



**PEMERINTAH KOTA PONTIANAK
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(BAPPEDA) KOTA PONTIANAK**

LAPORAN AKHIR

**STUDY PEMETAAN DAN PENANGANAN TERPADU BUTA AKSARA, PUTUS SEKOLAH DAN
GIZI BURUK KOTA PONTIANAK**

TAHUN ANGRAN 2016



KERJASAMA DENGAN



KATA PENGANTAR

Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk, merupakan pekerjaan yang dikelola oleh Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Pontianak dan penyusunannya dilakukan oleh CV. Multi Kreasi Konsultan

Buku laporan akhir ini merupakan muara akhir dari rangkaian sistem pelaporan pelaksanaan pekerjaan Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk yang seluruhnya terdiri dari 2 Laporan, yaitu Laporan Pendahuluan dan Laporan Akhir. Laporan akhir ini akan menjadi landasan dan acuan terhadap keluaran yang dihasilkan dari pekerjaan ini.

Sesuai dengan kerangka acuan yang telah diberikan, materi yang disajikan dalam buku laporan akhir ini adalah : pertama, latar belakang, maksud dan tujuan, sasaran, manfaat dan keluaran yang diharapkan, dampak yang diharapkan selain itu juga panduan dan lingkup kegiatan yang akan dilakukan oleh konsultan serta metodologi pelaksanaan pekerjaan dan rencana kerja serta tenaga ahli; kedua, gambaran umum Kota Pontianak; ketiga, Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk serta dasar analisis Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu; keempat Analisis Terjadinya Keaksaraan dan Gizi Buruk di Kota Pontianak; kelima Strategi Penanggulangan dan Penanganan Terpadu dalam Keaksaraan dan Gizi Buruk serta penutup yang berisikan kesimpulan dan rekomendasi.

Disusunnya Buku Laporan Akhir ini diharapkan dapat memberikan produk manfaat yang optimal bagi semua pihak, sehingga bisa dijadikan pedoman dalam Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk di Kota Pontianak.

Kami menyadari laporan ini masih memiliki kekurangan, tetapi semoga bermanfaat bagi yang memerlukan. Akhir kata kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian dan penyempurnaan buku laporan ini.

Pontianak, Juni 2016

CV. Multi Kreasi Konsultan

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR ISTILAH	ix
BAB I PENDAHULUAN	I-1
1.1. LATAR BELAKANG	I-1
1.2. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN	I-7
1.3. SASARAN, MANFAAT DAN KELUARAN YANG DIHARAPKAN	I-8
1.4. DAMPAK YANG DIHARAPKAN	I-8
1.5. PANDUAN KEGIATAN	I-8
1.6. ALUR PIKIR PELAKSANAAN PEKERJAAN	I-10
1.7. METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN	I-13
1.8. PENDEKATAN DAN METODOLOGI PENYUSUNAN PETA	I-14
1.9. PENDEKATAN DAN METODOLOGI	I-16
1.10. STRUKTUR ORGANISASI	I-18
1.11. KUALIFIKASI DAN URAIAN TUGAS PERSONIL	I-20
1.12. JADWAL PENUGASAN PERSONIL	I-20
BAB II GAMBARAN UMUM WILAYAH	II-1
2.1. FISIK KOTA PONTIANAK	II-1
2.1.1 Letak Administratif	II-1
2.1.2 Penggunaan Lahan	II-4
2.2. KEPENDUDUKAN KOTA PONTIANAK	II-9
2.2.1 Jumlah Penduduk	II-9
2.3. FASILITAS UMUM KOTA PONTIANAK	II-12
2.3.1 Fasilitas Pendidikan	II-12
2.3.2 Fasilitas Kesehatan	II-22
2.4. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-23
2.4.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi	II-23
2.4.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah	II-26

BAB III KONSEP DASAR KEAKSARAAN DAN GIZI SERTA DASAR ANALISIS SISTEM

INFORMASI GEOGRAFIS	III - 1
3.1. KERANGKA STRATEGI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAERAH	III – 1
3.2. MEKANISME PELAKSANAAN	III –11
3.3. PEMAHAMAN STATUS GIZI	III–12
3.4. GIZI BURUK	III–14
3.5. SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS	III–16
3.5.1. Definisi Sistem Informasi Geografis.....	III–16
3.5.2. Komponen SIG	III–17
3.5.3. Cara Kerja SIG	III–18
3.5.4. Kemampuan SIG	III–20
3.5.5. Model Data SIG	III–23
3.5.6. Representasi Data SIG	III–25
3.6. PERANCANGAN SISTEM	III–27
3.6.1. Analisis Kebutuhan Informasi	III–27
3.6.2. Struktur Data Spasial dan Non-Spasial.....	III–28
3.6.3. Sumber Data Spasial dan Non-Spasial	III–29
3.6.4. Representasi Rancangan Sistem Pada Program Aplikasi SIG	III–30
3.7. IMPLEMENTASI SISTEM	III–35

BAB IV METODOLOGI PELAKSANAAN PEKERJAAN DAN RENCANA KERJA SERTA

TENAGA AHLI	IV–1
4.1. ALUR PIKIR PELAKSANAAN PEKERJAAN	IV–1
4.1.1. Indikator Standar Kompetensi Keaksaraan Tingkat Dasar	IV–4
4.1.2. Model Pendataan Keaksaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)	IV–8
4.1.3. Keaksaraan Kota Pontianak	IV–16
4.1.4. Kendala Memberantas Keaksaraan	IV–32
4.2. PUTUS SEKOLAH	IV–33
4.2.1. Sebab-Sebab Anak Putus Sekolah	IV–37
4.2.2. Putus Sekolah Kota Pontianak	IV–41
4.3. STATUS GIZI	IV–46
4.3.1. Gizi Buruk	IV–48
4.3.2. Faktor Penyebab Terjadinya Gizi Buruk	IV–50
4.3.3. Gizi Buruk Kota Pontianak	IV–51

BAB V STRATEGI PENANGGULANGAN DAN PENANGANAN TERPADU BUTA AKSARA, PUTUS SEKOLAH DAN GIZI BURUK KOTA PONTIANAK	V-1
5.1. PENANGGULANGAN KEAKSARAAN	V-1
5.2. PENANGGULANGAN PUTUS SEKOLAH	V-8
5.3. PENANGGULANGAN GIZI BURUK	V-13
5.3.1. Kebijakan dan Strategi Menangani Masalah Gizi	V-14
5.3.2. Program Pemerintah	V-17
5.3.3. Intervensi Gizi dan Kesehatan	V-18
5.3.4. Promoai Keluarga Sadar Gizi	V-18
5.4. PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2015-2019	V-18
5.5. PENANGANAN TERPADU KEAKSARAAN, PUTUS SEKOLAH DAN GIZI BURUK	V-20
5.5.1. Pendekatan Dengan Pemetaan	V-28
5.5.2. Pendekatan Dengan Sistem Informasi	V-37
BAB V PENUTUP	VI-1
6.1. KESIMPULAN	VI-1
6.2. REKOMENDASI	VI-8

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Daftar Penugasan Tenaga Ahli	I-19
Tabel 1.2	Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan	I-21
Tabel 2.1	Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pontianak	II-3
Tabel 2.2	Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Pontianak	II-7
Tabel 2.3	Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat di Kota Pontianak	II-8
Tabel 2.4	Target Pencapaian RTH di Kota Pontianak	II-8
Tabel 2.5	Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2009-2014	II-10
Tabel 2.6	Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2014	II-10
Tabel 2.7	Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2009-2014	II-11
Tabel 2.8	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Pontianak	II-12
Tabel 2.9	Jumlah TK dan Jumlah Siswa di Kota Pontianak	II-13
Tabel 2.10	Jumlah SD/MI dan Jumlah Siswa di Kota Pontianak	II-14
Tabel 2.11	Jumlah SMP/MTs dan Jumlah Siswa di Kota Pontianak	II-15
Tabel 2.12	Jumlah SMA/MA dan Jumlah Siswa di Kota Pontianak	II-16
Tabel 2.13	Jumlah SMK dan Jumlah Siswa di Kota Pontianak	II-17
Tabel 2.14	Daftar Nama Universitas/Akademi/Sekolah Tinggi di Kota Pontianak	II-18
Tabel 2.15	Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Wajib Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2010-2013	II-19
Tabel 2.16	Angka Melek Huruf di Kota Pontianak	II-20
Tabel 2.17	Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2009-2013.....	II-20
Tabel 2.18	Rasio Murid terhadap Ruang Kelas di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013	II-21
Tabel 2.19	Rasio Guru Terhadap Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013.....	II-21
Tabel 2.20	Perkembangan Jumlah Guru di Kota Pontianak Tahun 2009 – 2013	II-22
Tabel 2.21	Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2010-2013	II-24
Tabel 2.22	Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2010- 2013.....	II-26
Tabel 2.23	Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Kota Pontianak Hingga Tahun 2033	II-28
Tabel 3.3	Kebutuhan Informasi Study	III-28
Tabel 3.4	Layer Data Spasial	III-28
Tabel 4.1	Data PKBM Kota Pontianak	IV-9
Tabel 4.2	Data Responden Buta Aksara	IV-18
Tabel 4.3	Angka Putus Sekolah (APS) Kota Pontianak	IV-45

Tabel 4.4	Penentuan Status Gizi Anak	IV-47
Tabel 4.5	Detail Data Kasus Gizi Buruk Kota Pontianak Tahun 2014-2015	IV-62
Tabel 4.6	Detail Data Kasus Gizi Buruk Tahun 2016 Januari-April	IV-54
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan	IV-63
Tabel 4.8	Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan	IV-63
Tabel 4.7	Distribusi Frekuensi Penghasilan	IV-64
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015-2019	V-22
Tabel 5.2	Data Buta Aksara Kecamatan Pontianak Utara dan Timur	V-32
Tabel 5.3	Data Gizi Buruk Tahun 2016 Januari-April	V-34

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Alur Pikir Makro Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk Kota Pontianak	I-11
Gambar 1.2	Alur Pikir Penyusunan Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk Kota Pontianak	I-12
Gambar 1.3	Organisasi Pelaksana Pekerjaan	I-19
Gambar 2.1	Peta Geografis Kota Pontianak	II-2
Gambar 2.2	Peta Wilayah Kelurahan di Kota Pontianak	II-4
Gambar 2.3	Peta Lokasi Gambut Kota Pontianak dan Sekitarnya	II-5
Gambar 2.4	Penggunaan Lahan Kota Pontianak Tahun 2012	II-9
Gambar 2.5	Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak	II-23
Gambar 2.6	Grafik Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2013	II-25
Gambar 2.7	Peta Rencana Struktur Ruang Kota Pontianak Tahun 2033	II-27
Gambar 2.8	Peta Rencana Pola Ruang Kota Pontianak 2012-2033	II-29
Gambar 3.1	Komponen SIG	III-17
Gambar 3.2	Ilustrasi Cara Kerja SIG	III-9
Gambar 3.3	Memetakan Letak	III-20
Gambar 3.4	Memetakan Kuantitas	III-21
Gambar 3.5	Memetakan Kerapatan	III-22
Gambar 3.6	Memetakan Perubahan	III-22
Gambar 3.7	Memetakan Didalam atau Diluar Area	III-23
Gambar 3.8	Representasi Data Vektor	III-24
Gambar 3.9	Representasi Data Raster	III-25
Gambar 3.10	Klasifikasi Tipe Data Geografis dan Representasinya	III-27
Gambar 3.11	Diagram Proses Sistem Informasi	III-30
Gambar 3.12	Hubungan Subsistem SIG	III-31
Gambar 3.13	Tingkatan Pengguna SIG	III-32
Gambar 3.14	Pemrosesan Digital	III-32
Gambar 3.15	Interpretasi dan Delinasi Kawasan	III-33
Gambar 3.16	Peta Tematik	III-34
Gambar 3.17	Contoh Data Survey GPS dan Hasil Pengolahannya	III-35
Gambar 3.18	Pendekatan SIG untuk Pemantauan Status Gizi	III-36

Gambar 3.19	Proses Pengolahan Data SIG	III-37
Gambar 5.1	Bagan Model Penyelenggaraan Program	V-4
Gambar 5.2	Pro PKMKP Sebagai Produk Masyarakat Berdaya	V-7
Gambar 5.3	Diagram Venn Keterkaitan Faktor Penyebab Masalah Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk	V-20
Gambar 5.4	Konsep Pemetaan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk Kota Pontianak	V-31
Gambar 5.5	Peta Sebaran Keaksaraan dan Gizi Buruk Kecamatan Pontianak Barat	V-35
Gambar 5.6	Peta Sebaran Keaksaraan dan Gizi Buruk Kecamatan Pontianak Utara	V-36
Gambar 5.7	Peta Sebaran Keaksaraan dan Gizi Buruk Kecamatan Pontianak Timur	V-37

DAFTAR KONSEP / DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa batas konsep dan definisi untuk menjalankan beberapa keterangan atau data yang dicakup tetap diikutsertakan pada publikasi ini. Dengan maksud menghindari ketidakseragaman penafsiran pada konsumen data dalam menterjemahkan angka-angka tersebut.

Aksara	:	Suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya (batu, kayu, kain, dll) untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa. Istilah lain untuk menyebut aksara adalah sistem tulisan
Buta Aksara	:	Istilah yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan membaca dan menulis yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sama dengan buta aksara dalam arti terbatas, yang berarti ketidakmampuan untuk membaca atau menulis kalimat sederhana dalam bahasa apapun.
Data	:	Merupakan bahasa, <i>mathematical</i> , dan simbol-simbol pengganti lain yang disepakati oleh umum dalam menggambarkan objek, manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, dan objek-objek penting lainnya. Dengan kata lain data merupakan kenyataan apa adanya (<i>raw facts</i>).
Data Non-Spasial	:	Data yang memberikan penjelasan atau dekripsi lebih lengkap pada data spasialnya. Data non-spasial sering disebut data atribut /data deskriptif atau data spasial.
Data Spasial	:	Data yang memiliki unsur keruangan (spasial) misalnya peta jaringan jalan, sungai, batas administrasi, dan sebagainya. Data spasial biasanya disimpan dalam bentuk <i>layer</i> tematik, misalnya <i>layer</i> jaringan jalan, <i>layer</i> sungai, <i>layer</i> wilayah administrasi, dan sebagainya.
Database	:	Kumpulan Informasi yang di simpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
Fleksibilitas	:	Kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda, dan dengan berbagai individu atau kelompok.

- Gizi : Elemen yang terdapat dalam makanan dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh seperti halnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Gizi yang seimbang dibutuhkan oleh tubuh, terlebih pada balita yang masih dalam masa pertumbuhan. Dimasa tumbuh kembang balita yang berlangsung secara cepat dibutuhkan makanan dengan kualitas dan kuantitas yang tepat dan seimbang.
- GPS (*Global Positioning System*) : Sistem radio navigasi dan penentuan posisi dengan menggunakan satelit navigasi yang dimiliki dan dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nama formalnya adalah NAVSTAR GPS (*Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System*). Sistem ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai posisi, waktu dan kecepatan kepada siapa saja secara global tanpa ada batasan waktu dan cuaca. Satelit GPS pertama diluncurkan pada tahun 1978 dan secara resmi sistem GPS dinyatakan operasional pada tahun 1994.
- Informasi : Data yang sudah mengalami pemrosesan atau data yang ditempatkan pada konteks yang penuh arti oleh penerimanya.
- Keaksaraan Fungsional : Usaha pendidikan luar sekolah dalam membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki mampu menulis, membaca dan berhitung untuk tujuan yang pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya, untuk peningkatan mutu dan taraf hidupnya.
- Ketelitian : Ketepatan, kerincian dan kelengkapan data dan atau informasi georeferensi dan tematik
- Koordinat : Pernyataan posisi terhadap suatu titik dan arah acuan tertentu yang dinyatakan dalam besaran vektor (besaran sudut dan atau besaran panjang). Penempatan Titik dan Arah Acuan tersebut tergantung pada system Proyeksinya.
- Kuisisioner : Suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.
- Kumuh : Mengandung pengertian tidak layak yang juga dapat

	berarti ketidakteraturan, ketidaksehatan, dan ketidaktertiban pembangunan dan keselamatan
Layer	: Suatu sistem yang menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut-atributnya dalam satuan yang disebut.
Observasi	: Metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.
Pengangguran	: Angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan
Perangkat Keras	: Bagian fisik <u>komputer</u> , yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya.
Perangkat Lunak	: <u>Data</u> yang diformat dan disimpan secara <u>digital</u> , termasuk <u>program komputer</u> , dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian <u>sistem komputer</u> yang tidak berwujud.
Perbaikan Gizi	: Program yang dilakukan dinas kesehatan dan instansi terkait dalam upaya untuk meningkatkan kualitas gizi balita di suatu wilayah tertentu yang menjadi sasaran.
Peta	: Gambaran/proyeksi dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar atau kertas dengan skala tertentu.
Peta Dasar	: Gambaran/proyeksi dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar atau kertas dengan skala tertentu yang dilengkapi dengan informasi kenampakan alami atau buatan. Contoh peta dasar seperti : Peta Situasi, Peta Topografi
Peta Tematik	: Gambaran dari sebagian permukaan bumi yang dilengkapi dengan informasi tertentu baik di atas maupun di bawah permukaan bumi yang mengandung tema tertentu. Contoh peta tematik seperti : Peta Jenis Tanah, Peta Kesesuaian Lahan.
Peta Wilayah	: Peta yang berdasarkan pada aspek administratif yang diturunkan dari peta dasar.
PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar)	: Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan.

- PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional
- Proyeksi : Suatu metode/cara dalam usaha mendapatkan bentuk ubahan dari dimensi tertentu menjadi bentuk dimensi yang lain secara sistematis, sehingga menghasilkan geometri baru dengan penyimpangan geometric minimal
- Rawan Gizi : Kondisi di mana perbandingan antara jumlah balita yang terkena gizi buruk berbanding dengan jumlah balita yang ditimbang diatas 15 % untuk suatu wilayah.
- Rawan Sosial : Mengacu pada ketidakmampuan orang, organisasi dan masyarakat untuk menahan dampak negatif dari beberapa stres yang mereka hadapi. Dampak ini disebabkan sebagian karakteristik yang melekat dalam interaksi sosial , lembaga , dan sistem nilai-nilai budaya.
- Ruang : Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- Sistem informasi (SI) : Merupakan suatu sistem manusia-mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi.
- Skala Peta : Angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak tersebut di muka bumi
- Strategi : Langkah-langkah yang perlu diambil pada level perencana untuk menerapkan kebijakan dalam pelaksanaan, yang juga memperhitungkan kendalakendalanya;
- Survey : Metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi: Sejumlah besar responden.
- Tujuan Khusus (*objectives*) : Merupakan tujuan yang berjangka lebih pendek, yang harus diungkapkan secara spesifik, dapat dicapai, dan dapat diukur. Kemajuan pencapaian tujuan ini dapat dimonitor;
- Tujuan Umum (*aim*) : Tujuan akhir atau alasan untuk melakukan kegiatan. Tujuan umum tidak harus dicapai dalam jangka pendek, atau tidak dapat diukur secara pasti.

- Wawancara (Koresponden) : Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.
- Wilayah : Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

DAFTAR KONSEP / DEFINISI DAN ISTILAH

Beberapa batas konsep dan definisi untuk menjalankan beberapa keterangan atau data yang dicakup tetap diikutsertakan pada publikasi ini. Dengan maksud menghindari ketidakseragaman penafsiran pada konsumen data dalam menterjemahkan angka-angka tersebut.

- Aksara : Suatu sistem simbol visual yang tertera pada kertas maupun media lainnya (batu, kayu, kain, dll) untuk mengungkapkan unsur-unsur yang ekspresif dalam suatu bahasa. Istilah lain untuk menyebut aksara adalah sistem tulisan
- Buta Aksara : Istilah yang digunakan untuk menjelaskan kemampuan membaca dan menulis yang belum cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Hal ini sama dengan buta aksara dalam arti terbatas, yang berarti ketidakmampuan untuk membaca atau menulis kalimat sederhana dalam bahasa apapun.
- Data : Merupakan bahasa, *mathematical*, dan simbol-simbol pengganti lain yang disepakati oleh umum dalam menggambarkan objek, manusia, peristiwa, aktivitas, konsep, dan objek-objek penting lainnya. Dengan kata lain data merupakan kenyataan apa adanya (*raw facts*).
- Data Non-Spasial : Data yang memberikan penjelasan atau dekripsi lebih lengkap pada data spasialnya. Data non-spasial sering disebut data atribut /data deskriptif atau data spasial.
- Data Spasial : Data yang memiliki unsur keruangan (spasial) misalnya peta jaringan jalan, sungai, batas administrasi, dan sebagainya. Data spasial biasanya disimpan dalam bentuk *layer* tematik, misalnya *layer* jaringan jalan, *layer* sungai, *layer* wilayah administrasi, dan sebagainya.
- Database : Kumpulan Informasi yang di simpan di dalam komputer secara sistematis sehingga dapat diperiksa menggunakan suatu program komputer untuk memperoleh informasi dari basis data tersebut.
- Fleksibilitas : Kemampuan untuk beradaptasi dan bekerja dengan efektif dalam situasi yang berbeda, dan dengan berbagai individu atau kelompok.

- Gizi : Elemen yang terdapat dalam makanan dan dapat dimanfaatkan secara langsung oleh tubuh seperti halnya karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Gizi yang seimbang dibutuhkan oleh tubuh, terlebih pada balita yang masih dalam masa pertumbuhan. Dimasa tumbuh kembang balita yang berlangsung secara cepat dibutuhkan makanan dengan kualitas dan kuantitas yang tepat dan seimbang.
- GPS (*Global Positioning System*) : Sistem radio navigasi dan penentuan posisi dengan menggunakan satelit navigasi yang dimiliki dan dikelola oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Nama formalnya adalah NAVSTAR GPS (*Navigation Satellite Timing and Ranging Global Positioning System*). Sistem ini digunakan untuk memberikan informasi mengenai posisi, waktu dan kecepatan kepada siapa saja secara global tanpa ada batasan waktu dan cuaca. Satelit GPS pertama diluncurkan pada tahun 1978 dan secara resmi sistem GPS dinyatakan operasional pada tahun 1994.
- Informasi : Data yang sudah mengalami pemrosesan atau data yang ditempatkan pada konteks yang penuh arti oleh penerimanya.
- Keaksaraan Fungsional : Usaha pendidikan luar sekolah dalam membelajarkan warga masyarakat penyandang buta aksara agar memiliki mampu menulis, membaca dan berhitung untuk tujuan yang pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di lingkungan sekitarnya, untuk peningkatan mutu dan taraf hidupnya.
- Ketelitian : Ketepatan, kerincian dan kelengkapan data dan atau informasi georeferensi dan tematik
- Koordinat : Pernyataan posisi terhadap suatu titik dan arah acuan tertentu yang dinyatakan dalam besaran vektor (besaran sudut dan atau besaran panjang). Penempatan Titik dan Arah Acuan tersebut tergantung pada system Proyeksinya.
- Kuisisioner : Suatu teknik pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikap-sikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada.

Kumuh	:	Mengandung pengertian tidak layak yang juga dapat berarti ketidakteraturan, ketidaksehatan, dan ketidaktertiban pembangunan dan keselamatan
Layer	:	Suatu sistem yang menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut-atributnya dalam satuan yang disebut.
Observasi	:	Metode pengumpulan data melalui pengamatan langsung atau peninjauan secara cermat dan langsung di lapangan atau lokasi penelitian.
Pengangguran	:	Angkatan kerja yang belum mendapat kesempatan bekerja, tetapi sedang mencari pekerjaan atau orang yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin memperoleh pekerjaan
Perangkat Keras	:	Bagian fisik komputer, yang berada di dalamnya atau yang beroperasi di dalamnya.
Perangkat Lunak	:	Data yang diformat dan disimpan secara digital, termasuk program komputer, dokumentasinya, dan berbagai informasi yang bisa dibaca dan ditulis oleh komputer. Dengan kata lain, bagian sistem komputer yang tidak berwujud.
Perbaikan Gizi	:	Program yang dilakukan dinas kesehatan dan instansi terkait dalam upaya untuk meningkatkan kualitas gizi balita di suatu wilayah tertentu yang menjadi sasaran.
Peta	:	Gambaran/proyeksi dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar atau kertas dengan skala tertentu.
Peta Dasar	:	Gambaran/proyeksi dari sebagian permukaan bumi pada bidang datar atau kertas dengan skala tertentu yang dilengkapi dengan informasi kenampakan alami atau buatan. Contoh peta dasar seperti : Peta Situasi, Peta Topografi
Peta Tematik	:	Gambaran dari sebagian permukaan bumi yang dilengkapi dengan informasi tertentu baik di atas maupun di bawah permukaan bumi yang mengandung tema tertentu. Contoh peta tematik seperti : Peta Jenis Tanah, Peta Kesesuaian Lahan.
Peta Wilayah	:	Peta yang berdasarkan pada aspek administratif yang diturunkan dari peta dasar.

- PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Mengajar) : Lembaga yang dibentuk oleh masyarakat untuk masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan. PKBM ini masih berada di bawah pengawasan dan bimbingan dari Dinas Pendidikan Nasional
- Proyeksi : Suatu metode/cara dalam usaha mendapatkan bentuk ubahan dari dimensi tertentu menjadi bentuk dimensi yang lain secara sistematis, sehingga menghasilkan geometri baru dengan penyimpangan geometri minimal
- Rawan Gizi : Kondisi di mana perbandingan antara jumlah balita yang terkena gizi buruk berbanding dengan jumlah balita yang ditimbang diatas 15 % untuk suatu wilayah.
- Rawan Sosial : Mengacu pada ketidakmampuan orang, organisasi dan masyarakat untuk menahan dampak negatif dari beberapa stres yang mereka hadapi. Dampak ini disebabkan sebagian karakteristik yang melekat dalam interaksi sosial, lembaga, dan sistem nilai-nilai budaya.
- Ruang : Wadah yang meliputi ruang daratan, ruang lautan, dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lainnya hidup dan melakukan kegiatan serta memelihara kelangsungan hidupnya.
- Sistem informasi (SI) : Merupakan suatu sistem manusia-mesin yang terpadu untuk menyajikan informasi guna mendukung fungsi operasi, manajemen, dan pengambilan keputusan dalam organisasi.
- Skala Peta : Angka perbandingan antara jarak dua titik di atas peta dengan jarak tersebut di muka bumi
- Strategi : Langkah-langkah yang perlu diambil pada level perencanaan untuk menerapkan kebijakan dalam pelaksanaan, yang juga memperhitungkan kendalakendalanya;
- Survey : Metode pengumpulan data primer dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada responden individu. Jadi bisa disimpulkan survei adalah metode untuk mengumpulkan informasi dari kelompok yang mewakili sebuah populasi: Sejumlah besar responden.
- Tujuan Khusus (*objectives*) : Merupakan tujuan yang berjangka lebih pendek, yang harus diungkapkan secara spesifik, dapat dicapai, dan dapat diukur. Kemajuan pencapaian tujuan ini dapat dimonitor;

- Tujuan Umum (*aim*) : Tujuan akhir atau alasan untuk melakukan kegiatan. Tujuan umum tidak harus dicapai dalam jangka pendek, atau tidak dapat diukur secara pasti.
- Wawancara (Koresponden) : Merupakan percakapan antara dua orang atau lebih dan berlangsung antara narasumber dan pewawancara. Tujuan dari wawancara adalah untuk mendapatkan informasi di mana sang pewawancara melontarkan pertanyaan-pertanyaan untuk dijawab oleh orang yang diwawancarai.
- Wilayah : Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait padanya yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrasi dan atau aspek fungsional.

1.1. LATAR BELAKANG

UUD 1945 sebagai landasan konstitusional negara Indonesia memberi perlindungan atas hak warga negara untuk memperoleh pendidikan. Amanat konstitusi ini ditegaskan kembali dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa sistem pendidikan nasional menyediakan kesempatan pendidikan yang sama bagi semua warganegara. Kedua Peraturan Perundangan tersebut menjadi landasan hukum bagi pemerintah untuk mendorong dan memfasilitasi setiap warga negara Indonesia memperoleh kesempatan dan manfaat pendidikan bagi semua golongan usia, etnis, ras, agama, dan kelompok lainnya tanpa diskriminasi untuk dapat menjadi pembelajar sepanjang hayat. Oleh karena itu pendidikan dilaksanakan bagi penduduk usia dini, anak-anak, remaja/pemuda, dan orang dewasa sampai usia lanjut.

Terkait dengan pendidikan bagi penduduk dewasa, Deklarasi Dakar menargetkan tercapainya penurunan angka buta aksara sebesar 50% di tahun 2015. Melalui Kabinet Indonesia Bersatu pemerintah Indonesia mengimplementasikan kesepakatan itu dengan menetapkan tercapainya target tersebut pada tahun 2010. Dari jumlah penduduk buta aksara tahun 2003 sekitar 15,4 juta orang, berarti tahun 2009, kelompok sasaran penanganan buta aksara ditargetkan tinggal berjumlah 7,7 juta orang.

Dalam upaya melakukan terobosan-terobosan untuk mencapai target yang ditetapkan, dikeluarkan Peraturan Presiden No. 5 tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar dan Penanganan Buta Aksara. Sebagai tindak lanjut dari Perpres tersebut, Menteri Pendidikan Nasional menyusun panduan pelaksanaan ditingkat Kementerian atau non Kementerian guna meningkatkan angka melek aksara di Indonesia.

Dalam tahap implementasi, strategi yang dilakukan adalah:

1. Fokus pada penguatan kelompok sasaran di provinsi: Memprioritaskan penanganan buta aksara di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, kelurahan yang memiliki angka keniraksaraan paling tinggi, maka target jangka pendek terkait jumlah siswa baru dapat dicapai. Sesuai dengan data terdapat sembilan provinsi mencapai sebesar 80% pada tahun 2003; 108 dari kabupaten/kota dari 76% kelompok buta aksara.

2. Konsentrasi Pada Wilayah Berkebutuhan Tinggi: Menjalankan strategi blok, yaitu penanganan buta aksara dimulai dari daerah padat penduduk yang buta aksara dilanjutkan ke daerah terdekat, sampai program penanganan buta aksara tuntas.
3. Perkuatan Akuntabilitas Mutual/Bersama untuk Penanganan Buta Aksara: Memberlakukan pendekatan vertikal dengan mengefektifkan kapasitas struktur pemerintahan dalam menggerakkan semua segmen masyarakat untuk berpartisipasi aktif memberantas buta aksara. Presiden, sebagai kepala negara, menginstruksikan semua menteri yang terkait, gubernur, bupati/walikota, camat, lurah dan kepala kampung untuk mengajak seluruh elemen masyarakat bergotong-royong, berpartisipasi dalam program penanganan buta aksara. (Di Indonesia, prinsip gotong royong menggambarkan jenis kerjasama dimana tiap individu dalam masyarakat merasa bertanggungjawab untuk berpartisipasi dan membantu).
4. Mendorong pengembangan jaringan dan kemitraan: Memberlakukan pendekatan horizontal dengan cara menjalin kerjasama yang intensif dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, seperti organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi perempuan, organisasi pemuda, Pondok Pesantren, mesjid, dan lain-lain untuk ikut serta aktif terlibat dalam penanganan buta aksara di daerah masing-masing.
5. Kolaborasi dengan universitas/ perguruan tinggi/akademi: Pemerintah berkolaborasi dengan perguruan tinggi, memberantas buta aksara melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN). Program KKN dengan program utama penanganan buta aksara telah terbukti berhasil memberi pengaruh positif dan mengurangi angka keniraksaraan.
6. Menetapkan Standar dan Jaminan Mutu: Mengembangkan Standar Kompetensi Keaksaraan dan Standar Penilaian Keaksaraan sebagai basis bagi program jaminan mutu. Penilaian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan peserta setelah mengikuti program. Dengan demikian, diperoleh berbagai informasi tentang hasil pencapaian sekaligus analisa bagi perbaikan program dapat bermanfaat untuk menyusun ulang target dan mencapai hasil sesuai standar kompetensi.

Pendidikan keaksaraan pada umumnya diawali dalam rangka memberikan pengetahuan membaca, menulis, dan berhitung agar peserta belajar dapat mengakses berbagai sumber bacaan atau tulisan serta berbagai bentuk perhitungan. Pada fase ini penyelenggaraan pendidikan keaksaraan dikembangkan melalui model "*vacum literacy*" yang memiliki konsep pelaksanaan pendidikan keaksaraan untuk keberaksaraan saja, seperti di Provinsi yang dikenal dengan program Penanganan Buta Huruf (PBH) atau Penanganan Buta Aksara (PBA) yang dilaksanakan sejak zaman kemerdekaan.

Pelaksanaan program penanganan buta aksara di Daerah semakin meningkat dengan diterbitkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan

Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penanganan Buta Aksara (GNP-PWB/PBA). Selama kurun waktu tersebut telah banyak hal yang dilakukan, baik yang menyangkut kebijakan sebagai tindak lanjut Inpres, maupun yang berkaitan dengan pelaksanaannya. Inpres Nomor 5 Tahun 2006 lahir sebagai respon Pemerintah terhadap pentingnya memenuhi amanat konstitusi di bidang pendidikan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009 dan Rencana Strategis (Renstra) Pendidikan Nasional 2005-2009. Dalam RPJMN 2004-2009 dan Renstra Pendidikan Nasional 2005-2009 tersebut Pemerintah Daerah bertekad menurunkan angka buta aksara usia 15 tahun ke atas menjadi 5% pada akhir 2009 dari posisi 10,21% pada akhir 2004 dan menuntaskan program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun pada akhir 2008.

Sesuai dengan tantangan dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang, pendidikan keaksaraan pada fase ini lebih dikaitkan dengan aktivitas kritis, kontekstualisasi budaya, dan fungsionalisasi keaksaraan bagi peran-peran sosial, politik, ekonomi, dan kebudayaan, sehingga dikenal adanya keaksaraan kritis (*critical literacy*), keaksaraan fungsional (*functional literacy*), keaksaraan budaya (*cultural literacy*), keaksaraan ekonomi (*economic literacy*), dan ragam keaksaraan lainnya. Demikian pun dalam hal pendekatannya, pendidikan keaksaraan tidak hanya bertumpu pada individu tetapi juga berkembang pendekatan-pendekatan kelompok/komunitas, seperti keaksaraan keluarga (*family literacy*). Dengan demikian, pendidikan keaksaraan kemudian dijadikan sebagai bagian strategis dalam rangka pemberdayaan masyarakat. Untuk itu, UNESCO mengembangkan program LIFE (*Literacy Initiative for Empowerment*) yang dicanangkan untuk dilaksanakan selama kurun waktu tahun 2006 – 2015. Indonesia sebagai negara yang turut menyepakati program LIFE berencana untuk merealisasikan kebijakan dan program LIFE tersebut. Dalam rangka itu, sejak tahun 2009 Direktorat Pendidikan Masyarakat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Kemendiknas mulai mengadaptasi konsep LIFE dalam suatu kerangka kerja pendidikan keaksaraan yang disebut AKRAB! (AKsaRa Agar Berdaya).

Dalam rangka memasuki tahapan III pelaksanaan program Education for All (EFA) atau Pendidikan untuk Semua (PUS) tahun 2010-2014, perlu disusun laporan tahunan PUS 2013, khususnya pokja keaksaraan. Laporan ini digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan yang telah dicapai sampai dengan tahun 2013 dan untuk mengetahui kendala/permasalahan yang dihadapi pokja keaksaraan untuk dicarikan solusi pemecahan terbaik untuk dilaksanakan pada tahun yang akan datang, sekaligus sebagai baseline data untuk penyusunan RAD Pokja Keaksaraan tahun 2010-2014.

Pemerintah, masyarakat dan terutama orang tua wajib bertanggung jawab terhadap pendidikan anak. Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS pasal 7 ayat 2, bahwa orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar

kepada anaknya. Begitupun masyarakat, dalam pasal 9 dijelaskan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Kemudian dalam pasal 11 ayat 2, dijelaskan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai lima belas tahun.

Penanganan Anak Putus Sekolah Melalui Penguatan Kemitraan Sekolah, Keluarga dan Masyarakat". Yaitu sebagai berikut:

1. Meningkatkan kesadaran orang tua dan masyarakat akan pentingnya pendidikan anak, terutama bagi anak usia sekolah dasar dan menengah.
2. Menemukan format pelaksanaan pendidikan yang tepat di tingkat sekolah dasar dan menengah.
3. Membangun sistem manajemen kinerja di sekolah dengan lebih baik dan terarah.
4. Meningkatkan mutu pembelajaran secara terpadu dan berkelanjutan di sekolah.
5. Menyatukan persepsi seluruh stakeholder, yaitu; sekolah, orang tua, tokoh agama, tokoh pemuda serta pemerintah desa/kelurahan yang ada.

Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 mewajibkan pemerintah, masyarakat termasuk dunia usaha memenuhi hak-hak anak, yaitu kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangannya serta perlindungan demi kepentingan terbaik anak. Di bidang kesehatan, pemerintah wajib menyediakan fasilitas dan menyelenggarakan upaya kesehatan yang komprehensif bagi anak melalui upaya kesehatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang optimal. Kesehatan bukanlah tanggung jawab pemerintah saja namun merupakan tanggung jawab bersama pemerintah dan masyarakat termasuk swasta.

Untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, desentralisasi bidang kesehatan sebagai salah satu strategi yang dianggap tepat saat ini, telah ditetapkan untuk dilaksanakan. Beberapa peraturan perundang-undangan bidang kesehatan sebagai tindak lanjut Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang merupakan inti kebijakan desentralisasi, telah dan sedang terus dipersiapkan. Misalnya Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.

Dalam lampiran Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 ditetapkan Visi dan Misi serta Strategi baru Pembangunan Kesehatan. Visi baru, yaitu Indonesia Sehat 2010, akan dicapai melalui berbagai program pembangunan kesehatan yang telah tercantum dalam Undang- Undang Nomor 25 tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas).

Salah satu tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 Bidang Kesehatan adalah menurunkan prevalensi gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 20%, termasuk prevalensi gizi buruk menjadi setinggi-tingginya 5% pada tahun 2014. Gizi buruk secara langsung dipengaruhi oleh 3 hal, yaitu; Anak tidak cukup mendapat makanan bergizi, anak tidak mendapat asuhan gizi yang memadai dan anak mungkin menderita infeksi penyakit. Ketiga penyebab langsung tersebut terkait dengan daya beli masyarakat, tingkat pendidikan, kondisi lingkungan dan pelayanan kesehatan.

Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk (RANPPGB) 2005-2009 disusun berdasarkan perkembangan permasalahan masalah gizi buruk terkini di Indonesia. Diharapkan RAN-PPGB ini dapat dipakai sebagai acuan berbagai pihak yang terkait untuk menanggulangi masalah gizi buruk di Indonesia.

Melihat kenyataan itu maka tidaklah mudah untuk menuntaskan seluruh "PR" tersebut dengan sekaligus. Untuk itu perencanaan tahun 2016 Pemerintah Kota Pontianak melalui BAPPEDA Kota Pontianak melakukan Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah Dan Gizi Buruk.

Adapun program utamanya untuk mendukung kebijakan tersebut diantaranya meliputi, program penanganan buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk secara terpadu meliputi aksi pengelolaannya, serta program penataan ruang. Keterpaduan antara pengembangan edukasi sangat erat dengan penanganan buta aksara dan putus sekolah dimana hal tersebut dilakukan dengan pengembangan berbasis komunitas masyarakat ataupun perorangan di sekitar kawasan tersebut dapat didekati dengan teknologi Sistem Informasi Geografis (SIG) sebagai dasar Study Pemetaan. Salah satu kemampuan SIG yang utama adalah mampu memetakan kondisi dunia nyata (real world) sehingga gambaran suatu kawasan dapat diamati dengan mudah dengan menampilkan keterangan identitas seseorang (nama, umur, tempat tinggal dan foto).

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer, khususnya perkembangan software pengembangan sistem basis data digital-map atau electronic mapping / pemetaan elektronik yang saat ini lebih dikenal dengan Sistem Informasi Geografis (SIG) atau Geographic Information System (GIS), nampaknya perlu dicoba dan dimanfaatkan dalam pengelolaan di bidang pendidikan di era otonomi daerah saat ini. Model basis data SIG pada dasarnya menampilkan setiap satu informasi dalam suatu layer (atau lembaran) peta digital. Dengan kecanggihan komputer, sejumlah layer peta dapat ditumpang susunkan (overlap) sehingga melahirkan informasi yang dibutuhkan dalam pengelolaan di bidang pendidikan. Misalnya, layer peta persebaran data buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk yang ditumpang susunkan dengan layer peta akses jalan dan administrasi.

Untuk melakukan perencanaan/pengembangan suatu kawasan khususnya kawasan kabupaten/kota tentu memerlukan peta gambaran detail dari kawasan yang akan dikembangkan. Gambaran detail ini dapat diperoleh dengan menerapkan Sistem Informasi Geografis. Dalam hubungannya dengan pengolahan data, Sistem Informasi Geografis merupakan pengolahan dan pengelolaan informasi digital berbasis geografis, sehingga masukan utama SIG merupakan data keruangan (spatial). Sistem Informasi Geografis diperlukan dalam menyediakan informasi yang akurat baik posisi, luasan, maupun informasi gambar, dan grafik. Sistem Informasi Geografis menyediakan informasi spasial, garis maupun titik yang dituangkan dalam bentuk peta, tabel dan grafis yang saling terkait sehingga SIG mampu mengubah data secara cepat sesuai dengan perkembangan yang terjadi. Sistem Informasi Geografis dapat melakukan analisa secara spasial maupun fungsi-fungsi statistik untuk analisa numerik, sehingga memudahkan untuk pengambilan keputusan.

Study Pemetaan menggunakan SIG ini dibagi menjadi dua kelompok yaitu sistem manual (analog) dan sistem otomatis (yang berbasis digital komputer). Perbedaan yang paling mendasar terletak pada cara pengelolaannya. Sistem informasi manual biasanya menggabungkan beberapa data seperti peta, lembar transparansi untuk tumpang susun (overlay), foto udara, laporan statistik dan laporan survey lapangan. Kesemua data tersebut dikompilasi dan dianalisis secara manual dengan alat tanpa komputer. Sedangkan sistem informasi geografis otomatis telah menggunakan komputer sebagai sistem pengolah data melalui proses digitasi. Sumber data digital dapat berupa citra satelit atau foto udara digital serta foto udara yang terdigitasi.

Data-data yang diolah dalam SIG pada dasarnya terdiri dari data spasial dan data atribut dalam bentuk digital, dengan demikian analisis yang dapat digunakan adalah analisis spasial dan analisis atribut. Data spasial merupakan data yang berkaitan dengan lokasi keruangan yang umumnya berbentuk peta. Sedangkan data atribut merupakan data tabel yang berfungsi menjelaskan keberadaan berbagai objek sebagai data spasial.

Penyajian data spasial sebagai gambaran studi mempunyai tiga cara dasar yaitu dalam bentuk titik (point), bentuk garis (line) dan bentuk area (polygon). Titik merupakan kenampakan tunggal dari sepasang koordinat x,y yang menunjukkan lokasi suatu obyek berupa ketinggian, lokasi kota, lokasi pengambilan sample dan lain-lain. Garis merupakan sekumpulan titik-titik yang membentuk suatu kenampakan memanjang seperti sungai, jalan, dan lain-lain. Sedangkan area adalah kenampakan yang dibatasi oleh suatu garis yang membentuk suatu ruang homogen, misalnya: batas daerah, batas penggunaan lahan, pulau dan lain sebagainya.

Dalam rangka menunjang perencanaan dan pengembangan, ada beberapa tema sistem informasi geografis yang sangat penting antara lain tematik jalan, fasilitas perekonomian, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, fasilitas sosial, dan sebagainya. Peta tematik tersebut bila dilengkapi

dengan data atribut yang akurat dapat menyajikan informasi yang sangat berguna, misalnya menampilkan sarana/prasarana apa yang akan mengalami kerusakan karena sesuatu hal atau menampilkan sarana/prasarana yang akan dilakukan perawatan pada suatu tahun anggaran tertentu. Penyajian informasi dengan menampilkan peta tentu sangat informatif karena situasi objek yang dianalisis dapat teramati dengan baik. Semua informasi tersebut sangat membantu dinas/instansi khususnya BAPPEDA dalam merencanakan anggaran.

Untuk melaksanakan Studi Pemetaan berbasis Geospasial tersebut diperlukan 2 (dua) data utama yaitu data spasial (peta) dan data atribut (statistik). Kedua jenis data harus tersedia secara bersama-sama untuk memberikan informasi yang akurat. Masalah yang muncul bagaimana mentransformasikan kondisi real (real world) ke domain SIG, bagaimana manajemen datanya, dan bagaimana membangun aplikasi SIG yang bermanfaat sebagai salah satu unsur penunjang dalam pengambilan keputusan.

Dalam rangka membantu pemerintah khususnya di Kota Pontianak untuk merencanakan pengeleloaan di bidang pendidikan khususnya penanganan buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk, dipandang perlu memanfaatkan SIG. Selain memudahkan dalam data entry, pengolahan, dan menganalisis data. SIG juga dapat menyimpan data bidang pendidikan dalam jangka waktu yang lama. Data yang sudah puluhan tahun tersimpan akan dengan mudah dipanggil atau dibaca kembali jika dibutuhkan untuk berbagai keperluan. Oleh karena itu, dalam rangka menciptakan rancangan model SIG dan atau pengembangan basis data yang dibutuhkan dalam pengelolaan di bidang pendidikan dalam era otonomi daerah dipandang perlu dilakukan kegiatan ini.

Tujuan pokok dari pemanfaatan SIG adalah memaparkan hasil studi pemetaan dengan deskripsi yang berbasis geospasial. Selain itu tujuannya adalah untuk mempermudah mendapatkan informasi yang telah diolah dan tersimpan sebagai atribut suatu lokasi atau obyek. Ciri utama data yang bisa dimanfaatkan dalam SIG adalah data yang telah terikat dengan lokasi dan merupakan data dasar yang belum dispesifikasi. Aplikasi SIG dapat digunakan untuk berbagai kepentingan selama data yang diolah memiliki referensi geografis, maksudnya data tersebut terdiri dari fenomena atau objek yang dapat disajikan dalam bentuk fisik serta memiliki lokasi keruangan.

1.2. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN

Maksud kajian ini adalah untuk menghasilkan suatu studi pemetaan terpadu masyarakat buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk beserta dengan data yang mendukung sebagai rumusan kebijakan yang diharapkan dapat menjadi landasan dalam upaya penanganan (*affirmative action*) yang dilakukan Pemerintah Kota Pontianak.

Secara Umum Penyusunan Studi Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk bertujuan:

1. Memberikan gambaran situasi dan kondisi eksisting keaksaraan, masyarakat putus sekolah dan persebaran gizi buruk di Kota Pontianak pada tahun 2015-2016 sehingga Pemerintah yang terkait dapat mengambil tindakan lebih lanjut untuk menekan permasalahan tersebut.
2. Menganalisis data dan informasi pendidikan yang berkenaan dengan keaksaraan dan kondisi gizi buruk sebagai baseline pelaksanaan program penanganan terpadu yang dapat dilakukan.

1.3. SASARAN, MANFAAT DAN KELUARAN YANG DIHARAPKAN

Bagi pemerintah Kota Pontianak diharapkan hasil studi ini dapat merupakan masukan dan rekomendasi di dalam mengambil tindakan untuk menekan angka keaksaraan, putus sekolah dan masyarakat dengan kondisi gizi buruk yang ada di Kota Pontianak dengan memahami kondisi eksisting dari permasalahan tersebut.

Terwujudnya dokumen laporan berupa pemetaan masyarakat buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk yang berguna untuk bahan studi dan pemantauan sebaran masyarakat buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk berbasis sistem informasi geografis di Kota Pontianak

Adapun Keluaran yang diharapkan dari kegiatan ini adalah:

1. Tersusunnya suatu konsep pemetaan mengenai masyarakat buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk yang dapat di-update sesuai perkembangannya.
2. Tersusunnya suatu dokumen laporan mengenai penanganan buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk di Kota Pontianak.

1.4. DAMPAK YANG DIHARAPKAN

Dampak yang diperkirakan dapat dirasakan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah suatu konsep pemetaan dan penanganan terpadu buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk di Kota Pontianak sehingga menjadi sebuah kebijakan dan strategi dalam upaya untuk menekan angka keaksaraan dan masalah gizi di Kota Pontianak.

1.5. PANDUAN KEGIATAN

Peraturan perundang-undangan yang mendasari pekerjaan ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 5 ayat 1 dan ayat 5, serta pasal 26

2. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009
3. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penanganan Buta Aksara
4. Surat Edaran Menteri Pendidikan Nasional Nomor 116/MPN/MS/2006 tentang Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 kepada Gubernur dan Bupati/Walikota
5. Surat Keputusan Menkokesra Nomor 15/KEP/MENKO/ KESRA/ VI/2002 tanggal 19 Juni 2002 tentang Pembentukan Forum Koordinasi Nasional Pendidikan untuk Nasional.
6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal Nomor: KEP-12/E./PR/2010, tanggal 11 Januari 2010, tentang Pembentukan Kelompok Kerja dan Sekretariat Forum Koordinasi Nasional Pendidikan untuk Semua POKJA FORUM PUS tahun 2010.
7. Keputusan Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Nomor 22/KEP/MENKO/ KESRA/IX/2006 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penanganan Buta Aksara
8. Peraturan Bersama antara Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 17/Men.PP/Dep.II/VII/2005, Nomor 28A Tahun 2005, dan Nomor 1/PB/2005 tentang Percepatan Penanganan Buta Aksara Perempuan
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Penanganan Buta Aksara.
10. Rencana Strategis Kementerian Pendidikan Nasional 2010-2014, Jakarta: Kemdiknas, tahun 2010
11. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2009-2014 Bidang Kesehatan adalah menurunkan prevalensi gizi kurang menjadi setinggi-tingginya 20%, termasuk prevalensi gizi buruk menjadi setinggi-tingginya 5% pada tahun 2014. Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk (RANPPGB) 2005-2009.
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839).
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Nomor 72 Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848).
14. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Propenas) (Lembaran Negara Nomor 206 Tahun 2000).
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 574/Menkes/SK/IV/2000 tentang Kebijakan Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010.

16. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 951/Menkes/SK/VI/2000 tentang Upaya Kesehatan Dasar di Puskesmas.
17. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1277/Menkes/SK/XI/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan.
18. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 511/Menkes/SK/V/2002 tentang Kebijakan dan Strategi Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Nasional (SIKNAS).
19. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 932/Menkes/SK/VIII/2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Sistem Informasi Kesehatan Daerah Kabupaten/Kota.

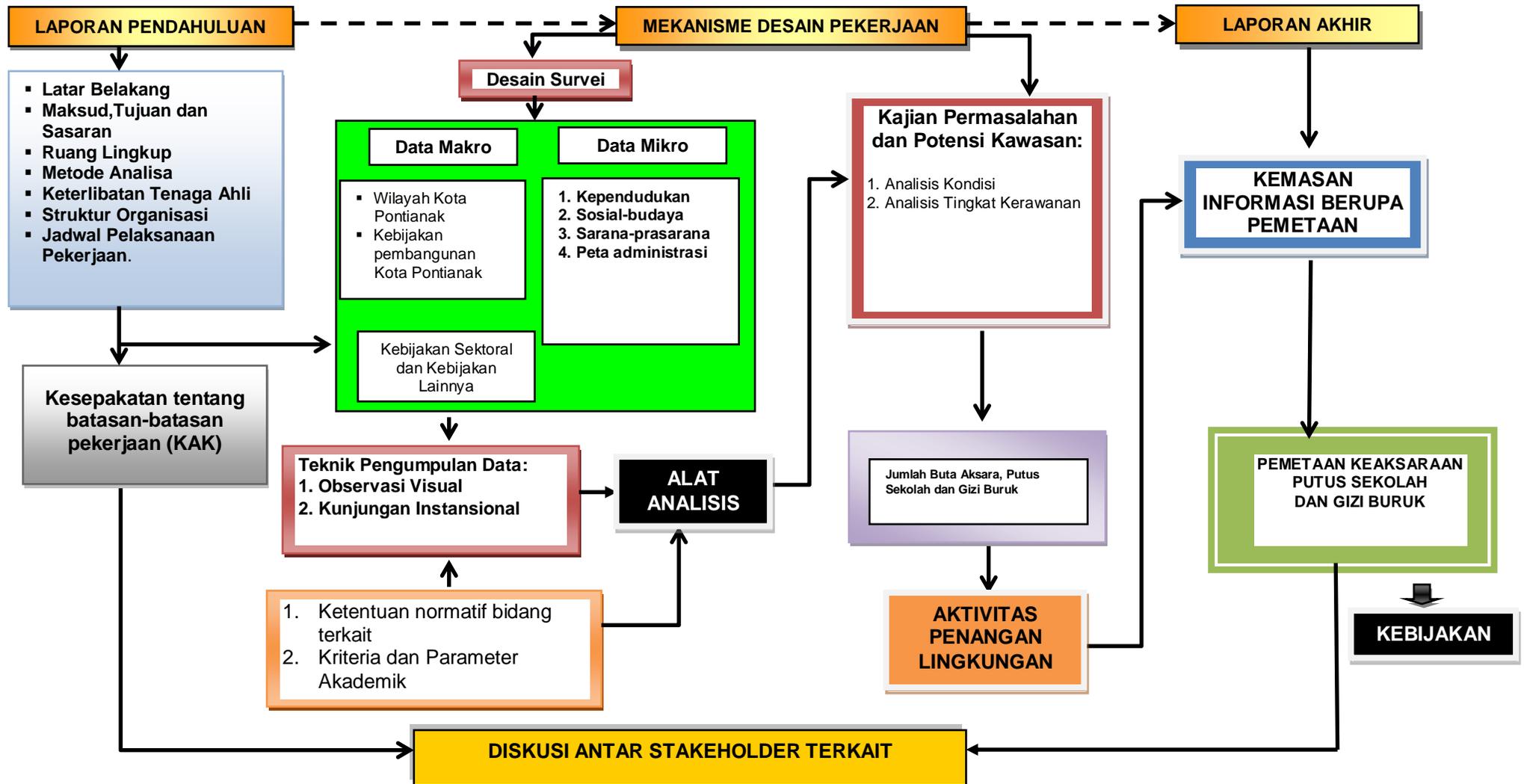
1.6 ALUR PIKIR PELAKSANAAN PEKERJAAN

Secara umum proses Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk dilakukan melalui beberapa tahapan yaitu (1) tahap Laporan Pendahuluan; (2) tahap Laporan Akhir Sementara dan (3) tahap Laporan Akhir. Dalam mekanisme desain pekerjaan yaitu dengan merumuskan desain survey data, yaitu rumusan kebutuhan data yang diperlukan, baik data primer maupun data sekunder yang diperlukan sesuai dengan kedalaman materi pekerjaan. Rumusan desain survei tersebut merupakan panduan untuk menghasilkan kompilasi data yang dapat dikelompokkan menjadi dua kelompok besar, yaitu data makro dan data mikro.

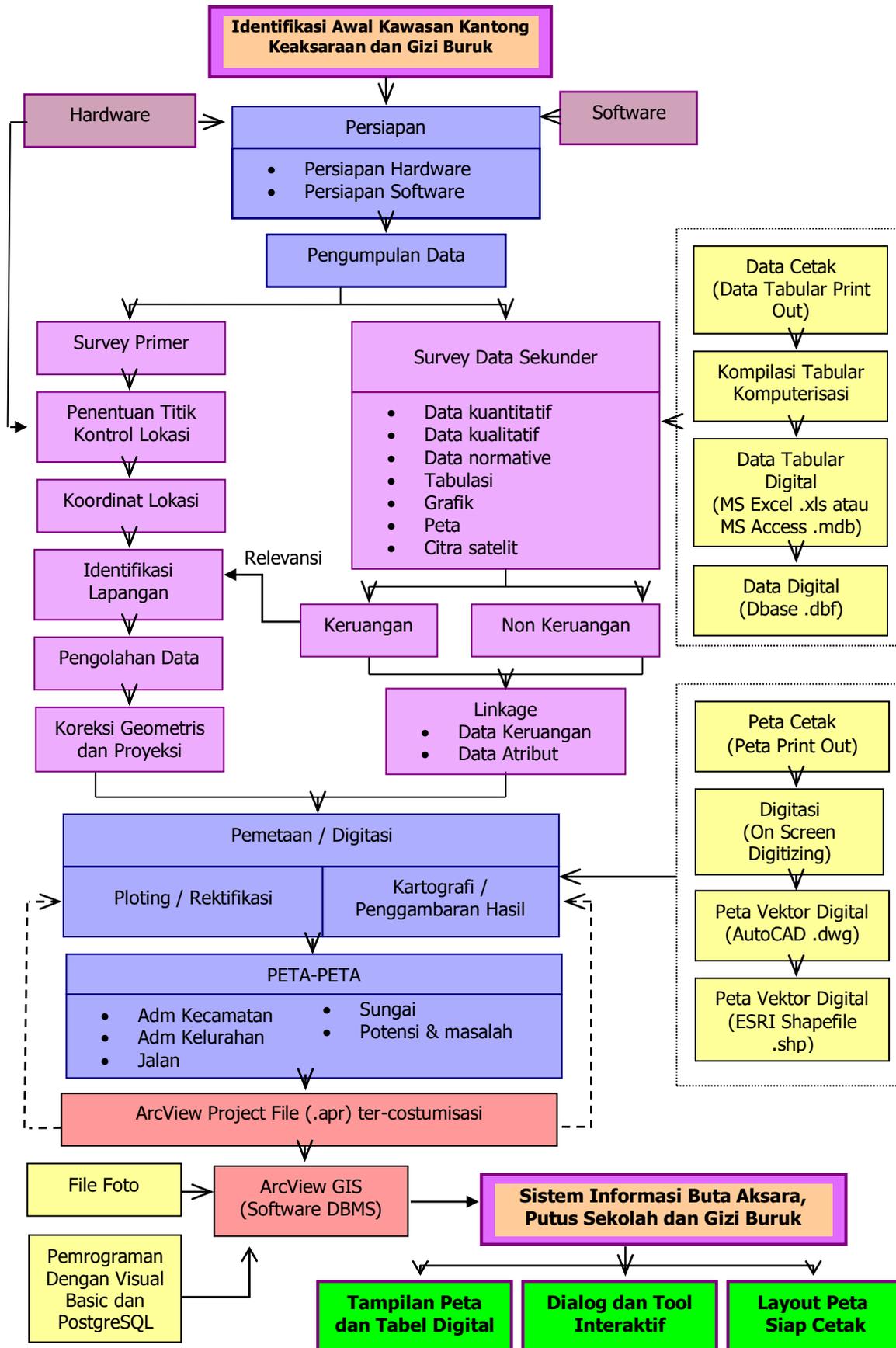
Data makro ialah data yang berasal dari kebijakan-kebijakan lokal terkait dengan pengembangan pembangunan. Data tersebut diperlukan agar rencana teknis yang dihasilkan sesuai dengan kebijakan di tingkat atasnya atau tidak bertentangan dengan kebijakan di tingkat atasnya. Berikutnya ialah data mikro, yaitu data-data spesifik di dalam wilayah perencanaan yang diperlukan untuk kegiatan analisa.

Setelah desain survey tersusun, maka langkah selanjutnya adalah menganalisis permasalahan dan penanganan berdasarkan karakteristik dan kriteria. Berdasarkan hasil keluaran dari analisis yang telah dilakukan, berikutnya ialah mengemas informasi buta aksara dan gizi buruk dalam bentuk pemetaan serta rencana penanganannya. Hasil penyusunan ini dituangkan dalam bentuk laporan akhir sementara untuk dibahas oleh seluruh *stakeholder* terkait. Urutan kegiatan-kegiatan di atas memiliki keterkaitan satu sama lainnya.

Gambaran lengkap mengenai alur pikir pelaksanaan pekerjaan dapat dilihat pada gambar 1.1 dan 1.2.



Gambar 1.1 Alur Pikir Makro Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksar, Putus Sekolah dan Gizi Buruk Kota Pontianak



Gambar 1.2 Alur Pikir Penyusunan Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk Kota Pontianak

1.7 METODE PELAKSANAAN PEKERJAAN

Dalam kegiatan ini, sistematika pelaksanaannya harus dilakukan melalui proses kegiatan dengan *sequence* (teratur) yang jelas mulai dari penentuan lokasi kantong rawan buta aksara dan gizi buruk kemudian program aksi rencana tindak sampai pada sistem informasi geografisnya berupa pemetaan buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk.

Metode pendekatan yang akan digunakan dalam study ini melalui beberapa tahapan sebagai berikut :

a. Persiapan

1. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Dinas Kesehatan Kota Pontianak dan Instansi terkait.
2. Pengumpulan data sekunder

b. Observasi Lapangan

1. Inventarisasi potensi setiap lokasi yang menjadi objek kajian yang berkaitan study.
2. Survey lapangan untuk mengetahui kondisi eksisting hal – hal yang berkaitan dengan keaksaraan dan gizi. Tahap awal adalah survei pada seluruh bagian kecamatan dan wilayah kawasan rentan akan keaksaraan dan gizi, pengumpulan data pendukung untuk setiap kawasan dan mengkaji satuan-satuan wilayah pengembangan sebagaimana tercantum dalam rencana dan membaginya ke dalam kelompok menurut fungsi yang dikembangkan dan potensi dominan setiap kecamatan.

c. Pengolahan Data Hasil Observasi Lapangan

1. Pengumpulan data hasil survey.
2. Pengelompokan data berdasarkan kecamatan dan kriteria kajian terkait.
3. Merancang pemodelan data tabular.
4. Menyusun pemodelan data tabular dan spasial sehingga menjadi suatu informasi pemetaan yang mudah dipahami.

Perangkat Lunak yang digunakan :

1. *ArcGIS Versi 10.1* : Untuk pengolahan data *spatial*.
2. *Mosaic Sattelite Imagery* : merupakan potongan citra satelit resolusi spasial 1 meter sebagai data dasar pendukung analisis kondisi eksisting.
3. *Database System*.

d. Analisis Data

1. Analisis kondisi lingkungan
2. Analisis potensi yang berkaitan dengan keaksaraan dan gizi buruk serta penyusunan Kebijakan.

3. Membuat strategi untuk penanganan, pemberantasan dan pengawasan daerah – daerah yang menjadi kantong rawan akan buta aksara dan permasalahan akan gizi.
4. Membuat konsep pemetaan keaksaraan dan gizi yang interaktif dan mudah dipahami sehingga mempermudah dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan poin ketiga di atas.

1.8 PENDEKATAN DAN METODOLOGI PENYUSUNAN PETA

Pemetaan merupakan tahapan yang dilakukan seiring dan setelah tahapan analisis data hasil observasi lapangan. Runtutan tahapan dalam penyusunan peta ini adalah :

A. Penyiapan Peta Dasar

Ditinjau dari tingkat kebutuhan peta dasar tersebut, maka peta dasar yang dibutuhkan paling tidak memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Merupakan peta yang berasal dari sumber yang terpercaya dan telah diakui seperti halnya peta Rupa Bumi Indonesia bersumber dari Bakosurtanal.
- b. Merupakan peta yang masih memiliki keakuratan dalam kenampakan spasial sesuai dengan keadaan saat ini; yaitu peta yang digunakan bukan peta yang telah kadaluarsa (lama) tetapi peta baru yang saat ini masih dianggap akurat.
- c. Merupakan peta yang sudah memiliki titik referensi kebumian ; yaitu mengartikan bahwa peta dasar yang digunakan sudah memiliki koordinat yang tepat sesuai dengan tipe/klasifikasi *gridline* yang digunakan.
- d. Merupakan peta dasar yang minimal mencakup layer-layer dasar kenampakan peta administrasi, yaitu seperti halnya layer jalan, sungai, dan batas administrasi.
- e. Merupakan peta berskala semi detail sesuai dengan tingkat kebutuhan materi pekerjaan; yaitu berskala berskala 1 : 50.000 dengan dasar pertimbangan materi yang termuat di dalamnya mencakup hingga informasi administrasi kecamatan.

Berdasarkan kriteria diatas, maka dalam penyiapan peta dasar tersebut menurut hemat kami adalah Peta Rupa Bumi Indonesia skala 1 : 50.000, Peta Administrasi Kota Pontianak (sumber dari BPN Kota Pontianak skala 1 : 50.000). Jika tersedia dan memungkinkan untuk digunakan, dibutuhkan juga Peta Citra Kota Pontianak. Adapun maksud dari penggunaan beberapa peta dasar tersebut diantaranya adalah :

1. Peta Rupa Bumi Indonesia, memiliki fungsi sebagai Petunjuk teknis dalam membaca karakteristik spasial wilayah studi, karena kenampakan yang ditampilkan oleh peta ini sangat jelas dan mudah dibaca/dipahami.

2. Peta Administrasi memiliki fungsi sebagai Petunjuk terpercaya dalam penentuan batas administrasi hingga wilayah administrasi desa/kelurahan.
3. Peta Infrastruktur, Sarana yang ada di Kota Pontianak sebagai petunjuk teknis untuk menganalisis keterkaitan akan kondisi sebab akibat.

Peta dasar yang diperoleh selanjutnya diproses lebih lanjut melalui teknik overlay untuk mendapatkan peta dasar utama yang selanjutnya digunakan dalam pelaksanaan teknik survei ke lapangan. Dalam pelaksanaan survey di lapangan, pelaksana survei dipandu oleh alat pandu yang disebut *Geographic Positioning System* (GPS). GPS ini akan digunakan untuk keperluan navigasi, sehingga tipe yang digunakan juga GPS bertipe navigasi bukan yang bertipe differential seperti yang digunakan untuk keperluan geodesi, sehingga alat bantu ini akan mampu menginformasikan titik koordinat lokasi terpilih, tinggi elevasi titik terpilih dan memiliki kemampuan untuk tracking daerah untuk menghasilkan garis yang diinginkan.

Garis dan titik yang dihasilkan oleh GPS nantinya digunakan sebagai data spasial utama dalam aplikasi penyusunan peta setelah melalui tahapan editing.

B. Digitasi Peta Dasar

Beberapa peta dasar yang diperoleh tersebut, kemudian diolah melalui tahap digitasi peta. Digitasi peta dapat dilakukan dengan berbagai cara, yaitu diantaranya:

- Digitasi langsung peta berdasarkan hasil scanner peta menggunakan program database spasial tertentu.
- Digitasi lembar peta dengan menggunakan alat bantu *digitizer*.
Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam proses digitasi peta antara lain :
 - Pembentukan *layer* dari setiap jenis item kenampakan (*layer* jalan, sungai, batas administrasi, dan lain-lain).
 - Proyeksi bidang permukaan bumi, untuk menentukan koordinat lembar peta.

C. Pembentukan Simbol Unsur-unsur Peta

Simbol atau unsur-unsur peta wilayah merupakan salah satu hal penting dalam pembentukan peta. Simbol atau unsur-unsur tersebut merupakan bentuk keterangan berupa gambar yang disajikan oleh peta. Berdasarkan PP No. 10 tentang Ketelitian Peta Dalam Penataan Ruang, telah dijabarkan mengenai simbol atau unsur-unsur standar dalam pembuatan peta.

Untuk itu penyajian peta disusun berdasarkan simbol atau unsur-unsur yang didasarkan pada peraturan pemerintah tersebut. Pada beberapa item/unsur yang tidak tertuang dalam PP No. 10

tentang Ketelitian Peta tersebut, maka pembentukkan simbol unsur-unsur didasarkan pada kesesuaian simbol terhadap kenampakkan yang ditampilkan.

Pembentukkan simbol unsur-unsur peta juga berupa penyiapan legenda (keterangan pendukung peta) serta penyajian koordinat posisi peta terhadap referensi kebumian.

D. Inventaris Data Keaksaraan dan Gizi

Pada tahap ini, atribut data mengenai keaksaraan dan gizi dari hasil analisis di simpan ke dalam data tabular yang terintegrasi dengan data spasial. Inventaris data disesuaikan dengan kebutuhan variabel yang ingin ditampilkan ke dalam peta.

E. Penyajian Peta Tematik

Berdasarkan arah pekerjaan mengenai Study Pemetaan Dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah Dan Gizi Buruk, maka penyajian peta tematik terbagi atas :

- Peta Administrasi (baik Kota maupun kecamatan)
- Peta Infrastruktur Jalan
- Peta Sebaran Sarana Kesehatan dan Pendidikan
- Peta Kawasan Permukiman yang menjadi kantong rawan akan permasalahan keaksaraan dan gizi (terbagi pada tiap-tiap kecamatan dan global pada ruang lingkup kecamatan)

1.9 PENDEKATAN DAN METODOLOGI

1.9.1 Prasyarat Pemetaan

Study pemetaan yang akan dilakukan dapat menjadi dasar/basis pengembangan lebih lanjut Sistem Informasi Geografis Pemantauan Keaksaraan dan Gizi yang ada di Kota Pontianak yang memungkinkan untuk dimanfaatkan secara umum bagi masyarakat di Kota Pontianak dan dapat diintegrasikan ke dalam Website Kota Pontianak. Sehingga kebutuhan akan data dan informasi yang berkaitan keaksaraan dan gizi dapat terpenuhi. Adapun pengembangan yang akan dilakukan nantinya harus memenuhi beberapa kriteria sebagai berikut :

- *Fungsional*, yaitu sistem yang akan dikembangkan dari study ini bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai daerah yang menjadi basis masalah aksara dan gizi di Kota Pontianak.
- *Sustainable*, artinya sistem yang dibentuk mampu untuk terus berkembang sesuai dengan kebutuhan.
- *Compatible*, yaitu sistem yang dikembangkan harus memiliki kecocokan dengan sistem dan perangkat kerja yang sudah ada, serta memiliki kecocokan secara umum dengan sistem-sistem informasi lain yang telah ada pada instansi.

- Mudah dan *user friendly*, sistem yang dikembangkan harus mudah dimengerti dan dioperasikan khususnya oleh calon pengguna.
- Handal, sistem informasi ini juga harus memuat kemampuan-kemampuan atau fungsi-fungsi informasi yang dibutuhkan.
- Layak dari segi biaya, artinya dalam pengembangannya harus disesuaikan dengan kemampuan daerah dalam penyediaan *hardware* dan *software* pendukung sistem, termasuk juga perawatan sistem.

1.9.2 Proses Pembuatan Peta

Adapun proses untuk menghasilkan suatu pemetaan yang interaktif adalah meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- Identifikasi karakteristik wilayah meliputi batas administrasi, infrastruktur dan sarana yang ada serta kondisi eksisting wilayah tersebut.
- Pemetaan lokasi kawasan yang menjadi kantong rawan keaksaraan dan permasalahan dengan gizi.

1.9.3 Perangkat Kerja

Perangkat kerja yang digunakan pada kegiatan Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk Kota Pontianak dibedakan menjadi *hardware*, dan *software* komputer, disamping tenaga ahli dan operator pelaksana (*brainware*) yang menjadi konseptor dan pelaksana perancangan desain sistem. Hal ini sesuai dengan prinsip kerja pembangunan sistem informasi secara umum.

- Software

Aplikasi pengolahan data dilengkapi dengan rancangan *user interface* menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia agar sesuai dengan kebutuhan pemakaian pada pekerjaan ini, yang juga akan membungkus dan menjembatani database agar dapat digunakan secara mudah oleh *user* yang awam sekalipun. Disamping itu juga diperlukan *software-software* konversi sistem informasi yang telah ada, untuk *sharing data* dan standarisasi struktur dan format data.

- Hardware

Hardware yang digunakan, sedapat mungkin disesuaikan dengan sistem hardware komputer yang telah banyak dipakai di lingkungan pemakai sistem informasi yang di susun serta dapat dapat dengan mudah dikembangkan pada sistem yang lebih *advance* bila dikehendaki.

- Brainware

Tenaga pelaksana inti ini dalam pelaksanaan tugasnya akan didukung oleh Ahli Perencanaan Umum dan Ahli Teknologi Informasi.

1.9.4 Metodologi Umum

Secara rinci langkah-langkah teknis yang harus dilakukan dalam kajian ini antara lain :

- a) Koordinasi dengan stake holder terkait yang berhubungan dengan pendidikan dan kesehatan khususnya gizi.
- b) Pengumpulan Data Sekunder
- c) Survey Lapangan
- d) Analisis data
- e) Perumusan konsep pemetaan
- f) Perumusan Solusi dan Penanganan

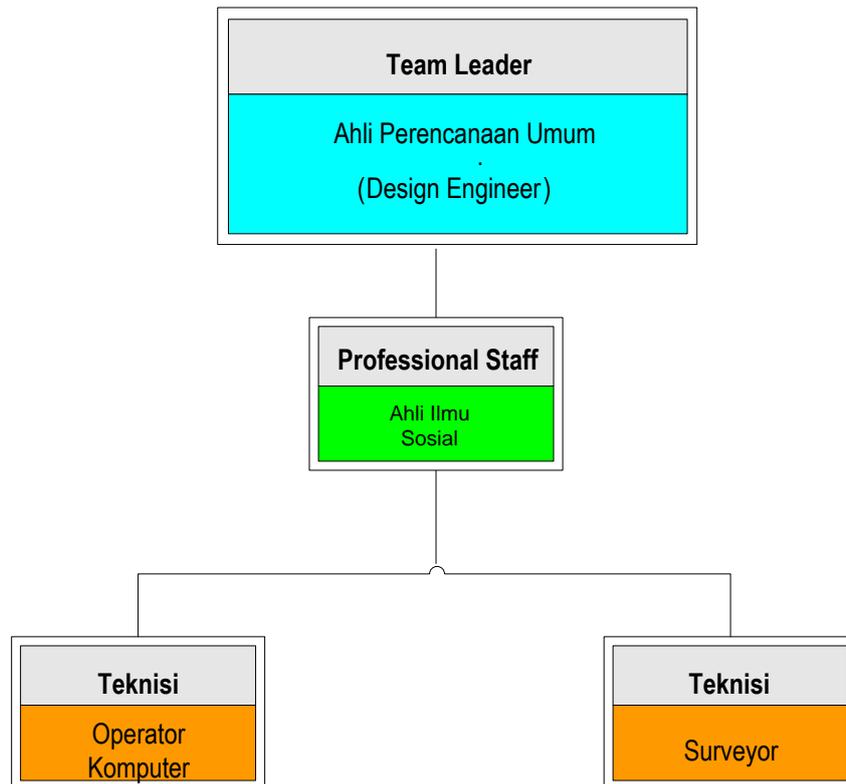
Pengumpulan data dan informasi yang diperlukan sebagai bahan masukan bagi pekerjaan Pra Desain ini dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- a) **Pengumpulan Data Sekunder**, berupa data dasar sebagai acuan untuk survey lapangan. Data sekunder didapatkan dari instansi-instansi terkait yang berhubungan dengan pekerjaan ini seperti dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan.
- b) **Observasi Lapangan**, yang berupa pengamatan atau peninjauan langsung terhadap kondisi existing berdasarkan data sekunder yang telah terkumpul.
- c) **Teknik Wawancara dan atau kuesioner**, umumnya teknik ini dilakukan apabila data atau informasi sebagai bahan masukan tidak terdapat dalam data sekunder dan sebagai bahan pendukung untuk melakukan analisis data. Pengisian kuesioner dalam pekerjaan dilakukan dengan teknik pencacahan guna mendapatkan perbandingan kondisi existing terhadap data sekunder.

Dengan kombinasi ketiga metode pengumpulan data/informasi seperti disebutkan di atas, maka diharapkan kebutuhan data dan informasi sebagai bahan masukan dalam proses penyusunan konsep pemetaan penanganan terpadu buta aksaran putus sekolah dan gizi buruk di Kota Pontianak.

1.10 STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka melaksanakan pekerjaan ini akan disusun organisasi pelaksanaan yang secara diagramatis digambarkan Gambar 1.3 berikut.



Gambar 1.3
Organisasi Pelaksana Pekerjaan

1.10.1 Tenaga Ahli

Untuk melaksanakan pekerjaan ini konsultan akan menugaskan tenaga ahli dengan kualifikasi dan lama penugasan sebagai berikut :

Tabel 1.1
Daftar Penugasan Tenaga Ahli

No.	Tenaga Ahli	Bulan	Keterangan
1.	Ketua Tim/Ahli Perenc. Umum (Design Engineer)	2	Ahli
2.	Ahli Ilmu Sosial	2	Ahli Muda

1.10.2 Tenaga Penunjang

Untuk memperlancar pelaksanaan dan penyelesaian seluruh tahapan pekerjaan Tim Ahli di atas akan dibantu oleh tenaga penunjang yang terdiri dari teknisi dan pendukung meliputi :

- Tenaga *Surveyor*
- Tenaga Administrasi/Pelaporan

Jumlah personil ahli maupun penunjang untuk masing-masing bidang yang diperlukan disesuaikan dengan kebutuhan ruang lingkup pekerjaan.

1.11 KUALIFIKASI DAN URAIAN TUGAS PERSONIL

Personil yang ditugaskan oleh konsultan untuk pekerjaan ini, harus mampu dalam melaksanakan tugasnya masing-masing. Tenaga-tenaga ahli merupakan syarat teknis yang harus dipenuhi untuk menangani pelaksanaan pekerjaan lapangan, diskusi dan konsultasi, evaluasi data, perhitungan, penggambaran dan pembuatan laporan. Sesuai Kerangka Acuan Kerja, untuk melaksanakan pekerjaan Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk ini dilibatkan tenaga ahli dan tenaga teknis beserta uraian tugas masing-masing personil sebagai berikut :

- Ketua Tim (Team Leader) / Ahli Perencanaan Umum (Design Engineer)
Team Leader atau ketua tim pelaksana adalah Sarjana Teknik Sipil dengan pengalaman kerja minimum 3 (tiga) tahun dalam pekerjaan perencanaan penataan Lahan dan perencanaan umum serta mengerti teknologi GIS.
- Ahli Ilmu Sosial
Sarjana Ilmu Sosial yang dengan pengalaman kerja minimum 3 (tiga) tahun dalam bidangnya serta menguasai pendekatan ilmu sosial untuk perencanaan penataan kawasan dengan kondisi sosial tertentu. Tugas tenaga ahli sosial meliputi rancangan konsep penataan sosial dan mengidentifikasi dalam bentuk pemetaan kawasan sosial tertentu.
- Surveyor
STM surveyor /sipil / bangunan dengan penga-laman kerja minimum 1 (satu) tahun dalam bidang survei, pengukuran dan pemetaan untuk pekerjaan sejenis serta menguasai penggunaan alat GPS.
- Administrasi/Pelaporan
SMA / STM/ dengan keterampilan menguasai dan mengerti menggunakan perangkat komputer dan Microsoft Office.

1.12 JADWAL PENUGASAN PERSONIL

Efektifitas kinerja Konsultan sangatlah mutlak diperlukan dalam Pekerjaan Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk Kota Pontianak sesuai dalam koridor KAK dan ketentuan yang ada. Sesuai KAK waktu pelaksanaan pekerjaan adalah selama 2 (dua) bulan atau 60 hari kalender, maka dengan itu konsultan menjadwalkan dan mensinergikan penugasan tenaga ahli, tenaga teknis dan tenaga pendukung secara terpadu mulai dari pekerjaan persiapan hingga pada tahap laporan hasil perencanaan sebagaimana disajikan pada Tabel 1.2 berikut.

Tabel 1.2
Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

No	Kegiatan	Bulan Ke 1				Bulan Ke 2			
		Minggu ke				Minggu ke			
		1	2	3	4	1	2	3	4
1	Koordinasi Tim								
	a. Penjelasan materi pekerjaan	■							
	b. Pembagian tugas tenaga ahli	■							
	c. Studi Literatur Perancangan Sistem	■							
	d. Mobilisasi tenaga ahli & survai awal	■							
	e. Persiapan administrasi dan perijinan survei	■							
2	Pengumpulan Data		■						
	a. Survey Data Sekunder	■	■						
	b. Pengumpulan Data	■	■						
3	Pelaporan Pendahuluan			■					
	a. Perumusan latar belakang dan permasalahan	■							
	b. Perumusan metodologi pekerjaan	■							
	c. Penyusunan Laporan Pendahuluan	■	■	■					
	d. Diskusi Laporan Pendahuluan	■	■	■					
4	Survey Lapangan (Survey Primer)				■				
	a. Penyebaran Kuesioner dan wawancara				■	■			
	b. Pemetaan Geografis				■	■			
	c. Pengumpulan Data				■	■			
	d. Cross Checking Data				■	■			
5	Kompilasi Data						■		
	a. Penggabungan Data Survey Primer dan Sekunder						■		
	b. Editing dan Permodelan Data						■		
6	Analisis Data							■	
	a. Analisis Data							■	
	b. Penyusunan Draft Peta							■	
7	Pembuatan laporan Akhir								■
	a. Arahan Pengembangan								■
	b. Pembentukan Kebijakan Lokal								■
	c. Penyajian Peta								■
	d. Pembahasan Laporan Akhir								■
8	Penggandaan								■
	a. Laporan Akhir								■
	b. Peta								■

2.1. FISIK KOTA PONTIANAK

2.1.1. Letak Administratif

Secara geografi, wilayah Kota Pontianak berdekatan dengan beberapa pusat pertumbuhan Regional yaitu Batam, Pekanbaru, Natuna, Jakarta, Balikpapan dan Pangkalan Bun. Kota Pontianak letaknya juga tidak jauh dari Negara Asean yang cukup berkembang seperti Malaysia, Brunei Darussalam dan Singapura. Bahkan Kota Pontianak berbatasan langsung dengan Negara Bagian Sarawak Malaysia, sehingga menjadi beranda terdepan Negara Indonesia dalam berinteraksi langsung dengan negara tetangga Malaysia.

Kota Pontianak merupakan Ibukota Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari 6 kecamatan dan terbagi menjadi 29 kelurahan, 534 Rukun warga (RW) dan 2.372 Rukun Tetangga (RT) dengan luas mencapai 107,82 km². Wilayah Kota Pontianak berbatasan dengan wilayah Kabupaten Pontianak dan Kabupaten Kubu Raya dengan batas-batas sebagai berikut:

Bagian Selatan : Desa Sungai Raya Kecamatan Sungai Raya dan Desa Punggur Kecil

Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya

Bagian Timur : Desa Kapur Kecamatan Sungai Raya dan Desa Kuala Ambawang Kecamatan

Sungai Ambawang Kabupaten Kubu Raya

Bagian Barat : Desa Pal IX dan Desa Sungai Rengas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten

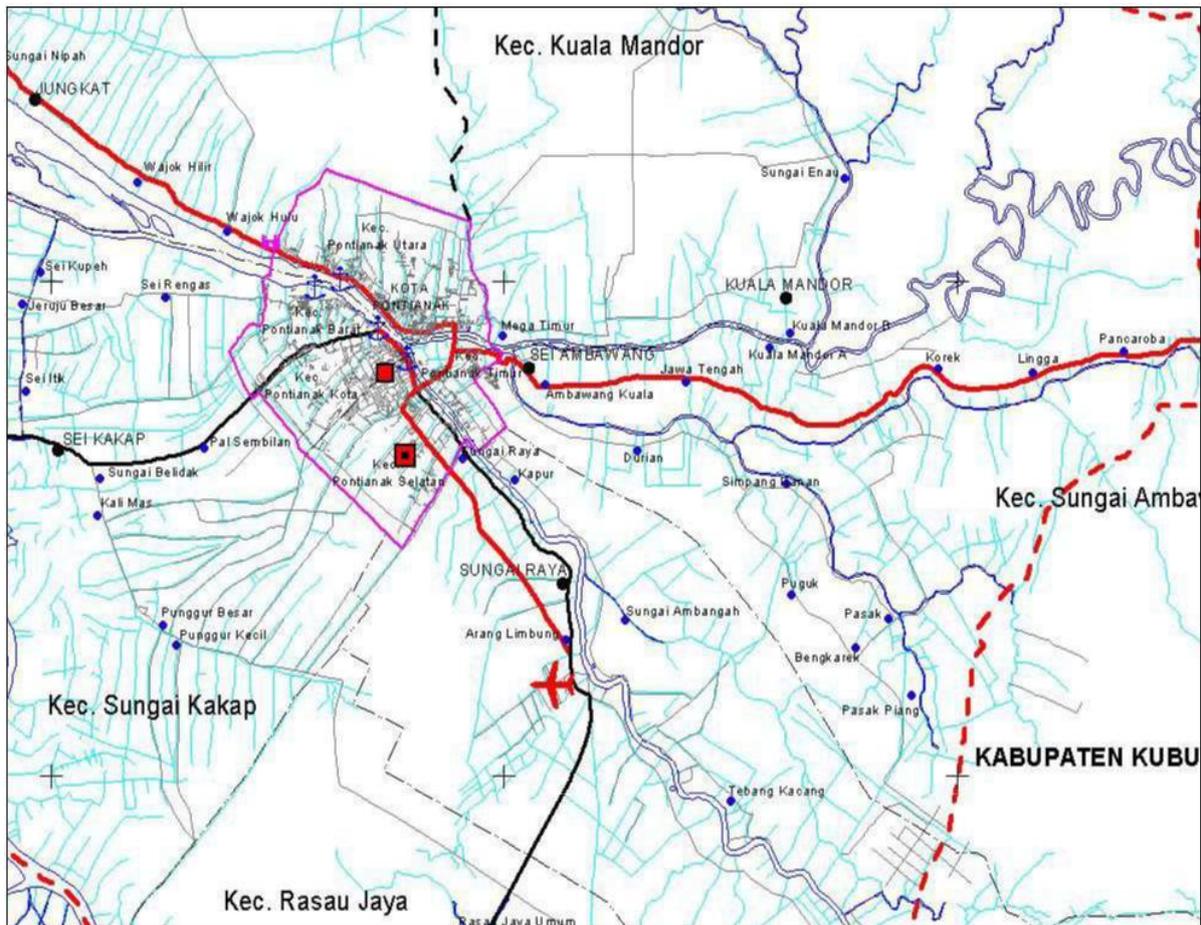
Kubu Raya

Bagian Utara : Desa Wajok Hulu Kecamatan Siantan Kabupaten Pontianak dan Desa Mega

Timur dan Desa Jawa Tengah Kecamatan Sungai Ambawang Kabupaten

Kubu Raya

Kota Pontianak secara geografis berada pada 0002'24" Lintang Utara sampai dengan 0005'37" Lintang Selatan dan 109023'01" Bujur Timur sampai dengan 109016'25" Bujur Timur. Karena terletak di Lintasan Garis Khatulistiwa, maka Kota Pontianak dijuluki sebagai Kota Khatulistiwa atau kota equator. Peta geografis Kota Pontianak dapat dilihat pada gambar 2.1.



Gambar 2.1 Peta Geografis Kota Pontianak

Dalam sistem Pulau Kalimantan, Kota Pontianak memiliki interaksi dalam sistem pelayaran Indonesia Bagian Barat dan Negara Tetangga (Malaysia, Singapura dan China). Maka dari itu peran Pelabuhan di Kota Pontianak sangat penting dalam kelancaran sistem angkutan Laut di wilayah Indonesia dan Internasional. Pelabuhan antar pulau Dwikora Kota Pontianak juga didukung dengan pelabuhan antar wilayah Kabupaten di Kalimantan Barat melalui pelabuhan Sheng Hie, pelabuhan ini melayani angkutan Pontianak-Ketapang, Pontianak–Teluk Melano (Kabupaten Kayong Utara), Pontianak-Sukadana (Kabupaten Kayong Utara) dan lain-lain.

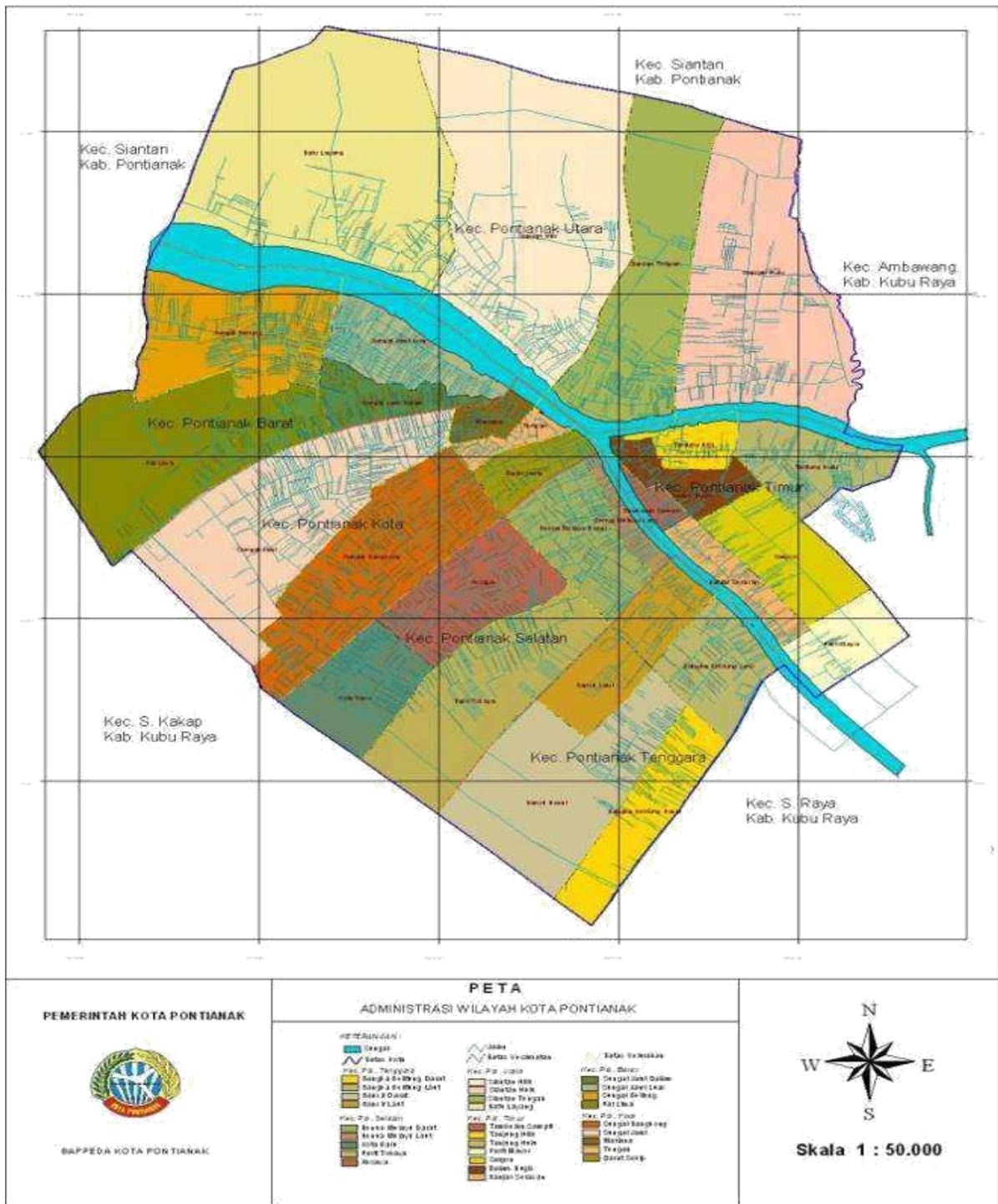
Kota Pontianak Terdiri dari 6 kecamatan dan 29 kelurahan dimana kecamatan terluas adalah Kecamatan Pontianak Utara 39,68 Km² yang terbagi menjadi 4 kelurahan. Sedangkan yang paling kecil batas administrasinya adalah Kecamatan Pontianak Timur dengan luas 9,78 Km² yang terbagi menjadi 7 kelurahan. Kelurahan yang paling luas batas administrasinya adalah Kelurahan Siantan tengah dengan luas mencapai 13,41 Km² atau sekitar 12,44 % dari luas keseluruhan Kota Pontianak. Luas kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel 2.1.

Tabel 2.1 Luas Kecamatan dan Kelurahan di Kota Pontianak

No	Kecamatan		Kelurahan	Luas Wilayah (Km ²)	% terhadap Kota Pontianak
1	Pontianak Barat	1	Pal Lima	5.80	5.38
		2	Sungai Jawi Dalam	2.34	2.17
		3	Sungai Jawi Luar	2.95	2.74
		4	Sungai Beliang	2.15	1.99
		Sub Total		13.24	12.28
2	Pontianak Timur	1	Parit Mayor	1.49	1.38
		2	Banjar Serasan	1.20	1.11
		3	Saigon	2.68	2.49
		4	Tanjung Hulu	1.97	1.83
		5	Tanjung Hilir	0.74	0.69
		6	Dalam Bugis	1.29	1.20
		7	Tambelan Sampit	0.41	0.38
		Sub Total		9.78	9.07
3	Pontianak Utara	1	Siantan Hulu	9.20	8.53
		2	Siantan Tengah	13.41	12.44
		3	Siantan Hilir	7.87	7.30
		4	Batu Layang	9.20	8.53
		Sub Total		39.68	36.80
4	Pontianak Selatan	1	Benua Melayu Darat	2.68	2.49
		2	Benua Melayu Laut	0.57	0.53
		3	Parit Tokaya	5.22	4.84
		4	Akcaya	3.19	2.96
		5	Kota Baru	2.56	2.37
		Sub Total		14.22	13.19
5	Pontianak Kota	1	Sungai Bangkong	6.20	5.75
		2	Darat Sekip	1.31	1.21
		3	Tengah	0.95	0.88
		4	Mariana	0.50	0.46
		5	Sungai Jawi	7.02	6.51
		Sub Total		15.98	14.82
6	Pontianak Tenggara	1	Bangka Belitung Darat	2.90	2.69
		2	Bangka Belitung Laut	2.33	2.16
		3	Bansir Darat	6.73	6.24
		4	Bansir Laut	2.96	2.75
		Sub Total		14.92	13.84
Total Kota Pontianak				107.82	100.00

Sumber : Perwa No. 55 tahun 2008

Peta batas administrasi kelurahan yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat pada gambar 2.2 berikut.



Sumber: BPS Kota Pontianak, 2014

Gambar 2.2 Peta Wilayah Kelurahan di Kota Pontianak

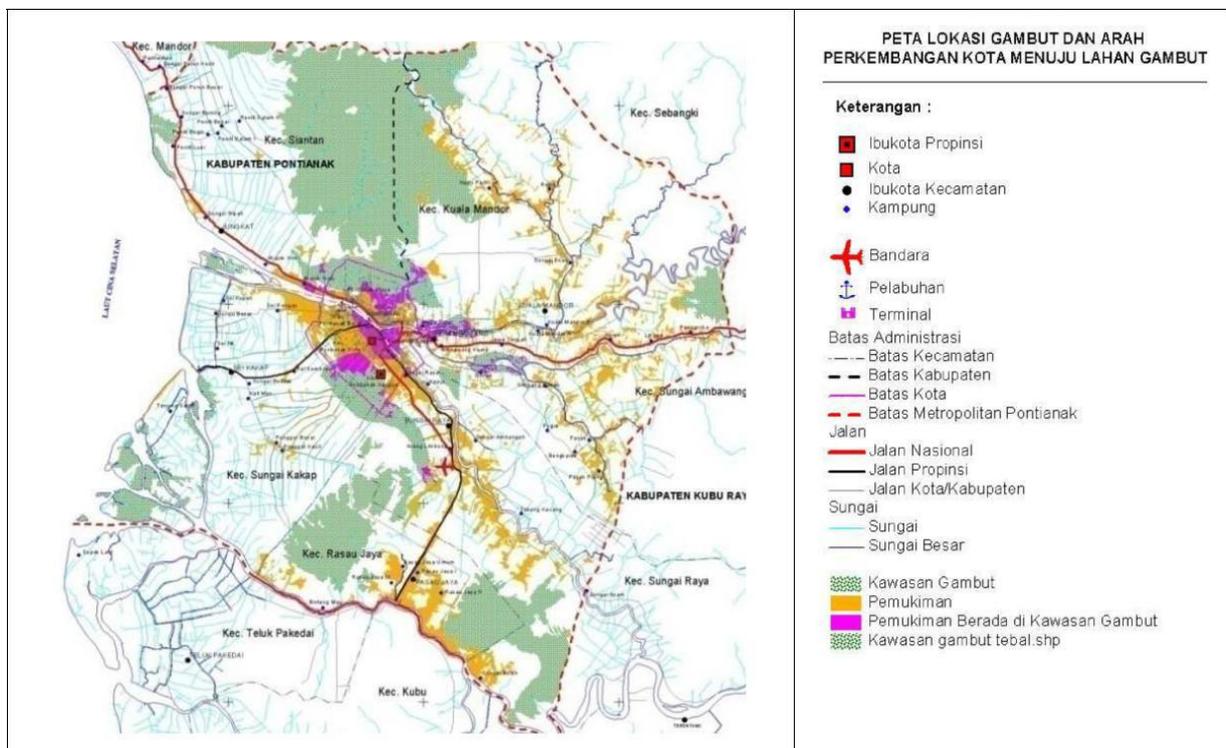
2.1.2 Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kota Pontianak dibagi berdasarkan kawasan yang menjadi karakteristik suatu wilayah. Terdapat 6 pembagian kawasan di Kota Pontianak, diantaranya :

1. Kawasan Lindung

Berdasarkan RTRW Kota Pontianak 2013-2033, jenis kawasan lindung yang terdapat di Kota Pontianak meliputi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya, kawasan perlindungan setempat, kawasan pelestarian alam dan kawasan cagar budaya. Kawasan lindung di Kota Pontianak yang direncanakan adalah Kawasan Lindung Gambut yang dapat didefinisikan sebagai Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya adalah kawasan bergambut. Yang dimaksud dengan kawasan bergambut adalah Kawasan yang unsur pembentuk tanahnya sebagian besar berupa sisa-sisa bahan organik yang tertimbun dalam waktu lama. Kriteria kawasan bergambut adalah mempunyai kedalaman gambut lebih dari 4 meter penetapannya dilakukan berdasarkan Keppres No 32 Tahun 1990. Adapun lokasi keberadaan gambut di Kota Pontianak sebagian kecil terdapat di Kecamatan Pontianak Tenggara dan sebagian besar terdapat di Kecamatan Pontianak Utara dengan luas keseluruhan lebih kurang sebesar 1.607 Ha atau sekitar 14,9 Persen dari luas kota secara keseluruhan. Kawasan bergambut dengan ketebalan 4 meter atau lebih merupakan kawasan lindung yang terkategori sebagai perlindungan kawasan bawahannya. Peraturan zonasi untuk kawasan bergambut disusun dengan memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

- Pemanfaatan ruang untuk wisata alam tanpa merubah bentang alam;
- Pelarangan seluruh kegiatan yang berpotensi merubah tata air dan ekosistem unik;
- Pengendalian material sedimen yang masuk ke kawasan bergambut melalui badan air.



Sumber: Dokumen PMA-Pontianak Metropolitan Area

Gambar 2.3 Peta Lokasi Gambut Kota Pontianak dan Sekitarnya

2. Kawasan Rawan Banjir dan Genangan

Seperti yang telah disebutkan diatas letak geografis Kota Pontianak dilalui oleh Sungai Kapuas serta topografinya yang sebagian besar wilayahnya merupakan lahan yang datar dengan kemiringan lahan 0 - 2 %. Oleh karenanya terdapat beberapa lokasi yang memiliki potensi tergenang air antara lain

- Parit Tokaya dan Sekitarnya : Kawasan Masjid Raya Mujahidin, Jalan KS. Tubun, Sutoyo, Suprpto dan Ahmad Yani
- Sungai Bangkong : jl. Alianyang dan Sekitarnya dan jalan Putri Daranante
- Wilayah Parit Bentasan Sekitar Sungai Malaya Wilayah sekitar Jeruju sampai Jl. Karet
- Wilayah Batu Layang
- Sebagian Besar wilayah Pontianak Timur yaitu Sekitar jalan Panglima Aim

3. Kawasan Perlindungan Setempat

Kawasan perlindungan setempat merupakan kawasan-kawasan yang harus dilindungi karena fungsinya yang sangat penting untuk menjaga kelestarian unsur alamiah tertentu seperti garis sempadan sungai, sempadan pantai, daerah sekitar waduk atau danau dan daerah sekitar mata air. Sesuai dengan Keppres No. 32 Tahun 1990, kondisi dan karakteristik permukiman perkotaan secara umum di Pontianak, maka kriteria yang dipakai untuk menentukan batas kawasan sempadan sungai ini adalah kawasan sepanjang sungai sekurang-kurangnya 15 meter di tepi kanan-kiri sungai besar dan 10 meter di tepi kanan-kiri sungai kecil dihitung dari titik pasang terendah sungai tersebut.

Kawasan sempadan sungai di Kota Pontianak menurut kriteria di atas adalah kawasan sepanjang tepi kanan-kiri Sungai Kapuas, Sungai Landak, Sungai Malaya dan parit-parit primer seperti Sungai Nipah Kuning, Sungai Jawi, Sungai Raya dan lain-lain. Karena sudah terdapat banyak permukiman penduduk yang termasuk pada kawasan sempadan sungai, maka kawasan terbangun pada sempadan sungai dan parit primer direkomendasikan sebagai kawasan dengan intensitas kegiatan rendah dengan pembangunan terbatas. Sedangkan untuk lahan kosong yang masih ada pada kawasan sempadan sungai diarahkan sebagai jalur hijau yang bebas dari pembangunan kecuali untuk pembangunan yang mendukung fungsi perlindungan setempat.

4. Kawasan Perlindungan Cagar Budaya

Benda Cagar Budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting artinya bagi pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan dan kebudayaan, sehingga perlu dilindungi dan lestarian demi pemupukan kesadaran jati diri bangsa dan kepentingan maksimal. Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, Peraturan

Pemerintah Nomor 10 tahun 1993 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 5 tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya, berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 063/U/1995 tentang Perlindungan dan Pemeliharaan Benda Cagar Budaya, maka Benda Cagar Budaya di Kota Pontianak ditetapkan sebagai berikut:

- Keraton Kadriah Pontianak (238 tahun)
- Masjid Jami' Sultan Sy. Abdurrachman (238 th)
- Makam Kesultanan Pontianak Batulayang (200 th) Tugu Khatulistiwa (81 th)
- Masjid Baitannur (207 th) SDN 14 (107 th)
- Vihara Bodhisatva (180 th) Kantor Pos (72 th)
- Lapangan Keboen Sayoek (54 th) Rumah Adat Betang/Panjang
- Sumur Bor (79 th) Pelabuhan Seng Hie
- Kantor Bappeda (179 th)
- Ruang Terbuka Hijau

5. Ruang Terbuka Hijau

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang atau jalur dan atau mengelompok yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Secara Fisik RTH dapat dibedakan menjadi RTH alami dapat berupa habitat liar alami, kawasan lindung dan taman-taman nasional serta RTH non alami atau binaan seperti taman, lapangan olahraga, pemakaman atau jalur-jalur hijau jalan.

a. Ruang Terbuka Hijau Publik

Luas total Ruang Terbuka Hijau Publik yang ada di Kota Pontianak adalah 1.445 Ha atau 13,41% dari total luas wilayah Kota Pontianak berupa taman kota, jalur hijau pada median dan tepi jalan, lapangan olah raga, pemakaman umum, hutan kota serta agrowisata/Kawasan Sentra Agro Bisnis.

Tabel 2.2 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik Di Kota Pontianak

No	Jenis RTH	Luas Wilayah Kota Pontianak (ha)	Luas RTH (ha)	Prosentase(%)
1	Taman Kota	10.782	408,01	3,78
2	Jalur Hijau		115,45	1,07
3	Lapangan Olah Raga		62,69	0,58
4	Pemukaman Umum		44,56	0,41
5	Hutan Kota		10,95	0,10
6	Agrowisata/KSA		803,72	7,45
Jumlah		10.782	1.445,38	13,41

Sumber : Dinas Kebersihan Dan Pertamanan Kota Pontianak Tahun 2013

b. RTH Privat

Ruang Terbuka Hijau Privat meliputi pekarangan rumah, halaman perkantoran, pertokoan dan tempat usaha dan taman atap bangunan, diatur melalui beberapa strategi pengaturan KDH dalam RTH privat dapat dilihat pada Tabel 2.3 dan pengaturan RTH Privat dalam pekarangan dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut :

Tabel 2.3 Jenis dan Luas Ruang Terbuka Hijau (RTH) Privat Di Kota Pontianak

No	Jenis RTH	Luas Wilayah Kota Pontianak (ha)	Luas RTH (ha)	Prosentase (%)
1	Perumahan/Permukiman	10.782	162,44	1,51
Jumlah		10.782	162,44	1,51

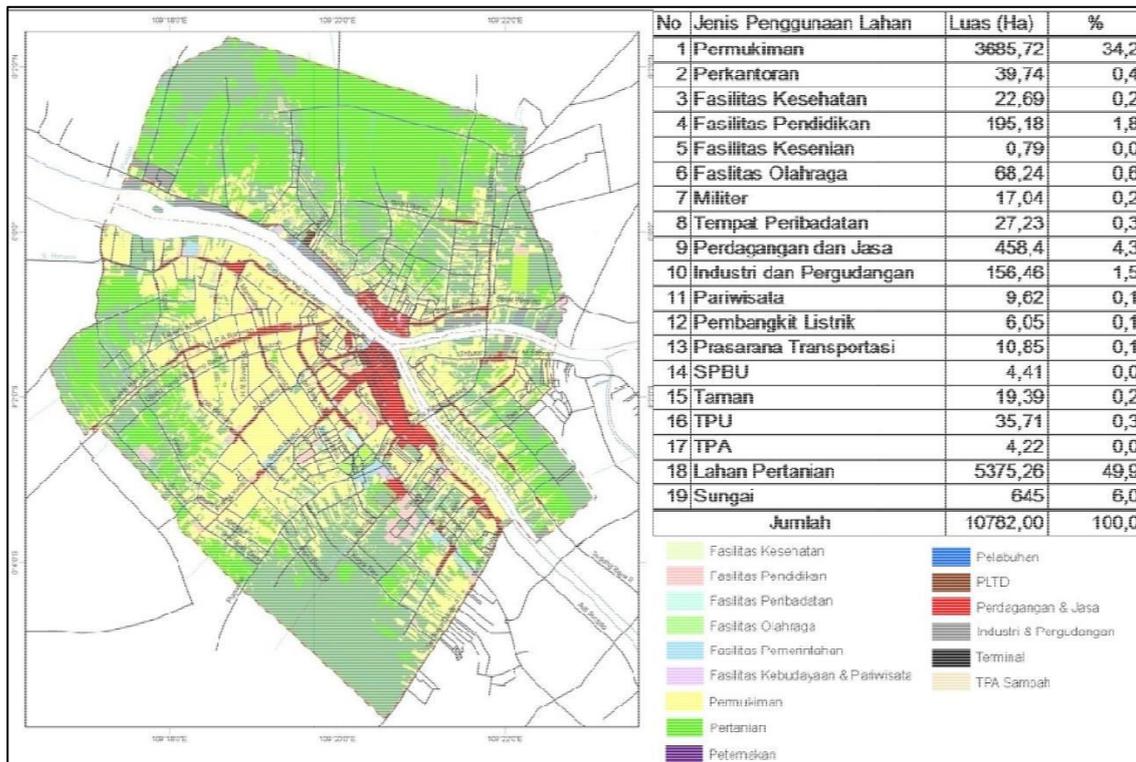
Tabel 2.4 Target Pencapaian RTH Di Kota Pontianak

No.	Jenis Penggunaan Lahan	Luas Proyeksi	KDB	KDH	Alokasi RTH Privat
1	Permukiman	4.358,000			
	a. Permukiman Kepadatan Tinggi	458,038	70 %	30 %	40,55
	b. Permukiman Kepadatan Sedang	1.374,114	60 %	40 %	216,19
	c. Permukiman Kepadatan Rendah	2.525,848	50 %	40 %	505,17
2	Perkantoran/Pelayanan Kota	129,63	60 %	40 %	20,54
3	Perkantoran/Pelayanan Kota	34,71	50 %	40 %	6,65
4	Fasilitas Kesehatan	357,50	60 %	40 %	48,37
5	Fasilitas Kesenian/kebudayaan dan Rekreasi	67,88	50 %	40 %	14,82
6	Militer	17,04	60 %	40 %	0,75
7	Perdagangan dan Jasa	714,64	80 %	10 %	14,07
8	Industri dan Pergudangan	257,74	50 %	20 %	26,41
9	Pembangkit Listrik	6,05	50 %	30 %	0,91
10	Prasarana Transportasi dan Fasilitas Perhubungan	15,09	50%	30 %	12,42
13	Lahan Cadangan/Pertanian dan lain-lain	21,55	70 %	40 %	2,59
Jumlah					944,76

6. Kawasan Budidaya

Pengembangan kawasan budidaya merupakan salah satu implementasi dari perhatian Pemerintah Kota Pontianak terhadap daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup kota dengan tetap memperhatikan Keppres No. 57 Tahun 1989 tentang Kawasan Budidaya dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.41 Tahun 2007 Tentang pedoman kriteria teknis Kawasan Budidaya. Untuk konteks Kota Pontianak, rencana pengembangan kawasan budidaya ini diarahkan kepada upaya untuk mengendalikan alih fungsi guna lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota. Kawasan budidaya tersebut terdiri dari perumahan, pemerintahan, perdagangan,

jasa, pendidikan, kesehatan, industri dan perdagangan, pariwisata dan rekreasi, dan militer. Secara garis besar kondisi penggunaan lahan Kota Pontianak (tahun 2012) dapat dilihat dalam gambar berikut.



Sumber : RTRW Kota Pontianak 2013-2033

Gambar 2.4 Penggunaan Lahan Kota Pontianak Tahun 2012

Dilihat dari gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa kawasan budidaya didominasi untuk peruntukkan lahan pertanian (kebun, tegalan da lahan kosong) sebesar 49,9% dari total luas wilayah Kota Pontianak, diikuti untuk peruntukkan perumahan dan permukiman yang mencapai 34,2%. Sisanya 15,9% terbagi untuk peruntukkan fasilitas perkantoran, kesehatan, pendidikan, kesenian dan olahraga, rumah ibadah, perdagangan dan jasa, industry dan pergudangan, dan sarana dan prasarana perkotaan.

2.2 KEPENDUDUKAN KOTA PONTIANAK

2.2.1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan yang cukup signifikan, dimana pada tahun 1990 jumlah penduduk keseluruhan mencapai 431.328 jiwa, dalam kurun waktu 10 tahun dari tahun 2000 meningkat menjadi 464.534 jiwa atau dengan pertumbuhan sebesar 0,7 %, sedangkan pada tahun 2011 jumlah penduduk keseluruhan mencapai 565.856 jiwa atau mengalami pertumbuhan sebesar 1,96% sedangkan sampai dengan tahun 2014 jika dibandingkan dengan tahun 2012 jumlah penduduk mencapai 598.097 jiwa. Dari jumlah penduduk keseluruhan tersebut dalam periode 5 (lima) tahun antara tahun 2009-2014 pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak mencapai

1,77 %, dimana pertumbuhan penduduk laki-laki sebesar 1,68 % dan pertumbuhan penduduk perempuan sebesar 1,77 %..

Tabel 2.5 Jumlah Penduduk Kota Pontianak Tahun 2009-2014

Kecamatan	Jumlah Penduduk (orang)				Laju Pertumbuhan Penduduk Pertahun (%)	
	1990	2000	2010	2014	1990-2000	2000-2010
Pontianak Selatan	80.498	78.232	81.821	87.955	-0,3	0,4
Pontianak Tenggara	27.674	35.812	44.856	48.646	2,6	2,3
Pontianak Timur	48.758	60.895	82.370	88.761	2,2	3,1
Pontianak Barat	106.259	121.594	123.029	133.239	1,4	0,1
Pontianak Kota	80.893	72.682	110.111	118.274	-1,1	4,2
Pontianak Utara	87.246	95.319	112.577	121.222	0,9	1,7
Kota Pontianak	431.328	464.534	554.764	598.097	0,7	1,8

Sumber/ Source : Hasil Sensus Penduduk 1990, 2000, 2010

Tingkat kepadatan penduduk di Kota Pontianak tahun 2013 sekitar 5.464 jiwa/Km². Jika dibandingkan dengan tahun 2013 kepadatan penduduk 5.438 jiwa/Km². Kecamatan dengan tingkat kepadatan paling tinggi adalah Kecamatan Pontianak Timur yaitu sebesar 10.109 jiwa/Km² dengan total penduduk keseluruhan mencapai 88.761 jiwa atau 14,84 % dari total penduduk Kota Pontianak. Sedangkan kecamatan yang kepadatannya paling rendah adalah Kecamatan Pontianak Utara yaitu 3.257 jiwa/Km² dengan total penduduk sebesar 121.222 jiwa (20,27%).

Tabel 2.6 Kepadatan Penduduk Kota Pontianak Per Kecamatan Tahun 2014

Kecamatan	Luas		Penduduk (orang)		Kepadatan Penduduk (orang/km ²)
	km ²	%	Jumlah	%	
Pontianak Selatan	15,14	14,04	87.955	14,71	5.809
Pontianak Tenggara	14,22	13,19	48.646	8,13	3.420
Pontianak Timur	8,78	8,14	88.761	14,84	10.109
Pontianak Barat	16,47	15,28	133.239	22,28	8.809
Pontianak Kota	15,98	14,82	118.274	19,78	7.023
Pontianak Utara	37,22	34,52	121.222	20,27	3.257
Kota Pontianak	107,81	100,00	598.097	100,00	5.464

Sumber/Source: Diolah dari Proyeksi Penduduk berdasarkan SP 2010

Berdasarkan kelompok umur jumlah penduduk di Kota Pontianak pada tahun 2014 terbesar berada pada kelompok umur 20 – 24 tahun yaitu mencapai 63.189 jiwa, hal ini mengartikan bahwa sebagian besar penduduk di Kota Pontianak didominasi pada kelompok umur produktif atau usia muda.

Sedangkan kelompok umur yang paling sedikit adalah penduduk yang berumur 75 tahun ke atas dengan jumlah 6.968 jiwa.

Tabel 2.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2009 – 2014

Kelompok Umur	Penduduk (orang)		
	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
0 - 4	29.045	27.792	56.837
5 - 9	26.234	24.879	51.113
10 - 14	25.047	24.440	49.487
15 - 19	28.422	30.092	58.514
20 - 24	30.775	32.414	63.189
25 - 29	26.592	27.026	53.618
30 - 34	24.421	24.705	49.126
35 - 39	23.195	23.346	46.541
40 - 44	21.013	20.111	41.124
45 - 49	17.875	17.234	35.109
50 - 54	14.383	14.187	28.570
55 - 59	11.471	11.538	23.009
60 - 64	8.270	7.928	16.198
65 - 69	5.472	5.714	11.186
70 - 74	3.542	3.966	7.508
75 +	2.932	4.036	6.968
2014	298.689	299.408	598.097
2013	293.017	294.152	587.169
2012	288.368	288.946	577.314
2011	283.529	282.327	565.856
2010	275.706	274.591	550.297
2009	263.910	263.192	527.102

Sumber/Source: Proyeksi SP 2010

Jika dilihat dari jumlah dan persentase penduduk miskin Kota Pontianak dari tahun 2006 – 2014, jumlah penduduk miskin Kota Pontianak memuncak pada tahun 2008 dengan jumlah 52.800 orang atau sekitar 9,29 % dari jumlah penduduk Kota Pontianak. Kemudian terus menurun di tahun – tahun berikutnya. Jumlah penduduk miskin Kota Pontianak dari tahun 2006 – 2014 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kota Pontianak

Tahun	Garis Kemiskinan (Rp/Kap/bulan)	Penduduk Miskin	
		Jumlah (000)	Persentase
2006	158.130	36,50	7,15
2007	169.342	37,70	6,77
2008	193.984	52,80	9,29
2009	218.802	36,56	6,38
2010	242.772	36,60	6,62
2011	253.357	34,39	6,15
2012	310.707	32,53	5,77
2013	341.422	32,80	5,56
2014	-	30,75	5,13

Sumber/Source : BPS Kota Pontianak

2.3. FASILITAS UMUM KOTA PONTIANAK

2.3.1. Fasilitas Pendidikan

Fasilitas pendidikan di Kota Pontianak mencakup berbagai jenjang pendidikan, dari TK, SD, SMP, SMA, Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang tersebar di Kota Pontianak. Selain fasilitas pendidikan itu bahkan ada pula lembaga-lembaga pendidikan kursus sebagai fasilitas pendidikan untuk mengajarkan keterampilan dan pengetahuan. Fasilitas pendidikan di Kota Pontianak terdiri dari 123 TK, 194 SD/Madrasah Ibtidaiyah, 110 SMP/Madrasah Tsanawiyah, 62 SMA/Madrasah Aliyah, 29 SMK dan 39 Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta yang tersebar di seluruh Kota Pontianak. Dengan fasilitas-fasilitas pendidikan yang memadai bahkan sampai tingkat perguruan tinggi, Kota Pontianak merupakan kota tujuan arus urbanisasi anak-anak daerah yang ingin bekerja dan mengadu nasib atau yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Jumlah sekolah yang berada di Kota Pontianak sebagai sarana dan prasarana pendidikan, dapat dilihat dari tabel-tabel berikut.

Tabel 2.9 Jumlah TK dan Jumlah Siswa di Kota Pontianak

NO	WILAYAH	JUMLAH TK		JUMLAH TK	SISWA		JUMLAH SISWA
		NEGERI	SWASTA		KEL A	KEL B	
I	Kecamatan Pontianak Selatan						
1	Kel. Benua Melayu Laut	0	2	2	0	0	0
2	Kel. Benua Melayu Darat	0	5	5	187	273	460
3	Kel. Parit Tokaya	0	4	4	72	113	185
4	Kel. Akcaya	1	7	8	246	460	706
5	Kel. Kota Baru	0	1	1	16	62	78
	JUMLAH	1	19	20	521	908	1429
II	Kecamatan Pontianak Timur						
1	Kel. Parit Mayor	0	1	1	0	0	0
2	Kel. Banjar Serasan	0	1	1	25	42	67
3	Kel. Saigon	0	3	3	73	199	272
4	Kel. Tanjung Hulu	0	3	3	26	52	78
5	Kel. Tanjung Hilir	0	0	0	0	0	0
6	Kel. Dalam Bugis	1	1	2	0	0	0
7	Kel. Tambelan Sampit	0	1	1	0	34	34
	JUMLAH	1	10	11	124	327	451
III	Kecamatan Pontianak Barat						
1	Kel. Pal Lima	1	1	2	24	89	113
2	Kel. Sungai Jawi Dalam	0	5	5	24	131	155
3	Kel. Sungai Jawi Luar	1	8	9	69	315	384
4	Kel. Sungai Beliang	0	7	7	85	257	342
	JUMLAH	2	21	23	202	792	994
IV	Kecamatan Pontianak Utara						
1	Kel. Siantan Hulu	0	6	6	33	68	101
2	Kel. Siantan Tengah	0	4	4	59	258	317
3	Kel. Siantan Hilir	0	5	5	43	182	225
4	Kel. Batu Layang	1	1	2	19	51	70
	JUMLAH	1	16	17	154	559	713
V	Kecamatan Pontianak Kota						
1	Kel. Sungai Bangkong	0	24	24	318	734	1052
2	Kel. Darat Sekip	0	4	4	204	299	503
3	Kel. Tengah	0	3	3	57	108	165
4	Kel. Mariana	0	2	2	18	57	75
5	Kel. Sungai Jawi	0	2	2	21	40	61
	JUMLAH	0	35	35	618	1238	1856
VI	Kecamatan Pontianak Tenggara						
1	Kel. Bansir Laut	0	5	5	183	301	484
2	Kel. Bansir Darat	0	3	3	0	41	41
3	Kel. Bangka Belitung Laut	0	4	4	106	226	332
4	Kel. Bangka Belitung Darat	0	5	5	0	0	0
	JUMLAH	0	17	17	289	568	857
	JUMLAH TOTAL	5	118	123	1908	4392	6300

Sumber/source : <http://www.schoolmap.dindikptk.net/sekolah.html>

Tabel 2.10 Jumlah SD/MI dan Jumlah Siswa di Kota Pontianak

NO	WILAYAH	JUMLAH SD/MI		JUMLAH SD/MI	SISWA						JUMLAH SISWA
		NEGERI	SWASTA		KLS 1	KLS 2	KLS 3	KLS 4	KLS 5	KLS 6	
I	Kecamatan Pontianak Selatan										
1	Kel. Benua Melayu Laut	1	2	3	184	189	200	207	220	222	1222
2	Kel. Benua Melayu Darat	5	3	8	346	374	406	448	420	386	2380
3	Kel. Parit Tokaya	4	6	10	461	423	469	437	400	389	2579
4	Kel. Akcaya	4	2	6	654	628	654	638	551	588	3713
5	Kel. Kota Baru	1	0	1	71	65	74	71	75	66	422
	JUMLAH	15	13	28	1716	1679	1803	1801	1666	1651	10316
II	Kecamatan Pontianak Timur										
1	Kel. Parit Mayor	1	0	1	88	90	83	77	75	80	493
2	Kel. Banjar Serasan	3	0	3	179	169	214	228	218	189	1197
3	Kel. Saigon	2	2	4	265	250	250	273	255	270	1563
4	Kel. Tanjung Hulu	4	1	5	443	427	424	279	223	230	2026
5	Kel. Tanjung Hilir	4	1	5	182	179	203	169	210	168	1111
6	Kel. Dalam Bugis	5	1	6	312	327	324	307	311	270	1851
7	Kel. Tambelan Sampit	3	2	5	130	124	128	93	101	94	670
	JUMLAH	22	7	29	1599	1566	1626	1426	1393	1301	8911
III	Kecamatan Pontianak Barat										
1	Kel. Pal Lima	2	2	4	278	219	210	199	165	161	1232
2	Kel. Sungai Jawi Dalam	6	1	7	598	576	639	686	655	573	3727
3	Kel. Sungai Jawi Luar	6	3	9	525	525	526	564	570	543	3253
4	Kel. Sungai Beliong	6	4	10	869	803	810	839	794	767	4882
	JUMLAH	20	10	30	2270	2123	2185	2288	2184	2044	13094
IV	Kecamatan Pontianak Utara										
1	Kel. Siantan Hulu	12	2	14	870	815	865	917	891	737	5095
2	Kel. Siantan Tengah	4	8	12	536	525	506	515	484	415	2981
3	Kel. Siantan Hilir	11	4	15	810	752	756	789	614	592	4313
4	Kel. Batu Layang	4	2	6	461	435	448	478	438	362	2622
	JUMLAH	31	16	47	2677	2527	2575	2699	2427	2106	15011
V	Kecamatan Pontianak Kota										
1	Kel. Sungai Bangkong	10	10	20	1559	1397	1477	1399	1432	1453	8717
2	Kel. Darat Sekip	0	4	4	650	648	690	591	632	621	3832
3	Kel. Tengah	3	1	4	203	193	192	208	216	197	1209
4	Kel. Mariana	1	2	3	79	84	83	83	86	79	494
5	Kel. Sungai Jawi	5	1	6	224	171	213	237	227	259	1331
	JUMLAH	19	18	37	2715	2493	2655	2518	2593	2609	15583
VI	Kecamatan Pontianak Tenggara										
1	Kel. Bansir Laut	2	5	7	134	146	139	157	132	148	856
2	Kel. Bansir Darat	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0
3	Kel. Bangka Belitung Laut	4	1	5	301	291	285	288	271	245	1681
4	Kel. Bangka Belitung Darat	3	6	9	248	275	301	275	261	277	1637
	JUMLAH	9	14	23	683	712	725	720	664	670	4174
	JUMLAH TOTAL	116	78	194	11660	11100	11569	11452	10927	10381	67089

Sumber/source : <http://www.schoolmap.dindikptk.net/sekolah.html>

Tabel 2.11 Jumlah SMP/MTs dan Jumlah Siswa di Kota Pontianak

NO	WILAYAH	JUMLAH SMP/MTs		JUMLAH SMP/MTs	SISWA			JUMLAH SISWA
		NEGERI	SWASTA		KELAS 7	KELAS 8	KELAS 9	
I	Kecamatan Pontianak Selatan							
1	Kel. Benua Melayu Laut	0	0	0	0	0	0	0
2	Kel. Benua Melayu Darat	1	3	4	299	289	311	899
3	Kel. Parit Tokaya	5	2	7	777	880	876	2533
4	Kel. Akcaya	1	5	6	923	844	740	2507
5	Kel. Kota Baru	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	7	10	17	1999	2013	1927	5939
II	Kecamatan Pontianak Timur							
1	Kel. Parit Mayor	0	0	0	0	0	0	0
2	Kel. Banjar Serasan	0	1	1	0	0	0	0
3	Kel. Saigon	2	2	4	725	620	656	2001
4	Kel. Tanjung Hulu	1	2	3	85	55	66	206
5	Kel. Tanjung Hilir	0	0	0	0	0	0	0
6	Kel. Dalam Bugis	1	1	2	275	296	294	865
7	Kel. Tambelan Sampit	0	1	1	167	113	59	339
	JUMLAH	4	7	11	1252	1084	1075	3411
III	Kecamatan Pontianak Barat							
1	Kel. Pal Lima	1	4	5	315	297	282	894
2	Kel. Sungai Jawi Dalam	2	2	4	594	510	533	1637
3	Kel. Sungai Jawi Luar	1	5	6	392	328	296	1016
4	Kel. Sungai Beliang	1	6	7	743	683	649	2075
	JUMLAH	5	17	22	2044	1818	1760	5622
IV	Kecamatan Pontianak Utara							
1	Kel. Siantan Hulu	2	5	7	375	333	301	1009
2	Kel. Siantan Tengah	0	7	7	569	537	468	1574
3	Kel. Siantan Hilir	2	3	5	645	630	608	1883
4	Kel. Batu Layang	1	3	4	362	149	159	670
	JUMLAH	5	18	23	1951	1649	1536	5136
V	Kecamatan Pontianak Kota							
1	Kel. Sungai Bangkong	3	9	12	1247	996	874	3117
2	Kel. Darat Sekip	0	2	2	314	212	226	752
3	Kel. Tengah	2	1	3	427	480	441	1348
4	Kel. Mariana	0	2	2	32	35	33	100
5	Kel. Sungai Jawi	1	5	6	462	407	352	1221
	JUMLAH	6	19	25	2482	2130	1926	6538
VI	Kecamatan Pontianak Tenggara							
1	Kel. Bansir Laut	0	6	6	237	225	165	627
2	Kel. Bansir Darat	0	0	0	0	0	0	0
3	Kel. Bangka Belitung Laut	0	1	1	100	60	59	219
4	Kel. Bangka Belitung Darat	1	4	5	544	455	462	1461
	JUMLAH	1	11	12	881	740	686	2307
	JUMLAH TOTAL	28	82	110	10609	9434	8910	28953

Sumber/source : <http://www.schoolmap.dindikptk.net/sekolah.html>

Tabel 2.12 Jumlah SMA/MA dan Jumlah Siswa di Kota Pontianak

NO	WILAYAH	JUMLAH SMA/MA		JUMLAH SMA/MA	SISWA			JUMLAH SISWA
		NEGERI	SWASTA		KELAS 10	KELAS 11	KELAS 12	
I	Kecamatan Pontianak Selatan							
1	Kel. Benua Melayu Laut	0	0	0	0	0	0	0
2	Kel. Benua Melayu Darat	1	3	4	445	342	313	1100
3	Kel. Parit Tokaya	1	1	2	483	411	410	1304
4	Kel. Akcaya	3	4	7	1431	1420	1358	4209
5	Kel. Kota Baru	0	1	1	37	51	54	142
	JUMLAH	5	9	14	2396	2224	2135	6755
II	Kecamatan Pontianak Timur							
1	Kel. Parit Mayor	0	0	0	0	0	0	0
2	Kel. Banjar Serasan	0	1	1	0	0	0	0
3	Kel. Saigon	2	0	2	433	345	350	1128
4	Kel. Tanjung Hulu	0	0	0	0	0	0	0
5	Kel. Tanjung Hilir	0	0	0	0	0	0	0
6	Kel. Dalam Bugis	0	1	1	0	0	0	0
7	Kel. Tambelan Sampit	0	1	1	0	0	0	0
	JUMLAH	2	3	5	433	345	350	1128
III	Kecamatan Pontianak Barat							
1	Kel. Pal Lima	0	2	2	13	13	13	39
2	Kel. Sungai Jawi Dalam	1	2	3	283	223	194	700
3	Kel. Sungai Jawi Luar	1	3	4	364	289	226	879
4	Kel. Sungai Beliuang	0	2	2	111	146	122	379
	JUMLAH	2	9	11	771	671	555	1997
IV	Kecamatan Pontianak Utara							
1	Kel. Siantan Hulu	0	1	1	17	25	21	63
2	Kel. Siantan Tengah	0	5	5	333	373	298	1004
3	Kel. Siantan Hilir	0	1	1	33	54	44	131
4	Kel. Batu Layang	1	1	2	38	31	22	91
	JUMLAH	1	8	9	421	483	385	1289
V	Kecamatan Pontianak Kota							
1	Kel. Sungai Bangkong	0	7	7	120	112	104	336
2	Kel. Darat Sekip	0	1	1	393	305	281	979
3	Kel. Tengah	0	0	0	0	0	0	0
4	Kel. Mariana	0	1	1	0	0	0	0
5	Kel. Sungai Jawi	2	4	6	842	715	738	2295
	JUMLAH	2	13	15	1355	1132	1123	3610
VI	Kecamatan Pontianak Tenggara							
1	Kel. Bansir Laut	0	3	3	14	13	13	40
2	Kel. Bansir Darat	0	1	1	279	277	295	851
3	Kel. Bangka Belitung Laut	0	1	1	50	50	58	158
4	Kel. Bangka Belitung Darat	0	3	3	356	327	322	1005
	JUMLAH	0	8	8	699	667	688	2054
	JUMLAH TOTAL	12	50	62	6075	5522	5236	16833

Sumber/source : <http://www.schoolmap.dindikptk.net/sekolah.html>

Tabel 2.13 Jumlah SMK dan Jumlah Siswa di Kota Pontianak

NO	WILAYAH	JUMLAH SMK		JLH SMK	SISWA			JUMLAH SISWA
		NEGERI	SWASTA		KELAS 10	KELAS 11	KELAS 12	
I	Kecamatan Pontianak Selatan							
1	Kel. Benua Melayu Laut	0	0	0	0	0	0	0
2	Kel. Benua Melayu Darat	1	1	2	384	400	245	1029
3	Kel. Parit Tokaya	0	1	1	0	0	0	0
4	Kel. Akcaya	2	2	4	558	540	508	1606
5	Kel. Kota Baru	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	3	4	7	942	940	753	2635
II	Kecamatan Pontianak Timur							
1	Kel. Parit Mayor	0	0	0	0	0	0	0
2	Kel. Banjar Serasan	0	0	0	0	0	0	0
3	Kel. Saigon	1	1	2	452	374	342	1168
4	Kel. Tanjung Hulu	0	0	0	0	0	0	0
5	Kel. Tanjung Hilir	0	0	0	0	0	0	0
6	Kel. Dalam Bugis	0	1	1	0	0	0	0
7	Kel. Tambelan Sampit	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	1	2	3	452	374	342	1168
III	Kecamatan Pontianak Barat							
1	Kel. Pal Lima	1	0	1	51	35	0	86
2	Kel. Sungai Jawi Dalam	0	1	1	12	15	22	49
3	Kel. Sungai Jawi Luar	0	0	0	0	0	0	0
4	Kel. Sungai Beliuang	1	3	4	799	687	702	2188
	JUMLAH	2	4	6	862	737	724	2323
IV	Kecamatan Pontianak Utara							
1	Kel. Siantan Hulu	1	0	1	0	0	0	0
2	Kel. Siantan Tengah	1	1	2	151	137	129	417
3	Kel. Siantan Hilir	1	2	3	81	68	55	204
4	Kel. Batu Layang	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	3	3	6	232	205	184	621
V	Kecamatan Pontianak Kota							
1	Kel. Sungai Bangkong	1	3	4	482	409	353	1244
2	Kel. Darat Sekip	0	0	0	0	0	0	0
3	Kel. Tengah	0	0	0	0	0	0	0
4	Kel. Mariana	0	0	0	0	0	0	0
5	Kel. Sungai Jawi	0	1	1	283	166	145	594
	JUMLAH	1	4	5	765	575	498	1838
VI	Kecamatan Pontianak Tenggara							
1	Kel. Bansir Laut	0	0	0	0	0	0	0
2	Kel. Bansir Darat	0	1	1	0	0	0	0
3	Kel. Bangka Belitung Laut	0	0	0	0	0	0	0
4	Kel. Bangka Belitung Darat	0	1	1	0	0	0	0
	JUMLAH	0	2	2	0	0	0	0
	JUMLAH TOTAL	10	19	29	3253	2831	2501	8585

Sumber/source : <http://www.schoolmap.dindikptk.net/sekolah.html>

Tabel 2.14 Daftar Nama Universitas/Akademi/Sekolah Tinggi di Kota Pontianak

No	Nama Universitas	Status
1	Universitas Tanjungpura Pontianak	Negeri
2	Universitas Panca Bhakti Pontianak	Swasta
3	Universitas Muhammadiyah Pontianak	Swasta
4	Akademi Bahasa Asing (ABA) Pontianak	Swasta
5	ABA Widya Dharma Pontianak	Swasta
6	Akademi Farmasi Yarsi Pontianak	Swasta
7	Akademi Keuangan Graha Arta Khatulistiwa Pontianak	Swasta
8	Akademi Manajemen Perusahaan Panca Bhakti Pontianak	Swasta
9	Akademi Perpajakan Pancasila Bhakti Pontianak	Swasta
10	Akbid Aisyiyah Pontianak	Swasta
11	Akbid Panca Bhakti Pontianak	Swasta
12	Akbid St. Benedicta Pontianak	Swasta
13	Akper Dharma Insan Pontianak	Swasta
14	AMIK BSI Pontianak	Swasta
15	AMIK Panca Bhakti Pontianak	Swasta
16	ASM Widya Dharma Pontianak	Swasta
17	ASMI Pontianak	Swasta
18	Politeknik Negeri Pontianak	Negeri
19	Poltekkes Kemenkes Pontianak	Negeri
20	Politeknik Putra Bangsa Pontianak	Swasta
21	Politeknik Tonggak Equator	Swasta
22	STAIN Pontianak	Negeri
23	STI Syari'ah Pontianak	Swasta
24	STIE Boedi Oetomo Pontianak	Swasta
25	STIE Indonesia Pontianak	Swasta
26	STIE Pontianak	Swasta
27	STIE Widya Dharma	Swasta
29	STIKES Yarsi Pontianak	Swasta
30	STIPER Muhammadiyah Pontianak	Swasta
31	STKIP PGRI Pontianak	Swasta
32	STMIK Pontianak	Swasta
33	STMIK Widya Dharma	Swasta
34	ST – Pastoral St. Agustinus Pontianak	Swasta
35	ST – Pertanian Panca Bhakti Pontianak	Swasta
36	ST – Teologi Ekklesia Pontianak	Swasta
37	ST – Teologi Injil Indonesia Pontianak	Swasta
38	ST – Teologi Teologi Pontianak	Swasta
39	ST – Theologia Kalimantan Pontianak	Swasta

Sumber/source : <http://www.universitymetric.com/>

Tujuan utama dari penyelenggaraan pendidikan di Kota Pontianak adalah menciptakan sumber daya manusia yang berpengetahuan dan berkecakupan yang siap berkompetisi dalam pasar tenaga kerja. Untuk menuju ke arah itu arah pembangunan pendidikan di Kota Pontianak adalah menyediakan

sarana dan prasana pendidikan yang baik, membuka akses seluas-luasnya bagi masyarakat untuk mengecap pendidikan, peningkatan profesionalisme dan pengetahuan pengajar serta mengembangkan substansi pembelajaran sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja.

Untuk mengetahui sejauh mana kinerja yang telah dicapai dalam penyelenggaraan urusan pendidikan di Kota Pontianak, tabel di bawah ini merangkum capaian kinerja pelaksanaan urusan pendidikan di kota Pontianak dalam periode 2010-2013. Secara umum capaian kinerja yang telah diraih adalah memuaskan, bahkan beberap indikator melebihi ekspektasi.

Tabel 2.15 Tingkat Capaian Kinerja Penyelenggara Urusan Wajib Pendidikan Kota Pontianak Tahun 2010 – 2013

No.	Indikator Kinerja Kunci	Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	28.98	20.71	26.72	37.52
2	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	92.01	93.58	99.83	99.83
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/Paket A	142.94	119.14	116.09	114.47
4	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	120.45	101.11	107.80	106,49
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	107.38	99.53	104.61	111.12
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	77.24	69.73	97.43	103,38
7	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	139.37	98.00	102.19	101,00
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	110.25	65.50	90.32	94,04
9	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0.09	0.10	0.06	0,13
10	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0.26	0.29	0.14	0,08
11	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	1.46	1.44	1.14	0,12
12	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100.00	100.00	100.00	100.00
13	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	89.26	99.05	99.05	99,79
14	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	99.15	98.23	99.41	99,90
15	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	98.88	106.09	96.68	104,85
16	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	149.81	126.39	114.83	119,84
17	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	47.92	64.05	66.33	69.81
18	Guru yang sudah sertifikasi	14.55	20.61	40.98	58.14

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak, 2014

APK di tingkat SD/MI tahun 2010 merupakan yang tertinggi yaitu 142,94 dibandingkan dengan tahun 2009 sebesar 131,64% yang artinya dalam jumlah siswa SD/MI yang ada di Kota Pontianak terdapat siswa yang usianya di luar usia SD/MI sehingga APK melebihi 100%. APK tingkat SLTP/MTs

tahun 2012 sebesar 104,61% meningkat dibandingkan dengan tahun 2011 sebesar 99,53%. Sedangkan APK tingkat SMU/SMK/MA tahun 2009 sebesar 97,13% jika dibandingkan dengan tahun 2012 terjadinya peningkatan sebesar 102,19%.

Angka melek huruf merupakan penduduk usia 15 tahun keatas yang bisa membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek huruf digunakan untuk mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf. Di Kota Pontianak dimana jumlah penduduk yang tidak pernah bersekolah atau tidak tamat SD masih cukup tinggi. Tahun 2013 angka melek huruf di Kota Pontianak diperkirakan mencapai angka 96,54% dibandingkan realisasi di tahun 2012 mencapai 95,73%.

Terdapat sekitar 3,46% warga yang buta huruf di Kota Pontianak disebabkan oleh kriteria pengukuran yang digunakan BPS adalah setiap warga usia 15 tahun ke atas bukan hanya pada rentang usia sekolah, sehingga diduga masih ada penduduk usia lanjut yang buta huruf masuk dalam pencacahan tersebut. Apabila didasarkan atas usia wajib sekolah, dapat dipastikan tidak terdapat warga Kota Pontianak yang buta huruf.

Tabel 2.16 Angka Melek Huruf di Kota Pontianak Tahun 2009-2013

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
- Angka Melek Huruf (%)	94,08	94,97	95,02	95,73	96,07
<i>Sumber : BPS Kota Pontianak, 2014</i>					

Rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang diformulasikan oleh UNDP untuk menilai keberhasilan pembangunan. Program Wajib Belajar 9 tahun telah dicanangkan pemerintah sejak tahun 1994 melalui Inpres I tahun 1994. Rata-rata lama sekolah mengindikasikan makin tinggi pendidikan yang dicapai oleh masyarakat di suatu daerah.

Berdasarkan tabel dapat dilihat bahwa angka rata-rata lama sekolah untuk kota Pontianak, kurun waktu 2009 ke 2012 mengalami peningkatan dari 9,20 ke 9,85 dan diprediksikan akan meningkat menjadi 9,87 di tahun 2013. Hal ini memperlihatkan bahwa rata-rata penduduk Kota Pontianak di tahun 2012 bersekolah selama 9,36 tahun, atau setingkat kelas 3 SMP. Kondisi ini berarti Pemerintah Kota Pontianak secara umum telah berhasil mencapai tujuan Program Wajib Belajar 9 Tahun, akan tetapi perlu lebih banyak usaha untuk mencapai target berikutnya yaitu Wajib Belajar 12 tahun.

Tabel 2.17 Rata-rata Lama Sekolah di Kota Pontianak Tahun 2009-2013

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013
Rata-Rata Lama sekolah (tahun)	9.20	9.36	9,45	9,85	9,86

Sumber : BPS Kota Pontianak, 2014

Rasio murid terhadap ruang kelas untuk semua jenjang pendidikan tahun 2009 rata-rata sebesar 40,33 murid per ruang kelas. Jika dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi penurunan sebesar 31,66 murid per ruang kelas. Berdasarkan jenjang pendidikan selama tahun 2009-2014 yang dimulai dari jenjang pendidikan tingkat SD/MI dengan rasio murid terhadap ruang kelas pada tahun 2009 sebanyak 22 murid per ruang kelas dibandingkan dengan tahun 2013 terjadi peningkatan sebanyak 31 murid per ruang kelas. Rasio murid terhadap ruang kelas untuk tingkat SLTP/MTs pada tahun 2009 sebanyak 35 murid per ruang kelas dari jika dibandingkan pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 32 murid per ruang kelas. Demikian pula rasio murid terhadap ruang kelas untuk tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 34 murid pada tahun 2009, dibandingkan tahun 2010 terjadi peningkatan 59 murid per ruang kelas.

**Tabel 2.18 Rasio Murid terhadap Ruang Kelas di Kota Pontianak
Tahun 2009 – 2013**

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI	22	36	33	26	31
2	SLTP/MTs	35	41	36	37	32
3	SMU/SMK/MA	34	59	30	32	32
	Rata-rata	40,33	45,33	33,00	31,66	31,66

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak, 2014

**Tabel 2.19 Rasio Guru Terhadap Sekolah di Kota Pontianak
Tahun 2009 – 2013**

No.	Tingkat Pendidikan	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	SD/MI	20,89	20,81	20,11	14,85	23,30
2	SLTP/MTs	24,31	22,97	25,49	13,77	15,12
3	SMU/SMK/MA	23,63	24,50	30,88	29,23	19,08
	Rata-rata	22,94	22,76	25,49	19,28	19,16

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak, 2014

Melihat perkembangan rasio guru terhadap sekolah untuk semua jenjang pendidikan tahun 2009 dengan rata-rata sebesar 22,94 guru per sekolah di bandingkan dengan tahun 2013 terjadi penurunan sebesar 19,16 guru per sekolah. Jika dilihat secara jenjang pendidikan mulai dari tingkat pendidikan sekolah dasar SD/MI tahun 2009 sebanyak 20,89 guru per sekolah namun jika dibandingkan dengan tahun 2013 mengalami peningkatan sebanyak 23,30 guru persekolah. Rasio guru terhadap sekolah untuk tingkat SLTP/MTs dengan rata-rata sebanyak 25,49 guru per sekolah pada tahun 2011 jika dibandingkan dengan tahun 2012 terjadi penurunan yang cukup signifikan yaitu sebanyak 13,77 guru per sekolah. Sedangkan untuk rasio guru terhadap sekolah pada tingkat SMA/SMK/MA sebanyak 23,63 guru per sekolah pada tahun 2009 terjadi peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2012 sebanyak 29,23 guru per sekolah.

**Tabel 2.20 Perkembangan Jumlah Guru di Kota Pontianak
Tahun 2009 – 2013**

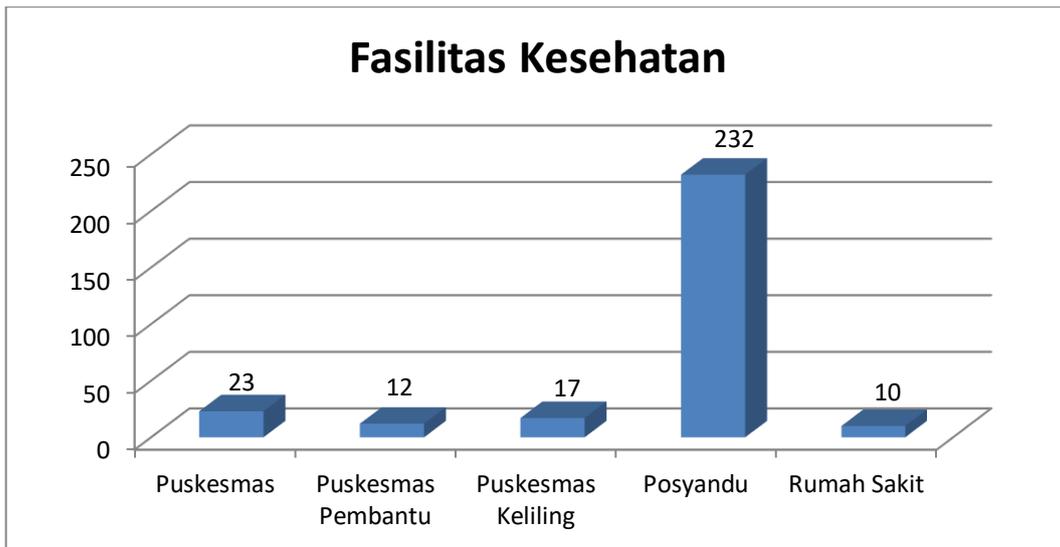
No.	Jenjang	Tahun				
		2009	2010	2011	2012	2013
1	Guru TK	15	130	106	110	868
2	Guru SD	2.273	2.383	2.271	2.256	3.697
3	Guru SLTP	1.016	1.057	996	1.012	2.246
4	Guru SMU/SMK/MA	927	950	892	888	2.429
	Jumlah	4.231	4.520	4.265	4.266	9.240

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak, 2014

Dari perkembangan selama tahun 2009-2013 menggambarkan kebutuhan guru di Kota Pontianak yang terus berkembang sesuai dengan jenjang pendidikan, terutama untuk guru pada bidang studi dan guru sekolah kejuruan. Kekurangan guru disebabkan juga oleh adanya moratorium pemerintah pusat terhadap penerimaan guru baru dan adanya guru-guru yang pensiun.

2.3.2. Fasilitas Kesehatan

Fasilitas kesehatan yang tersebar di Kota Pontianak pada tahun 2011 terdiri atas rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, puskesmas keliling, dan posyandu.



Gambar 2.5 Ketersediaan Fasilitas Kesehatan di Kota Pontianak 2011

2.4. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.4.1 Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Perkembangan Perekonomian

Kondisi Perekonomian Kota Pontianak Tahun 2013 mengalami peningkatan dari Tahun 2012, terbentuk dari delapan sektor kegiatan ekonomi dari enam kecamatan, pertumbuhan ekonomi Tahun 2013 sebesar 6,04 %, dibandingkan pertumbuhan ekonomi Tahun 2012 sebesar 6,07 %. Seluruh sektor ekonomi menyumbangkan pertumbuhannya, diantara empat sektor yang mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak, sektor Pengangkutan dan Komunikasi mengalami pertumbuhan diatas rata-rata pertumbuhan, sektor lainnya yang mempunyai pengaruh tinggi terhadap PDRB yaitu sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran, sektor Bangunan dan sektor jasa-jasa.

Kinerja sektor Pengangkutan dan Komunikasi menjadi pendorong utama perekonomian Kota Pontianak dimana kontribusi sektor tersebut dalam pertumbuhan mencapai 1,42 % dari angka pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan sebesar 6,04 %. Selanjutnya sektor perdagangan, hotel dan restoran memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,28 %, serta sektor Bangunan memberikan kontribusi pada pertumbuhan sebesar 1,02 % dan sektor Jasa-jasa memberikan andil pertumbuhan sebesar 1,20 %. Keempat sektor tersebut berkontribusi sebesar 4,92 % terhadap total pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak sedangkan empat sektor lainnya rata-rata memberikan andil dibawah 0,05 % dan total keempat sektor tersebut menyumbang 1,12 % dalam pertumbuhan ekonomi Kota Pontianak.

B. Struktur Perekonomian Daerah

Kinerja perekonomian Kota Pontianak secara sektoral pada Tahun 2013 tumbuh sebesar 6,04% dan ditandai dengan peningkatan pada setiap sektornya, meskipun mengalami perlambatan sebesar 0,04 poin dibanding tahun 2012 yang tumbuh sebesar 6,07 %. Semua sektor ekonomi pada tahun 2013 mengalami pertumbuhan positif. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sector pengangkutan-komunikasi dengan pertumbuhan sebesar 8,71 %, diikuti oleh sektor Bangunan 5,95 %, sektor keuangan-persewaan-jasa perusahaan 5,68 %, sektor perdagangan-hotel-restoran sebesar 5,48 %, sektor jasa-jasa 5,28 %, , sektor Listrik dan air bersih 4,37 %, sektor Pertanian sebesar 4,01 % dan sektor industri pengolahan 3,74 %.

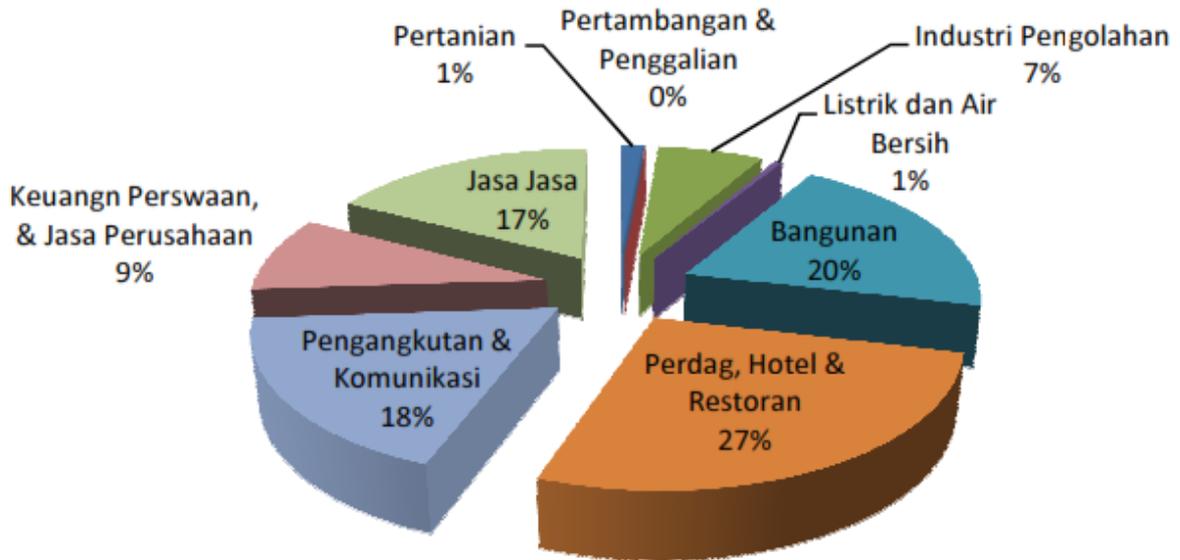
Peningkatan kinerja sektor Perdagangan Hotel dan Restoran pada 2013 antara lain diindikasikan dengan peningkatan volume bongkar melalui pelabuhan Kota Pontianak yang tercatat sebesar 1,41 juta ton atau meningkat 11,44 % dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 1,27 juta ton, demikian pula peningkatan penerimaan pajak restoran serta kecenderungan kenaikan rata-rata tingkat hunian hotel berbintang maupun non bintang semakin memperkuat sektor PHR pada perekonomian Kota Pontianak. Sementara dalam periode yang sama, sektor yang mengalami perlambatan pertumbuhan adalah sektor Industri Pengolahan meskipun pada tahun 2012 kinerja sektor ini menguat 0,21 poin dari tahun sebelumnya.

Pada 2013 antara lain diindikasikan dengan peningkatan volume bongkar melalui pelabuhan Kota Pontianak yang tercatat sebesar dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya atau penerimaan pajak restoran serta rata tingkat hunian hotel berbintang maupun non bintang semakin Sementara dalam periode yang sama. Prumbuhan adalah sektor Industri Pengolahan meskipun pada tahun 2012 kinerja sektor ini menguat 0,21 poin dari tahun sebelumnya.

Tabel 2.21 Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2010-2013

Sektor	2010	2011	2012	2013
1. Pertanian	1.46	1.45	1.44	1.42
2. Pertambangan & Penggalian	0.00	0.00	0.00	-
3. Industri Pengolahan	7.72	7.32	7.01	6.81
4. Listrik dan Air Bersih	0.52	0.50	0.49	0.48
5. Bangunan	19.54	19.54	19.80	19.98
6. Perdag, Hotel & Restoran	24.51	25.46	26.07	26.89
7. Pengangkutan & Komunikasi	18.12	18.36	18.47	18.32
8. Keuangn Perswaan, & Jasa Perusahaan	9.42	9.23	9.02	8.78
9. Jasa Jasa	18.71	18.14	17.70	17.31
PDRB	100.00	100.00	100.00	100.00

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2014



Gambar 2.6 Grafik Struktur Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2013

Struktur ekonomi Kota Pontianak Tahun 2013 didominasi oleh sektor tersier yaitu perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi terhadap perekonomian sebesar 26,89%, diikuti oleh sektor Bangunan 19,98%, sektor Jasa-jasa sebesar 17,31% serta sektor Pengangkutan dan Komunikasi sebesar 18,32%, keempat sektor tersebut memberikan kontribusi dalam perekonomian sebesar 82,50%, sementara empat sektor lainnya seperti sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan 8,78%, sektor Industri pengolahan 6,81%, sektor Pertanian 1,42% dan Sektor Listrik dan Air memberikan kontribusi sebesar 0,48%.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan pertumbuhan ekonomi selama empat tahun terakhir, dari tahun 2010 hingga 2013 menunjukkan trend peningkatan setiap tahunnya, ekonomi Kota Pontianak rata-rata tumbuh sebesar 6,07% per tahun, pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2013 yaitu sebesar 6,92%. Sedangkan pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009 yaitu sebesar 5,26%.

Selama periode 2010 – 2013 sektor ekonomi yang memberikan kontribusi pertumbuhan tertinggi di atas rata-rata pertumbuhan PDRB Kota Pontianak adalah Sektor jasa-jasa sebesar 6,07%, di tahun 2013 sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai pertumbuhan tertinggi sebesar 8,13%. Sektor ini tumbuh lebih tinggi dari sektor lainnya, sebagai konsekuensi tumbuhnya sektor Perdagangan, Hotel dan Restoran dan sektor Bangunan utamanya dalam penggunaan moda transportasi arus distribusi barang dan penduduk dalam melakukan aktivitas ekonomi, kunjungan wisatawan mancanegara dan domestik, serta peningkatan volume bongkar muat di pelabuhan Pontianak berpengaruh positif pada sektor pengangkutan dan komunikasi.

Tabel 2.22 Pertumbuhan Ekonomi Kota Pontianak Tahun 2010- 2013

Sektor	2009	2010	2011	2012	2013
1. Pertanian	4,57	4,32	4,65	4,73	4.90
2. Pertambangan & Penggalian	-	-	-	-	-
3. Industri Pengolahan	3,61	2,34	2,5	2,71	3.06
4. Listrik dan Air Bersih	6,41	4,28	4,52	4,5	7.83
5. Bangunan	10,79	5,27	5,81	6,46	7.65
6. Perdag, Hotel & Restoran	4,40	6,24	5,97	6,66	8.13
7. Pengangkutan & Kom	6,28	9,11	9,04	9,19	8.03
8. Keu. Prswaan, & Jasa Persh	3,49	5,55	5,64	6,03	6.91
9. Jasa Jasa	2,51	2,42	2,93	3,34	5.18
PDRB	5,26	5,39	5,88	6,07	6.92

Sumber: BPS Kota Pontianak, 2014

2.4.2 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Kebijakan dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Pontianak Tahun 2013-2033 sebagaimana telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah No. 2 Tahun 2013, disusun berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang bertujuan mewujudkan ruang wilayah yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan dan terciptanya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan SDM; dan terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang serta pengendalian program-program pembangunan kota dalam jangka panjang.

A. Struktur Ruang Kota

Secara garis besar, konsep pengembangan Kota Pontianak adalah Pengembangan Sistem Pelayanan Banyak Pusat. Kota Pontianak yang terdiri dari 6 Kecamatan terbagi dalam 3 wilayah yang dibatasi oleh Sungai Kapuas dan Sungai Landak, maka Kota Pontianak diarahkan mempunyai 1 pusat pelayan Kota dan yang mempunyai peran sebagai berikut:

1. Pusat Pelayanan Pasar Skala Regional dapat berupa pusat perbelanjaan dan pusat pertokoan dan atau
2. Pusat Pelayanan Pemerintahan baik pemerintahan kota maupun pemerintahan provinsi dan atau
3. Pusat Pelayanan Jasa Perbankan dan perhotelan serta jasa umum skala regional lainnya dan atau
4. Pusat Pelayanan Fasilitas Peribadatan dan olahraga skala regional.

Tabel 2.23 Rencana Alokasi Pemanfaatan Ruang Kota Pontianak Hingga Tahun 2033

I. Kawasan Lindung:

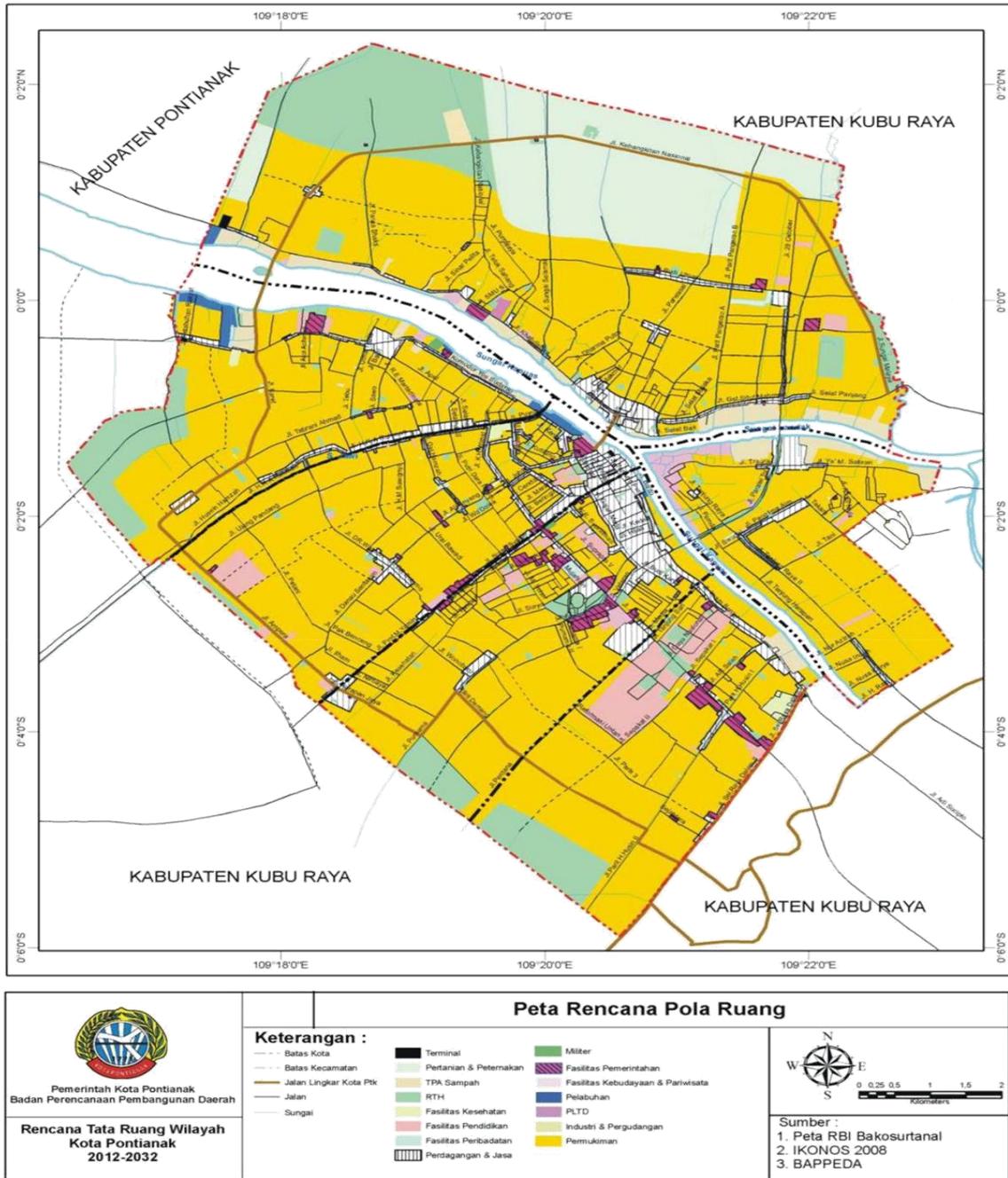
NO.	KAWASAN LINDUNG	LUAS (Ha)	Prosentase
1.	Kawasan Lindung Gambut	858,24	7,95
2	Sempadan Sungai (Sungai Kapuas, Sungai Landak dan Sungai Malaya)	53,10	0,49
JUMLAH		911,34	8,45

II. Kawasan Budidaya:

No	JENIS PEMANFAATAN RUANG	LUAS (Ha)		PROSENTASE
		EKSISTING	RENCANA	
		TAHUN 2013	TAHUN 2033	
1	Permukiman	3.685,72	4.358,00	40,42
2	Perdagangan dan Jasa	462,81	714,64	6,63
3	Perkantoran Pemerintahan dan Pelayanan umum	56,78	129,63	1,20
4	Industri dan Pergudangan	156,46	257,74	2,39
5	Pariwisata, Rekreasi dan Seni Budaya	10,41	67,88	0,63
6	Kawasan ruang terbuka non hijau;	0	276,8	*
7	Kawasan peruntukan ruang evakuasi bencana;	0	153,06	*
8	Kawasan peruntukan ruang bagi kegiatan sektor informal;	0	1,92	*
9	Kawasan peruntukan lainnya			
	a. Kawasan peruntukan pertanian dan peternakan	4.127,79	944,59	8,76
	- Pertanian Hortikultura	4.127,79	774,62	7,18
	- Peternakan	0	169,97	1,58
	b. Kawasan peruntukan pelayanan umum;	352,74	542,87	5,03
	- Fasilitas Kesehatan	22,69	34,71	0,32
	- Fasilitas Pendidikan	195,18	357,5	3,32
	- Fasilitas Peribadatan	27,23	40,85	0,38
	- Lapangan Olahraga	54,97	70,64	0,61
	- Pemakaman Umum	29,90	43,98	0,41
	c. Kawasan peruntukan prasarana kota	984,68	1.090,15	10,11
	- Jaringan jalan, Terminal, Dermaga, Pelabuhan	974,41	1.067,60	9,90
	- Pembangkit Listrik	6,05	6,05	0,06
	- Tempat Pengolahan Akhir Sampah	4,22	16,5	0,15
10	Taman	112,55	271,82	2,52
	- Taman RT	55,05	77,37	0,72
	- Taman RW	27,50	38,67	0,36
	- Taman Kelurahan	18,00	23,17	0,21
	- Taman Kecamatan	12,00	15,66	0,15
	- Taman Kota	-	116,95	1,08
11	Hutan Kota	231,70	251,55	2,33
12	Jalur Hijau	63,38	165,01	1,53
	- Jalur Hijau Sepanjang Parit Primer & Sekunder	10,74	35,81	0,33
	- Jalur Hijau Sempadan Jalan	14,95	49,83	0,46
	- Jalur Hijau di bawah SUTT	-	53,92	0,50
	- Kawasan Penyangga TPA Sampah	10,35	20,69	0,19
	- Kawasan Penyangga Pembangkit Listrik PLN	2,38	4,76	0,04

Keterangan : *) tidak dihitung %asinya karena penggunaan lahannya hanya bersifat fungsi tambahan dari guna lahan utamanya
Sumber : RTRW Kota Pontianak 2013-2033.

Sumber : RTRW Kota Pontianak 2013-2033.



Gambar 2.8 Peta Rencana Pola Ruang Kota Pontianak 2012-2033

3.1 KERANGKA STRATEGI KEBIJAKAN PENDIDIKAN DAERAH

Pendidikan merupakan langkah awal yang harus dilakukan sebuah negara, jika ingin maju di bidang pembangunan ekonomi. Tidak ada negara yang maju perekonomiannya hanya berdasarkan kekayaan alam. Negara harus berinvestasi pada manusia, karena manusia bisa selalu diperbarui (*renewed*). Pendidikan pertama yang harus dituntaskan oleh masyarakat Indonesia adalah pendidikan keaksaraan. Karena kesuksesan pembangunan di bidang pendidikan ternyata juga tergantung pada kemampuan membaca dan minat baca yang ada pada masyarakat. Minat baca yang rendah akan mempengaruhi kemampuan seseorang dan secara tidak langsung akan berakibat pada rendahnya daya saing dirinya dalam percaturan internasional. Namun sayangnya tingkat ekonomi yang rendah seringkali menjadi alasan lemahnya akses masyarakat pada pendidikan dan lemahnya daya beli buku sebagai penunjang pendidikan keaksaraan. Akibatnya, masih banyak masyarakat merasa asing dengan buku dan memiliki minat baca yang rendah. Kondisi ini merupakan salah satu dampak kemajuan teknologi.

Dewasa ini, telah terjadi perubahan signifikan dari budaya lisan menuju budaya elektronik seperti televisi dan radio, sebelum memasuki tahapan budaya tulis yang sempurna. Dengan kata lain, masyarakat telah langsung melompat dari tradisi mendongeng ke tradisi menonton sebelum terbiasa dengan tradisi membaca. Akibatnya, masih banyak masyarakat yang buta aksara, padahal kunci produktivitas untuk pembangunan ekonomi masyarakat terletak pada penciptaan nilai tambah yang bisa dilakukan jika masyarakat bebas buta aksara sehingga luas pengetahuannya.

Kemampuan membaca sangatlah penting. Sejak dulu sampai sekarang, para pemimpin negeri ini telah menyerukan untuk membudayakan membaca. Di tengah revolusi maha hebat pertengahan tahun 1960-an, Presiden (ketika itu) Soekarno menyerukan agar masyarakat suka membaca tanpa sekali-kali bersikap prasangka. Saat itu Soekarno menandakan bahwa bagi manusia yang benar-benar mau menjadi manusia berharga, membaca sangatlah penting. Para pemimpin bangsa setelahnya pun tak mau kalah dalam mencanangkan berbagai gerakan memasyarakatkan membaca. Mantan Presiden Soeharto mencanangkan Hari Aksara, Hari

Kunjung Perpustakaan, serta Bulan Membaca pada 14 September 1995. Mantan Presiden Megawati Soekarnoputri menyerukan Gerakan Membaca Nasional pada 12 November 2003. Hingga Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga mencanangkan Gerakan Pemberdayaan Perpustakaan di Masyarakat pada 17 Mei 2006. Namun, kenyataannya hingga kini budaya membaca masih menjadi persoalan bagi bangsa ini.

Jangankan membaca sebagai sebuah budaya, melek huruf masih menjadi hantu yang menggentayangi masa depan bangsa. Berdasarkan Education For All Global Monitoring Report Tahun 2008, Indonesia merupakan Negara ke-8 dengan populasi buta huruf terbesar di dunia, yakni sekitar 18,4 juta orang buta huruf di Indonesia. Meski demikian, ada indikasi jumlah penyandang buta aksara di Indonesia dari tahun ke tahun cenderung mengalami penurunan. Optimisme Pemerintah pun kian tumbuh untuk memenuhi target menurunkan jumlah buta aksara usia 15 tahun ke atas pada akhir 2009 menjadi 5% dapat tercapai. Apalagi pada beberapa waktu terakhir, kepedulian berbagai komponen bangsa dalam mendukung Gerakan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara kian bertambah. Bahkan Gerakan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara di Indonesia ini telah dikukuhkan dengan terbitnya Instruksi Presiden No.5 Tahun 2006.

Usaha Pemerintah sejauh ini sejalan dengan adanya kesepakatan dalam Deklarasi Dunia Tentang Pendidikan untuk Semua (Education For All) yang ditetapkan di Thailand tahun 1990 dan telah ditindaklanjuti dengan Rencana Aksi Dakar di Senegal tahun 2000. Dalam akta Rencana Aksi Dakar 2000 tersebut dicanangkan tekad untuk mencapai target 50% melek aksara baru orang dewasa terutama wanita pada tahun 2015. Harapan Pemerintah, dengan kemampuan keaksaraan itu masyarakat yang telah bebas buta aksara didorong untuk melanjutkan pendidikan dasar serta terus didorong untuk mengikuti pendidikan berkelanjutan lainnya untuk meningkatkan kesejahteraannya.

Indikasi menurunnya jumlah penyandang buta aksara dari tahun ke tahun turut didukung adanya antusiasme masyarakat pada bacaan. Kondisi dapat dilihat pada semakin maraknya kegiatan mempromosikan bacaan seperti pameran buku dan festival buku murah yang diselenggarakan di berbagai daerah. Dimana pada setiap penyelenggaraannya dapat menyedot animo masyarakat untuk berkunjung cukup besar. Momentum ini sangat tepat untuk mencanangkan gerakan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan keaksaraan sekaligus mendukung penuntasan pemberantasan buta aksara di Indonesia.

Penyuksesan Gerakan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara sangat membutuhkan dukungan penuh dari Pemerintah dan masyarakat. Kurangnya fasilitas pendukung gerakan ini secara otomatis akan sangat mengurangi efektivitas program ini untuk mencapai target yang

diharapkan. Beberapa kendala yang masih menjadi penghambat gerakan ini antara lain akses yang kurang terhadap pendidikan berkualitas (masih mahal dan belum gratis), akses yang kurang terhadap buku lantaran harga buku yang mahal, minimnya tempat membaca seperti perpustakaan yang layak dan memadai, serta kurangnya motivasi membaca baik dalam keluarga maupun di sekolah. Memang di negeri yang pemenuhan sandang pangan warganya masih menjadi persoalan hidup sehari-hari, keinginan membaca menjadi beban, mengingat mahalnya harga buku. Alhasil, jalan masih panjang untuk membangun budaya membaca.

Pendidikan di Indonesia belum bisa dirasakan oleh 10% dari warga Indonesia. Bahkan sekitar 15,4 juta warga Indonesia berusia di atas 15 tahun ternyata masih buta aksara. Kondisi memerlukan solusi yang efektif dan efisien. Ada dua tindakan utama yang dapat dilakukan Pemerintah namun harus didukung sepenuhnya oleh masyarakat untuk melakukan pemberantasan buta aksara secepatnya. Solusi tindakan yang pertama adalah memberdayakan agama untuk turut membangun kesadaran meningkatkan pendidikan keaksaraan. Dalam sudut pandang agama-agama yang ada di Indonesia, pendidikan adalah suatu kegiatan yang bernilai wajib. Pemaknaan tersebut dapat menjadi salah satu gerakan meningkatkan kepedulian masyarakat terhadap pendidikan sekaligus mendorong penuntasan wajib belajar sembilan tahun yang tak kunjung usai. Adanya kesadaran bersama antar masyarakat dan Pemerintah diharapkan nantinya akan tercipta jaringan besar dengan isu pendidikan sebagai masalah bersama.

Dengan kemandirian dan kesadaran masyarakat yang kuat terhadap pendidikan, Pemerintah dapat ditekan agar menjalankan tugas-tugasnya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan. Agama apapun pasti melarang hadirnya sumber daya manusia yang rendah dan buta aksara. Namun, ketika orang buta aksara hadir dimana-mana yang menyebabkan kemiskinan baik moral maupun materi semakin meluas dan timbul kriminalitas yang semakin meningkat, itu adalah tantangan bagi umat beragama yang peduli pada pendidikan untuk bekerja lebih sinergi lagi. Agama yang diyakini memiliki energi untuk menggerakkan umat ke arah tindakan-tindakan yang positif bagi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, untuk lebih meningkatkan peran serta dan tingkat kontribusi masyarakat dalam menyukseskan program pendidikan nasional termasuk pendidikan keaksaraan, peran para pemimpin agama sangat penting untuk secara terus menerus menyosialisasikan bahwa pendidikan adalah perbuatan mulia yang diwajibkan setiap agama.

Solusi tindakan yang kedua adalah adanya kebijakan sebagai payung yang antara lain mencakup sistem pembiayaan dan arah pengembangan yang dilakukan Pemerintah untuk menunjang fasilitas Gerakan Percepatan Pemberantasan Buta Aksara di Indonesia. Seperti

telah diketahui banyak fasilitas penunjang bebas buta aksara pada masyarakat masih minim dan tidak memadai. Anggaran pendidikan dari Pemerintah yang masih minim baik di lingkungan pendidikan formal (sekolah/wajib belajar 9 tahun) maupun di lingkungan pendidikan non formal (pendidikan luar sekolah/kejar paket A-B-C) masih kurang dalam memfasilitasi masyarakat untuk meningkatkan pendidikan termasuk pendidikan keaksaraan. Apalagi ditambah kondisi saat ini, dimana harga buku yang mahal kurang menunjang pergerakan pemberantasan buta aksara di Indonesia. Bahkan harga buku di Indonesia jauh lebih mahal daripada di India.

Di India, sudah tidak ada pajak kertas dan pertambahan nilai untuk penerbitan buku sehingga bisa menekan biaya produksi buku hingga sekitar 20%. Bahkan New York Times dalam sebuah artikelnya berjudul *Getting Books Cheaper From India* melaporkan, kini semakin banyak buku teks Amerika yang diterbitkan di India. Pajak yang lebih rendah, tenaga kerja yang lebih murah, dan mencetak buku hitam putih membuat buku dapat dijual dengan harga lebih murah. Pihak penerbit dari Amerika atau Inggris juga menjalin kerjasama khusus dengan pemerintah India terkait dengan hak cipta buku. Alhasil, buku-buku keluaran penerbit Amerika dijual hanya sepersepuluh harga di negara aslinya. Hanya saja terdapat peraturan bahwa buku tersebut hanya dijual di India dan sekitarnya.

Hal yang terpenting, isi buku dapat diakses murah oleh masyarakat India. Sayangnya, Pemerintah Indonesia baru beraksi sebatas gerakan, belum menyentuh persoalan nyata. Sayangnya lagi, di tengah tingginya harga buku, di tanah air juga masih kurang fasilitas alternatif untuk membaca. Adanya perpustakaan yang disediakan oleh Pemerintah belum dapat berfungsi optimal akibat minimnya anggaran dana pembinaan dan sistem perpustakaan yang cenderung masih tertutup/terbatas, yang mengakibatkan akses masyarakat untuk membaca menjadi terbatas. Kondisi yang lebih parah lagi, terjadi di sekolah-sekolah yang tidak ada fasilitas perpustakaannya, sehingga pembudayaan membaca jauh lebih tertinggal. Lebih memprihatinkan lagi, para murid diajar dan dididik oleh para guru yang sebelumnya juga tidak ditanamkan kebiasaan membaca. Sebagai contoh, guru hanya mengajarkan merangkai kata dan huruf tetapi belum menanamkan arti pentingnya membaca. Sedangkan di rumah, orang tua yang mendidik anak-anak mereka, sebagian merupakan keluaran dari lingkungan yang jauh dari budaya membaca. Alhasil, yang terjadi adalah lingkaran setan budaya miskin membaca. Oleh karenanya, kesadaran Pemerintah dan masyarakat untuk segera mengambil langkah nyata sangat dibutuhkan.

Inti dari keprihatinan kebudayaan manusia adalah kegiatan membaca masih perlu diapresiasi secara rutin, disamping apresiasi yang terus menarik perhatian publik pada kegiatan menonton dan mendengar obyek apa saja. Buku tetap menjadi medium yang paling

diterima secara luas untuk kegiatan membaca yang bermakna. Kegiatan membaca tidak harus di sekolah dengan buku pelajarannya. Kegiatan membaca lebih menarik perhatian publik karena produk barunya yang datang dari pengarang-pengarang yang terpanggil untuk memproduksi terus menerus. Penulis dan produk baru menjadi resep untuk menarik publik untuk membaca, melupakan monoton dan mendengar.

Peningkatan pendidikan keaksaraan menunjang pembangunan ekonomi masyarakat. Karena bebas buta aksara merupakan penunjang pembentukan pola pikir dan olah rasa manusia untuk menciptakan nilai tambah yang merupakan kunci produktivitas dalam pembangunan ekonomi masyarakat. Rahasia produktivitas dalam pengembangan ekonomi masyarakat terdapat dalam penciptaan nilai tambah (value added) yang dilakukan. Penciptaan nilai tambah ini membedakan kualitas manusia yang produktif dan tidak produktif. Seberapa besar seseorang mampu menciptakan nilai-nilai yang bermanfaat bagi orang banyak. Pada tingkat negara pun dapat dilihat, ada negara maju dan tidak maju. Negara maju dipastikan dibangun dengan menciptakan nilai tambah dari sumber daya yang dimiliki untuk dimanfaatkan masyarakat lebih luas. Beberapa nilai tambah yang diciptakan negara-negara maju dalam produksi mobil, komputer, televisi, telepon seluler sampai bisnis lisensi.

Rahasia penciptaan nilai itu ada pada olah pikir dan olah rasa. Dalam proses olah pikir dan olah rasa diperlukan stimulan yang diperoleh lebih banyak dari kegiatan membaca disamping menonton dan mendengar. Berdasarkan hasil olah pikir, masyarakat dapat menciptakan nilai tambah yang bisa dirasakan oleh masyarakat lain sehingga kegiatan perekonomian pun meningkat. Produktivitas dapat berarti mengerjakan sesuatu dengan benar. Dengan membaca, masyarakat akan semakin dewasa dalam melihat suatu permasalahan yang berkembang sehingga tidak minim informasi dan pengetahuan. Alhasil, peningkatan pendidikan keaksaraan dapat memacu produktivitas untuk pengembangan ekonomi masyarakat yang lebih baik lagi dan berdikari. Produktivitas dapat terjadi dan ada dalam segala kehidupan, tapi kata kuncinya hanya satu yaitu penciptaan nilai. Penciptaan nilai hanya bisa dilakukan oleh olah pikir dan olah rasa yang benar.

Olah pikir dan olah rasa yang benar diperoleh dengan banyak membaca. Masyarakat yang suka membaca akan menjadi masyarakat yang kreatif dan pekerja keras karena membaca lebih banyak mengolah pikiran, rasa, dan kreativitas untuk mengartikan simbol-simbol dalam buku untuk memperoleh pengetahuan dibandingkan dengan mendengar dan menonton. Masyarakat yang sadar akan membaca akan menjadikan bangsa ini menjadi bangsa yang produktif dan masyarakatnya pun niscaya akan sejahtera.

Pendidikan Keaksaraan Keluarga merupakan upaya pemberdayaan keluarga dengan melatih kemampuan berkomunikasi melalui teks lisan, tulis, dan angka dalam bahasa Indonesia agar mereka dapat memperoleh, mencari, dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah keluarga dan berperan serta dalam pembangunan. Dana Program Pendidikan Keaksaraan Keluarga merupakan alokasi biaya APBN yang dapat diakses oleh lembaga/ organisasi untuk menyelenggarakan program pendidikan keaksaraan keluarga sebagai upaya pemberdayaan keluarga dengan melatih kemampuan berkomunikasi melalui teks lisan, tulis, dan angka dalam bahasa Indonesia agar mereka dapat memperoleh, mencari, dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah keluarga dan berperanserta dalam pembangunan.

Sasaran program pendidikan keaksaraan keluarga adalah keluarga yang mempunyai masih melek aksara parsial dan cenderung masih buta aksara atau mereka yang masih berkeaksaraan dasar. Program Pendidikan Keaksaraan Keluarga bertujuan untuk memberdayakan keluarga dalam memperoleh, mencari, dan mengelola informasi untuk memecahkan masalah keluarga dan berperanserta dalam pembangunan masyarakat.

Secara khusus, program pendidikan keaksaraan keluarga ini bertujuan untuk:

1. Memperluas akses penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan, khususnya bagi anggota keluarga yang melek aksara parsial yang cenderung buta aksara.
2. Meningkatkan kemampuan keberaksaraan anggota keluarga dalam mengelola informasi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan yang dapat menguatkan kehidupan keluarga;
3. Meningkatkan kecakapan hidup (*life skills*) anggota keluarga yang dapat memperkuat keberdayaan ekonomi keluarga.

Layanan Pendidikan Luar Sekolah yang hingga saat ini masih terus dikembangkan pemerintah dalam rangka memerangi ketidakberdayaan masyarakat sebagai akibat dari kebodohan dan kemiskinan adalah memberikan pelayanan pendidikan dasar bagi orang dewasa (*adult basic education*). Program Pendidikan Keaksaraan melalui kegiatan pemberantasan buta aksara menjadi salah satu prioritas sasaran Pendidikan Untuk Semua (PUS) yang menargetkan penurunan jumlah buta aksara seminimal mungkin.

Pengertian Keaksaraan (*Literacy*) secara sederhana diartikan sebagai kemampuan untuk membaca, menulis dan berhitung. Bagi orang dewasa yang buta aksara, kecakapan keaksaraan tidak hanya sekedar dapat membaca, menulis dan berhitung, akan tetapi lebih menekankan fungsi dalam kehidupan sehari-hari (Archer, 2006). Secara luas, Keaksaraan didefinisikan sebagai pengetahuan dasar dan keterampilan yang diperlukan oleh semua warga

negara dan menjadi salah satu fondasi bagi penguasaan kecakapan-kecakapan hidup yang lain. Program keaksaraan di Indonesia lebih dikenal dengan Program Pendidikan Keaksaraan Fungsional, sehingga secara terminologi (istilah) fungsional dalam keaksaraan, berkaitan erat dengan fungsi dan/atau tujuan dilakukannya Pembelajaran di dalam program pendidikan keaksaraan, serta adanya jaminan bahwa hasil belajarnya benar-benar “bermakna/bermanfaat” atau fungsional bagi “peningkatan mutu dan taraf hidup” warga belajar dan masyarakatnya. Program ini ditujukan untuk melayani warga masyarakat yang tidak dapat membaca dan menulis yang dikarenakan mereka tidak dapat mengikuti atau menyelesaikan pendidikan di sekolah formal.

Berdasarkan penelitian lintas negara yang dilaksanakan oleh UNESCO disimpulkan bahwa keberhasilan dalam program pemberantasan buta huruf berdampak pada menurunnya angka kematian ibu dan bayi, meningkatnya usia harapan hidup masyarakat (Zainudin Arief, 2007), Program pendidikan keaksaraan merupakan bentuk layanan Pendidikan Non Formal untuk membelajarkan warga masyarakat buta aksara, agar memiliki kemampuan menulis, membaca, berhitung dan menganalisa, yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan sekitarnya, sehingga warga belajar dan masyarakat dapat meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.

Tujuan pendidikan keaksaraan merupakan bentuk layanan Pendidikan Non Formal untuk membelajarkan masyarakat buta aksara, agar memiliki keterampilan CALISTUNG, dan kemampuan fungsional untuk meningkatkan “mutu” dan “taraf” hidupnya. Atas dasar uraian tersebut maka program pendidikan keaksaraan bertujuan untuk; meningkatkan ketrampilan membaca, menulis dan berhitung warga masyarakat buta aksara, agar melek aksara latin dan angka Arab, serta meningkatkan kemampuan fungsionalnya agar melek bahasa Indonesia dan pengetahuan dasarnya sehingga mutu dan taraf hidupnya menjadi lebih baik.

Prinsip penyelenggaraan pendidikan keaksaraan adalah bahwa pendidikan keaksaraan sebagai salah satu layanan pendidikan non formal untuk membelajarkan warga masyarakat buta aksara, dan sebagai suatu pendekatan pembelajaran, merupakan cara untuk mengembangkan kemampuan seseorang dalam menguasai dan menggunakan keterampilan membaca, menulis, berhitung, mengamati dan menganalisis, yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar.

Untuk mencapai hal tersebut, pendidikan keaksaraan diselenggarakan dengan prinsip sebagai berikut:

1. Konteks lokal, adalah bahwa pembelajaran pendidikan keaksaraan dilaksanakan berdasarkan minat, kebutuhan, pengalaman, permasalahan dan situasi lokal serta potensi yang ada di sekitar warga belajar.
2. Desain lokal, tutor bersama warga belajar perlu merancang kegiatan pembelajaran di kelompok belajar, sebagai jawaban atas permasalahan, minat dan kebutuhan warga belajar.
3. Partisipatif, tutor perlu melibatkan warga belajar berpartisipasi secara aktif, dari mulai tahap perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian hasil warga belajar.
4. Fungsionalisasi hasil belajar, dari hasil pembelajaran nya warga belajar diharapkan dapat memecahkan masalah keaksaraannya dan meningkatkan mutu dan taraf hidupnya.

Dalam rangka mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan membaca, menulis, berhitung, mengamati dan menganalisis, yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari serta memanfaatkan potensi yang ada di lingkungan sekitar, maka strategi pembelajaran yang diterapkan adalah; membaca, menulis, berhitung, diskusi dan aksi (Calistungdasi). Kegiatan aksi dalam strategi pembelajaran pendidikan keaksaraan adalah merupakan pemanfaatan hasil belajar warga belajar atau fungsionalisasi hasil belajar.

Komponen penyelenggaraan pendidikan keaksaraan terdiri; atas komponen utama, komponen pembelajaran dan komponen pendukung, yang masing terdiri atas -unsur-unsur sebagai berikut:

1. Komponen utama. Komponen utama penyelenggaraan pendidikan keaksaraan meliputi: warga belajar, tutor, penyelenggara, kelompok belajar, tenaga suport sistem, dan dana.
2. Komponen pembelajaran. Komponen pembelajaran dalam penyelenggaraan pendidikan keaksaraan terdiri atas: struktur kurikulum program pembelajaran, program pembelajaran, proses pembelajaran, bahan dan media belajar, evaluasi belajar, dan fungsionalisasi hasil belajar.
3. Komponen pendukung. Komponen pendukung pendidikan keaksaraan terdiri atas: pelatihan, pendampingan, bimbingan teknis, acuan-acuan, rasi belajar, birokrasi, dan dukungan masyarakat.

Sampai saat ini program pendidikan keaksaraan masih digayuti berbagai persoalan sebagai akibat pelaksanaannya di lapangan menggunakan top-down approach, pendekatan struktural. Artinya, program pendidikan keaksaraan berpusat pada pemerintah, terutama dalam hal regulasi penyelenggaraan, pengaturan anggaran, dan ketentuan batasan waktu penyelenggaraannya. Selain itu, hal penting yang mempengaruhi kualitas hasil belajar yang rendah adalah pendekatan pembelajaran konvensional, yaitu pembelajaran yang masih

berpusat pada guru/tutor, tidak mengakomodasi perbedaan karakteristik dan kompetensi keaksaraan yang ada pada warga belajar. Penyelenggaraan program seperti itu cenderung menghasilkan output yang secara kuantitatif tinggi, tetapi sekedar memenuhi target administratif.

Pada akhir penyelenggaraan dan pembelajaran wargabelajar hanya mendapatkan sertifikat sebagai tanda bukti telah mengikuti program pendidikan keaksaraan yang rendah kualitasnya, bersifat mekanis, dan lebih mementingkan aspek politis, misalnya mempercepat deklarasi melek aksara. Penyelenggaraan program kurang memperhatikan aspek lain yang bersifat teknis, seperti pembelajaran yang memadukan substansi keaksaraan dan kecakapan hidup, serta pertimbangan mengenai pemanfaatan hasil pembelajaran bagi warga belajar di dalam kehidupan sehari-hari.

Kelemahan penyelenggaraan dengan top-down approach lainnya adalah pola pembelajaran teacher-centered yang tidak mengakomodasi perbedaan yang terdapat pada tiap individu/warga belajar, yaitu: 1) kemampuan keaksaraan awal; 2) motivasi belajar; 3) kebutuhan belajar; 4) bakat yang dapat dikembangkan; 5) potensi yang dapat diberdayakan; 6) peluang yang dapat dimanfaatkan; 7) tingkat ekonomi; dan 8) usia warga belajar. Selain itu, warga belajar dengan kemampuan dasar akademis yang berbeda tidak seharusnya diperlakukan dengan mekanisme yang sama. Perubahan situasi kondisi pada saat ini berdampak pada jumlah sasaran didik menjadi semakin sedikit, karena faktor mortalitas dan meningkatnya kemampuan pemerintah dalam memberikan layanan program pendidikan keaksaraan.

Sebaran sisa sasaran yang tidak merata menjadi permasalahan baru dalam penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan yang bersifat top-down approach yang memerlukan penanganan secara khusus. Fakta penting lainnya yang terkait dengan penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan secara konvensional adalah hasil belajar yang belum berpengaruh pada kehidupan warga belajar pasca-pembelajaran keaksaraan. Hal ini terbukti belum adanya peningkatan ekonomi pendapatan dan taraf kehidupan dalam kehidupan sehari-hari warga belajar walaupun mereka telah selesai mengikuti pembelajaran dan mendapatkan sertifikat keaksaraan.

Seharusnya, keberaksaraan sebagai hasil pembelajaran tetap ditempatkan sebagai tujuan antara, bukan tujuan akhir program, sedangkan tujuan utamanya adalah keberdayaan masyarakat di dalam kehidupan memanfaatkan keberaksaraan yang dikuasainya itu. Berdasarkan pada fakta sebagaimana tersebut di atas, Pusat Pengembangan Pendidikan Nonformal dan Informal (P2PNFI) Regional 2 Semarang pada tahun 2009 mengembangkan model pendidikan keaksaraan yang meliputi rekrutmen pembelajaran sampai dengan aplikasi

hasil belajarnya di dalam kehidupan sehari-hari. Model ini dimaksudkan bukan semata-mata menemukembangkan inovasi pada pembelajaran, tetapi juga pada berbagai komponen lain yang ada di dalamnya.

Pengembangan model ini diharapkan dapat menjadi salah satu alternatif pilihan untuk mengatasi kebutuhan penyelenggaraan dan pembelajaran program pendidikan keaksaraan yang efektif dan efisien dari sisi kuantitas dan kualitas. Sebagaimana telah dipahami bahwa program pendidikan keaksaraan bertujuan untuk meningkatkan keberaksaraan penduduk dewasa (*adult literacy*) dalam rangka pemberdayaan masyarakat miskin melalui program pemberantasan buta aksara, sebagai perwujudan komitmen nasional dan internasional untuk berpartisipasi dalam upaya penanggulangan dan pengentasan kemiskinan. Sasaran program ini adalah penduduk buta aksara usia 15 tahun ke atas yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat, khususnya daerah-daerah yang masih tinggi penduduk buta aksara.

Tingkat keaksaraan suatu negara/daerah merupakan salah satu indikator dalam penentuan indeks pengembangan sumber daya manusia (*Human Development Index*). Tingginya jumlah penduduk buta aksara, karena masih adanya siswa usia sekolah yang tidak bersekolah atau tidak tertampung di SD. Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab serius tingginya jumlah penduduk buta aksara. Selain itu, setiap tahun masih ada sekitar 2000-3000 siswa putus sekolah, baik di tingkat SD atau MI atau yang sederajat pada kelas I,II dan III. Karena putus sekolah di kelas rendah pada tingkat SD, ini disinyalir nantinya bisa menjadi buta aksara kembali karena penguasaan keaksaraan waktu putus sekolah belum mendalam.

Faktor lain adalah adanya penduduk yang sejak awal memang tidak bersekolah karena berbagai alasan, seperti keadaan ekonomi keluarga dan kondisi geografis yang menyebabkan mereka tidak bersekolah, terjadinya buta aksara kembali bagi peserta didik yang telah mengikuti pemberantasan buta aksara karena kurangnya intensifikasi dalam pemeliharaan keaksaraan mereka.

Strategi kebijakan pendidikan keaksaraan di daerah Provinsi Kalimantan Barat mengacu pada Misi dan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat bidang pembangunan pendidikan, yaitu "Meningkatkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia (SDM) Kalimantan Barat melalui peningkatan kualitas tenaga kependidikan dan penyediaan sarana dan prasarana pendidikan serta pemerataan pendidikan". Misi tersebut bermuara pada pencapaian Visi Pendidikan Kalimantan Barat, yaitu: "Penyelenggaraan pendidikan yang optimal untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang cerdas".

Untuk mencapai visi tersebut Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Barat menetapkan misi sebagai berikut;

1. Meningkatkan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan di semua jenis pendidikan.
2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana pendidikan.
3. Meningkatkan jumlah dan mutu penyelenggaraan Pendidikan Layanan Khusus.
4. Memfasilitasi pengembangan perguruan tinggi
5. Meningkatkan prestasi olah raga pelajar
6. Meningkatkan pelayanan pendidikan yang menjangkau masyarakat tertinggal atau tidak mampu.
7. Mengendalikan mutu pendidikan melalui standarisasi kurikulum dan evaluasi.
8. Meningkatkan prestasi siswa melalui kompetensi antara kabupaten/kota, provinsi dan nasional.
9. Meningkatkan manajemen pelayanan pendidikan.
10. Melakukan pengembangan sekolah berstandar nasional

3.2. MEKANISME PELAKSANAAN

Program pendidikan keaksaraan akan dapat dilaksanakan sesuai target yang ditentukan di setiap daerah di Indonesia, dengan waktu yang relatif cepat jika didukung oleh peran serta masyarakat secara aktif. Peran serta tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan nyata, misalnya memberikan motivasi atau kesadaran pentingnya melek aksara, membantu sarana/fasilitas pembelajaran, dan dalam bentuk menyelenggarakan program keaksaraan itu sendiri. Hanya dengan kepedulian inilah program pembebasan keaksaraan terutama sekali di kantong-kantong kemiskinan di setiap daerah di Indonesia akan dapat terselesaikan sehingga Indonesia menjadi cerdas, bermartabat dan berbudaya dimata dunia.

Upaya-upaya mendorong pencapaian target Pendidikan Untuk Semua sebagaimana dikemukakan di atas, perlu diimplementasikan kebi-jakan-kebijakan berikut:

1. Meningkatkan akses dan perluasan kesempatan belajar bagi semua anak usia pendidikan dasar, utamanya daerah dan masyarakat miskin, terpencil, dan terisolasi. Melanjutkan bantuan biaya operasional sekolah (BOS) sebagai langkah awal pelaksanaan pendidikan dasar gratis.
2. Meningkatkan kualitas dan relevansi pendidikan mengacu pada standar nasional pendidikan (Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005)

3. Meningkatkan anggaran pendidikan untuk dapat mencapai 20 persen dari APBN dan APBD sesuai amanat UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
4. Mendorong pelaksanaan otonomi dan desentralisasi pengelolaan pendidikan sampai dengan satuan pendidikan dalam menyelenggaraan pendidikan.
5. Memperkuat manajemen pelayanan pendidikan dalam rangka membangun pelayanan pendidikan yang amanah, efisien, produktif dan akuntabel melalui upaya peningkatan tata kelola yang baik (*good governance*) kelembagaan pendidikan.
6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan pendidikan, antara lain melalui peran dan fungsi komite sekolah dan dewan pendidikan, mengembangkan shool-base education dan community base education.

3.3 PEMAHAMAN STATUS GIZI

Menurut Hammond (2004), status gizi berarti penggolongan suatu hasil pengukuran ke dalam tingkat kebutuhan gizi fisiologis seseorang. Sedangkan pengertian lain menyebutkan, status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari status tubuh yang berhubungan dengan gizi dalam bentuk variabel tertentu (Supriasa, Bakri, dan Fajar, 2002). Jadi intinya, terdapat suatu variabel yang diukur (misalnya berat badan dan tinggi badan) yang dapat digolongkan ke dalam kategori gizi tertentu (misalnya baik, kurang, buruk, dan sebagainya).

Pertumbuhan seorang anak bukan hanya sekedar gambaran perubahan ukuran tubuh, tapi lebih dari itu memberikan gambaran tentang keseimbangan antara asupan dan kebutuhan gizi (status gizi). Oleh karena itu, pertumbuhan merupakan indikator yang baik dari perkembangan status gizi anak (Depkes RI, 2002 a). Status gizi dinilai dari interpretasi dari data yang didapatkan dengan menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi populasi atau individu yang beresiko atau dengan status gizi buruk (Hartriyanti dan Triyanti, 2007). Adapun tujuan penilaian status gizi menurut Hammond (2004) adalah untuk :

- a. Mengidentifikasi individu yang membutuhkan dukungan nutrisi yang cukup.
- b. Mempertahankan status gizi seseorang.
- c. Mengidentifikasi penatalaksanaan medis yang sesuai.
- d. Memonitor efektifitas intervensi yang telah dilakukan tersebut.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, jelas bahwa penilaian status gizi adalah untuk meningkatkan kualitas gizi balita. Metode dalam penilaian status gizi dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu secara langsung, tidak langsung, dan dengan melihat variabel ekologi.

Penilaian status gizi secara langsung terdiri dari tes laboratorium, pemeriksaan tanda-tanda klinis, pemeriksaan biofisika dan pengukuran antropometri. Adapun penilaian status gizi secara tak langsung misalnya dengan menggunakan informasi angka kematian pada umur tertentu, ataupun angka penyebab kesakitan dan kematian. Sedangkan pada penilaian variabel ekologi, dilakukan pengumpulan data lapangan misalnya *24-hour food recall* (Hartriyanti dan Triyanti, 2007).

Dalam menentukan status gizi harus ada ukuran baku (*reference*). Baku antropometri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah baku *World Health Organization-National Centre for Health Statistics* (WHO-NCHS). Terakhir, berdasarkan Temu Pakar Gizi di Bogor tanggal 19-21 Januari dan di Semarang tanggal 24 – 26 Mei 2000, merekomendasikan buku WHO-NCHS untuk digunakan sebagai baku antropometri di Indonesia (Depkes RI, 2000 dalam Arisman, 2004). Menurut WHO, data berat dan tinggi badan yang dikumpulkan oleh *United – National Centre for Health Statistics* merupakan pilihan terbaik baku rujukan (Supriasa, Bakri, dan Fajar, 2002).

Departemen Kesehatan Republik Indonesia membuat rujukan penilaian status gizi anak balita yang terpisah antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan di atas. Kriteria jenis kelamin inilah yang membedakan baku WHO-NCHS dengan Harvard yang sebelumnya digunakan. Adapun baku WHO 2005 belum digunakan di Indonesia sebagai rujukan pengganti baku WHO-NHCS (Sudiman, 2006). Penggolongan status gizi pada tabel indeks berat badan menurut umur dan berat badan menurut tinggi badan didasarkan kepada deviasi standar (DS). Dari indeks berat badan menurut umur (BB/U), status gizi dapat digolongkan menjadi empat kelas yaitu gizi buruk ($BB/U < -3DS$), gizi kurang ($-3 DS < BB/U < -2 DS$), gizi baik ($-2 DS < BB/U < +2 DS$), dan gizi lebih ($BB/U > +2 DS$). Status Gizi berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) juga dibagi menjadi empat kelas, yaitu kurus sekali ($BB/TB < -3DS$), kurus ($-3 DS < BB/TB < -2 DS$), Normal ($-2 DS < BB/TB < +2 DS$), dan gemuk ($BB/TB > +2 DS$).

Status gizi wilayah dibagi menjadi dua macam, yaitu wilayah bebas rawan gizi (gizi baik) dan wilayah rawan gizi. Wilayah bebas rawan gizi adalah wilayah dengan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk $< 15\%$. Sedangkan wilayah rawan gizi adalah wilayah yang prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk $\geq 15\%$ (Depkes RI, 2003). Status gizi wilayah juga sangat berpengaruh dengan faktor lingkungan yang ada. Pertambahan jumlah penduduk menyebabkan kepadatan di suatu wilayah semakin meningkat. Hal tersebut berdampak signifikan dengan keterbatasan lahan bagi penduduk. Munculnya pemukiman liar, kumuh dan jauh dari standar kesehatan tidak dapat terelakkan lagi. Sehingga secara langsung dapat

dirasakan bahwa pengaruh lingkungan sangat berdampak nyata bagi permasalahan gizi buruk. Hipotesa yang dapat diambil adalah semakin padat suatu daerah dengan tingkat kemiskinan dan semakin kumuh suatu lingkungan akan rentan menjadi wilayah rawan gizi.

3.4 GIZI BURUK

Kasus gizi buruk yang meningkat dan sangat ramai dibicarakan sejak ditemukan di NTB, telah membuka mata kita tentang masalah gizi anak balita. Kenyataan di lapangan, setelah NTB, hampir seluruh daerah di Indonesia segera melaporkan adanya kasus gizi buruk di wilayahnya. Fenomena ini kemungkinan berkaitan dengan pengalokasian dana yang digulirkan oleh pemerintah (Pusat) untuk penanggulangan kasus gizi buruk (Dr. dr. Nurpudji A. Taslim, MPH, SpGK).

Gizi buruk merupakan kejadian kronis dan bukan kejadian yang tiba-tiba. Pertanyaan yang timbul adalah dimana laporan hasil pemantauan status gizi berada dan kemana laporan tersebut dikirimkan selama ini? Secara teknis, mestinya laporan tersebut berada di Dinas Kesehatan (untuk Daerah) dan Departemen Kesehatan (untuk Pusat). Secara teknis pula, lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab atas kajian data hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Puskesmas, dengan Posyandu sebagai ujung tombak sumber informasi. Demikian pula institusi rumah sakit, merupakan unit pelayanan yang juga turut berkontribusi atas tersedianya informasi kasus tersebut karena berkaitan dengan fungsinya sebagai pusat rujukan kasus.

Departemen Kesehatan telah menyelenggarakan suatu pertemuan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan gizi buruk bagi pemegang kebijakan di Batam 6-8 Oktober 2005 (Regional I) dan di Yogyakarta 11-13 Oktober 2005 (Regional II). Pada pertemuan yang dihadiri oleh para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Direktur Rumah Sakit Provinsi se-Indonesia tersebut telah dibahas Rencana Aksi Nasional (RAN) Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk 2005-2009, yang menginformasikan 70% dari anggaran yang tersedia akan difokuskan pada promosi kesehatan dalam hal ini upaya promotif dan preventif, sementara 30% sisanya ditujukan untuk pelaksanaan kegiatan operasional. Diantara agenda kegiatan dalam RAN tersebut adalah pemberian makanan tambahan berbasis makanan lokal, dan pelatihan kader.

Gizi buruk adalah kondisi kurang gizi yang disebabkan oleh rendahnya konsumsi energi dan protein dalam asupan makanan sehari-hari hingga tidak memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG). Ada beberapa cara untuk mengetahui seorang anak terkena busung lapar (gizi buruk) yaitu:

- 1) Dengan cara menimbang berat badan secara teratur setiap bulan. Bila perbandingan berat badan dengan umurnya dibawah 60% standar WHO-NCHS, maka dapat dikatakan anak tersebut terkena busung lapar (Gizi Buruk).
- 2) Dengan mengukur tinggi badan dan Lingkar Lengan Atas (LILA) bila tidak sesuai dengan standar anak yang normal waspadai akan terjadi gizi buruk.

Gizi buruk dibagi menjadi 3 jenis, yang sering ditemui dan sangat berbahaya yaitu **Kwashiorkor**, **Marasmus** dan gabungan dari keduanya **Marasmic-Kwashiorkor**. Tanda-tanda Gizi Buruk untuk jenis **Kwashiorkor** adalah sebagai berikut:

- a. Bengkak pada seluruh tubuh terutama pada punggung kaki dan bila ditekan akan meninggalkan bekas seperti lubang.
- b. Otot mengecil dan menyebabkan lengan atas kurus sehingga ukuran LILA-nya kurang dari 14 cm.
- c. Timbulnya ruam berwarna merah muda yang meluas dan berubah warna menjadi coklat kehitaman dan terkelupas.
- d. Tidak nafsu makan.
- e. Rambutnya menipis berwarna merah seperti rambut jagung dan mudah dicabut tanpa menimbulkan rasa sakit.
- f. Wajah anak membulat dan sembab (*moon face*).
- g. Cengeng/rewel dan apatis.
- h. Sering disertai infeksi, anemia dan diare.

Sedangkan untuk jenis **Marasmus** tanda-tandanya :

- a. Anak sangat kurus tampak tulang terbungkus kulit.
- b. Tulang rusuk menonjol.
- c. Wajahnya seperti orang tua (*monkey face*).
- d. Kulit keriput (jaringan lemak sangat sedikit sampai tidak ada).
- e. Cengeng/rewel.
- f. Perut cekung sering disertai diare kronik (terus menerus) atau susah buang air kecil.

Tanda-tanda **Marasmic – Kwashiorkor** adalah Campuran dari beberapa tanda tanda **Kwashiorkor** dan **Marasmus** disertai pembengkakan yang tidak menyolok.

Dampak dari gizi buruk (busung lapar) pada anak bukan hanya tubuh yang kurus tetapi lebih dari itu. Gizi buruk dapat mengakibatkan menurunnya tingkat kecerdasan anak, rabun senja dan penderita gizi buruk lebih rentan terhadap penyakit terutama penyakit infeksi. Bila

ditemukan anak dengan gizi buruk harus segera dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatan lebih lanjut. Busung Lapar (Gizi buruk) dapat dicegah dengan memberikan makanan yang bergizi pada anak berupa sayur-mayur, buah-buahan, makanan yang mengandung karbohidrat (seperti nasi, kentang, jagung), makanan yang mengandung protein (telur, ikan, daging) dll, dan berikanlah ASI bagi anak usia 0-2 tahun. Masa depan bangsa Indonesia tergantung pada keadaan anak bangsa saat ini, jika anak-anak Indonesia tidak terpenuhi gizi seimbangnnya tak terbayangkan masa depan bangsa ini (Dr. dr. Nurpudji A. Taslim, MPH, SpGK).

3.5 SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS

3.5.1 Definisi Sistem Informasi Geografis

Perkembangan aplikasi sistem informasi saat ini tidak lagi terbatas pada pengolahan data tabular dimana data disimpan ke dalam tabel-tabel basis data yang dikelola oleh perangkat lunak DBMS (*database management system*), tetapi telah berkembang untuk pengolahan data yang bersifat keruangan atau spasial.

Sistem informasi yang mempunyai kemampuan pengelolaan data spasial maupun data atribut ini kemudian dikenal sebagai Sistem Informasi Geografis-SIG (*Geographical Information Systems-GIS*). Para peneliti SIG telah mengemukakan beberapa definisi tentang SIG itu sendiri, antara lain:

- a. sekumpulan alat bantu (*tools*) untuk mengumpulkan, menyimpan, memanggil, mentransformasikan, dan menampilkan data spasial dari dunia nyata. '*a powerful set of tools for collecting, storing, retrieving at will, transforming and displaying spatial data from the real world*' (Burrough 1986).
- b. Sebuah sistem untuk menangkap, menyimpan, memeriksa, memanipulasi, menganalisis, dan menampilkan data yang secara spasial merujuk ke permukaan bumi. '*a system for capturing, storing, checking, manipulating, analyzing and displaying data which are spatially referenced to the Earth*' (Department of Environment 1987).
- c. Teknologi informasi yang menyimpan, menganalisis, dan menampilkan baik data spasial maupun data non-spasial. '*an information technology which stores, analyses, and displays both spatial and non- spatial data*'. (Parker 1988).
- d. Sekumpulan prosedur manual atau berbasis komputer yang digunakan untuk menyimpan dan memanipulasi data yang bereferensi secara geografis. '*any manual or computer based set of procedures used to store and manipulate geographically referenced data*' (Aronoff 1989).

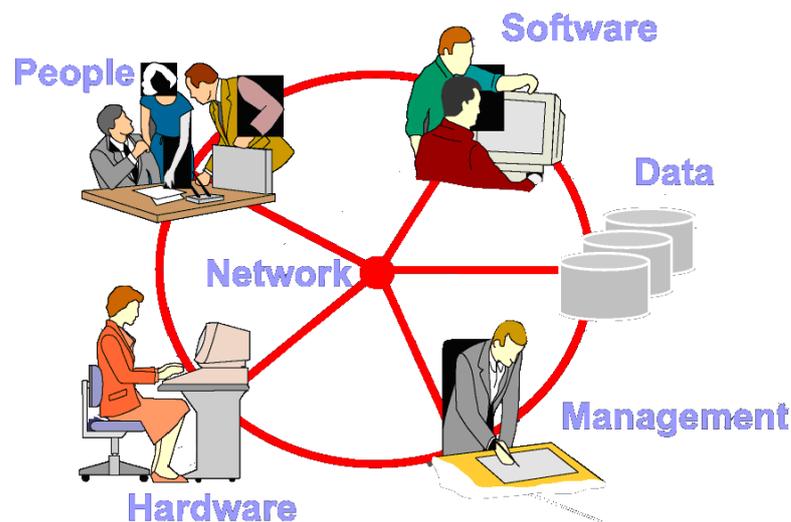
- e. Sistem pendukung keputusan yang menangani penintegrasian data bereferensi spasial dalam lingkup pengambilan keputusan. *'a decision support system involving the integration of spatially referenced data in problem solving environment'* (Cowen 1988).

Dari definisi tersebut di atas dapat diambil beberapa point penting bahwa SIG adalah:

- Sistem informasi berbasis komputer
- Berfungsi untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, menganalisis, dan menampilkan
- Data yang bereferensi geografis (spasial) maupun non-geografis (data atribut/non-spasial)
- Yang berguna untuk mendukung sistem pengambilan keputusan.

3.5.2 Komponen SIG

Sistem Informasi Geografis memiliki lima elemen pokok yaitu **perangkat keras**, **perangkat lunak**, **data**, **personel/people** untuk mengelola sistem, dan institusi untuk mendukung elemen tersebut (pihak manajemen).



Gambar 3.1.
Komponen SIG

Prahasta (2000) membagi komponen pendukung SIG sebagai berikut:

1. Perangkat keras

Perangkat keras yang sering digunakan di dalam SIG antara lain: komputer (CPU), monitor, *keyboard*, *mouse*, *digitizer*, kamera digital, *printer*, *plotter*, *scanner*, *receiver* GPS, dan sebagainya.

2. Perangkat lunak

Perangkat keras tidak akan dapat berfungsi jika tidak memiliki perangkat lunak yang bertugas mengatur kerja perangkat keras dan bertindak sebagai interface (antar muka) antara mesin dan manusia. Terdapat tiga komponen utama perangkat lunak yaitu (1) sistem operasi (Windows, UNIX, Linux, MAC/OS), (2) *special system utilities* (*compiler, device driver, utility, library*), dan (3) perangkat lunak aplikasi (MS Office, ArcView/ArcInfo, MapInfo, IDRISI, ERDAS, ER MAPPER).

3. Data dan informasi geografi

Bentuk data dan informasi geografi dapat berupa *hardcopy* (seperti peta dasar, foto udara, tabel, gambar grafik, dan sebagainya), maupun berupa *softcopy* (berbentuk *file* peta digital, citra satelit, basisdata, dan sebagainya). Proses penyimpanan data dan informasi dapat dilakukan secara tidak langsung dengan meng-*import* dari perangkat lunak yang lain, atau dilakukan secara langsung dengan cara mendijitasi data spasialnya dari peta dan memasukkan data atributnya berdasarkan tabel, grafik, dan laporan-laporan.

4. Manajemen

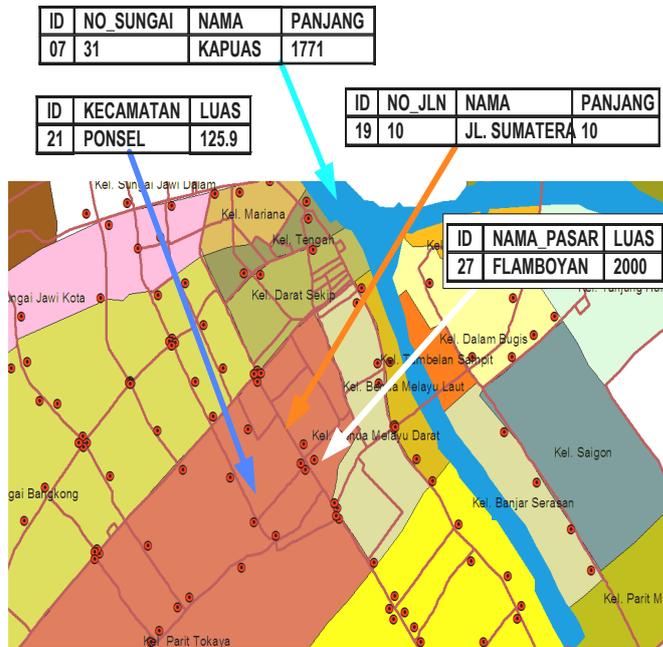
Dalam hal ini manajemen merujuk kepada sumber daya manusia (*brainware*) yang akan mengerjakan tugas atau proyek SIG. Tanpa adanya orang-orang yang memiliki keahlian yang tepat pada tiap tingkatan, maka proyek SIG tidak dapat mencapai sasarannya.

3.5.3. Cara Kerja SIG

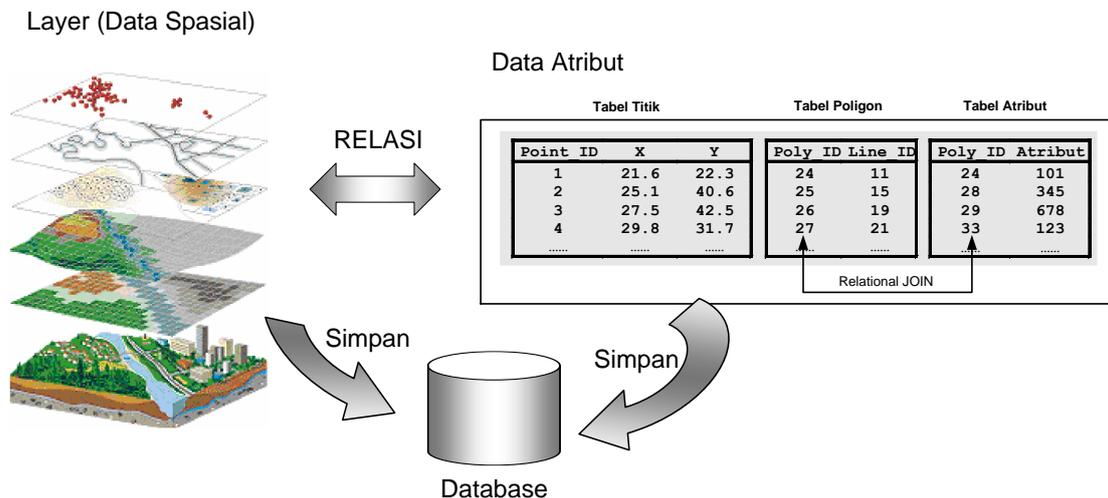
Menurut Prahasta (2001) "SIG dapat mempresentasikan *real world* (dunia nyata) di atas monitor komputer sebagaimana lembaran peta dapat mempresentasikan dunia nyata di atas kertas." SIG memiliki kekuatan lebih dan fleksibilitas daripada lembaran peta kertas. Peta merupakan representasi grafis dari dunia nyata, objek-objek yang direpresentasikan di atas peta disebut unsur peta atau *map features* contohnya sungai, jalan, kampung, dan lain-lain. Karena peta mengorganisasikan unsur-unsur berdasarkan lokasi-lokasinya, peta sangat baik dalam memperlihatkan hubungan atau relasi yang dimiliki oleh unsur-unsurnya.

Sistem menghubungkan sekumpulan unsur-unsur peta dengan atribut-atributnya dalam satuan yang disebut *layer* yang akhirnya membentuk basis data. Contoh dari layer-layer yang merupakan satuan dari unsur-unsur peta tersebut dapat saling melengkapi representasi yang ditampilkan dalam satu kesatuan lembar kerja dalam satu lokasi peta seperti: batas areal kerja, kompartemen tanaman, gross area yang merupakan satuan *layer polygon* dilengkapi dengan adanya *layer point* seperti kampung, camp, menara api dan sebagainya, serta untuk *layer line* seperti jalan, sungai, dan sebagainya.

Sistem Informasi Geografis merepresentasikan dunia nyata (*real world*) dalam bentuk lapisan (*layer*) peta yang ditayang pada sebuah monitor atau dituangkan dalam lembaran kertas. Setiap peta memiliki tema-tema tertentu (disebut peta tematik) sesuai yang diperlukan pengguna (*user*). Untuk keperluan analisis layer peta tematik dapat saling ditumpang susun (*overlay*) satu sama lain, pengguna dapat memperoleh data atribut dari peta tematik tersebut demikian sebaliknya dari data atribut dapat diperoleh informasi data spasialnya (peta tematik).



(a) Contoh relasi unsur-unsur peta dengan tabel-tabelnya



(b) Hubungan layer s
pasial, tabel atribut, dan basisdata SIG

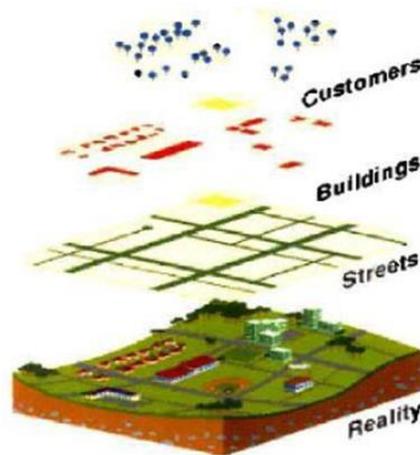
Gambar 3.2
Ilustrasi Cara Kerja SIG

3.5.4. Kemampuan SIG

a. Memetakan Letak

Data realita di permukaan bumi akan dipetakan ke dalam beberapa layer dengan setiap layer-nya merupakan representasi kumpulan benda (*feature*) yang mempunyai kesamaan, contohnya layer jalan, layer bangunan, dan layer customer (Gambar 3.4). Layer-layer ini kemudian disatukan dengan disesuaikan urutannya.

Setiap data pada setiap layer dapat dicari, seperti halnya melakukan query terhadap database, untuk kemudian dilihat letaknya dalam keseluruhan peta. Kemampuan ini memungkinkan seseorang untuk mencari dimana letak suatu daerah, benda, atau lainnya di permukaan bumi. Fungsi ini dapat digunakan seperti untuk mencari lokasi rumah, mencari rute jalan, mencari tempat-tempat penting dan lainnya yang ada di peta.



Gambar 3.3.
Memetakan Letak

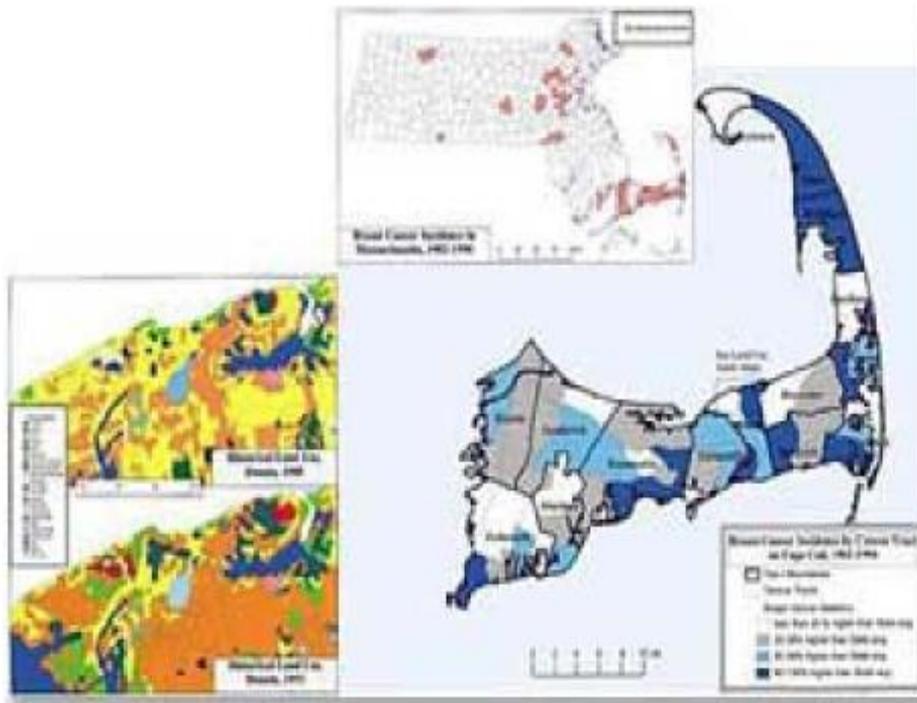
Kita dapat pula melihat pola-pola yang mungkin akan muncul dengan melihat penyebaran letak-letak feature, misalnya sekolah, pelanggan, daerah miskin dan sebagainya.

b. Memetakan Kuantitas

Dalam kondisi tertentu kita dihadapkan pada tugas untuk memetakan kuantitas, yaitu sesuatu yang berhubungan dengan jumlah, seperti dimana yang paling banyak atau dimana yang paling sedikit. Dengan melihat penyebaran kuantitas tersebut dapat dicari tempat-tempat yang sesuai dengan kriteria yang diinginkan dan digunakan untuk pengambilan keputusan, ataupun juga untuk mencari hubungan dari masing-masing tempat tersebut. Pemetaan ini akan lebih memudahkan pengamatan terhadap data statistik dibanding database biasa.

Sebagai contoh, sebuah perusahaan pakaian anak yang akan menyebarkan brosurnya akan terbantu dengan mengetahui daerah-daerah mana yang punya banyak keluarga dengan anak kecil dan mempunyai pendapatan yang tinggi.

Contoh SIG pada Gambar 3.4 memetakan jumlah penderita kanker di teluk Cod direlasikan dengan penggunaan lahan. Pemetaan ini digunakan untuk menganalisa apakah penggunaan pestisida dan bahan kimia lainnya berpengaruh terhadap kasus-kasus kanker yang terjadi.



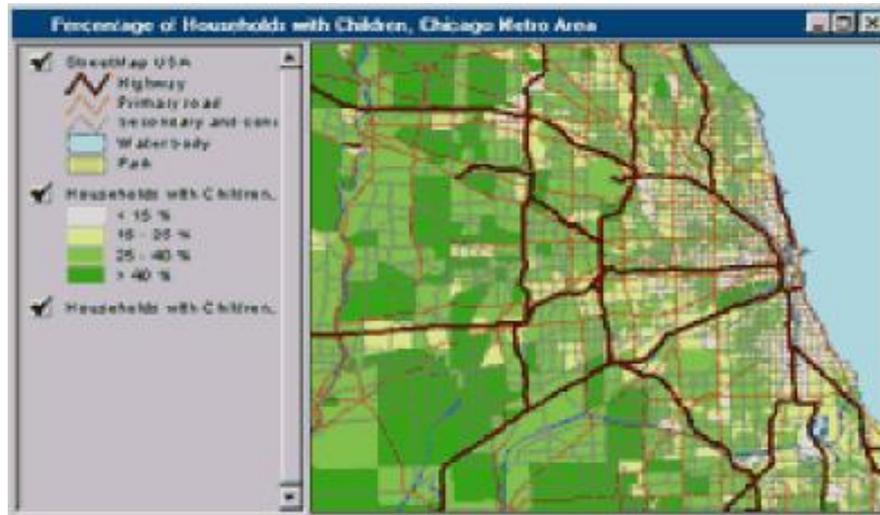
Gambar 3.4
Memetakan Kuantitas

c. Memetakan Kerapatan (Densities)

Sewaktu orang melihat konsentrasi dari penyebaran lokasi dari feature-feature, di wilayah yang mengandung banyak feature mungkin akan mendapat kesulitan untuk melihat wilayah mana yang mempunyai konsentrasi lebih tinggi dari wilayah lainnya. Peta kerapatan dapat mengubah bentuk konsentrasi kedalam unit-unit yang lebih mudah untuk dipahami dan seragam, misal membagi dalam kotak-kotak selebar 10 km², dengan menggunakan perbedaan warna untuk menandai tiap-tiap kelas kerapatan. Pemetaan kerapatan sangat berguna untuk data-data yang berjumlah besar seperti sensus atau data statistik daerah.

Dalam data sensus seperti Gambar 3.5 misalnya, sebuah unit sensus yang mempunyai jumlah keluarga diatas 40 diberi warna hijau, 30-40 hijau muda dan seterusnya. Dengan

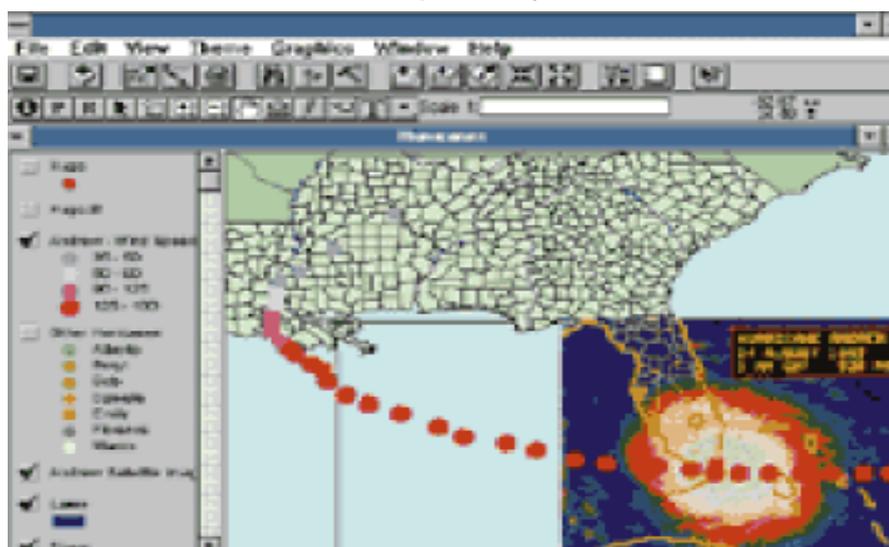
cara ini orang akan lebih mudah melihat daerah mana yang kepadatan penduduknya tinggi dan mana yang kepadatan penduduknya rendah.



Gambar 3.5
Memetakan Kerapatan

d. Memetakan Perubahan

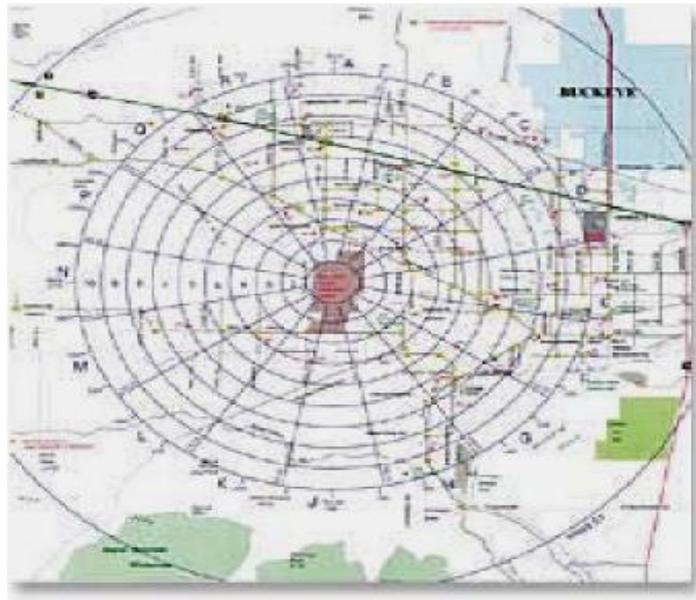
Dengan memasukkan variabel waktu, SIG dapat dibuat untuk peta historikal. Histori ini dapat digunakan untuk memprediksi keadaan yang akan datang dan dapat pula digunakan untuk evaluasi kebijaksanaan. Pemetaan jalur yang dilalui badai, dapat digunakan untuk memprediksi kemana nantinya arah badai tersebut (Gambar 3.6). Seorang manajer pemasaran dapat melihat perbandingan peta penjualan sebelum dan sesudah dilakukannya promosi untuk melihat efektivitas dari promosinya.



Gambar 3.6.
Memetakan Perubahan

e. Memetakan Apa yang Ada di Dalam dan di Luar Suatu Area

SIG digunakan juga untuk memonitor apa yang terjadi dan keputusan apa yang akan diambil dengan memetakan apa yang ada pada suatu area dan apa yang ada diluar area. Sebagai contohnya, pada Gambar 3.7 adalah peta sekolah, jalan, sirene dan lainnya dalam jarak radius 10 mil dari pembangkit listrik tenaga nuklir Palo Verde. Peta ini digunakan untuk dasar rencana apabila terjadi keadaan darurat. Adakalanya perlu untuk menentukan daerah yang diluar kriteria, misalnya untuk menentukan lokasi pabrik dilakukan di daerah dalam radius lebih dari 1 km.



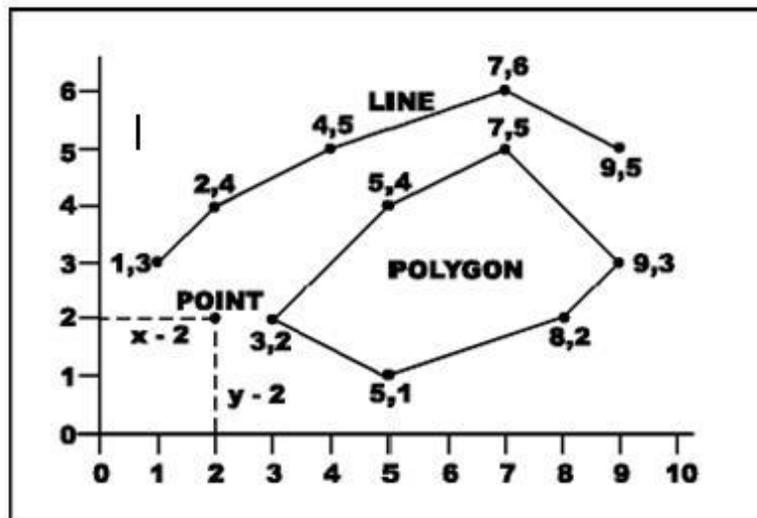
Gambar 3.7
Memetakan Didalam atau Diluar Area

3.5.5. Model Data SIG

1. Model Data Vektor

Model data vektor menampilkan, menempatkan, menyimpan data spasial dengan menggunakan titik-titik, garis-garis atau kurva, atau poligon beserta atribut-atributnya. Menyimpan koordinat bumi dalam bentuk titik. Garis dan polygon dibentuk dari kumpulan titik-titik.

Dalam data format vektor, bumi kita direpresentasikan sebagai suatu mosaik dari garis (arc/line), poligon (daerah yang dibatasi oleh garis yang berawal dan berakhir pada titik yang sama), titik/point (node yang mempunyai label), dan nodes (merupakan titik perpotongan antara dua buah garis).



Data vektor

Gambar 3.8

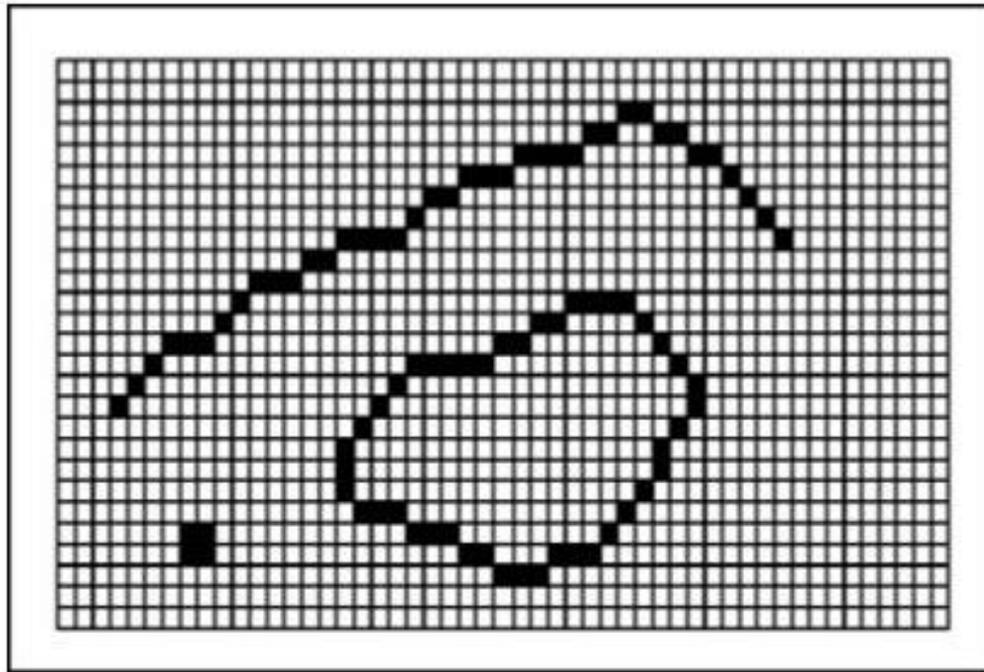
Representasi Data Vektor

Keuntungan utama dari format data vektor adalah ketepatan dalam merepresentasikan fitur titik, batasan dan garis lurus. Hal ini sangat berguna untuk analisa yang membutuhkan ketepatan posisi, misalnya pada basisdata batas-batas kadaster. Contoh penggunaan lainnya adalah untuk mendefinisikan hubungan spasial dari beberapa fitur. Kelemahan data vektor yang utama adalah ketidakmampuannya dalam mengakomodasi perubahan gradual.

2. Model Data Raster

Model data raster menampilkan, menempatkan, menyimpan data spasial dengan menggunakan struktur matriks atau pixel yang membentuk grid. Kebanyakan model data raster adalah digital image dalam berbagai jenis type file misalnya .tiff, .jpg, .gif, .bmp, .img.

Data raster (atau disebut juga dengan sel grid) adalah data yang dihasilkan dari sistem Penginderaan Jauh. Pada data raster, obyek geografis direpresentasikan sebagai struktur sel grid yang disebut dengan pixel (*picture element*). Pada data raster, resolusi (definisi visual) tergantung pada ukuran pixel-nya. Dengan kata lain, resolusi pixel menggambarkan ukuran sebenarnya di permukaan bumi yang diwakili oleh setiap pixel pada citra. Semakin kecil ukuran permukaan bumi yang direpresentasikan oleh satu sel, semakin tinggi resolusinya. Data raster sangat baik untuk merepresentasikan batas-batas yang berubah secara gradual, seperti jenis tanah, kelembaban tanah, vegetasi, suhu tanah, dan sebagainya. Keterbatasan utama dari data raster adalah besarnya ukuran file; semakin tinggi resolusi grid-nya semakin besar pula ukuran filenya.



Data raster

Gambar 3.9

Representasi Data Raster

Masing-masing format data mempunyai kelebihan dan kekurangan. Pemilihan format data yang digunakan sangat tergantung pada tujuan penggunaan, data yang tersedia, volume data yang dihasilkan, ketelitian yang diinginkan, serta kemudahan dalam analisa. Data vektor relatif lebih ekonomis dalam hal ukuran file dan presisi dalam lokasi, tetapi sangat sulit untuk digunakan dalam komputasi matematik. Sebaliknya, data raster biasanya membutuhkan ruang penyimpanan file yang lebih besar dan presisi lokasinya lebih rendah, tetapi lebih mudah digunakan secara matematis.

3.5.6. Representasi Data SIG

Penyajian fenomena geografis berbeda dengan cara pandang fenomena alam pada umumnya karena sifatnya yang unik dan sedikit rumit. Keunikan fenomena geografis terletak pada informasi tentang posisi dan kemungkinan hubungan keruangan dengan fenomena lain, di samping atribut (informasi tentang sifat-sifat lain) dari fenomena tersebut.

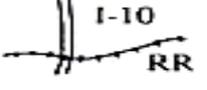
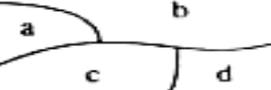
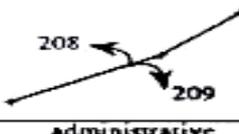
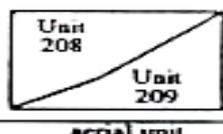
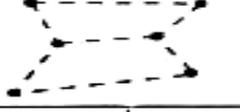
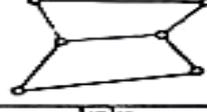
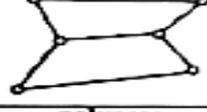
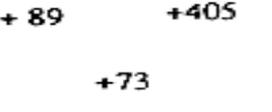
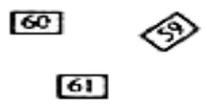
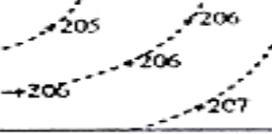
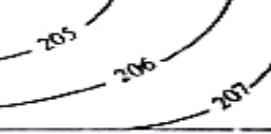
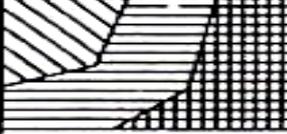
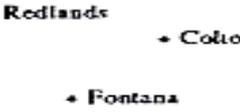
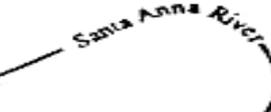
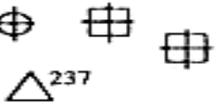
Konsep penyajian fenomena geografis ini telah lama menjadi dasar teknik pemetaan permukaan bumi. Setiap lembar peta, sesuai dengan "tema"-nya, pada dasarnya adalah penyajian dalam bentuk gambar yang menunjukkan posisi dan hubungan keruangan dari tiga katagori simbol objek, yaitu titik, garis, dan poligon (area). Terdapat tujuh fenomena geografis

yang dapat digambarkan dalam tiga bentuk simbol (titik, garis, dan poligon), yaitu: Data kenampakan (*feature data*), Unit area (*aerial unit*), Jaringan topologi (*topology network*), Catatan sampel (*sampling record*), Data permukaan bumi (*surface data*), Data label/teks (*label/text data*), dan Data simbol grafis (*graphic symbol data*).

Masing-masing bentuk simbol, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.11, dapat diuraikan sebagai berikut:

1. **Simbol titik** (*point symbols*), dapat dibedakan berdasarkan bentuknya, yaitu bentuk simbol kualitatif seperti simbol kota (bulat atau persegi), simbol gunung (segitiga), simbol titik-titik geometrik (tanda +). Sedangkan titik kuantitatif biasanya dinyatakan seperti simbol kualitatif diberi harga satuan angka (ketinggian gunung, nomor titik triangulasi), simbol kuantitatif dapat dinyatakan dalam tulisan seperti nama kota (Pemangkat, Tebas, dan Galing), dapat juga dinyatakan dalam perbandingan yang mewakili satuan tertentu yang berhubungan dengan data statistik misalnya simbol kota yang menyatakan kepadatan penduduknya.
2. **Simbol garis** (*line symbols*), secara kualitatif mempunyai bentuk, pola, dan karakter unsur yang diwakilinya (misal jalan, sungai), dapat juga menggambarkan gerakan arus seperti jalur penerbangan, arus migrasi. Simbol garis dapat pula menggambarkan kondisi yang sesungguhnya (deskriptif) sesuai kenyataan (*real fact*) seperti jalan raya, jalur irigasi dan dapat menggambarkan bentuk khayal (*abstract*) yang merupakan hasil pernyataan seperti batas negara, batas propinsi. Simbol garis kuantitatif merupakan gambaran unsur garis yang dapat menunjukkan unsur besaran secara proporsional, dengan penggambaran garis tebal atau tipis, seperti jalan raya, jalan tol, jalan kampung. Simbol garis yang menghubungkan tempat-tempat yang mempunyai kuantitas (harga/nilai) sama, misalnya garis kontur (data ketinggian), *isobar* (data tekanan udara), *isotherm* (data suhu). Simbol garis kuantitatif dengan tanda panah menggambarkan arah perpindahan, tebalnya garis dapat menunjukkan arah dan jumlah, seperti pergerakan angin, perpindahan penduduk.
3. **Simbol poligon atau area** (*polygon/aerial symbols*), menunjukkan bidang atau keluasan yang secara **kualitatif** memperlihatkan gambaran tentang unsur yang mewakili suatu daerah, misalnya peta penggunaan lahan, peta tanah, peta pariwisata. Pemisahan bagian-bagian dari unsur-unsurnya dapat digambarkan dengan pola atau warna, dan dapat juga secara deskriptif (tulisan) yang menyatakan unsur-unsur daerah tertentu, seperti rawa, danau, kebun kelapa sawit, hutan bakau. Simbol poligon secara kuantitatif umumnya

dinyatakan dengan simbol pola atau warna sesuai dengan harga atau jumlah nilai statistiknya, seperti peta curah hujan, peta kepadatan penduduk, peta sumber daya alam.

	POINTS	LINES	POLYGONS
FEATURE DATA	 point feature (archaeological site)	 linear features (roads)	 homogeneous polygons (soils)
AERIAL UNITS	 polygon centroids	 administrative polygon boundaries	 aerial unit (census tract)
NETWORK TOPOLOGY	 nodes (intersections)	 links (streets)	 polygons (blocks)
SAMPLING RECORDS	 weather station	 flight lines	 field test plots
SURFACE DATA	 topographic elevations	 contour lines	 proximal polygons
LABEL/TEXT DATA	 place names	 linear feature	 polygon naming
GRAPHIC SYMBOL DATA	 point symbols	 line symbols	 polygon shading

Gambar 3.10

Klasifikasi Tipe Data Geografis dan Representasinya

3.6 PERANCANGAN SISTEM

3.6.1 Analisis Kebutuhan Informasi

Untuk mencapai maksud dari pengembangan sistem ini perlu dilakukan analisis kebutuhan akan pemetaan dan penanganan terpadu buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk di Kota

Pontianak. Berdasarkan lima Informasi ini disusun suatu analisis kebutuhan informasi sebagaimana Tabel 3.3.

Tabel 3.1.
Kebutuhan Informasi Objek Study

No	Jenis Informasi	Kebutuhan Informasi
1	Informasi Kependudukan	Informasi Tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Kepadatan Penduduk • Jumlah Penduduk • Perekonomian Penduduk • Lingkungan
2	Informasi Keaksaraan	Informasi Tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Keaksaraan • Jumlah Putus Sekolah
3	Informasi Status Gizi	Informasi Tentang: <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah Balita • Status Gizi Berdasarkan Kecamatan • Balita Gizi Buruk

3.6.2 Struktur Data Spasial dan Non-Spasial

Perancangan data difokuskan pada struktur basis data spasial maupun non spasial. Basis data spasial dibagi ke dalam beberapa lapisan data (*layer*) sesuai dengan karakteristik data wilayah objek kajian, sedangkan basis data non spasial ditentukan berdasarkan kebutuhan informasi untuk setiap kegiatan operasional. Kebutuhan data spasial untuk kegiatan ini mencakup sedikitnya 5 (lima) lapisan data grafis (*layer*) sebagaimana pada Tabel 3.4. Layer-layer tersebut telah dianalisis sesuai dengan kebutuhan data untuk kegiatan study pemetaan dan penanganan terpadu buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk di Kota Pontianak. Model data yang digunakan dalam perancangan struktur data spasial dan non spasial adalah model relasional. Pemodelan data merupakan pengelompokan data dalam suatu struktur logika, yang digambarkan dengan *entity relationship diagrams* (ERD).

Tabel 3.2
Layer Data Spasial

No	Nama Lapisan Data (<i>Layer</i>)	Topologi	Feature Attribute Table (FAT)
1	Batas Administrasi	<i>Polygon</i>	<i>Polygon Attribute Table</i>
2	Infrastruktur Jalan	<i>Line</i>	<i>Arc Attribute Table</i>
3	Sungai	<i>Line</i>	<i>Arc Attribute Table</i>
4	Fasilitas pendidikan dan kesehatan	<i>Point</i>	<i>Point Attribute Table</i>

3.6.3 Sumber Data Spasial dan Non-Spasial

SIG membutuhkan masukan data yang bersifat spasial maupun deskriptif. Beberapa sumber data tersebut antara lain adalah:

1. Peta analog (peta topografi, peta tanah, dan sebagainya.)

Peta analog adalah peta dalam bentuk cetakan. Pada umumnya peta analog dibuat dengan teknik kartografi, sehingga sudah mempunyai referensi spasial seperti koordinat, skala, arah mata angin dan sebagainya. Peta analog dikonversi menjadi peta digital dengan berbagai cara. Referensi spasial dari peta analog memberikan koordinat sebenarnya di permukaan bumi pada peta digital yang dihasilkan. Biasanya peta analog direpresentasikan dalam format vektor.

2. Data dari sistem Penginderaan Jauh (citra satelit, foto-udara, dan sebagainya.)

Data Pengindraan Jauh dapat dikatakan sebagai sumber data yang terpenting bagi SIG karena ketersediaanya secara berkala. Dengan adanya bermacam-macam satelit di ruang angkasa dengan spesifikasinya masing-masing, kita bisa menerima berbagai jenis citra satelit untuk beragam tujuan pemakaian. Data ini biasanya direpresentasikan dalam format raster.

3. Data hasil pengukuran lapangan.

Contoh data hasil pengukuran lapangan adalah data batas administrasi, batas kepemilikan lahan, batas persil, batas hak perusahaan hutan, dan sebagainya yang dihasilkan berdasarkan teknik perhitungan tersendiri. Pada umumnya data ini merupakan sumber data atribut.

4. Data GPS (*Global Positioning System*).

Global Positioning System (Sistem Pencari Posisi Global), adalah suatu jaringan satelit yang secara terus menerus memancarkan sinyal radio dengan frekuensi yang sangat rendah. Alat penerima GPS secara pasif menerima sinyal ini, dengan syarat bahwa pandangan ke langit tidak boleh terhalang, sehingga biasanya alat ini hanya bekerja di ruang terbuka. Satelit GPS bekerja pada referensi waktu yang sangat teliti dan memancarkan data yang menunjukkan lokasi dan waktu pada saat itu. Operasi dari seluruh satelit GPS yang ada disinkronisasi sehingga memancarkan sinyal yang sama. Alat penerima GPS akan bekerja jika ia menerima sinyal dari sedikitnya 4 buah satelit GPS, sehingga posisinya dalam tiga dimensi bisa dihitung. Pada saat ini sedikitnya ada 24 satelit GPS yang beroperasi setiap waktu dan dilengkapi dengan beberapa cadangan. Satelit tersebut dioperasikan oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat, mengorbit selama 12 jam (dua orbit per hari) pada ketinggian sekitar 11.500 mil dan bergerak dengan kecepatan 2000 mil per jam.

Sumber data tersebut di atas semuanya akan digunakan untuk menghasilkan analisis spasial yang komprehensif dan integral. Data spasial dan non-spasial yang akan digunakan adalah sebagai berikut:

1. Data Spasial

a. Format Raster

- *Data Terrain Model (DTM) Online Sattellite Imagery*
- *Data Elevation Model (DEM)*
- *Mosaic Satellite Imagery*

b. Format Vector

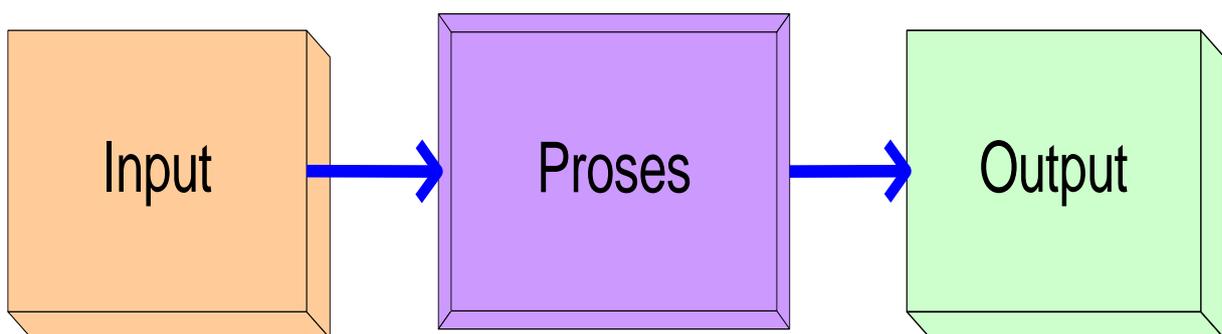
- Peta Dasar Kota Pontianak (dalam format vector ArcView GIS)
- Peta Dasar Batas Administrasi Kecamatan (dalam format vektor ArcView GIS)

2. Data Atribut

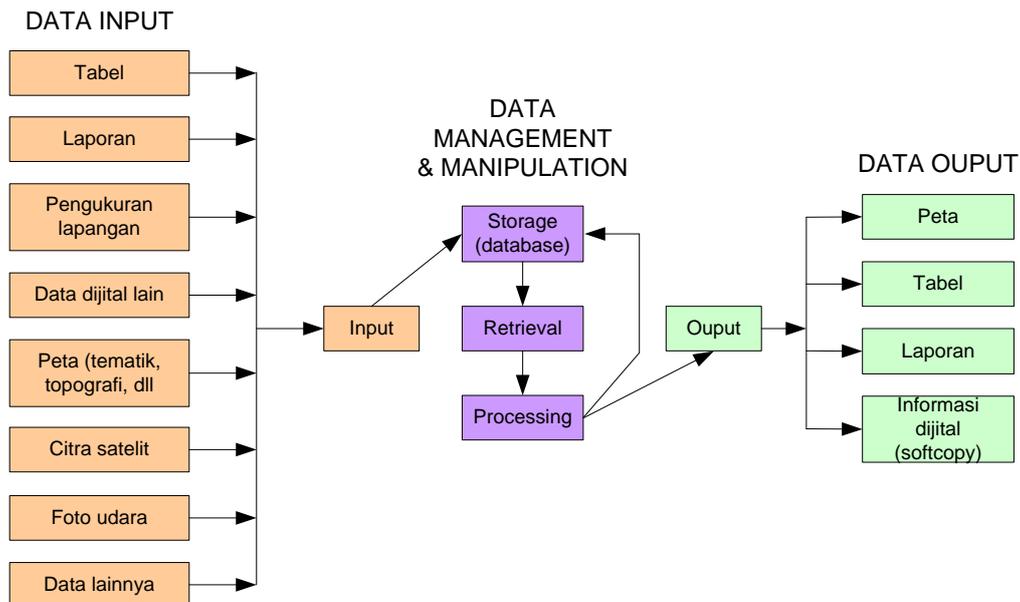
Data atribut yang akan diolah merujuk pada Tabel 3.3 dan 3.5.

3.6.4. Representasi Rancangan Sistem Pada Program Aplikasi SIG

Representasi rancangan sistem ini menggambarkan proses-proses yang akan dilakukan dalam membangun suatu aplikasi SIG. Setiap tahapan akan dijelaskan dengan bantuan gambar atau diagram untuk memperjelas proses yang akan dilakukan. Sebagaimana perancangan sistem informasi pada umumnya (misalnya Sistem Informasi Manajemen) tahapan yang dilakukan mengikuti diagram sederhana sebagaimana Gambar 3.11. Selanjutnya dalam domain SIG diperjelas ke dalam subsistem yang lebih rinci sebagaimana Gambar 3.12.



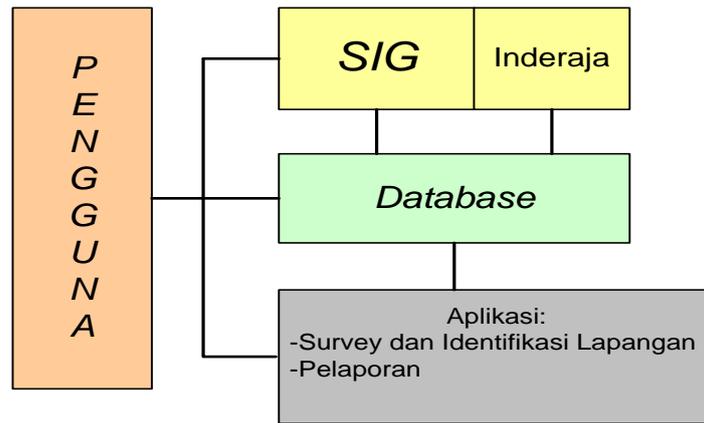
Gambar 3.11
Diagram Proses Sistem Informasi



Gambar 3.12
Hubungan Subsistem SIG

Sebagaimana Gambar 3.12, data input terdiri dari berbagai macam bentuk/format yang dijadikan subsistem input. Untuk menjadi subsistem input dalam SIG semua data harus mempunyai unsur spasial atau informasi tentang lokasi, jika berupa data atribut maka harus mempunyai relasi dengan data spasial yang ada. Selanjutnya pada subsistem proses atau biasa disebut *data management & manipulation*. data disimpan dalam database, diakses (*retrieval*), dan diproses lebih lanjut. Setelah melalui pemrosesan data selanjutnya disimpan kembali dalam database dan/atau diteruskan ke subsistem output. Subsistem output berfungsi untuk penayangan data (*data display*) baik ditayangkan pada monitor, dicetak (*print out*), atau disimpan dalam format tertentu (*softcopy*) untuk keperluan penayangan data dengan sistem yang lain, misalnya melalui web.

Jika ditinjau dari sudut pandang pengguna (*user*) maka pengguna dapat dibedakan menjadi tiga tingkat berdasarkan sistem yang diaksesnya, perhatikan Gambar 3.13. Tingkat pertama adalah pengguna yang mengakses ke sistem SIG dan/atau Inderaja, pengguna pada tingkat ini harus memiliki kemampuan pengolahan data SIG dan Inderaja, serta analisis spasial. Tingkat kedua adalah pengguna yang mengakses ke sistem database, pengguna pada tingkatan ini memiliki kemampuan manajemen database atau paling tidak memahami bagaimana input, edit, dan update database. Selanjutnya tingkat ketiga adalah pengguna yang memakai hasil akhir dari rancangan SIG, termasuk pada tingkatan ini adalah seorang surveyor yang akan melakukan survey dan identifikasi lapangan menggunakan hasil analisis SIG.



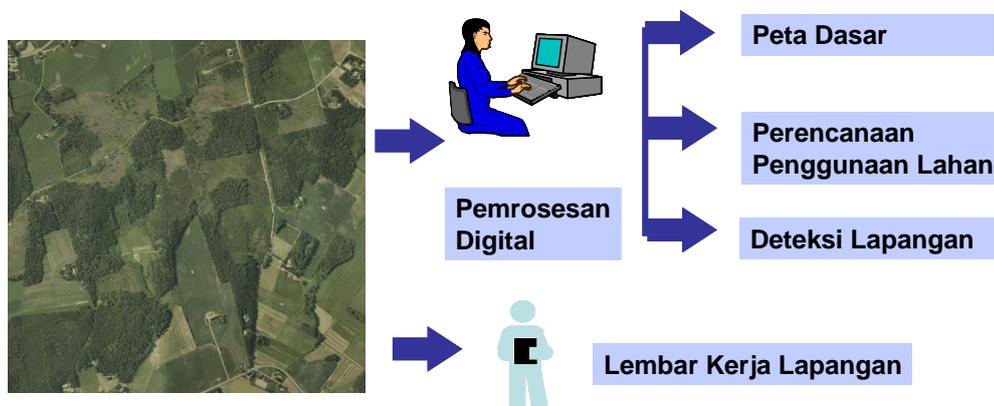
Gambar 3.13
Tingkatan Pengguna SIG

Berikut akan dijelaskan proses yang akan dilakukan dalam membangun Sistem Informasi Pemantauan Status Gizi Balita di Kota Pontianak dengan menggunakan salah satu komponen data input yaitu foto udara dalam hal ini menggunakan *EnsoMOSAIC Digital Aerial Imagery (DAI)*. Untuk data inderaja yang lain, misalnya data satelit Landsat 7 ETM dan Ikonos, diproses dengan cara yang hampir sama.

Tahapan pengolahan data yang dilakukan sebagai berikut:

a. Pemrosesan Digital

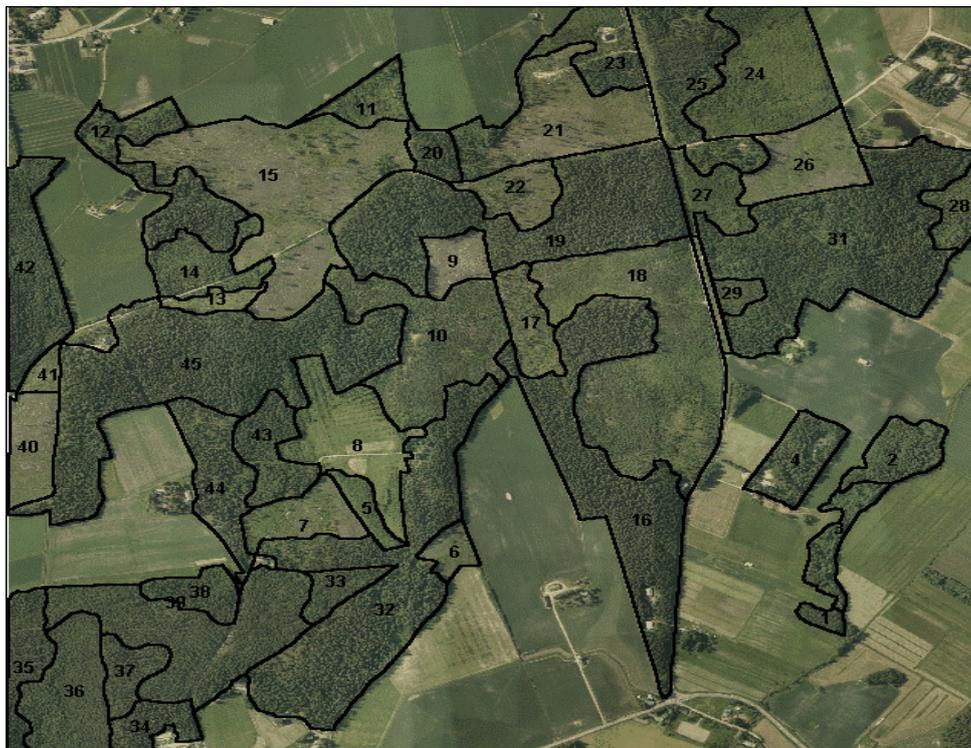
EnsoMOSAIC adalah hasil foto udara dari suatu kawasan yang akan dikelola, format datanya adalah raster. Dengan perangkat lunak SIG baik berbasis raster maupun berbasis vector, data *EnsoMOSAIC* diproses secara digital untuk mendapatkan keluaran antara lain berupa peta dasar, peta perencanaan penggunaan lahan, dan peta untuk deteksi lapangan. Pada Gambar 3.14 memperlihatkan proses pengolahan data *EnsoMOSAIC*, dari pemrosesan digital akan diperoleh data spasial dalam bentuk *vector*.



Gambar 3.14.
Pemrosesan Digital

b. Interpretasi dan Delinasi Kawasan

Interpretasi adalah proses “menterjemahkan” kenampakan dari objek-objek pada data *EnsoMOSAIC*. Kenampakan (*land cover*) dapat berupa vegetasi, bangunan, jalan, sungai, dan sebagainya. Khusus untuk kenampakan vegetasi harus dilakukan interpretasi sampai tingkat yang lebih detail misalnya jenis vegetasi seperti rumput, semak, padi, pohon, dan sebagainya. Interpretasi dapat dilakukan langsung secara visual maupun menggunakan formulasi. Selanjutnya dilakukan delinasi kawasan yaitu melakukan digitasi pada objek-objek yang telah diinterpretasi sebelumnya. Gambar 3.15 memperlihatkan contoh kawasan yang telah diinterpretasi dan didelinasi.



Gambar 3.15.

Interpretasi dan Delinasi Kawasan

c. Pembuatan Peta Tematik

Peta tematik dibentuk berdasarkan interpretasi dan delinasi kawasan dengan mengelompokkan kenampakan berdasarkan temanya. Misal peta tematik vegetasi dibentuk dengan *feature type* (topologi) poligon dimana vegetasi dibedakan berdasarkan jenis vegetasi yang berhasil diinterpretasi. Untuk peta tematik saluran air dan jalan menggunakan topologi garis tetapi keduanya berada pada layer yang berbeda. Dari peta tematik yang terbentuk selanjutnya dilakukan analisis spasial untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, misal kelereng, sehingga kawasan yang dianalisis ini dapat ditentukan penggunaannya (*land use*).



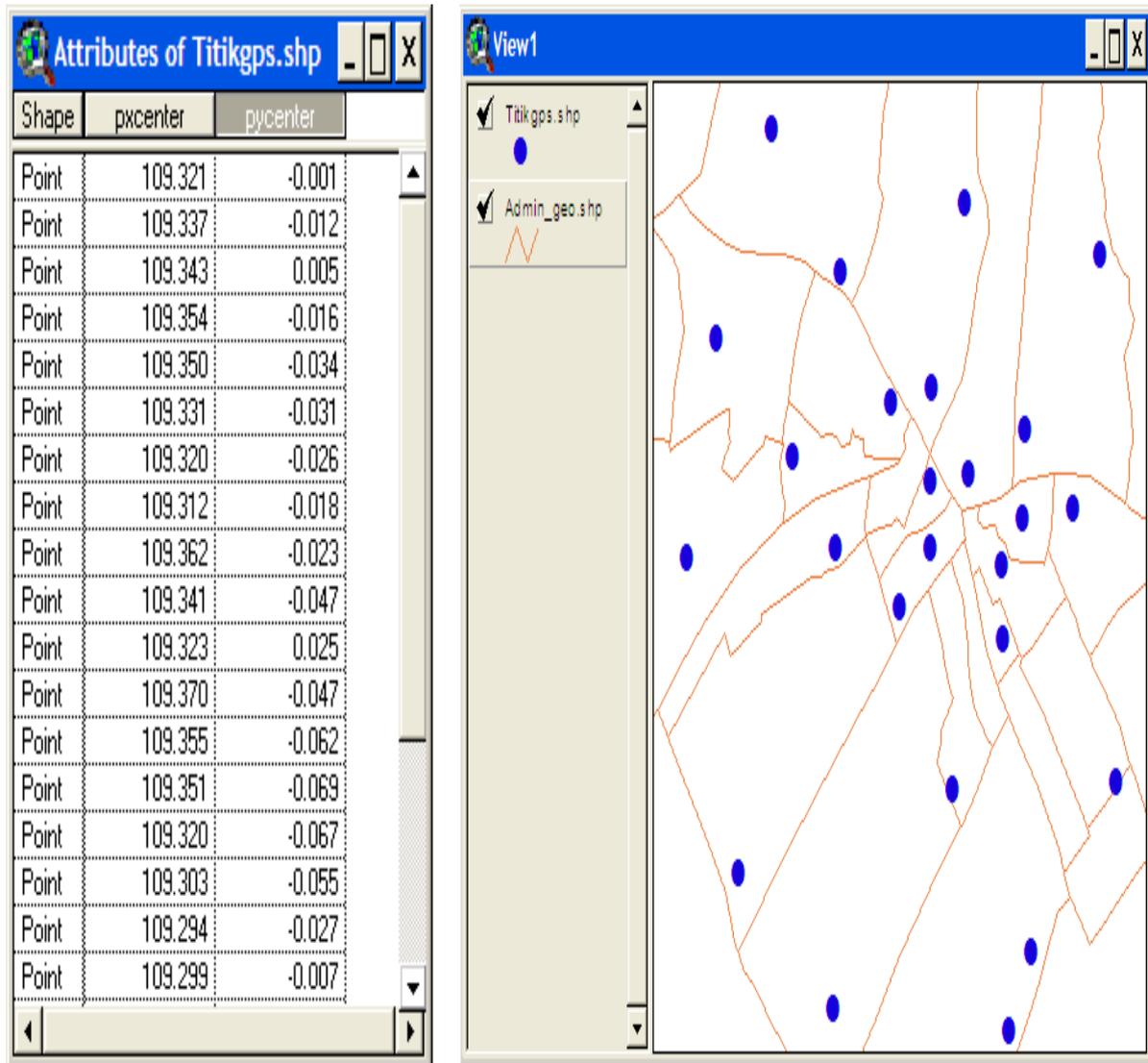
Gambar 3.16
Peta Tematik

d. Survey Lapangan

Untuk mendapatkan detail data pada kawasan tersebut dilakukan survey lapangan atau (*ground truth*) berdasarkan lembar kerja lapangan yang telah disusun sebelumnya sebagai hasil pemrosesan digital. Survey lapangan bertujuan untuk mendapatkan detail data atribut dari kawasan yang akan dikelola, selanjutnya data atribut ini direlasikan dengan data spasial agar dapat diproses lebih lanjut.

Surveyor akan membawa GPS receiver untuk mendapatkan informasi lokasi atau koordinat dari objek yang disurvei berdasarkan Tabel 3.5. Sistem koordinat yang dapat digunakan misalnya koordinat geografis dalam format DMS (*degree, minute, second*) atau dalam koordinat proyeksi UTM dengan satuan meter.

Selain koordinat, juga dilakukan pengumpulan data atribut sebagaimana Tabel 3.6. Data koordinat selanjutnya diproses dengan mentransferkannya ke komputer. Data GPS ini selanjutnya diolah dalam perangkat lunak ArcView untuk di-plot menjadi data spasial.

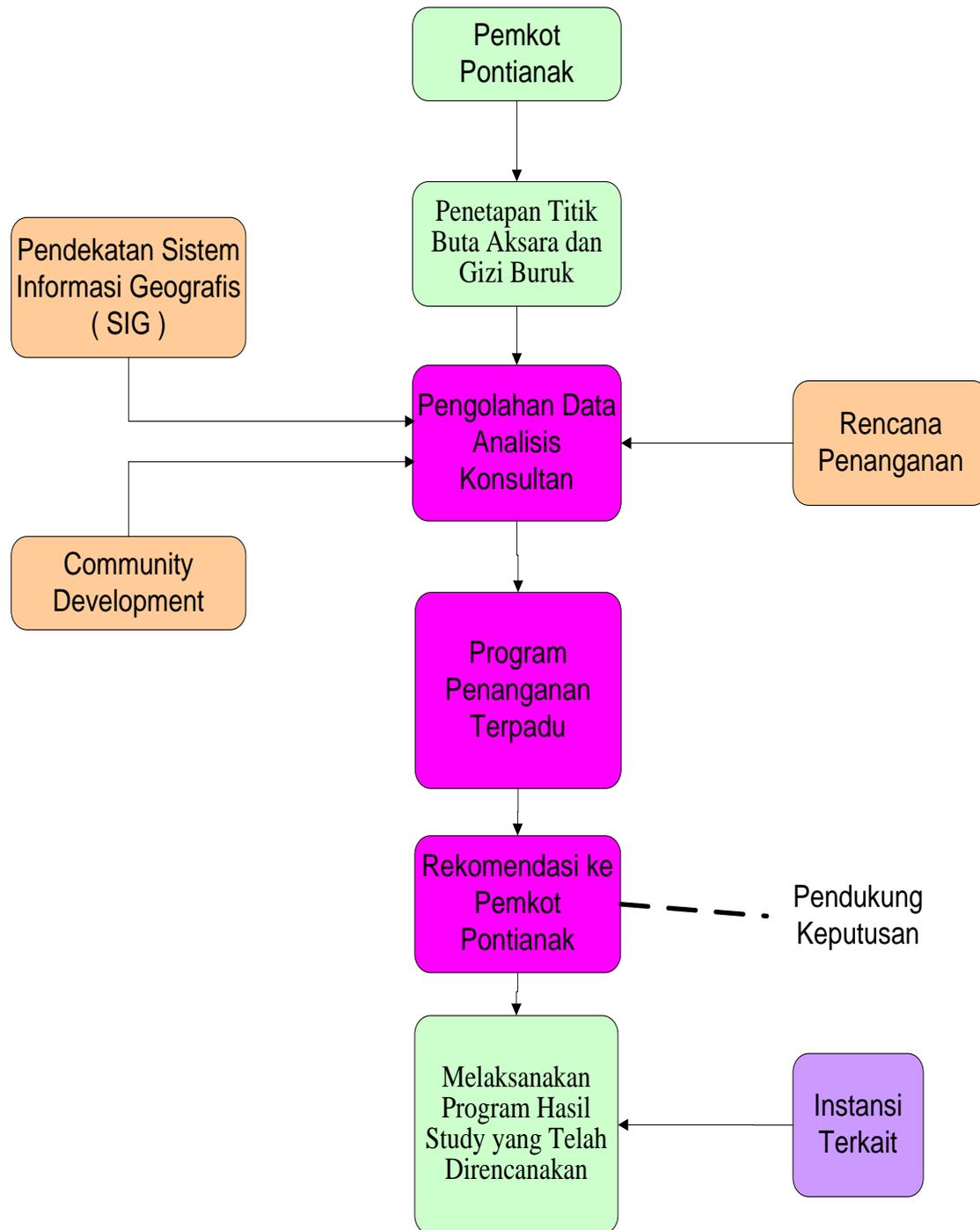


Gambar 3.17

Contoh Data Survey GPS dan Hasil Pengolahannya

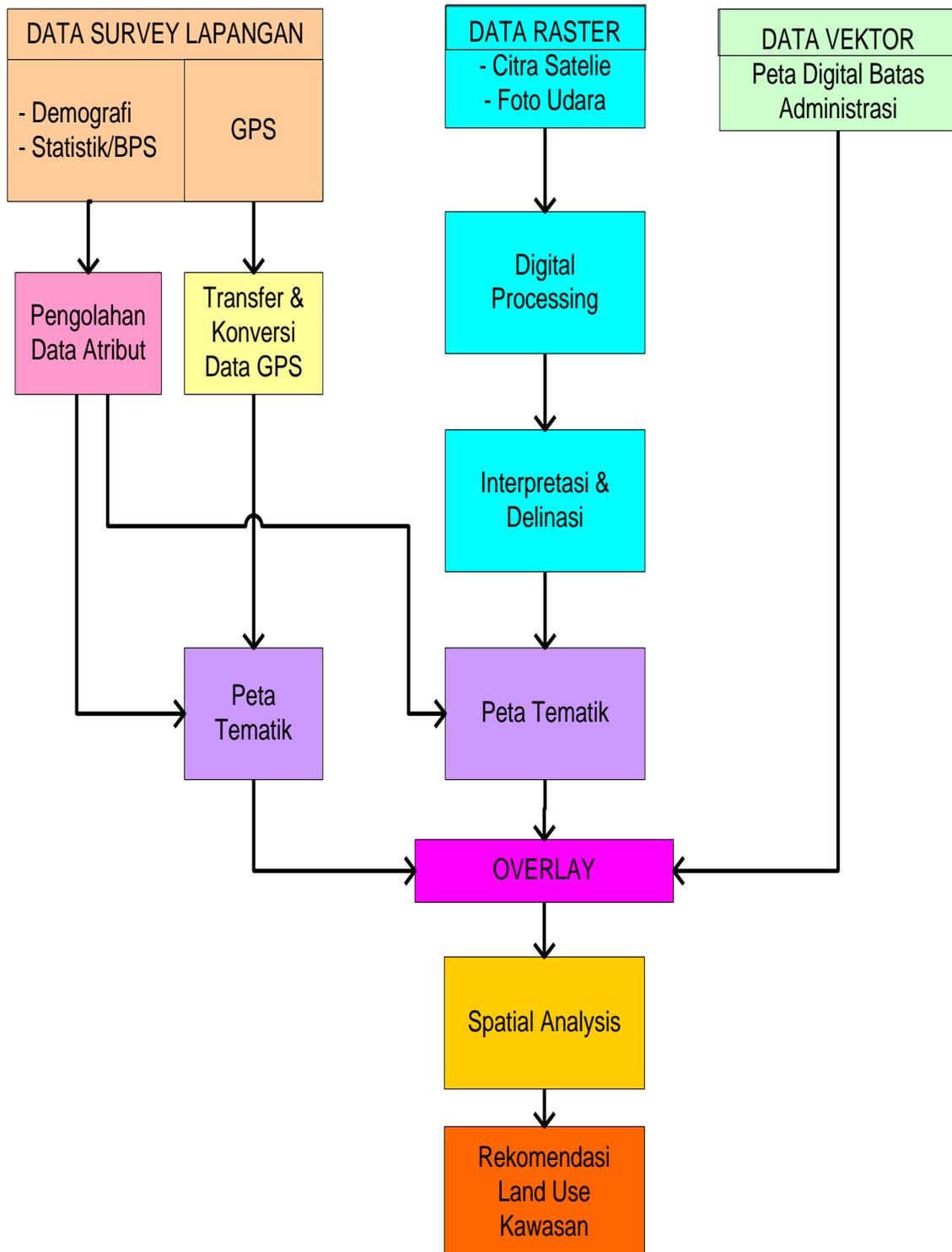
3.7 IMPLEMENTASI SISTEM

Dari paparan yang telah dijelaskan untuk implementasi keseluruhan dari study yang telah dilakukan dapat digambarkan dalam bentuk diagram seperti Gambar 3.18 berikut ini:



Gambar 3.18.
Pendekatan SIG untuk Penanganan Terpadu Buta Aksara dan Gizi Buruk

Kegiatan yang dilakukan pada Blok Pendekatan SIG Gambar 3.18 dijabarkan dalam kegiatan yang lebih detail sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 3.19.



Gambar 3.19
Proses Pengolahan Data SIG

4.1 KEAKSARAAN DAN PUTUS SEKOLAH

Buta aksara terdiri dari dua kata yakni buta dan aksara. Buta diartikan sebagai tidak dapat melihat, mengenali sesuatu dalam bentuk dan warna dengan cara melihat. Sedangkan aksara adalah sistem tanda grafis atau sistem tulisan yang digunakan manusia untuk berkomunikasi. Jadi, Buta Aksara dapat diartikan sebagai suatu kondisi dimana seseorang tidak dapat mengenali tanda garis atau system tulisan yang biasa digunakan oleh manusia untuk berkomunikasi sehari – hari. Dengan sistem tulisan ini, manusia dapat menyimpan kekayaan akal budinya serta mengingat berbagai peristiwa. Karena daya ingat manusia terbatas, dapat dikatakan bahwa tulisan memberikan sumbangan yang sangat berarti dalam pencatatan sejarah dan berbagai macam peristiwa dalam kehidupan manusia. Tanda-tanda grafis yang digunakan untuk pencatatan tersebut adalah berupa huruf maupun angka. Aksara dapat terdiri dari huruf-huruf, angka dan aksara khusus. Aksara yang meliputi huruf-huruf adalah:

- a. ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
- b. Abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
- c. Aksara yang meliputi angka-angka ialah: 0123456789; dan
- d. Aksara khusus yakni +:~*/()=,.'[]<>;{}

UNESCO mendefinisikan bahwa buta aksara adalah:

“ability to identify, understand, interpret, create, communicate and compute, using printed and written materials associated with varying contexts. Literacy involves a continuum of learning in enabling individuals to achieve their goals, to develop their knowledge and potential, and to participate fully in their community and wider society”.

Artinya: kemampuan untuk mengidentifikasi, memahami, menafsirkan, membuat, berkomunikasi dan menghitung, menggunakan material tercetak dan tertulis terkait dengan konteks yang bervariasi. Literasi melibatkan kontinum belajar dalam memungkinkan individu untuk mencapai tujuan mereka, untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi mereka, dan untuk berpartisipasi sepenuhnya dalam komunitas mereka dan masyarakat yang lebih luas.

Kemampuan baca tulis dianggap penting karena melibatkan pembelajaran berkelanjutan oleh seseorang sehingga orang tersebut dapat mencapai tujuannya, dimana hal ini berkaitan langsung

bagaimana seseorang mendapatkan pengetahuan, menggali potensinya, dan berpartisipasi penuh dalam masyarakat yang lebih luas.

Banyak analis kebijakan menganggap angka melek aksara adalah tolak ukur penting dalam mempertimbangkan kemampuan sumber daya manusia di suatu daerah. Hal ini didasarkan pada pemikiran yang beralih bahwa melatih orang yang mampu baca-tulis jauh lebih murah dari pada melatih orang yang buta aksara, dan umumnya orang-orang yang mampu baca-tulis memiliki status sosial ekonomi, kesehatan, dan prospek meraih peluang kerja yang lebih baik. Argumentasi para analis kebijakan ini juga menganggap kemampuan baca tulis juga berarti peningkatan peluang kerja dan akses yang lebih luas pada pendidikan yang lebih tinggi.

Beberapa faktor yang menyebabkan buta aksara dapat diidentifikasi sebagai berikut:

a. Kemiskinan penduduk.

Sejak lama, kemiskinan, buta aksara, ketertinggalan dan keterbelakangan, serta ketidakberdayaan masyarakat, memang sudah menjadi bagian dari masalah sosial yang kompleks dan multidimensional. Adanya krisis ekonomi yang berkepanjangan hingga saat ini sangat mempengaruhi usaha pemerintah dan masyarakat untuk mensukseskan wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun. Banyak anak Indonesia yang terancam buta aksara, yang diakibatkan oleh faktor kemiskinan dan ekonomi keluarga.

b. Putus sekolah dasar (SD)

Ancaman besar lain yang selalu menghantui dan menjadi penyebab timbulnya calon – calon buta aksara adalah masih besarnya anak – anak SD/MI yang putus sekolah. Belum lagi anak – anak yang belum memiliki kesempatan masuk sekolah dikarenakan berbagai hal, misalnya karena orang tua dan keluarganya tidak mampu.

c. *Drop out program* PLS

Salah satu yang kurang diperhatikan penyebab terjadinya buta aksara di Indonesia adalah DO program PLS yang selama ini dilaksanakan baik melalui program Paket A, yang dibiayai proyek OBAMA, UNICEF, PPLS, Pemda dan lainnya yang tidak diperhitungkan angka DO-nya, termasuk Paket A setara dengan SD dan Paket B setara SLTP.

d. Kondisi sosial masyarakat

1) Kesehatan dan gizi masyarakat.

Kondisi kesehatan dan gizi masyarakat yang kurang baik, jika tidak diperhatikan dengan seksama akan berpengaruh pada menurunnya angka partisipasi sekolah, terutama pada tingkat sekolah dasar.

2) Demografis dan geografis

Dilihat dari segi demografis dan geografis bagian terbesar dari jumlah penduduk tinggal di pedesaan, sekitar 70-80% penduduk dunia terutama di Negara-negara miskin dan yang

sedang berkembang termasuk Indonesia bermukim di pedesaan. Tenaga pendidik masih sangat kurang karena sebagian penduduk pedesaan berpendidikan rendah.

3) Issue gender.

Jika ditinjau dari isu gender, berbagai pendapat menyatakan keberatan yang dinyatakan dengan terus terang maupun hanya sekedar menggerutu di belakang. Pendapat ini tidak sekedar di kalangan aktivis pembangunan, tetapi juga di kalangan orang – orang yang berkecimpung di bidang pengembangan masyarakat utamanya di bidang pendidikan. Isu yang berkembang tahun – tahun belakangan ini yaitu adanya pola hubungan pembagian peran dan tugas antara laki – laki dan perempuan yang seimbang, setara dan saling melengkapi.

e. Penyebab struktural

1) Skala Makro

Secara struktural pengambilan kebijakan diberbagai level dan bidang, termasuk bidang pendidikan didominasi oleh laki – laki dibanding perempuan, sehingga keputusan yang dihasilkan pun adalah berdasarkan kacamata (kepentingan) laki – laki.

2) Skala Mikro

Dalam skala keluarga misalnya, hampir semua keputusan yang berkaitan dengan keuangan, akan didominasi oleh figur laki – laki (ayah), termasuk keputusan pembiayaan pendidikan bagi anak – anaknya.

3) Aspek kebijakan

Masalah klasik lainnya adalah program – program yang diluncurkan oleh pemerintah termasuk pendidikan, masih belum seluruhnya berpihak untuk kepentingan pengentasan bagi masyarakat yang memerlukannya. Banyak program – program pendidikan yang hanya bersifat “tawaran” dari atas yang belum tentu masyarakat membutuhkannya. Hal ini pun terjadi pada program pendidikan keaksaraan atau pemberantasan buta aksara, sehingga warga belajar yang menjadi sasaran didiknya tidak memiliki rasa tanggung jawab (*sense of responsibility*) untuk mensukseskannya, karena bukan berangkat dari apa yang dibutuhkan mereka (*bottom-up*).

Dari beberapa faktor di atas, kemiskinan adalah faktor utama yang membuat seseorang menjadi buta aksara karena untuk makan sehari-hari juga masih sulit apalagi untuk mengenyam bangku sekolah, meskipun sekarang sudah yang namanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tapi dana tersebut banyak di korupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Faktor struktural juga merupakan faktor cukup memiliki andil dalam menciptakan masyarakat buta huruf karena layanan pendidikan yang jauh juga menjadi faktor seseorang menjadi buta aksara, contohnya saja di daerah pedalaman atau daerah terpencil sangat jauh ke sekolah dasar sekalipun, apalagi ke sekolah lanjutan.

Mereka yang di daerah terpencil harus berangkat pagi-pagi sekali atau jam lima pagi karena jarak rumahnya dengan sekolah sangat jauh. Selain itu orang tua menganggap bahwa sekolah itu tidak penting. Orang tua menganggap bahwa sekolah adalah perbuatan yang sia-sia, tidak penting dan lebih baik menyuruh anak mereka untuk membantu berladang, berternak, berjualan, menggembala hewan, atau bahkan mereka menyuruh anak mereka untuk mengemis atau ngamen di jalan.

4.1.1 Indikator Standar Kompetensi Keaksaraan Tingkat Dasar

Dalam mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan ini, pihak konsultan mengacu pada petunjuk teknis penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat. Sebagai bahan referensi, dalam proses turun lapangan kontek pengambilan data buta aksara.

Melalui berbagai penjelasan yang tertera dalam acuan program pendidikan keaksaraan yang diterbitkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat, diharapkan proses penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dapat dilaksanakan dan dipertanggung jawabkan dengan baik dan transparan, dan memperoleh hasil yang optimal dalam upaya peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat sebagai sasaran program. Beberapa indikator standar kompetensi keaksaraan tingkat dasar adalah membaca, menulis, berhitung dan berkomunikasi.

1. Membaca

Berikut ini dibuatkan indikator standar kompetensi keaksaraan tingkat dasar sebagai berikut:

No.	Standar Kompetensi	Indikator	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar
1.	Mampu membaca kalimat sederhana (terdiri dari subyek, predikat dan obyek) dengan menggunakan bahasa indonesia	Membaca huruf vokal dan konsonan abjad Latin dengan lancar	<ul style="list-style-type: none"> ○ Permainan kartu huruf ○ Bernyanyi ○ Menggambar ○ Melafalkan Huruh ○ Bercerita 	Mampu membaca huruf vokal dan abjad latin dengan lancar
		Membaca suku kata yang terdiri atas sekurang-kurangnya dua huruf	<ul style="list-style-type: none"> ○ Melafalkan suku kata ○ Permainan suku kata ○ Menggambar ○ Bernyanyi 	Mampu mengenal dan membaca suku kata yang terdiri dari sekurang-kurangnya 2 huruf
		Membaca kata yang terdiri atas sekurang-kurangnya 2 suku kata	<ul style="list-style-type: none"> ○ Permainan kata yang dikenal di lingkungan setempat ○ Kartu kata ○ Lacak kata ○ Membaca gambar ○ Menyebutkan kata 	Mampu membaca kata yang terdiri atas sekurang-kurangnya 2 suku kata

			berimbuhan sesuai dengan gambar <ul style="list-style-type: none"> ○ Menjodohkan kata dengan gambar ○ Memperagakan kata melalui gerakan 	
		Membaca kalimat sederhana (terdiri atas subyek, predikat dan obyek) sekurang-kurangnya 7 kata dengan menggunakan bahasa Indonesia		Mampu membaca kalimat sederhana (terdiri atas subyek, predikat, obyek) dengan menggunakan bahasa Indonesia
2.	Membaca dan memahami petunjuk sederhana / pendek dengan menggunakan bahasa Indonesia	Membaca isi / pesan pada papan nama, arah, label, merk, poster sederhana	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memperkenalkan berbagai jenis papan nama, arah, label, poster, berdasarkan gambar ○ Memperagakan cara membaca berbagai jenis papan nama, arah, label, merk, poster berdasarkan gambar ○ Menjodohkan kata dengan gambar 	Mampu membaca dan memahami petunjuk sederhana dengan menggunakan bahasa Indonesia
3.	Membaca angka 1 sampai 100 dengan menggunakan bahasa Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> ○ Membaca lambang bilangan 1 sampai 10 ○ Membaca lambang bilangan 11 sampai 19 ○ Membaca lambang bilangan 20 sampai 100 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Lacak angka ○ Permainan angka ○ Menjodohkan angka / lambang bilangan dengan nama bilangan 	Mampu membaca angka 1 sampai 100 dengan menggunakan bahasa Indonesia

2. Menulis

Berikut ini dibuatkan indikator standar kompetensi keaksaran tingkat dasar sebagai berikut:

No.	Standar Kompetensi	Indikator	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar
1.	Menulis kalimat sederhana (terdiri dari subyek, predikat dan obyek) dengan	<ul style="list-style-type: none"> ○ Menulis huruf vokal dan konsonan abjad Latin dengan lancar ○ Menulis suku kata yang sekurang-kurangnya yang 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Praktik menulis huruf vokal dan konsonan ○ Menulis berdasarkan gambar ○ Praktik menulis suku kata yang sekurang- 	<ul style="list-style-type: none"> ○ Mampu menulis huruf vokal dan konsonan dengan lancar ○ Mampu menulis suku kata yang

	menggunakan bahasa Indonesia	terdiri dari 2 huruf ○ Menulis kata yang terdiri atas 2 suku kata ○ Menulis kalimat sederhana sekurang-kurangnya 7 kata dengan menggunakan bahasa Indonesia	kurangnya terdiri dari 2 huruf ○ Praktik menulis kata yang terdiri atas 2 suku kata ○ Praktik menulis kalimat sederhana dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar	sekurang-kurangnya terdiri dari 2 huruf ○ Mampu menulis kata yang terdiri atas 3 suku kata ○ Mampu menulis kalimat sederhana sekurang-kurangnya 7 kata dengan menggunakan bahasa Indonesia yang benar
2.	Menulis identitas diri dan alamat	○ Menulis nama, usia, tempat lahir dan tanggal lahir ○ Menulis nama jalan, nomor rumah, RT/RW, nama desa, nama kecamatan, kabupaten / kota	○ Praktik menulis nama, usia, tempat lahir, tanggal lahir ○ Praktik menulis nomor jalan, nomor rumah, RT/RW, nama desa, nama kecamatan, kabupaten/kota	○ Menulis nama, usia, tempat lahir, tanggal lahir ○ Menulis nama jalan nomor rumah, RT/ RW, nama desa, nama kecamatan, kabupaten/ kota.
3.	Menulis angka 1 sampai 100	○ Menulis angka 1-100 ○ Menulis angka 11-19 ○ Menulis angka 20-100	○ Menuliskan angka berdasarkan simbol	○ Mampu menulis angka 1-10 ○ Mampu menulis angka 11-19 ○ Mampu menulis angka 20-100

3. Berhitung

Berikut ini dibuatkan indikator standar kompetensi keaksaran tingkat dasar sebagai berikut:

No.	Standar Kompetensi	Indikator	Pengalaman Belajar	Standar Kompetensi
1.	Mengenal angka 1-100	Menghitung (mencacah) banyak objek (benda, gambar, dll) secara berurutan (dari 1 sampai 100)	Diberikan sejumlah objek di lingkungan sekitar, menghitung jumlah objek tersebut (dari angka 1 sampai 100)	Mampu menghitung (mencacah) banyak objek (benda, gambar, dll) secara berurutan (dari 1-100)
		Membandingkan dua kumpulan obyek hitung, menyatakan dalam istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak	Membandingkan dua kumpulan objek yang dikenal dan menyatakan secara lisan dan tulisan dalam istilah "lebih banyak", "lebih sedikit" atau "sama banyak"	Mampu membandingkan dua kumpulan objek hitung, menyatakan dalam istilah lebih banyak, lebih sedikit, atau sama banyak.
		Mengurutkan lambang bilangan	Mengurutkan serangkaian lambang	Mampu mengurutkan lambang bilangan yang

		yang terdiri atas 2 angka dari terkecil atau terbesar	bilangan yang terdiri atas 2 angka dari terkecil hingga terbesar atau sebaliknya	terdiri atas 2 angka dari terkecil hingga terbesar
		Menyusun obyek (benda atau gambar) dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya	Disediakan beberapa objek (benda atau gambar), kemudian warga belajar diminta mengurutkan banyak objek, dari terkecil sampai terbesar atau sebaliknya	Mampu menyusun objek (benda atau gambar) dari yang terkecil sampai terbesar atau sebaliknya
2.	Melakukan perhitungan penjumlahan dan pengurangan sekurang-kurangnya 1 angka	Menghitung dengan menggunakan simbol "+, -, dan =" dalam mengerjakan penjumlahan dan pengurangan sekurang-kurangnya 1 angka	Menghitung jumlah atau selisih dua kumpulan objek (benda atau gambar yang sama) kemudian menuliskan dan membacanya dalam lambang bilangan dengan simbol "+, - dan =" sekurang-kurangnya 1 angka	Mampu menghitung dengan menggunakan simbol "+, -, =" dalam mengerjakan penjumlahan dan pengurangan sekurang-kurangnya 1 angka.
		Menghitung penjumlahan atau pengurangan bilangan 1 angka dengan menggunakan metode susun ke bawah	Menghitung penjumlahan atau pengurangan bilangan 1 angka dengan menggunakan metode penulisan lambang bilangan susuk ke bawah	Mampu menghitung penjumlahan atau pengurangan bilangan 1 angka dengan menggunakan metode susun ke bawah
		Melakukan perhitungan penjumlahan dan pengurangan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari (sekurang-kurangnya 1-100)	Menerapkan konsep penjumlahan atau pengurangan secara fungsional dengan mengambil contoh dari pekerjaan atau kehidupan sehari-hari (sekurang-kurangnya 1 -100)	Mampu melakukan perhitungan penjumlahan dan pengurangan dalam pekerjaan atau kehidupan sehari-hari (sekurang-kurangnya 1 – 100)
3.	Mengenal satuan waktu	Mengenal satuan waktu seperti hari, minggu, bulan, tahun dan jam	<ul style="list-style-type: none"> ○ Dikenalkan nama-nama hari dan bulan ○ Dikenalkan jumlah jam dalam satu hari, jumlah hari dalam 1 minggu, jumlah minggu dalam 1 bulan, jumlah bulan dalam satu tahun. 	Mampu mengenal satuan waktu seperti hari, minggu, bulan, tahun dan jam

4. Berkomunikasi

Berikut ini dibuatkan indikator standar kompetensi keaksaraan tingkat dasar sebagai berikut:

No.	Standar Kompetensi	Indikator	Pengalaman Belajar	Hasil Belajar
1.	Berkomunikasi menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara lisan	Menjawab pertanyaan dengan benar menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara lisan terkait dengan masalah yang dihadapi sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> ○ Memperhatikan cara menjawab pertanyaan secara berpasangan ○ Menjawab pertanyaan yang diajukan oleh tutor 	Mampu menjawab pertanyaan dengan benar menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara lisan terkait dengan masalah yang dihadapi sehari-hari
		Mengajukan pertanyaan dengan benar menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara lisan terkait dengan masalah yang dihadapi sehari-hari	<ul style="list-style-type: none"> ○ mempraktikkan cara mengajukan pertanyaan menggunakan kata tanya apa, siapa, mengapa, bagaimana, dimana dan kapan ○ Mengajukan pertanyaan secara lisan kepada tutor atau warga belajar lain secara berpasangan 	Mampu mengajukan pertanyaan dengan benar menggunakan bahasa daerah dan bahasa Indonesia secara lisan terkait dengan masalah yang dihadapi sehari-hari
		Bertanya jawab tentang satu masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah secara lisan	Menanyakan dan menjawab masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari yang diajukan oleh tutor atau warga belajar secara berpasangan atau kelompok	Mampu bertanya jawab tentang satu masalah yang dihadapi dalam kehidupan sehari-hari menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa daerah secara lisan

4.1.2 Model Pendataan Keaksaraan PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)

Sebagai perpanjangan tangan dari pemerintah dalam memberantas buta aksara tentunya PKBM sangat berperan penting. Di Kota Pontianak sendiri terdapat kurang lebih 45 PKBM yang terdaftar di Direktorat Pembinaan Pendidikan Keaksaraan dan Kesetaraan, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Masyarakat, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Akan tetapi dari 45 PKBM tersebut ada beberapa PKBM yang sudah tidak aktif lagi dan hanya tersisa kurang lebih 23 PKBM yang masih menyelenggarakan kegiatan belajar mengajar untuk masyarakat. Data PKBM yang ada di Kota Pontianak dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.1 Data PKBM Kota Pontianak

NO	PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat)		TAHUN BERDIRI	JUMLAH AKSARA	
				2014	2015
1	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	SETIA JL. PARIT PANGERAN, GG. KETO SIANTAN HULU PONTIANAK UTARA	2010		
2	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	ANNUR JL. SELAT PANJANG, GG. KARYA BAKTI 1 SINTAN HULU PONTIANAK UTARA	2007	30	
3	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	BINA SALAM JL. BUDI UTOMO, KOMP. TAMAN ANGGREK BLOK F 16 SIANTAN HULU PONTIANAK UTARA	2012		
4	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	PANGERAN PERBU JL. PARWASAL RT1/RW24 SINTAN TENGAH PONTIANAK UTARA 61.2.13.4.1.0003	2000		
5	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	AL-FIKRI JL. KHATULISTIWA SIANTAN HILIR PONTIANAK UTARA 61.2.13.4.1.0006	2005	80	30
6	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	MIFTAHUSSOLIHIN JL. KEBANGKITAN NASIONAL SIANTAN HILIR PONTIANAK UTARA	2015		30

7	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	HAMKA JL. KEBANGKITAN NASIONAL, RT03/RW05 BATULAYANG PONTIANAK UTARA	2011	21	20
8	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	ANDESTA JL..KEBANGKITAN NASIONAL,GG BANTILAN NO.27 BATULAYANG PONTIANAK UTARA	2011		
9	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	KHATULISTIWA JL.PANCA BHAKTI BATU LAYANG PONTIANAK UTARA 61.2.13.4.1.2008	2001		
10	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	PATTIMURA JL. TANJUNG RAYA II GG.TAMAN SISWA NO.16 SAIGON PONTIANAK TIMUR 61.2.13.4.1.0002	2007	40	20
11	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	KAPUAS JL. SUNGAI MENDALAM 3 PERUMNAS IV TJ.HULU PONTIANAK TIMUR	2002		
12	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	CAHAYA JL. ABDUL MUIS,PERUM 3 NO.32 TJ.HULU PONTIANAK TIMUR 61.2.13.4.1.0019	2008	60	30
13	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	RADEN SITTI KARTINI JL. TRITURA GG. KARYA SEPAKAT NO 1 TJ.HILIR PONTIANAK TIMUR	2009		
14	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	SEJAHTERA JL.H RAIS KEL PARIT MAYOR PARIT MAYOR PONTIANAK TIMUR	2015		
15	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	ARWANA JL. TEKAM GG FAMILY NO 2 TJ.HULU PONTIANAK TIMUR	2007		

16	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	BELIUNG MAJU JL TEBU NO 243 (SMA TUNAS BHAKTI) SEI BELIUNG PONTIANAK BARAT	2007		
17	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	INDAH JL APEL NO 6 SUNGAI JAWI DALAM PONTIANAK BARAT	2006		
18	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	AISYIYAH JL PROF DR HAMKA GG NILAM 3 NO 14 SUNGAI JAWI PONTIANAK KOTA	2010		
19	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	ARYANTI JL PANGERAN NATAKUSUMA GG SUMUR BOR SUI BANGKONG PONTIANAK KOTA	2007		
20	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	BUNDAKU JL DANAU SENTARUM GG MITRA KARYA LESTARI II SUI BANGKONG PONTIANAK KOTA	2010		
21	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	MAKMUR JL URAI BAWADI GG SENTOSA NO 5A SUI BANGKONG PONTIANAK KOTA	2005		
22	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	UMP JL A.YANI NO 111 BANSIR DARAT PONTIANAK TENGGARA	2009		
23	Nama : Alamat : Kelurahan : Kec : Nilem :	RAMADHAN JL. AR. SALEH, DI KANTOR KELURAHAN BANGKA BELITUNG PONTIANAK TENGGARA			

Sumber : <http://www.paud-dikmas.kemdikbud.go.id/bindikmas/>

Berikut ini adalah data kegiatan Keaksaraan yang dilakukan oleh PKBM di tingkat kecamatan :

DATA KEGIATAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL

KECAMATAN :
 DESA / DUSUN :
 NAMA KELOMPOK:
 TEMPAT KEGIATAN :

1. CALON PENYELENGGARA
 - a. Nama :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Tempat Tanggal Lahir :
 - e. Pendidikan :
2. CALON TUTOR
 - a. Nama :
 - b. Jenis Kelamin :
 - c. Pekerjaan :
 - d. Tempat Tanggal Lahir :
 - e. Pendidikan :
3. CALON WARGA BELAJAR

NO	NAMA ANGGOTA	L/P	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR			PEKERJAAN	ALAMAT
				TGL	BLN	THN		
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

JENIS KEGIATAN YANG AKAN DILATIH / DILAKSANAKAN :

- a. ANYAM-ANYAMAN

Mengetahui : 20....
 PLS Ketua PKBM

.....
 Nip.

Mengetahui :
 Kepala Desa

.....

Salah satu contoh hasil pendataan dari PKBM .

DATA KEGIATAN KEAKSARAAN FUNGSIONAL

KECAMATAN : Pontianak Utara
 DESA / DUSUN : Siantan Hilir
 NAMA KELOMPOK : Keaksaraan Dasar
 TEMPAT KEGIATAN : Jl. Dharma Putra, Gg. Dharma Putra 3

1. CALON PENYELENGGARA

a. Nama : Salama
 b. Jenis Kelamin : Perempuan
 c. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
 d. Tempat Tanggal Lahir : Pontianak, 06 Desember 1979
 e. Pendidikan :

2. CALON TUTOR

f. Nama :
 g. Jenis Kelamin :
 h. Pekerjaan :
 i. Tempat Tanggal Lahir :
 j. Pendidikan :

3. CALON WARGA BELAJAR

NO	NAMA ANGGOTA	L/P	TEMPAT LAHIR	TANGGAL LAHIR			PEKERJAN	ALAMAT
				TGL	BLN	THN		
1	Rosnani Binti Daeng	P	Pontianak	03	05	1960	Ibu Rumah Tangga	Jl. Dharma Putra Gg. Dharma Putra 3
2	Salama	P	Pontianak	06	12	1979	Ibu Rumah Tangga	Jl. Dharma Putra Gg. Dharma Putra 3
3	Darma Hendra	L	Pontianak	07	06	1988	Buruh	Jl. Dharma Putra Gg. Dharma Putra 3
4	Misnati	P	Pontianak	01	03	1963	Ibu Rumah Tangga	Jl. Dharma Putra Gg. Dharma Putra 3
5	Ramlah	P	Peniti	15	11	1964	Ibu Rumah Tangga	Jl. Dharma Putra Gg. Dharma Putra 3
6	Dahlia	P	Pontianak	31	12	1964	Ibu Rumah Tangga	Jl. Dharma Putra Gg. Dharma Putra 3
7	Rosiada	P	Semparuk	01	01	1966	Ibu Rumah Tangga	Jl. Dharma Putra Gg. Dharma Putra 3
8	Haliyah	P	Pontianak	17	04	1970	Ibu Rumah Tangga	Jl. Dharma Putra Gg. Dharma Putra 3
9	Halima	P	Pontianak	15	02	1967	Ibu Rumah Tangga	Jl. Dharma Putra Gg. Dharma Putra 3
10	Maria	P	Mempawah	20	09	1960	Tani	Jl. Dharma Putra Gg. Dharma Putra 3

JENIS KEGIATAN YANG AKAN DILATIH / DILAKSANAKAN :

b. KEAKSARAAN DASAR

Sebagai salah contoh, dimana alokasi dana biaya operasional penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri sebesar Rp. 4.600.000,00 (Empat Juta Enam Ratus Rupiah) Per Kelompok. Adapun Rincian Alokasi penggunaan dana mengacu pada suatu kelompok sebanyak 25 Kelompok yang tertera pada tabel sebagai berikut.

NO	KOMPONEN PEMBIAYAAN	RINCIAN PEMBIAYAAN	PROPORSI BIAYA
1	Identitas calon peserta didik	Pendataan Calon Peserta Didik	5% (Rp. 5.750.000,00)
2	ATK Peserta didik dan Penyelenggaraan	Pensil, pulpen, penghapus, buku tulis, dan lain-lain	7% (Rp. 8.050.000,00)
3	Pembelajaran dan Pelatihan Keterampilan	Penyusunan / pengadaan / pembelian bahan pembelajaran, bahan praktik keterampilan dan dana modal	35% (Rp.40.250.000,00)
4	Penyelenggaraan Program	Transportasi Penyelenggara, Monitoring, evaluasi program, dan pelaporan	10% (Rp. 11.500.000,00)
5	Transportasi Tutor / Pelatih Keterampilan	Transportasi 1 orang tutor dan 1 orang pelatih keterampilan selama program berlangsung	40% (Rp. 46.000.000,00)
6	Penilaian Pembelajaran pelatihan keterampilan	Penggadaian soal, pengolahan hasil tes, dan penulisan SUKMA / STSB	3% (Rp. 3.450.000,00)
	TOTAL DANA PER KELOMPOK		Rp.115. 000.000,00

Dana yang diberikan pemerintah cukup besar terhadap kegiatan semacam ini hanya saja, jika ditelaah lebih jauh maka alokasi untuk penyelenggaraan baik waktu (lamanya pelatihan dilakukan), nama peserta dan tempat dilakukan kegiatan keaksaraan menjadi lebih penting ditinjau kembali. Hal ini peneliti telah melihat dari dekat dengan melakukan wawancara mendalam (*indeep interview*) ternyata terdapat beberapa kejanggalan yang semestinya pemerintah melakukan hal tersebut lebih hati-hati dan cermat dalam memilih PKBM yang mengusulkan kegiatan keaksaraan, diantaranya adalah:

1. Sebagai salah satu contoh adalah, sebuah PKBM akan mengusulkan data nama peserta tetapi tidak dilengkapi dengan foto copi KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan foto copi KK (Kartu Keluarga), hal ini sangat sulit menyortir data tersebut, apalagi jika data tersebut hanya dibuat dalam bentuk

File. Doc. Seharusnya setiap PKBM membuat menggunakan file excell agar lebih memudahkan pengambil keputusan apakah PKBM tersebut layak untuk diberikan dana penyelenggaraan keaksaraan. Dan file tersebut juga diberikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dalam bentuk sebuah CD (compact disk). Contoh ini membuktikan kepada kita semua bahwa sebuah nama gampang atau sangat mudah sekali untuk dimanipulasi. Hal ini dikarenakan tidak adanya dokumen resmi (sebuah foto copi KTP atau KK yang jelas) sebagai pendukung kejelasan data tersebut. Untuk buta aksara yang belum sampai berumur 17 tahun atau belum punya KTP, maka selayaknya diberikan surat keterangan dari Kepala Dusun dan diketahui oleh Kepala Desa setempat.

2. Sebuah PKBM akan mengusulkan data nama peserta tetapi tidak dilengkapi dengan foto peserta sebagai penyanggah data buta aksara. Hal ini juga merupakan sesuatu yang gampang dimanipulasi dari kegiatan PKBM tersebut.
3. Data buta aksara yang diambil dalam kegiatan ini berdasarkan data gabungan yang diberikan oleh perangkat desa/dusun yang bekerjasama dengan PKBM setempat. Hanya saja data tersebut kadangkala berdasarkan azas kepentingan dari PKBM tersebut terhadap luncuran program baik APBN maupun APBD untuk kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten atau Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat. Sehingga ada yang namanya data luncuran untuk kegiatan ditahun berikutnya, padahal data tersebut sebenarnya merupakan jumlah komulatif buta aksara di suatu kecamatan pada tahun berjalan.

Untuk itu diharapkan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan perlu membuat Single Database System yang menjadi dasar acuan lembaga, maupun juga program untuk penanggulangan buta aksara. Data ini yang menjadi data tunggal sehingga tidak menimbulkan bias dalam implementasi penanggulangan data buta aksara itu sendiri, mengingat banyaknya lembaga yang memiliki data keaksaraan menurut definisi masing-masing.

Seperti melihat pemandangan hutan dari langit yang kesemuanya terlihat indah, dibalik hal itu, tidak mudah juga suatu PKBM menyelenggarakan suatu pendidikan keaksaraan bagi masyarakat buta aksara, mengingat masih adanya beberapa pendapat dari warga buta aksara yang menyatakan bahwa jikalau mereka ikut program keaksaraan mereka ingin dibayar (1 hari belajar dibayar sesuai dengan berapa yang semestinya mereka dapat dari hasil berladang/bertani), mereka (warga buta aksara) mempunyai bisnis cadangan sebagai tukang ojek, jauhnya tempat belajar yang ditunjuk oleh PKBM dan sekolah yang ada dari permukiman peserta buta aksara, lebih-lebih penyelenggaraan PKBM dilakukan pada malam hari, dimana waktu tersebut sering terjadi pemadaman bergilir.

4.1.3 Keaksaraan Kota Pontianak

Mengacu kepada indikator keaksaraan yang dikeluarkan oleh Direktorat Pendidikan Masyarakat, maka kami dari pihak konsultan membuat suatu form survey keaksaraan yang diambil secara acak untuk mendapatkan sample responden buta aksara guna membuat suatu metode pemetaan dan penanganan terpadu yang cocok untuk menekan angka keaksaraan yang ada di Kota Pontianak. Adapun form survey tersebut dapat dilihat pada gambar berikut.

FORM SURVEY KEAKSARAAN KOTA PONTIANAK

Nama Responden :

Alamat :

Kecamatan :

Kelurahan :

RW :

RT :

No KK :

No KTP :

PKBM :

Long :

Lat :

1. Apakah responden dapat membaca / mengenal huruf / Angka ?

a. Ya b. Tidak

Ket :

.....

.....

2. Apakah responden dapat menulis?

a. Ya b. Tidak

Ket :

.....

.....

3. Apakah responden dapat berhitung?

a. Ya b. Tidak

Ket :

.....

.....

Indikator yang diambil adalah Membaca, Menulis dan Berhitung. Seperti tertera di lembar tes keaksaraan di bawah ini.

DAFTAR TES UJI KEAKSARAAN	
1. <u>Tes Membaca</u>	
<u>Huruf Alfabet:</u>	A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
<u>Angka:</u>	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
<u>Membaca :</u>	
a. <u>Ini Budi</u>	
b. <u>Ini Ibu Budi</u>	
c. <u>Budi Pergi Kepasar</u>	
2. <u>Tes Menulis</u>	
<u>Menuliskan Huruf</u>	A E I O U
<u>Menulis Angka</u>	5 – 15 – 155 – 1515
3. <u>Tes Menghitung</u>	
	1+5 =
	45 + 15 =
	5 – 1 =
	25 – 10 =

UNESCO dalam "*Literacy for Life: Further Results from the Adult Literacy and Life Skills Survey*" tahun 2011, mengelompokkan buta aksara menjadi 3 kelompok usia, yaitu usia 16 – 25 tahun, usia 26 – 45 tahun dan usia 46 – 65 tahun. Sedangkan menurut pendataan dari BPS (Badan Pusat Statistik) tahun 2011, buta aksara menurut usia dikelompokkan menjadi 3 kelompok juga, yaitu usia 15+, usia 15 – 44 tahun dan usia 45+ (45-59). Melihat kedua perbedaan diatas mengenai tetapan untuk pendataan buta aksara dari segi batasan usia, kami dari pihak konsultan sepakat untuk mengambil suatu kesimpulan dalam penyelenggaraan survey data buta aksara ini, sasaran utama penyelenggaraan kegiatan ini adalah masyarakat yang mempunyai kriteria sebagai berikut :

1. Warga masyarakat yang tidak sekolah sama sekali (Buta huruf murni)
2. Usia 15 – 44 tahun (prioritas) atau 15 – 59 tahun.

Berdasarkan hasil survey yang kami lakukan di lapangan, dengan jumlah responden sebanyak 41 orang, yang menjadi kantong keaksaraan di kota pontianak adalah di Kecamatan Pontianak Utara dan Timur. Adapun data *by name by adres* buta aksara yang kami survey dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Data Responden Buta Aksara

No	Detail Data	Foto
1	Nama Responden : Pani L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 01 April 1948 Umur : 68 Tahun Alamat : Jl Dharma Putra Gg Dharma Putra 3 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hilir RT/RW : No KK : 6171 040709090000 No KTP : 6171 044801480002 PKBM : AL FIKRI Latitude : 00.00507° Longitude : 109.20357°	
2	Nama Responden : Hamzah L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Segedong, 03 Juli 1944 Umur : 56 Tahun Alamat : Jl Dharma Putra Gg Dharma Putra 3 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hilir RT/RW : 004/026 No KK : 6171 041112080055 No KTP : 6171 046007460001 PKBM : Al FIKRI Latitude : 00.00528° Longitude : 109.20366°	
3	Nama Responden : Sahara L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Segedong, 20 April 1946 Umur : 54 Tahun Alamat : Jl Dharma Putra Gg Dharma Putra 3 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hilir RT/RW : 004/026 No KK : 6171 041112080055 No KTP : 6171 046007460001 PKBM : Al Fikri Latitude : 00.00528° Longitude : 109.20366°	

4	<p>Nama Responden : Halima L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 15 Februari 1967 Umur : 49 Tahun Alamat : Jl Dharma Putra Gg Dharma Putra 3 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantanhilir RT/RW : 004/026 No KK : 6171 042507130012 No KTP : 6171 045502670012 PKBM : Aal Fikri Latitude : 00.00538° Longitude : 109.20377°</p>	
5	<p>Nama Responden : Haliyah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 17 April 1970 Umur : 46 Tahun Alamat : Jl Dharma Putra Gg Dharma Putra 4 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hilir RT/RW : 004/026 No KK : 6171 040602080014 No KTP : 6171 045704700006 PKBM : Al Fikri Latitude : 00.00407° Longitude : 109.20327°</p>	
6	<p>Nama Responden : Jumalia L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 07 Juli 1963 Umur : 53 Tahun Alamat : Jlkebangkitannasional Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batulayang RT/RW : 05/005 No KK : 6171 041601120013 No KTP : 6171 044707630002 PKBM : Miftahussolihin Latitude : 00.01380° Longitude : 109.19288°</p>	

7	Nama Responden : Jumadi L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 12 Mei 1959 Umur : 57 Tahun Alamat : Jl Kebangkitan Nasional Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batulayang RT/RW : 05/005 No KK : 6171 041601120013 No KTP : 6171 041205590001 PKBM : Miftahussolihin Latitude : 00.01380° Longitude : 109.19288°	
8	Nama Responden : Punanti L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 07 Juli 1955 Umur : 60 Tahun Alamat : Jl Kebangkitan Nasional Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantanhilir RT/RW : 002/09 No KK : 6171 040605100011 No KTP : 6171 044709550000 PKBM : Miftahussolihin Latitude : 00.01497° Longitude : 109.19483°	
9	Nama Responden : Radiyeh L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 04 Juni 1979 Umur : 37 Tahun Alamat : Jl Kebangkitan Nasional Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantanhilir RT/RW : 02/009 No KK : 6171 042303090028 No KTP : 6171 044406790000 PKBM : Miftahussolihin Latitude : 00.01494° Longitude : 109.19477°	

10	<p>Nama Responden : Siti L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Kuburaya, 20 Maret 1983 Umur : 33 Tahun Alamat : Jl Kebangkitan Nasional Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantanhilir RT/RW : 002/09 No KK : 6112 012704110020 No KTP : 6112 014203850021 PKBM : Miftahussolihin Latitude : 00.01494° Longitude : 109.19477°</p>	
11	<p>Nama Responden : Hayati L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 03 Mei 1966 Umur : 50 Tahun Alamat : Jl Sami Sumping Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 002/021 No KK : 6171 020912080008 No KTP : 6171 024306660015 PKBM : Pattimura Latitude : 00.02708° Longitude : 109.22111°</p>	
12	<p>Nama Responden : Seni L/P : P Tempat, tanggal Lahir : TI Pakedai, 18 Juni 1982 Umur : 34 Tahun Alamat : Jl Sami Sumping Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 002/021 No KK : 6171 020305070049 No KTP : 6171 025806820001 PKBM : Pattimura Latitude : 00.01494° Longitude : 109.19477°</p>	

13	<p>Nama Responden : Yulia L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 06 Juni 1972 Umur : 44 Tahun Alamat : Jl Sami Sumping Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 021/02 No KK : 6171 022304070014 No KTP : 6171 026008720004 PKBM : Pattimura Latitude : 00.02739° Longitude : 109.22046°</p>	
14	<p>Nama Responden : Mistiye L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 02 Mei 1978 Umur : 38 Tahun Alamat : Jl Sami Sumping Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 021/02 No KK : 6171 0203060006 No KTP : 6171 024205780001 PKBM : Pattimura Latitude : 00.02708° Longitude : 109.22111°</p>	
15	<p>Nama Responden : Wardah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 06 Maret 1965 Umur : 51 Tahun Alamat : Jl Sami Sumping Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 021/02 No KK : 6171 021401072534 No KTP : 6171 024603650001 PKBM : Pattimura Latitude : 00.02708° Longitude : 109.22111°</p>	

16	NamaResponden : Supa'l L/P : P Tempat, tanggal Lahir : pontianak, 15 maret 1948 Umur : 68 Tahun Alamat : Jl Tanjung Raya Gg Cendana Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 004/006 No KK : 6171 021304070036 No KTP : 6171 025503480002 PKBM : Pattimura Latitude : 00.02739° Longitude : 109.22088°	
17	Nama Responden : Santi L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Sambas, 05 Mei 1983 Umur : 33 Tahun Alamat : Jl Tanjung Raya Gg Cendana Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 002/006 No KK : 6171 022711070023 No KTP : 6171 024506850005 PKBM : Pattimura Latitude : 00.02739° Longitude : 109.22088°	
18	Nama Responden : Parida L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 06 April 1955 Umur : 61 Tahun Alamat : Jl. Tritura, Gg. Karya Sepakat Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Tj. Hilir RT/RW : 004/005 No KK : 6171 021102080013 No KTP : 6171 024604550002 PKBM : Raden Sitti Kartini Latitude : 00.02405° Longitude : 109.35432°	

19	<p>Nama Responden : Marsudeh L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 16 Juni 1958 Umur : 58 Tahun Alamat : Jl Tritura Gg Karya Sepakat Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Tj. Hilir RT/RW : 004/005 No KK : 6171 020504100002 No KTP : 6171 025606560004 PKBM : Raden Sitti Kartini Latitude : 00.02393° Longitude : 109.35425°</p>	
20	<p>Nama Responden : Leha L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 03 April 1948 Umur : 68 Tahun Alamat : Jl. Tritura, Gg. Karya Sepakat Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Tj. Hilir RT/RW : 004/005 No KK : 6171 021206070016 No KTP : 6171 024304480003 PKBM : Raden Sitti Kartini Latitude : 00.02389° Longitude : 109.35434°</p>	
21	<p>Nama Responden : Julaiha L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 02 Desember 1967 Umur : 49 Tahun Alamat : Jl. Tritura, Gg. Karya Sepakat Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Tj. Hilir RT/RW : 002/002 No KK : 6171 022107080010 No KTP : 6171 024212670008 PKBM : Raden Sitti Kartini Latitude : 00.02420° Longitude : 109.35462°</p>	

22	Nama Responden : Minah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 15 Maret 1948 Umur : 68 Tahun Alamat : Jl. Tritura, Gg. Karya Sepakat Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Tj. Hilir RT/RW : 002/002 No KK : 6171 021401080009 No KTP : 6171 025503480004 PKBM : Raden Sitti Kartini Latitude : 00.00680° Longitude : 109.36155°	
23	Nama Responden : Sapariyah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Punggur, 31 Desember 1961 Umur : 55 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 004/013 No KK : 6171 041910110002 No KTP : 6171 047112610027 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01679° Longitude : 109.31066°	
24	Nama Responden : May L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 31 Desember 1965 Umur : 51 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 004/013 No KK : 6171 041712120002 No KTP : 6171 047112650115 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01693° Longitude : 109.31055°	

25	Nama Responden : Samona L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Karti, 02 November 1982 Umur : 34 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 041106080019 No KTP : 6171 044211820012 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01254° Longitude : 109.31385°	
26	Nama Responden : Juana L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Karti, 05 Maret 1967 Umur : 49 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 041306080029 No KTP : 6171 044503670011 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01249° Longitude : 109.31391°	
27	Nama Responden : Ardian L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Karti, 01 Februari 1966 Umur : 50 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 040509070010 No KTP : 6171 044102660002 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01253° Longitude : 109.31391°	

28	Nama Responden : Hamaedah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 22 Juli 1971 Umur : 45 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 002/013 No KK : 6171 041207080010 No KTP : 6171 046207710004 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01276° Longitude : 109.31399°	
29	Nama Responden : Samsiah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 06 Mei 1978 Umur : 38 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 041706080033 No KTP : 6171 044605780020 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01241° Longitude : 109.31386°	
30	Nama Responden : Ropiatun L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 02 April 1987 Umur : 29 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 041403110002 No KTP : 6171 044204870016 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01195° Longitude : 109.31372°	

31	Nama Responden : Jumiati L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 10 Agustus 1979 Umur : 36 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 042105080045 No KTP : 6171 045008790022 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01177° Longitude : 109.31365°	
32	Nama Responden : Sumina L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Sambas, 14 Agustus 1994 Umur : 22 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 040409120006 No KTP : 6171 045408940006 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01246° Longitude : 109.31390°	
33	Nama Responden : Sumiati L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Sambas, 14 Juni 1987 Umur : 29 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti, Gg. Hidayah 3 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 041011080006 No KTP : 6171 045406870008 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01215° Longitude : 109.31379°	

34	<p>Nama Responden : Sumiati L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Karti, 20 Februari 1975 Umur : 41 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 041812080010 No KTP : 6171 046002750012 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01249° Longitude : 109.31390°</p>	
35	<p>Nama Responden : Suminten L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 29 Mei 1972 Umur : 44 Tahun Alamat : Jl. Parwasal Dalam, Gg. Hollywood No. 75 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah RT/RW : 003/024 No KK : 6171 041212070059 No KTP : 6171 046905720503 PKBM : Pangeran Perbu Latitude : 00.00189° Longitude : 109.34897°</p>	
36	<p>Nama Responden : Juda L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pemangkat, 06 Juli 1973 Umur : 43 Tahun Alamat : Jl. Parwasal Dalam, Rt03/Rw24 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah RT/RW : 003/024 No KK : 6171 042212080017 No KTP : 6171 044607730001 PKBM : Pangeran Perbu Latitude : 00.00190° Longitude : 109.34893°</p>	

37	<p>Nama Responden : Edi Gunawan L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 10 Oktober 1979 Umur : 37 Tahun Alamat : Jl. Parwasal, Gg. Hollywood, No. 71, Rt03/Rw24 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah RT/RW : 003/024 No KK : 6171 042806080036 No KTP : 6171 041010790024 PKBM : Pangeran Perbu Latitude : 00.00181° Longitude : 109.34912°</p>	
38	<p>Nama Responden : Subairi L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 05 Juni 1979 Umur : 37 Tahun Alamat : Jl. Parwasal, Gg. Hollywood, No. 70, Rt03/Rw24 Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Siantan Tengah RT/RW : 003/024 No KK : 6171 040803100002 No KTP : 6171 040506790025 PKBM : Pangeran Perbu Latitude : 00.00173° Longitude : 109.34921°</p>	
39	<p>Nama Responden : Tijah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Sambas, 08 Juni 1983 Umur : 33 Tahun Alamat : Jl. Parwasal, Gg. Hollywood, No. 73a Pontianak Utara Kecamatan : Siantan Tengah Kelurahan : 003/024 RT/RW : 6171 041911090011 No KK : 6171 044806930028 No KTP : Pangeran Perbu PKBM : 00.00186° Latitude : 109.34897° Longitude :</p>	

40	Nama Responden : Mat Ali L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Seruat Iii, 06 Agustus 1970 Umur : 46 Tahun Alamat : Jl. Parwasal Dalam, Gg. Ananda No. 49 Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Siantan Tengah RT/RW : 003/024 No KK : 6171 043010070010 No KTP : 6171 040608700011 PKBM : Pangeran Perbu Latitude : 00.00132° Longitude : 109.35054°	
41	Nama Responden : Bahriyah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Seruat Iii, 07 Juni 1975 Umur : 41 Tahun Alamat : Jl. Parwasal Dalam, Gg. Ananda No. 49 Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Siantan Tengah RT/RW : 003/024 No KK : 6171 043010070010 No KTP : 6171 044706750011 PKBM : Pangeran Perbu Latitude : 00.00130° Longitude : 109.35052°	

Keaksaraan di Kota Pontianak di pengaruhi oleh urbanisasi yang disebabkan oleh faktor stabilitas keamanan di beberapa daerah pedalaman. Keadaan ini menyebabkan masyarakat yang terkena dampak tersebut berbondong – bondong pindah ke Kota Pontianak demi keselamatan dan keamanan. Tentunya hal ini mengakibatkan sulitnya untuk mengontrol akan tingkat tarap pendidikan masyarakat tersebut. Sehingga terjadilah peningkatan keaksaraan di Kota Pontianak.

Selain itu, faktor ekonomi dan budaya juga berpengaruh terhadap keaksaraan. Sebagai contoh beberapa orang berfikir “janganakan untuk mendapatkan pendidikan, untuk makan saja susah”. Tentunya pola fikir seperti ini sangat disayangkan mengingat betapa pentingnya pendidikan. Dijaman era globalisasi seperti saat ini pendidikan sangat di perlukan demi mendapatkan kehidupan yang layak. Dengan pendidikan yang memadai akan mendongkrak perekonomian masyarakat. Faktor budaya pada masyarakat yang harus di ubah adalah *issue gender*. Pola pikir ini banyak terjadi pada masyarakat pedalaman, dimana pendidikan lebih di utamakan hanya untuk kaum laki-laki saja karena kaum laki-laki sebagai tonggak utama dalam keluarga. Dari 41 orang responden yang kami survey, memang terbukti 36 orang adalah berjenis kelamin perempuan.

4.1.4 Kendala Memberantas Keaksaran

Banyak sekali kendala yang dihadapi pemerintah untuk memberantas buta aksara mulai dari peserta didik sampai kepada anggaran biaya untuk kegiatan tersebut. Kendala tersebut dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Keterbatasan kemampuan peserta didik berbahasa Indonesia sehingga proses pembelajaran terhambat. Peserta didik biasanya tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia sehingga terjadi kendala yang dihadapi oleh pengajar yang mengajar karena tidak nyambungny bahasa yang dipergunakan, pengajar menggunakan bahasa Indonesia sedangkan peserta didik berbahasa daerah.
- b. Peserta didik kurang aktif dan masih malu-malu untuk mengikuti pembelajaran. Peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran mungkin karena peserta didik bosan dan malas dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan malu untuk mengikutinya. Sehingga banyak sehingga yang sudah mengikuti kegiatan tersebut yang tidak melanjutkan lagi.
- c. Masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Masih banyak ditemui anak usia sekolah yang seharusnya sekolah tapi mereka malah berada di tempat-tempat yang tidak layak, contohnya mereka mengamen dan mengemis di perempatan di kota-kota besar, ada juga yang memulung sampah baik di tempat pembuangan sampah atau di jalan-jalan, kalau di pedesaan banyak yang menggembalakan hewan ternaknya.
- d. Banyak yang putus sekolah setiap tahunnya. Banyak anak usia sekolah yang sudah bersekolah setengah jalan tapi tidak dilanjutkan atau putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh faktor kemiskinan. Meskipun sudah ada Bantuan Operasional Sekolah tapi sebagian dari mereka tidak menikmati dana tersebut karena diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
- e. Pengajar yang kurang Professional; Pengajar harus seprofesional mungkin, pengajar harus mempunyai cara-cara dalam proses pembelajaran dan pengajar harus di beri pelatihan lagi oleh dinas pendidikan.
- f. Program pemberdayaan bukan sebagai program berkelanjutan tapi hanya program sesaat; Program memberantas buta aksara yang seharusnya menjadi program berkelanjutan malah menjadi program yang sesaat. Hal ini bisa terjadi karena pengajar dan peserta didik bosan dan bisa juga anggaran atau gaji untuk para pengajar tidak lagi turun.
- g. Kemampuan pemerintah (dalam penyediaan dana) yang terbatas; Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% di APBDnya, namun anggaran tersebut sering diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Tidak hanya itu, persoalan atau alasan yang dihadapi oleh masyarakat penyandang buta

aksara untuk tidak mengikuti program buta aksara adalah:

- a. Umur: Mereka menyatakan umur saya sudah terlalu tua untuk belajar.
- b. Kepentingan: Mereka menyatakan kepentingan membaca dan menulis juga tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, mereka lebih senang berhitung dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat yang mereka tempati.
- c. Apatis: Melalui program pemberantasan aksara mereka ketahui akan tetapi mereka menganggap bahwa setelah mereka tau pasti akan hilang lagi pengetahuan tersebut selama 3 sampai 4 bulan berikutnya. Sehingga mereka merasa apatis (kurang menyadari) terhadap program buta aksara.
- d. Sibuk dengan pekerjaan: Mereka tidak punya waktu lagi untuk mengikuti program pemberantasan buta aksara dikarenakan terlalu sibuk dengan pekerjaan bercocok tanam atau pekerjaan sambilan mereka (mencari upahan) untuk orang lain.
- e. Fatalisme atau pasrah pada nasib.

4.2 PUTUS SEKOLAH

Putus sekolah adalah proses berhentinya siswa secara terpaksa dari suatu lembaga pendidikan tempat dia belajar. Artinya adalah terlantarnya anak dari sebuah lembaga pendidikan formal, yang disebabkan oleh berbagai faktor, salah satunya kondisi ekonomi keluarga yang tidak memadai (Musfiqon, 2007: 19). Padahal "anak adalah manusia yang akan meneruskan cita-cita orang tuanya dan sebagai estafet untuk masa yang akan datang" (Gunarm D, Singgih, 2004: 42).

Siswono Yudo Usodo dalam Gunarm Singgih (2004: 43) mengemukakan bahwa anak merupakan generasi penerus bagi kelangsungan hidup keluarga, bangsa dan negara di masa mendatang. Oleh karena itu memberikan jaminan bagi generasi penerus untuk dapat tumbuh dan berkembang dengan baik merupakan investasi sosial masa depan yang tidak murah dan harus dipikul oleh keluarga, masyarakat dan negara.

Dari teori tersebut dapat dikemukakan bahwa hubungan antara orang tua dan anak sangat penting artinya bagi perkembangan kepribadian anak dan bagi seorang anak, hubungan afeksi dengan orang tua merupakan faktor penentu, agar ia dapat *survive*. Penyelidikan Renespitz, 1985 (Munandar, 2002: *Online*), menunjukkan bahwa "Tanpa cinta kasih seorang anak tidak dapat hidup terus; memperoleh cinta kasih merupakan kebutuhan dasar, seperti makan dan tidur". Orang tualah yang menentukan baik buruknya anak di masa mendatang. Hal tersebut juga selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Abdul Munir (2002:27) bahwa:

Dalam agama islam, anak merupakan amanah dari Allah Swt, seorang anak dilahirkan dalam keadaan fitrah tanpa noda dan dosa, laksana sehelai kain putih yang belum mempunyai motif dan warna. Oleh karena itu, orang tualah yang akan memberikan warna terhadap kain putih

tersebut; hitam, biru hijau bahkan bercampur banyak warna. Suatu daerah tidak akan hancur akibat geografisnya, perbedaan budaya, tradisi, keyakinan atau hal lainnya yang bersifat merusak. Tapi suatu daerah akan hancur karena generasi mudanya. Dengan memberikan sedikit perhatian kepada pendidikan anak berarti kita telah berpartisipasi pada pembangunan bangsa terutama membangun manusianya.

Asumsi tersebut menunjukkan bahwa peranan orang tua sangat signifikan terhadap pendidikan anak. Pada masa-masa perkembangan seorang anak menuju kedewasaannya bisa saja dipengaruhi oleh faktor yang bersifat positif maupun negatif. Faktor yang memberikan pengaruh positif seperti intake nutrisi yang baik dan seimbang, pemeliharaan kesehatan yang baik, pola pengasuhan yang baik, serta kondisi lingkungan yang bersih dan sehat, dan lain-lain. Sedangkan faktor yang memberikan pengaruh negatif bagi pertumbuhan dan perkembangan anak seperti kemiskinan, keterlantaran, ketunասusialan, layanan kesehatan yang jelek dan lain-lain. Olehnya tanggung jawab orang tua untuk mengusahakan agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga di kelak kemudian hari akan menjadi individu orang dewasa yang sehat, baik secara jasmani, rohani dan sosialnya, sehingga mereka bisa menjadi generasi penerus bangsa yang tangguh.

David W. Kaplan, 2004 (Suharto, 2008: *Online*), bahwa pertumbuhan dan perkembangan yang baik akan menjadi modal bagi kelangsungan anak sebagai generasi penerus yang baik. Sebaliknya ia juga dapat sebagai penghambat kelangsungan generasi penerus bahkan juga dapat sebagai sumber kesusahan dan malapetaka individu, keluarga dan masyarakat.

Demikian kompleksnya faktor penyebab putus sekolah di bumi pertiwi ini, membuat siapa saja merasa terpanggil untuk harus berbuat. Dalam negara kesatuan RI, adanya Undang-undang Dasar 1945 yang menjamin hak-hak setiap warga negara untuk memperoleh pengajaran yang layak. Dalam hal ini kesempatan untuk memperoleh pendidikan dasar yang layak adalah merupakan hak setiap warga negara, tanpa kecuali. Olehnya latar belakang sosial, budaya, ekonomi dan sebagainya bukanlah penghalang bagi anak-anak usia sekolah untuk mengenyam pendidikan. Jadi, tanggung jawab pendidikan bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi tanggung jawab seluruh seluruh komponen bangsa utamanya para orang tua. Karena orang tualah orang pertama dan utama dalam mendidik anak.

Pada kenyataannya, tidak sedikit anak-anak yang dianiyaya, ditelantarkan atau dibunuh hak-haknya oleh orangtuanya sendiri, maupun oleh kerasnya kehidupan. Hak anak seakan-akan tidak ada lagi dan tercabut begitu saja oleh orang-orang yang kurang bertanggung jawab. Padahal hak-hak anak telah diakui dalam Konvensi Hak Anak yang dikeluarkan oleh Badan Perserikatan Bangsa-bangsa tahun 1989. Menurut konvensi tersebut, semua anak tanpa membedakan ras, agama, suku bangsa, jenis kelamin, asal usul keturunan ataupun bahasa memiliki empat hak dasar, (Abdussalam. R, 1990: 47) yaitu :

a. Hak atas kelangsungan hidup

Termasuk didalamnya adalah hak atas tingkat kehidupan yang layak, dan pelayanan kesehatan. Artinya anak-anak berhak memperoleh gizi yang baik, tempat tinggal yang layak dan perawatan kesehatan yang baik bila jatuh sakit.

b. Hak untuk berkembang

Termasuk didalamnya hak untuk memperoleh pendidikan, informasi, waktu luang, berkreasi seni dan budaya, juga hak asasi untuk anak-anak cacat, dimana mereka berhak, mendapatkan perlakuan dan pendidikan khusus.

c. Hak partisipasi

Termasuk didalamnya adalah hak kebebasan untuk menyatakan pendapat, berserikat dan berkumpul, serta ikut serta dalam pengambilan keputusan, yang menyangkut dirinya. Jadi seharusnya orang-orang dewasa khususnya orang tua tidak boleh memaksakan kehendaknya kepada anak karena bisa jadi pemaksaan kehendak dapat mengakibatkan beban psikologis terhadap diri anak.

d. Hak perlindungan.

Termasuk didalamnya perlindungan dalam bentuk eksploitasi, perlakuan kejam dan sewenang-wenang dalam proses peradilan pidana maupun dalam hal lainnya. Contoh: eksploitasi yang paling sering kita lihat adalah memperkerjakan anak-anak di bawah umur.

Untuk itu ada baiknya orang tua, lembaga-lembaga pendidikan maupun lembaga lain yang terkait dengan anak mengevaluasi kembali, apakah semua hak-hak asasi anak telah terpenuhi atau belum.

Pendidikan untuk semua tidak hanya berkisar pada perhitungan APM (Angka Partisipasi Murni) dan APK (Angka Partisipasi Kasar) semata, namun terlebih harus menitik pada pemastian kualitas pendidikan itu sendiri terhadap peserta didiknya. Banyak kalangan menilai sistem pendidikan di Indonesia belum dapat membekali anak dengan kompetensi dasar yang diperlukan untuk mempertahankan dan mengupayakan kehidupan yang lebih baik di masa depan (Ali, 2002: 17).

Asumsi ini jika dijelaskan bahwa pendidikan harus mengembangkan anak didik agar mampu menolong dirinya sendiri, artinya memberi pertolongan agar anak mampu menolong dirinya sendiri di masa depan. "Banyaknya lulusan pendidikan formal mulai dari SLTP sampai lulusan perguruan tinggi yang menganggur dan tidak memiliki pekerjaan telah membawa dampak buruk pada persepsi masyarakat tentang arti pentingnya pendidikan bagi anak. Artinya pandangan tersebut akan berakhir dengan asumsi buat apa sekolah setinggitinginya jika akhirnya tidak memiliki pekerjaan. Asumsi ini telah mengaburkan pengertian tentang arti pendidikan sepanjang hayat. Namun dibalik itu asumsi

tersebut telah mengkritisi pendidikan selama ini bahwa pendidikan kita tidak menyiapkan lulusan yang berorientasi pada masa depan. Artinya sekolah yang semestinya menjadi tempat berlangsungnya proses pendidikan justru kehilangan arah dan tujuan utamanya yaitu untuk menciptakan manusia yang mampu menghadapi tantangan dimasa depan” (Gunawan, 2000: 86).

Penggantian kurikulum hanyalah bersifat tambal sulam. Watak masa depan memang sering diungkapkan, tetapi tidak diantisipasi secara memadai dalam kurikulum. Seharusnya melalui pendidikan kita harus mampu menciptakan manusia yang mampu menolong dirinya sendiri di masa yang akan datang. Seperti yang dikemukakan oleh Ivan Illich, seorang pakar filsafat pendidikan. Dalam konsepnya Ivan Illich menggambarkan tentang adanya masyarakat khususnya anak usia sekolah yang ingin bebas dari ikatan-ikatan pendidikan sekolah.

Ivan Illich dalam Ali Imran (2002: 137) mengemukakan bahwa kelemahan dari sistem pendidikan saat ini adalah sekolah lebih menitikberatkan produknya pada lulusan yang hanya didasarkan atas hasil penilaian dengan angka-angka dan izasah. Sekolah telah mengaburkan makna belajar dan mengajar, dan kemampuan lulusan untuk berprestasi dan berinovasi. Proses pendidikan didominasi oleh guru yang pada gilirannya merampas harga diri peserta didik, yang mengakibatkan kurang kreatif dan rasa ketidak-bebasan untuk mengembangkan kemampuan diri dan potensi yang ada. Guru sering memainkan perannya dalam empat macam kekuasaan, yaitu sebagai hakim, penganjur ideologi, dokter dan peramal rahasia kehidupan peserta didik di masa depan. Hal ini mengakibatkan tumbuhnya sikap ketergantungan peserta didik kepada pihak lain yang lebih berkuasa.

Pada bagian lain Illich mengemukakan bahwa, pendidikan sebagai pranata sosial yang ada, memiliki hubungan yang mantap dan bermakna dalam kehidupan bermasyarakat. Pendidikan mempunyai peranan yang mendasar untuk memanusiakan manusia.

Pendidikan bertujuan untuk memberikan pengertian dan kesadaran kepada individu/ kelompok guna memahami dan mengontrol kekuatan sosial ekonomi dan politik sehingga dapat memperbaiki kehidupannya di dalam masyarakat. Program belajar di desain untuk memberi kesempatan pada masyarakat guna menganalisis kehidupan mereka dan untuk mengembangkan keterampilan yang mereka kehendaki dalam merubah keadaan ekonominya (Elfindri, 2008:68).

Suzanna Kindervatter (Ali Imran, 2002: 38) mengajukan solusi masalah dengan "*humanisas*" yaitu menempatkan insan pembangunan sebagai pelaku dan bukan sebagai penderita pembangunan. Sementara itu Freire (Grahacendikia, 2009: *Online*), tidak menyalahkan secara langsung terhadap pendidikan sekolah sebagai satu-satunya penyebab timbulnya anak putus sekolah. Freire mengkritik dampak yang ditimbulkan oleh pendidikan sekolah terhadap masyarakat luas, dan melihat pola interaksi antara dua kelompok yang ada di masyarakat, yaitu: 1) kelompok yang cenderung untuk membebani masyarakat atau kelompok penekan. 2) kelompok yang merasa dikuasai atau dibebani, atau kelompok yang merasa tertekan.

Sepanjang adanya dua kelompok ini, tidak mungkin mereka dapat berkembang secara demokratis, kreatif dan dinamis. Pandangan Freire terhadap pendidikan sekolah adalah: pertama, adanya ketidak berhasilan sekolah untuk mengembangkan situasi belajar-mengajar yang memberi kemampuan kepada peserta didik untuk berpikir kritis sehingga mereka dapat mengenali menganalisis dan memecahkan yang timbul dalam kehidupan di masyarakat. Kedua, situasi belajar-mengajar di sekolah pada umumnya tidak

mengembangkan dialog antara pendidik dan peserta didik untuk saling belajar, dan sekolah lebih menekankan hubungan vertikal antara guru dan murid. Kegiatan belajar-mengajar sekolah lebih didominasi oleh guru yang cenderung berperan sebagai penekan sedangkan peserta didik berada dalam situasi tertekan.

Freire (Grahacendikia, 2009: *Online*) memandang gaya mengajar yang ada di sekolah tajam dan identik dengan sistem transaksi bank (*banking sytem*) yang memindahkan informasi dari pikiran guru dengan mendepositokan kepada peserta didik. Oleh karena itu guru hendaknya berperan sebagai fasilitator untuk membantu para peserta didik agar mereka belajar dengan cara berfikir dan bertindak. Sumbangan pikiran yang paling utama adalah pendidikan sebagai konsep penyadaran untuk membangkitkan kesadaran diri peserta didik terhadap lingkungannya. Kesadaran ini ditumbuhkan melalui gerakan pendidikan pembebasan.

4.2.1 Sebab – sebab Anak Putus Sekolah

Putus sekolah bukan merupakan persoalan baru dalam sejarah pendidikan. Faktor ekonomi menjadi alasan penting terjadinya putus sekolah. Persoalan ini telah berakar dan sulit untuk di pecahkan, sebab ketika membicarakan solusi maka tidak ada pilihan lain kecuali memperbaiki kondisi ekonomi keluarga. Ketika membicarakan peningkatan ekonomi keluarga terkait bagaimana meningkatkan sumber daya manusianya. Sementara semua solusi yang diinginkan tidak akan lepas dari kondisi ekonomi nasional secara menyeluruh, sehingga kebijakan pemerintah berperan penting dalam mengatasi segala permasalahan termasuk perbaikan kondisi masyarakat (Gunawan A. H, 2000: 27).

Kebijakan pemerintah tentang Program wajib belajar 9 tahun didasari konsep “pendidikan dasar untuk semua” (*universal basic education*), yang pada hakekatnya berarti penyediaan akses terhadap pendidikan yang sama untuk semua anak. Program ini mewajibkan setiap warga negara Indonesia untuk bersekolah selama 9 (sembilan) tahun pada jenjang pendidikan dasar, yaitu dari tingkat kelas 1 Sekolah Dasar (SD) atau Madrasah Ibtidaiyah (MI) hingga kelas

Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs). Melalui program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun diharapkan dapat mengembangkan sikap, pengetahuan, dan

keterampilan dasar yang perlu dimiliki semua warga negara sebagai bekal untuk dapat hidup dengan layak di masyarakat (Dananjaya, Utomo, 2005: *Onlione*).

Pemerintah telah berusaha menanggulangi masalah putus sekolah dengan memberikan Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Tujuan program ini untuk membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan siswa yang lain, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar yang lebih bermutu sampai tamat dalam rangka penuntasan wajib belajar 9 tahun. Meskipun usaha telah dilakukan pemerintah namun kasus anak putus sekolah tetap masih ada.

Berbagai penelitian seperti: A.A. Ketut Oka (2000) di Bali serta Sugeng Arianto (2001) di Jambi menyatakan beberapa faktor yang mempengaruhi anak putus sekolah, yaitu: status ekonomi, jenis pendidikan siswa (umum atau kejuruan), kehamilan, kemiskinan, ketidaknyamanan, kenakalan siswa, penyakit, minat, tradisi/adat istiadat, pendidikan orangtua, pekerjaan orangtua, usia orang tua, jumlah tanggungan keluarga, kondisi tempat tinggal serta perhatian orang tua (Musfiqon, 2007: 24).

Berdasarkan penelitian Rahmawati (2008: Skripsi), disebutkan bahwa angka putus sekolah disebabkan oleh terbatasnya jumlah sekolah yang ada, faktor sosial/ masyarakat, pengeluaran perkapita suatu daerah, dan jumlah anak dalam keluarga. Berdasarkan konsep tersebut dapatlah dikemukakan bahwa program pendidikan hendaknya dirancang dan diarahkan untuk membantu masyarakat agar memiliki kebebasan yang bertanggungjawab dalam upaya memajukan diri masyarakat dan lingkungannya. Artinya strategi kegiatan belajar merupakan suatu proses untuk memanusiakan manusia. Proses inilah yang disebut pendidikan sebagai panggilan sejarah untuk tujuan kemanusiaan.

Lain lagi yang diungkapkan oleh Ki Hadjar Dewantara (Sudjana, 1983: 64) bahwa pendidikan dimaksudkan untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada peserta didik, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Dalam pendidikan, tidak memakai istilah paksaan, serta selalu menjaga kelangsungan hidup batin anak dan mengamati agar anak dapat tumbuh dan berkembang menurut kodratnya.

Pendidikan secara umum berarti usaha menumbuh-kembangkan budi pekerti, intelegensi dan tubuh peserta didik, oleh sebab itu maka segala sarana, usaha dan metoda pendidikan harus sesuai dengan kodrat manusia. Kodrat keadaan manusia itu meliputi adat istiadat peserta didik, adat istiadat sebagai sifat perikehidupan, atau perpaduan usaha dan daya upaya menuju hidup tertib dan damai akan dipengaruhi oleh masa.

Pengajaran bertujuan untuk kemerdekaan hidup manusia secara lahiriah, sedangkan pendidikan bertujuan untuk kemerdekaan hidup manusia secara batiniah. Manusia baik secara lahiriah

maupun batiniah, tidak tergantung kepada orang lain, melainkan bersandar atas kekuatan sendiri. Tujuan pengajaran dan pendidikan yang berguna bagi kepentingan bersama adalah memerdekakan manusia sebagai anggota masyarakat. Dalam pendidikan, kemerdekaan itu maksudnya adalah berdiri sendiri, tidak tergantung kepada orang lain (Sujana, N. 1983: 65).

Lebih lanjut Ki Hajar Dewantara (Sudjana, 1983: 67) mengemukakan bahwa manusia hanya dapat menjadi manusia karena pendidikan. Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam proses pendidikan adalah menumbuh kembangkan potensi peserta didik untuk dapat berkreativitas karena kreativitas merupakan lambang suatu masyarakat yang mampu mengungkapkan diri secara bebas, kritis terhadap lingkungannya, serta mampu berfikir dan bertindak di dalam dan terhadap dunia kehidupannya.

Berdasarkan teori-teori tersebut diatas dapatlah disebutkan bahwa faktor-faktor penyebab anak putus Sekolah Dasar yang dimaksud dalam penelitian ini adalah: faktor ekonomi, geografi, besarnya jumlah saudara, tidak ada penerangan listrik, rendahnya pendidikan orang tua, dan faktor sosial budaya.

Sedangkan Burhanudin (2009: Makalah) menemukan penyebab anak putus sekolah adalah jumlah guru, angka melek huruf, tingkat kemiskinan, dan tingkat kesempatan kerja yang dimiliki oleh suatu daerah. Beberapa factor yang menyebabkan putus sekolah adalah sebagai berikut:

1. Faktor Ekonomi

Berbicara tentang kemiskinan penduduk tentu saja tidak terlepas dari pengeluaran rata-rata rumah tangga perbulan. Asumsi ini bila dijelaskan bahwa semakin tinggi rata-rata pengeluaran rumah tangga semakin rendah kemungkinan anak untuk meninggalkan sekolah (semakin tinggi rata-rata konsumsi semakin rendah *drop out*). besarnya pengeluaran untuk konsumsi memberikan arti bahwa komponen pengeluaran konsumsi lebih penting mereflesikan status ekonomi rumah tangga (Mulyanto Sumardi, 1986: 74). Sementara kondisi ekonomi seperti ini disebabkan berbagai faktor, di antaranya orang tua tidak mempunyai pekerjaan tetap dan hanya mengandalkan diri sebagai petani yang terkadang gagal panen karena hama dan cuaca yang tidak menentu.

Hal selaras juga dikemukakan oleh Gerungan (1988: 182) bahwa hubungan orang tua dengan anaknya dalam status sosial-ekonomi serba cukup dan kurang mengalami tekanan-tekanan fundamental seperti dalam memperoleh nafkah hidupnya yang memadai. Orang tuanya dapat mencurahkan perhatian yang lebih mendalam kepada pendidikan anaknya apabila ia tidak disulitkan dengan perkara kebutuhan-kebutuhan primer kehidupan manusia.

2. Faktor Geografi

Distribusi lokasi sangat mempengaruhi kemungkinan anak putus sekolah. Apalagi untuk anak perempuan kecenderungan akan lebih besar untuk mengundurkan diri melanjutkan pendidikan. Meskipun asumsi tersebut tidak terlihat secara signifikan, akan tetapi bilamana dikontrol dengan jarak tempuh fisik untuk anak lelaki berkemungkinan tidak terlalu menghalangi mereka untuk pergi ke sekolah dibandingkan dengan anak wanita, di samping anak wanita peranan mereka masih cukup besar untuk mengasuh saudara yang lebih kecil atau kegiatan rumah tangga lainnya. Secara singkat aspek distribusi lokasi sangat mempengaruhi kemungkinan anak perempuan untuk mengundurkan diri melanjutkan pendidikan (Isnantri, A.C. 2008: *Online*).

3. Besarnya jumlah saudara

Dalam kaitannya dengan putus sekolah, semakin tinggi jumlah saudara semakin besar kemungkinan anak putus sekolah. Dalam hal ini, semakin banyak anggota keluarga maka beban yang akan ditanggung oleh kepala rumah tangga juga akan semakin besar. Semakin besar beban yang ditanggung oleh kepala rumah tangga, maka semakin besar kemungkinan anak untuk drop out sekolah. Keikutsertaan orangtua terhadap keluarga berencana dapat menekan terjadinya proses *drop out* anak usia sekolah. Gomez, 1984 (Gunawan, 2000: 45) mengemukakan bahwa pentingnya menganalisis pengaruh status keluarga berencana orang tua mengingat sasaran dari keluarga berencana tidak hanya membatasi kelahiran. Akan tetapi secara implisit dengan keikutsertaan keluarga berencana memberikan kesempatan yang lebih besar kepada anak-anak nantinya untuk mengecap pendidikan.

Teori tersebut mengisyaratkan bahwa usia kawin, pendidikan ibu, dan status keluarga berencana (KB) sangat mempengaruhi anak putus sekolah. Dampak usia kawin terhadap kemungkinan anak untuk sekolah penting didasarkan atas dugaan bahwa usia kawin muda berkaitan erat dengan rendahnya pendidikan yang diselesaikan oleh orangtua. Seperti yang dikemukakan oleh Godfrey, Martin, 1987 (Gunawan, 2000: 44) bahwa pendidikan ibu berkaitan erat dengan besarnya anggota rumah tangga dan kualitas anak.

4. Tidak ada penerangan listrik

Putus sekolah juga dapat distimulus melalui sumber penerangan yang ada di rumah tangga. Terdeteksi bahwa putus sekolah relatif tinggi secara signifikan pada rumah tangga desa yang tidak mempunyai alat penerangan listrik dibandingkan dengan alat penerangan listrik. (Inu Hardi Kusumah, 2008: *Online*)

5. Rendahnya pendidikan orangtua

Implikasi dari tingkat pendidikan yang rendah, berpengaruh pada persepsi orangtua terhadap arti pentingnya pendidikan bagi anak. Anak lebih banyak diperbantukan orangtua dalam proses produksi serta sekolah hanya merupakan aktifitas sampingan. Dan kemiskinan pendidikan erat kaitannya dengan kemiskinan ekonomi.

Jika diamati pengaruh pendidikan orangtua terhadap pendidikan anak maka pendidikan bapak jauh lebih berarti dibandingkan dengan pengaruh pendidikan ibu. Artinya jumlah anak usia sekolah yang terdaftar di sekolah lebih dominan dipengaruhi oleh pendidikan bapak dibandingkan pendidikan ibu (Inu Hardi Kusumah, 2008: *Online*).

6. Faktor Sosial Budaya

Dalam masyarakat tradisional adanya kebiasaan atau tradisi masyarakat yang dapat menghambat pendidikan anak. Tradisi yang paling menonjol yang dapat dikemukakan adalah cara memandang dan memperlakukan anak. Katakan saja untuk anak perempuan diperlakukan seperti barang dagangan, cepat laku lebih baik. Tak heran jika dalam masyarakat pedesaan marak terjadinya pernikahan dini. Sementara untuk anak lelaki dalam kehidupan masyarakat pedesaan dikader atau diajarkan tata cara bertani dan beternak yang baik sebagai pembekalan untuk menghidupi dirinya dan keluarganya kelak ketika ia sudah dewasa.

Setelah mereka dianggap mampu untuk bertani dan beternak dengan baik serta bisa mencari nafkah sendiri, mereka umumnya berorientasi pada pernikahan. Masyarakat kurang memperhatikan tingkat kematangan kepribadian individu atau tingkat kedewasaan saat melangsungkan pernikahan. Umumnya masyarakat pedesaan menikah pada masa pubertas awal dimana pada masa itu seorang anak masih baru pertama mempunyai rasa suka terhadap lawan jenis (Isnantri, A.C. 2008: *Online*).

4.2.2 Putus Sekolah Kota Pontianak

Dunia Pendidikan memiliki pengaruh dalam capaian tingkat Indeks Pembangunan Manusia, jika pada bidang pendidikan angka putus sekolah tinggi jelas IPM pada sebuah wilayah juga akan menurun. Indonesia berada di peringkat 69 dari 127 negara dalam *Education Development Index*. Sementara laporan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, setiap menit ada empat anak yang putus sekolah. Data Pendidikan pada tahun 2010 menyebutkan bahwa 1,3 juta anak usia 7 – 15 tahun terancam putus sekolah (Indonesia Berkibar, 2012). Paulo Fraire (dalam Sholeh, 2007) mengemukakan konsep dimana pendidikan harus berbasis pada kerakyatan. Struktur Sosial harus dilihat dari lapisan paling bawah yang sering disebut masyarakat marginal, pendidikan berbasis kerakyatan ini bermaksud agar pendidikan kita

mampu mengatasi masalah – masalah sosial yang bersinggungan dengan otoritas kekuasaan. Kondisi yang tidak berimbang dimana kaum marginal yang serba kesulitan dalam pembiayaan kegiatan sekolah terasa berat sekali.

Salah satu penghambat dalam pembangunan pendidikan yaitu adanya permasalahan angka putus sekolah yang terjadi di Kota Pontianak. Jika dilihat wilayah perkotaan tidak mungkin menyimpan lagi masalah angka putus sekolah, namun tidak dipungkiri bahwa pada kawasan Kota Pontianak masih rentan adanya anak yang mengalami putus sekolah. Putus sekolah di Kota Pontianak dapat dikarenakan oleh diri anak didik itu sendiri, rata-rata anak yang putus sekolah bukan dikarenakan faktor ekonomi sebab pemerintah telah mengalokasikan dana khusus bagi pendidikan sehingga tidak ada lagi alasan untuk tidak bersekolah karena tidak mempunyai uang. Tetapi nyatanya masih ada anak yang putus sekolah dan sangat disayangkan itu disebabkan karena si anak didik memiliki sifat malas untuk bersekolah. Kedua faktor lingkungan anak yang biasanya memiliki teman sebaya mereka yang tidak bersekolah sehingga pengaruh untuk putus sekolah lebih besar. Ketiga adalah faktor psikologis (berasal dari dalam diri peserta didik). Tidak dipungkiri bahwa salah satu faktor itu memiliki hubungan atau berpengaruh terhadap munculnya faktor lain. Berikut pembahasan lebih dalam terkait faktor-faktor tersebut.

1. Faktor Psikologis

Psikologis merupakan bagian dari perilaku manusia, dimana psikologi berkaitan dengan kejiwaan atau mengenai fungsi mental dalam perilaku individu. Menurut Woodworth (dalam Khodijah, 2014) psikologi ialah mengenai aktivitas-aktivitas individu, mencakup aktivitas motorik, kognitif, maupun emosional. Pada faktor psikologis inilah yang memiliki peluang dalam diri anak terhadap minat anak untuk tidak melanjutkan jenjang pendidikan. Faktor psikologis itu sendiri berpengaruh terhadap beberapa hal, seperti :

a. Rendahnya Minat Anak Untuk Bersekolah

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, sepuluh informan memaparkan bahwa penyebab mereka putus sekolah diutamakan karena rasa minat untuk bersekolah yang tidak ada (malas). Seperti yang diutarakan oleh AT, dimana dia mengalami putus sekolah pada jenjang pendidikan ditingkat SMP. Hal ini diungkapkan oleh AT dalam sesi wawancara:

“Nak ngape lah kak sekolah,tadak gak dapat duet. Pelajaran sih paham pula Cuma tuh be tadak enak yak sekolah tuh malas nak ke sekolah, kamek biase ngumpol same kawan, same gak mereka pon tdak gak sekolah nyambong sikitlah. Biase dulu tuh habes balek sekolah dahlah kamek pegi tadak gak nak ngapengape. Sekarang kegiatan kamek sih maen atau bantu jadi tukang parkir” (Wawancara AT tanggal 07 Oktober 2014).

*“Kenapa harus sekolah kak, **tidak juga mendapatkan uang**. Pelajaran disekolah paham, tapi sekolah **tidak enak** jadi malas mau pergi ke sekolah, saya biasanya **berkumpul sama teman**, sama juga mereka juga tidak sekolah jadi sama. Biasanya setelah sekolah saya pergi tidak ada kegiatan apa-apa. Sekarang kegiatan saya hanya bermain atau membantu jadi **tukang parkir**.”* (Wawancara AT tanggal 07 Oktober 2014).

Jika kita amati dari wawancara diatas terlihat bahwa malasnya AT bukan hanya sekedar karena malas saja, melainkan memiliki faktor pendukung yang menyebabkan malas itu terjadi yaitu pandangan akan hal pendidikan yang sempit, dimana AT merasa bahwa sekolah tidak menguntungkan secara finansial bagi dirinya, selain itu sekolah tidak memberikan rasa nyaman bagi dirinya untuk menghabiskan waktu atau melakukan aktivitas belajar, ditambah AT memiliki lingkungan pergaulan yang juga sama dengannya yaitu tidak bersekolah dan aktivitas AT lebih kepada mencari keuntungan bagi dirinya secara finansial yaitu sebagai tukang parkir. Ketidakmauan AT untuk bersekolah bukan disebabkan oleh malasnya dia, melainkan malasnya AT merupakan hasil dari sitem lainnya.

b. Tingkat Kesadaran dan Motivasi diri

Menurut Titaley (2012) tingkat kesadaran siswa dapat terwujud melalui sikap mereka, tingkat kesadaran siswa sangat mempengaruhi mereka untuk tetap bersekolah atau bahkan memilih untuk berhenti atau tidak melanjutkan sekolahnya dimana tingkat kesadaran ini juga bersumber dari motivasi siswa dalam belajar. Apabila siswa memiliki tingkat kesadaran akan hal pendidikan tinggi maka semakin tinggi pula motivasi yang ada untuk bersekolah dan belajar, namun sebaliknya jika tingkat kesadaran akan hal pendidikan itu rendah maka motivasi bersekolah dan belajar juga rendah, tidak adanya rasa tanggungjawab atas apa yang harus dia lakukan dan pada akhirnya siswa tidak akan melanjutkan pendidikannya.

c. Ruang Lingkup Sekolah

Keadaan suatu sekolah ternyata memiliki pengaruh terhadap minat peserta didik untuk bersekolah. Sekolah merupakan tempat peserta didik mendapatkan ilmu pengetahuan dan melewati proses aktivitas pendidikan, jika didalam ruang lingkup atau lingkungan sekolah tidak memiliki rasa nyaman dan aman jelas akan berdampak pada proses belajar peserta didik. Penyebab tidak adanya rasa nyaman didalam lingkungan sekolah bisa disebabkan karena pertama, adanya salah satu guru yang memiliki karakter galak terhadap siswa, sehingga siswa merasa segan untuk melakukan eksplorasi diri pada saat disekolah. Keadaan ini memiliki dampak bagi siswa dimana mereka tidak memiliki rasa nyaman saat disekolah label galak pada guru

melekat pada siswa menjadikan siswa memiliki rasa takut kepada guru. didik untuk pergi kesekolah dan rasa minder terhadap lingkungan teman.

2. Faktor Sosial

Faktor sosial menjadi penyebab alasan peserta didik putus sekolah. Pada nyatanya manusia tidak akan bisa terlepas dari sebuah lingkungan dimana dia tinggal. Keberadaan peserta didik dalam lingkungan masyarakat dan dalam sebuah komunitas memiliki pengaruh terhadap pendidikan, mengingat peserta didik tidak hanya hidup dilingkungan sekolah saja melainkan peserta didik memiliki ruang yang lebih kecil dari bagian kehidupannya. Lingkungan keluarga dan lingkungan sekitar tempat tinggal selalu memiliki kontak sosial secara langsung dengan peserta didik, faktor sosial juga berkaitan dengan pandangan atau persepsi mereka tidak terkecuali pandangan atau persepsi mereka pada pendidikan.

Beberapa informan memiliki kehidupan keluarga yang tidak utuh, dimana orangtua mereka bercerai sehingga sulit untuk masing-masing anggota keluarga untuk menjalankan fungsi mereka. Pada kasus perceraian yang menjadi korban ialah sang anak adanya gangguan psikologis dan ketidakstabilan fungsi keluarga, serta terjadinya pergeseran peran masing-masing dalam lingkungan sosial. Menurut Bumpass dan Rindfuss (dalam Ihromi, 2004) menunjukkan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai cenderung mengalami pencapaian tingkat pendidikan dan kondisi ekonomi yang rendah serta mengalami ketidakstabilan dalam perkawinan mereka sendiri.

3. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi merupakan bagian dari penyebab terjadinya masalah putus sekolah pada peserta didik. Ketidakmampuan secara ekonomi meletakkan mereka pada garis kemiskinan, kebutuhan pokok dalam pencapaiannya saja masih kurang, apalagi dana untuk pendidikan walaupun pemerintah telah memberikan program bantuan itu tidak bisa dijadikan penguat peserta didik untuk melanjutkan sekolah karena masih ada biaya diluar dari tanggungan pemerintah yang harus dipenuhi. Penghasilan keluarga yang pas-pasan untuk kebutuhan pokok harus berkurang dalam pembiayaan pendidikan.

Penuturan salah informan yang mengalami putus sekolah karena ekonomi keluarga yaitu SS: *“Saya putus sekolah karne orangtua **saya tdak mampu untuk biaya nye**, ekonomi kluarge tdak cukup buat sekolah buat kebutuhan makan yak pas-pasan agik pon dolok tdak ade bantuan kayak sekarang nih dan yang kerje pon hanya bapak yak buruh lepas klo mamak hanya ibu rumah tangga dan saye anak pertame pula, jadi masih banyak tanggungan buat adek tuh.”* (Wawancara SS 02 Oktober 2014) *“Saya putus sekolah **dikarenakan ekonomi keluarga**,*

karena tidak ada uang untuk membiayakan kebutuhan pendidikan sedangkan kebutuhan pokok saja pas-pasaan, lagipula pada saat dulu belum ada bantuan dari pemerintah seperti sekarang ini, ditambah ayah saya bekerja hanya sebagai buruh lepas sedangkan ibu sebagai ibu rumah tangga dan saya anak pertama lagipula masih ada adik yang harus ditanggung.”(Wawancara SS 02 Oktober 2014). Berdasarkan penuturan SS terlihat bahwa alasan dia putus sekolah dikarenakan ketidakmampuan biaya pendidikan dalam keluarganya ditambah dengan pekerjaan orangtua yaitu ayah yang hanya bekerja sebagai buruh lepas dengan penghasilan yang tidak tetap, sehingga SS terpaksa berhenti dan memilih untuk mencari nafkah demi membantu kebutuhan keluarga.

Berdasarkan paparan diatas dapat kita simpulkan bahwa faktor utama terjadinya putus sekolah di Kota Pontianak adalah pengaruh faktor psikologis. Sedangkan faktor sosial dan ekonomi bukanlah menjadi dasar utama terjadinya putus sekolah di Kota Pontianak, walaupun ada beberapa kasus putus sekolah disebabkan oleh ke-2 faktor tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah telah berupaya menekan angka putus sekolah dengan berbagai cara salah satunya adanya program BOS yang menggratiskan biaya sekolah untuk anak – anak. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Pontianak tahun 2014 dalam buku Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Pontianak tahun 2015 – 2019, Angka Putus Sekolah (APS) tahun 2013 paling tinggi terjadi pada tingkat SD / Sederajat yaitu sekitar 0,13% dari jumlah anak usia sekolah jenjang SD. Memang APS tingkat SD / Sederajat sangat bervariasi, dari tahun 2010 – 2013 Angka Putus Sekolah (APS) di tingkat SD / Sederajat tidak menentu terkadang mengalami penurunan dan terkadang mengalami kenaikan. Hal ini berbeda dengan APS di tingkat SMP dan SMA. Memang jika dilihat dari tahun 2010, APS di tingkat SMA / Sederajat paling tinggi di antara semua jenjang pendidikan. Akan tetapi hal ini terus menurun setiap tahunnya hingga pada tahun 2013 APS di tingkat SMA mengalami penurunan yang signifikan yaitu dari 1,14% di tahun 2012 menjadi 0,12% di tahun 2013. APS Kota Pontianak dari tahun 2010 – 2013 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.3 Angka Putus Sekolah (APS) Kota Pontianak

No	Angka Putus Sekolah (APS)	Tahun (%)			
		2010	2011	2012	2013
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/Sederajat	0.09	0.10	0.06	0,13
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/Sederajat	0.26	0.29	0.14	0,08
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/Sederajat	1.46	1.44	1.14	0,12

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Pontianak, 2014

4.3 STATUS GIZI

Menurut Hammond (2004), status gizi berarti penggolongan suatu hasil pengukuran ke dalam tingkat kebutuhan gizi fisiologis seseorang. Sedangkan pengertian lain menyebutkan, status gizi merupakan ekspresi dari keadaan keseimbangan dalam bentuk variabel tertentu, atau perwujudan dari status tubuh yang berhubungan dengan gizi dalam bentuk variabel tertentu (Supriasa, Bakri, dan Fajar, 2002). Jadi intinya, terdapat suatu variabel yang diukur (misalnya berat badan dan tinggi badan) yang dapat digolongkan ke dalam kategori gizi tertentu (misalnya baik, kurang, buruk, dan sebagainya).

Pertumbuhan seorang anak bukan hanya sekedar gambaran perubahan ukuran tubuh, tetapi lebih dari itu memberikan gambaran tentang keseimbangan antara asupan dan kebutuhan gizi (status gizi). Oleh karena itu, pertumbuhan merupakan indikator yang baik dari perkembangan status gizi anak (Depkes RI, 2002 a). Penilaian status gizi adalah interpretasi dari data yang didapatkan dengan menggunakan berbagai metode untuk mengidentifikasi populasi atau individu yang berisiko atau dengan status gizi buruk (Hartriyanti dan Triyanti, 2007). Tujuan penilaian status gizi menurut Hammond (2004) adalah untuk:

- a. Mengidentifikasi individu yang membutuhkan dukungan nutrisi yang cukup.
- b. Mempertahankan status gizi seseorang.
- c. Mengidentifikasi penatalaksanaan medis yang sesuai.
- d. Memonitor efektivitas intervensi yang telah dilakukan tersebut.

Berdasarkan tujuan-tujuan tersebut, Peneliti akan melakukan penilaian status gizi anak balita gizi kurang yang telah diberi intervensi berupa pemberian makanan tambahan. Metode dalam penilaian status gizi dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu secara langsung, tidak langsung, dan dengan melihat variable ekologi. Penilaian status gizi secara langsung terdiri dari tes laboratorium, pemeriksaan tanda-tanda klinis, pemeriksaan biofisika dan pengukuran antropometri. Adapun penilaian status gizi secara tak langsung misalnya dengan menggunakan informasi angka kematian pada umur tertentu, ataupun angka penyebab kesakitan dan kematian. Sedangkan pada penilaian variabel ekologi, dilakukan pengumpulan data lapangan misalnya *24-hour food recall* (Hartriyanti dan Triyanti, 2007).

Adapun metode yang dilaksanakan pada penelitian ini adalah dengan pengukuran antropometri dan pemeriksaan tanda-tanda klinis. Dalam menentukan status gizi harus ada ukuran baku (reference). Baku antropometri yang sekarang digunakan di Indonesia adalah Baku *World Health Organization-National Centre for Health Stastics (WHO-NCHS)*. Terakhir, berdasarkan Temu Pakar Gizi di Bogor tanggal 19-21 Januari dan di Semarang tanggal 24-26 Mei 2000, merekomendasikan baku WHO-NCHS untuk digunakan sebagai baku antropometri di Indonesia (Depkes RI, 2000 dalam Arisman, 2004).

Menurut WHO, data berat dan tinggi badan yang dikumpulkan oleh United States - National Centre for Health Stastics merupakan pilihan terbaik baku rujukan (Supariasa, Bakri, dan Fajar, 2002). Departemen Kesehatan Republik Indonesia membuat rujukan penilaian status gizi anak balita yang terpisah antara anak laki-laki dan perempuan. Hal ini sesuai dengan yang telah disampaikan di atas. Kriteria jenis kelamin inilah yang membedakan baku WHO-NCHS dengan Baku Harvard yang sebelumnya digunakan. Adapun baku WHO 2005 belum digunakan di Indonesia sebagai rujukan pengganti baku WHO-NCHS (Sudiman, 2006).

Penggolongan status gizi pada tabel indeks berat badan menurut umur dan berat badan menurut tinggi badan didasarkan kepada *deviasi standar* (DS). Dari indeks berat badan menurut umur (BB/U), status gizi dapat digolongkan menjadi empat kelas yaitu :

1. Gizi buruk (BB/U < -3 DS)
2. Gizi kurang (- 3 DS < BB/U < -2 DS)
3. Gizi baik (-2 DS < BB/U < +2 DS)
4. Gizi lebih (BB/U > +2 DS).

Sedangkan status gizi berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) juga dibagi menjadi empat kelas, yaitu :

1. Kurus sekali (BB/T < -3 DS)
2. Kurus (- 3 DS < BB/TB < -2 DS)
3. Normal (2 DS < BB/TB < +2 DS)
4. Gemuk (BB/TB > +2 DS).

Untuk melakukan pengawasan pertumbuhan anak, dapat didahului dengan pengisian Kartu Menuju Sehat (KMS) Balita. Bila pada KMS tersebut didapati BB/U < -3 deviasi standar (DS) ataupun <60 % median NCHS (atau di bawah garis merah), maka ditentukan status gizinya melalui indeks BB/TB. Jika BB/TB < -3 DS (< 70 % median NCHS), ditambah dengan tanda klinis yang sesuai, maka status gizi anak tersebut adalah buruk. Berikut ini akan disajikan Tabel 4.4. tentang cara penentuan status gizi anak.

Tabel 4.4 Penentuan Status Gizi Anak

Status Gizi	Klinis	Antropometri (BB/TB-PB)
Gizi Buruk	Tampak sangat kurus dan atau edema pada kedua punggung kaki sampai seluruh tubuh.	< -3 DS
Gizi Kurang	Tampak Kurus	≥ -3 DS - <-2 DS
Gizi Baik	Tampak Sehat	-2 DS - + 2 DS
Gizi Lebih	Tampak Gemuk	> +2 DS

Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara, 2007. Buku Bagan Tata Laksana Anak Gizi Buruk I, Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Utara. Hlm.2. BB/TB-PB=Berat badan menurut tinggi (panjang) badan

4.3.1 Gizi Buruk

Di negara Indonesia, sebuah kasus seperti Kurang Energi Protein (KEP) tersebut masih menjadi momok bagi negara Indonesia yang mana masih banyak kami jumpai dimana-mana pada seorang balita. Gizi buruk bukanlah kejadian kronis dan bukan kejadian yang tiba-tiba. Pertanyaan yang timbul adalah di mana laporan hasil pemantauan status gizi berada dan ke mana laporan tersebut dikirimkan selama ini? Secara teknis, mestinya laporan tersebut berada di Dinas Kesehatan (untuk Daerah) dan Departemen Kesehatan (untuk Pusat). Secara teknis pula, lembaga-lembaga tersebut bertanggung jawab atas kajian data hasil pemantauan yang dilakukan secara berkala mulai dari tingkat Puskesmas, dengan Posyandu sebagai ujung tombak sumber informasi. Demikian pula institusi rumah sakit, merupakan unit pelayanan yang juga turut berkontribusi atas tersedianya informasi kasus tersebut karena berkaitan dengan fungsinya sebagai pusat rujukan kasus.

Gizi buruk dapat diartikan sebagai suatu keadaan kondisi yang mana seseorang balita yang memiliki kekurangan asupan nutrisi, atau dalam arti lain orang tersebut memiliki nutrisi dibawah rata-rata umumnya orang normal. Nutrisi yang kami maksud ialah bisa berupa protein, kalori serta karbohidrat. Berdasarkan *antropometri* (BB/TB-PB) Gizi buruk adalah keadaan kurang gizi tingkat berat pada anak berdasarkan indeks berat badan menurut tinggi badan (BB/TB) < -3 SD dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor dan marasmus-kwashiorkor.

1. Marasmus

Marasmus adalah keadaan gizi buruk yang ditandai dengan tampak sangat kurus, iga gambang, perut cekung, wajah seperti orang tua dan kulit keriput. Ciri – ciri *Marasmus* Yaitu :

- a. Badan terlihat kurus, seakan-akan tulang hanya terbalut kulit saja
- b. Muka terlihat seperti layaknya orang tua
- c. Gampang nangis/cengeng atau pun rewel
- d. Kulit terlihat keriput dan kering
- e. Jaringan pada lemak subkutis-nya begitu sangat sedikit sekali sampai tak ada
- f. Perut akan terlihat cekung dan tulang iga akan gambang
- g. Sering kali terkena penyakit infeksi yang umumnya seperti kronis yang berulang-ulang
- h. Diare kronik maupun konstipasi

2. Kwashiorkor

Kwashiorkor adalah keadaan gizi buruk yang ditandai dengan edema seluruh tubuh terutama di punggung kaki, wajah membulat dan sembab, perut buncit, otot mengecil, pandangan mata sayu dan rambut tipis/kemerahan. Adapun ciri – ciri *kwashiorkor* sebagai berikut :

- a. Edema atau pembengkakan, pada umumnya bagian seluruh tubuh (terutama pada punggung kaki serta wajah) akan membulat serta lembab.
- b. Pandangan atau penglihatan mata terlihat sayu
- c. Rambut yang tipis agak kemerahan layaknya warna yang ada pada rambut jagung serta mudah sekali dicabut dengan tanpa rasa sakit, dan tentunya rambut rontok
- d. Mental seseorang berubah menjadi Apatis serta rewel
- e. Akan terjadi pembesaran pada hati
- f. Otot akan mengecil (Hipotrofi), akan terlihat nyata ketika saat berdiri maupun duduk
- g. Kulit memiliki bercak warna merah muda yang bisa meluas serta bisa berubah warnanya hingga menjadi warna yang coklat namun agak kehitaman dan terus akan mengelupas (Crazy Pavement Dermatitis)
- h. Sering disertai dengan penyakit infeksi seperti umumnya akut saja
- i. Diare serta Anemia

3. Marasmus-Kwashiorkor adalah keadaan gizi buruk dengan tanda-tanda gabungan dari marasmus dan kwashiorkor.

Gejala yang ditimbulkan pada penderita gizi buruk tergantung pada berat dan ringannya status gizi buruk yang dialami anak tersebut. dan juga tergantung pada jenis nutrisi yang mengalami defisiensi. Walaupun demikian gejala umum dari gizi buruk yaitu :

1. Kulit yang kering dan bersisik
2. Gusi bengkak dan berdarah
3. Berat badan anak kurang.
4. Mudah lelah karena kurang kalori
5. Anak jadi sulit berkonsentrasi
6. Anak kurang aktif.
7. Kekebalan tubuh rendah dan sering sakit.
8. Pertumbuhan fisik anak lambat.
9. Kekuatan otot melemah. Tulang mudah patah
10. Dan Terdapat masalah masalah lain pada fungsi organ tubuh anak.

Menimbang sangat begitu penting untuk dapat memantau kondisi gizi pada balita tersebut agar pertumbuhannya dan juga kecerdasannya meningkat, maka dianjurkan buat orang tua harus memperhatikan semua hal-hal yang bisa mencegah terjadinya gejala gizi buruk terhadap anak balita ibu sendiri. Nah, berikut ini ada beberapa tips atau cara untuk dapat mencegah terjadinya gejala gizi

buruk terhadap balita:

1. Berikan asupan ASI yang eksklusif hingga balita tersebut berusia 6 bulan. Kemudian, balita tersebut mulailah kenalkan sama makanan asupan tambahan untuk pendamping ASI, namun harus tingkatan dengan sesuai usia-nya, lalu setelah usia si balita 2 tahun baru bisa disapih.
2. Balita harus diberikan asupan yang bervariasi dan seimbang pula antara kandungan dari protein-nya, vitamin, lemak serta mineralnya juga. Komposisi asupannya harus minimal 10% untuk lemak, dan untuk protein sebanyak 12% serta sisanya untuk karbohidrat.
3. Sering menimbang serta mengukur tinggi-nya balita dengan mengikuti sebuah program seperti Posyandu. Harus dicermati mengenai pertumbuhannya. Jika ada keganjalan anda segeralah berkonsultasi dengan ahlinya.
4. Kalau balita telah dirawat dirumah sakit terkena gizi buruk, anda bisa menanyakan langsung kepada para petugasnya mengenai pola atau jenis makanan apa yang meski diberikan pada balita tersebut setelah pulang nanti.
5. Kalau balita sudah terkena kekurangan gizi, maka bergegaslah asupkan makanan yang mengandung kalori tinggi. Kemudian untuk protein-nya dapat diberikan nanti setelah kalori tersebut terlihat dapat meningkatkan energi pada balita. Berikan pula vitamin dan suplemen mineral kepada balita. Penanganan sejak dini banyak sekali membuahkan hasil yang sangat baik. Walau kondisi yang telah berat, namun bisa dilakukan dengan cara meningkatkan suatu kondisi pada kesehatan umumnya. Hanya saja, biasanya tetap akan meninggalkan sebuah sisa-sisa gejala seperti kelainan fisik dengan permanen serta akan timbul masalah seperti intelegensia pada kemudian hari.

Supaya mencukupi kebutuhan seperti gizi yang sangat baik untuk balita harus dibutuhkan usaha yang keras dari seorang ibu untuk memberikan asupan yang terbaik buat balitanya. Tentunya hal tersebut membutuhkan sifat kesabaran dan ketawakalan serta keuletan dalam pekerjaan untuk mencari kerizkian.

4.3.2 Faktor Penyebab Terjadinya Gizi Buruk

Bangsa Indonesia masih mempunyai pekerjaan besar untuk mengatasi masalah gizi buruk. Faktor dari tingginya gizi buruk yang dialami oleh anak-anak penderita gizi buruk di Indonesia adalah faktor yang muncul dari kehidupan sehari-hari. Sampai saat ini penderita gizi buruk sebagian besar adalah anak-anak, karena orangtua mereka kemungkinan memiliki berbagai masalah yang membuat mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan gizi anak-anaknya, kata seorang spesialis gizi klinik dr

Saptawati Bardosono, M.sc, dan beliau juga sebagai pengajar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Menurutnya, anak mengalami gizi buruk karena disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya:

1. Ekonomi

Di Indonesia, masalah ekonomi yang rendah merupakan salah satu faktor yang sangat dominan dialami oleh banyak keluarga. Dalam mencukupi kebutuhan gizi anak banyak orangtua yang merasa kesulitan, penyebabnya adalah keadaan ekonomi yang lemah, penghasilan dari pekerjaan kurang mencukupi dan harga dari bahan makanan yang mahal. Padahal, masa kritis gizi buruk yang dialami anak terjadi pada usia antara 1 sampai 3 tahun.

2. Sanitasi / Kebersihan

Kondisi sanitasi yang kurang baik di rumah dapat berimbas pada kondisi kesehatan anggota keluarga, terlebih anak-anak. Buruknya sanitasi juga dapat mencemari beberapa bahan makanan yang akan diolah menjadi masakan.

3. Pendidikan

Orangtua seharusnya mempunyai pengetahuan yang lebih mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup bagi anak. Rendahnya tingkat pendidikan orangtua sehingga mereka tidak mampu untuk menyediakan jumlah gizi yang dibutuhkan anak. Ibu merupakan kunci dari pemenuhan gizi anak-anak, dan kunci untuk mengatasi gizi buruk, ujar Saptawati. Orangtua yang tidak tahu mengenai pentingnya asupan gizi bagi anak akan cenderung untuk acuh dan menganggapnya tidak penting.

4. Perilaku orangtua

Banyak dari orangtua yang beranggapan bahwa dirinya adalah yang paling tahu, sebenarnya mereka masih memerlukan bantuan bimbingan dari para ahli gizi dan medis untuk mengatasi permasalahan kesehatan dan gizi yang dialaminya. Ada persepsi yang salah dari para orangtua ketika mereka datang ke posyandu. Seringkali mereka malas datang karena takut diceramahi dan dimarahi dokter tentang masalah gizi, kata Saptawati. Perilaku dan pola pikir orang tua yang seperti itu menyebabkan anak selalu dalam kondisi gizi buruk dan anak menjadi lebih rentan terhadap sakit.

4.3.3 Gizi Buruk Kota Pontianak

Kota Pontianak merupakan pusat ibukota Provinsi Kalimantan Barat. Sebagai pusat ibukota Provinsi, tentunya Kota Pontianak menjadi sasaran utama perpindahan penduduk dari pedesaan dalam mencari nafkah guna meningkatkan taraf hidup. Dengan adanya fenomena ini, tentunya pertumbuhan penduduk di Kota Pontianak sedikit kurang terkontrol. Kurang terkontrolnya pertumbuhan penduduk ini

akan berdampak pada masalah – masalah sosial yang cukup kompleks salah satunya adalah masalah gizi buruk. Detail data kasus gizi buruk di tahun 2014 dan 2015 dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.5 Detail Data Kasus Gizi Buruk Kota Pontianak Tahun 2014 - 2015

No	Nama	Umur (bln)	Alamat	Puskesmas	Kecamatan	Tahun	Ket
1	NUR AMIRUL	30	Jl. Kom Yos Sudarso Gg.Rambutan	Perumnas 2	Pontianak Barat	2014	Tuntas
2	NAYFA THASANIE	35	Jl. Kom Yos Sudarso Gg.Durian II No.36	Perumnas 1	Pontianak Barat	2014	Tuntas
3	VICKY NUGI PRATAMA	9	Jl. Kom Yos Sudarso Komp. Yuga Gg. Alpokat Indah	Perumnas 2	Pontianak Barat	2014	Meninggal
4	DAFFA M. ATTAYA	8	Jl. Pelabuhan Rakyat Jalur IB	Perumnas 2	Pontianak Barat	2014	Tuntas
5	M.AFTARIGAN ARAYYAN	56	Jl. Aliyayang Gg. Rahayu	Aliyayang	Pontianak Kota	2014	Tuntas
6	EVELYN MARDIANA	36	Jl.ST Syahrir Gg.Rawasari	Aliyayang	Pontianak Kota	2014	Tuntas
7	ASISKA NINGRUM	6	Jl. Prof M.Yamin Gg Morodadi No 55	Karya Mulia	Pontianak Kota	2014	Tuntas
8	NURA ALIA SAFIKA	13	Jl. Harapan Jaya Gg.Mekar Jaya	Gg.Sehat	Pontianak Selatan	2014	Tuntas
9	RIZKY ALFARUKI	46	Jl. Tanjung Raya I Gg.Sampang	Kampung Dalam	Pontianak Timur	2014	Tuntas
10	NAZWA PUTRI SABRINA	25	Jl. Padat Karya Komp.Palestine Blok B.2	Saigon	Pontianak Timur	2014	Tuntas
11	M. IQBAL	39	Jl. Tanjung Raya II Gg.M.Arif	Banjar Serasan	Pontianak Timur	2014	Tuntas
12	AURA AZZAHRA	23	Jl. Tanjung Harapan Gg.H.Rais	Banjar Serasan	Pontianak Timur	2014	Tuntas
13	SY RIDWAN	28	Jl. Tanjung Raya II Gg. Babul Khair	Banjar Serasan	Pontianak Timur	2014	Tuntas
14	DINDA MAULIDIA	5	Jl. Tritura Gg.Mangga	Kampung Dalam	Pontianak Timur	2014	Tuntas
15	M.KHAIRI	20	Jl. Tanjung Raya II Gg.Mulya Dalam	Kampung Dalam	Pontianak Timur	2014	Meninggal
16	KOMLA SARI	51	Jl. Tanjung Harapan Gg.H.Uzman	Banjar Serasan	Pontianak Timur	2014	Tuntas
17	YULI RAHMAYANTI	3	Bawah Tol Landak Gg Semut	Tj Hulu	Pontianak Timur	2014	Tuntas
18	AHMAD ZAINI	5	Gg. Bersama II	Siantan Tengah	Pontianak Utara	2014	Meninggal
19	DERI ALKAHFI	13	Gg.Wartawan	Telaga Biru	Pontianak Utara	2014	Tuntas
20	INDAH AYU KURNIA	46	Gg. Selat Sumba	Siantan Tengah	Pontianak Utara	2014	Tuntas
21	RAHMAD JAYA SAPUTRA	21	Jl. Selat Panjang	Telaga Biru	Pontianak Utara	2014	Tuntas
22	MAULIDIA	13	Jl.Panca Bhakti Gg.Hidayah No.4	Khatulistiwa	Pontianak Utara	2014	Tuntas
23	ADE KRISTIAN	39	Jl. Kebangkitan Nasional Gg.Sinar Karya Jalur 3	Khatulistiwa	Pontianak Utara	2014	Tuntas
24	M. ALIF MAULANA	9	Jl. Khatulistiwa Gg. Selat Madura No.16	Siantan Tengah	Pontianak Utara	2014	Tuntas
25	VIRGIN MAULANI	55	Gg. Karimata	Siantan Tengah	Pontianak Utara	2014	Tuntas
26	FATURRAHMAN	7	Jl. Khatulistiwa Gg. Sambas Dalam Jaya	Khatulistiwa	Pontianak Utara	2014	Tuntas
27	LESTI MULYA	9	Perumnas 2 Gg Fajar Karya No 2	Perumnas 2	Pontianak Barat	2015	Meninggal
28	NIKITA	36	Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Kayu Manis	Perumnas 1	Pontianak Barat	2015	Tuntas
29	ROMADHON HABIBURAHIM	14	Gg. Darma Karya	Perumnas 1	Pontianak Barat	2015	Tuntas
30	SYAIFUL ULA	16	Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Gotong Royong	Perumnas 1	Pontianak Barat	2015	Tuntas
31	NAUFAL AFDAL	11	Jl. Dansen Gg.Wonosobo No 8	Karya Mulia	Pontianak Kota	2015	Tuntas
32	RATU	18	Gg Kemuning Kel. Tengah	Jendral Urip	Pontianak Kota	2015	Meninggal
33	RAYHAN SYAHBANA	4	Jl Sepakat RT 2 RW 4 BBL	Kampung Bangka	Pontianak Tenggara	2015	Tuntas
34	ADELIE KIRANA	10	Jl. Sei Sekayam Saigon	Saigon	Pontianak Timur	2015	Tuntas
35	ARIEF BILLAH	9	Jl. Tj.Raya Gg. Sampang	Kampung Dalam	Pontianak Timur	2015	Tuntas
36	ROHMAN	3	Jl. Tj.Hilir Gg.Karya Sepakat	Kampung Dalam	Pontianak Timur	2015	Tuntas
37	ROHIM	3	Jl. Tj.Hilir Gg.Karya Sepakat	Kampung Dalam	Pontianak Timur	2015	Tuntas
38	TIGER FEBRUARI	0,5	Jl. Tritura Gg. Azhari	Tanjung Hulu	Pontianak Timur	2015	Tuntas
39	M.ARFAN	12	Jl. Tj Pulau RT 4 RW q3 Dalam Bugis	Kampung Dalam	Pontianak Timur	2015	Tuntas
40	HASAN	18	Jl. Tanjung Raya I Gg. Bersama	Kampung Dalam	Pontianak Timur	2015	Tuntas
41	M. LUTHFI	4	Jl. Pemdada Gg. M Yasin No2 Saigon	Saigon	Pontianak Timur	2015	Tuntas
42	YUSRIL AMAJID	6	RT 3 RW 6 Kel. Tambelan Sampit	Tambelan Sampit	Pontianak Timur	2015	Tuntas
43	REYHANA LATIFA ALFIYA	15	Jl. Tanjung Raya II Gg.Musyawahar	Parit Mayor	Pontianak Timur	2015	Tuntas
44	AMPI	27	Gg KPLP	Kampung Dalam	Pontianak Timur	2015	Tuntas
45	CHINDY AYU VITA SARI	49	Gg. Suka Doa	Parit Mayor	Pontianak Timur	2015	Tuntas
46	AULIA IZZATUNISA	9	Jl. 28 Oktober Komp Villa Malaya Permai	Telaga Biru	Pontianak Utara	2015	Tuntas
47	RAJWA AIDIL FIQRI	19	Jl. Parit Pangeran	Siantan Hulu	Pontianak Utara	2015	Tuntas
48	DEFSI CLEO	11	Jl. 28 Okober Gg.Pendidikan	Telaga Biru	Pontianak Utara	2015	Tuntas
49	AKBAR	9	Jl. Selat Sumba Gg. Sederhana	Siantan Tengah	Pontianak Utara	2015	Tuntas
50	SHAMIR	21	Jl. 28 Oktober Gg. Trisakti	Telaga Biru	Pontianak Utara	2015	Tuntas
51	RAFFA	20	RT 4 RW 15 Siantan Hulu	Siantan Hulu	Pontianak Utara	2015	Tuntas
52	ALBY PRADIPTA	13	Jalan Sepakat Siantan Tengah	Siantan Tengah	Pontianak Utara	2015	Tuntas
53	RONI TRIYANTO	54	Gg. Swasembada	Telaga Biru	Pontianak Utara	2015	Tuntas

Walau sebagai pusat ibukota Provinsi, Kota Pontianak tidak terlepas dari fenomena akan kasus gizi buruk pada balita. Kasus gizi buruk di Kota Pontianak disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

a. Ekonomi

Ekonomi yang rendah atau bisa dikatakan kemiskinan merupakan faktor yang menyebabkan masalah gizi buruk di Kota Pontianak, rendahnya perekonomian masyarakat akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat untuk memenuhi kebutuhannya secara layak, baik itu makanan, pakaian dan kebutuhan rumah tangga lainnya.

b. Pendidikan

Rendahnya pendidikan orang tua sehingga membuat orang tua kurang sadar akan pentingnya asupan gizi untuk anak. Gizi yang baik untuk anak akan berpengaruh terhadap masa depan anak itu sendiri.

c. Lingkungan

Lingkungan yang sehat serta sanitasi yang baik akan berpengaruh terhadap mutu kesehatan suatu masyarakat. Semakin bersih lingkungan di suatu masyarakat, semakin sehat pula masyarakat itu sendiri.

d. Psikologis Orang Tua.

Sikap orang tua yang lebih mementingkan diri sendiri daripada memikirkan gizi dan kesehatan anak. Hal itu disebabkan oleh orang tua yang menikah di usia muda

Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak, pada tahun 2014 terdapat kurang lebih 26 kasus gizi buruk yang tersebar di 5 kecamatan yang ada di Kota Pontianak dan Pontianak Timur sebagai kecamatan yang paling banyak kasus Gizi Buruknya, yaitu berjumlah 9 kasus. Dari 26 kasus tersebut, 23 telah dinyatakan tuntas pada akhir tahun 2014 dan 3 meninggal dunia. Akan tetapi, pada tahun 2015 kasus gizi buruk di Kota Pontianak kembali muncul. Tercatat kurang lebih 27 kasus gizi buruk pada tahun 2015 dan telah dinyatakan tuntas pada akhir 2015 sebanyak 25 kasus dan 2 orang meninggal dunia. Melihat fenomena ini kami dari pihak konsultan mencoba mempelajari masalah pokok yang menjadi penyebab kasus gizi buruk dengan melakukan survey ke lapangan. Survey yang kami lakukan berdasarkan data sekunder dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak tahun 2016 bulan Januari – April dengan jumlah 19 kasus. Dari sekian banyak kasus tersebut, kami menemukan pokok utama penyebab terjadinya gizi buruk pada balita di Kota Pontianak, yaitu dari faktor ekonomi dan ada beberapa yang disebabkan oleh penyakit serta dari faktor psikologis orang tua yang enggan membawa balitanya untuk lapor ke puskesmas terdekat di karenakan kurangnya kesadaran akan pentingnya kebutuhan akan gizi balita.

Tentunya hal ini sangat memprihatinkan mengingat Kota Pontianak adalah pusat ibu kota Provinsi Kalimantan Barat. Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya memperhatikan asupan gizi kepada balita adalah satu-satunya upaya untuk menekan angka kasus gizi buruk. Adapun

data detail kasus gizi buruk di Kota Pontianak Tahun 2016 bulan Januari - April dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 4.6 Detail Data Kasus Gizi Buruk Tahun 2016 Januari - April

No	Detail Data	Foto
1	<p>Nama Balita : M. Farid Alfarisi (Herul) L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 02 Januari 2015 Umur : 1 Tahun Alamat : Jl. Parwasal Dalam, Gg. Melati 1 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah Jumlah Saudara : Nama Orang Tua Bapak : Muhadi Ibu : Subeideh Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Ibu Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SD/ Sederajat Ibu : SD/ Sederajat Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 Jenis Gizi Buruk : Marasmus Penyakit Penyerta : Batuk, Pilek Latitude : 00.00048° Longitude : 109.34834°</p>	
2	<p>Nama Balita : M. Abizar L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 24 Mei 2014 Umur : 2 Tahun Alamat : Jl. Parit Pangeran Rt4/Rw10 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hulu Jumlah Saudara : Nama Orang Tua Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Ibu Rumah Tangga Pekerjaan Orang Tua Bapak : Misnawar Ibu : Mariati Pendidikan Orang Tua Bapak : SD/Sederajat Ibu : SD/Sederajat Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.000.000 Jenis Gizi Buruk : Marasmus Penyakit Penyerta : Lipoma, Demam, Batuk, Latitude : 00.01353° Longitude : 109.35498°</p>	

3	<p>Nama Balita : Siti Nurlaila L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 02 Februari 2014 Umur : 2 Tahun Alamat : Jl. Selat Madura Rt2/Rw9 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah Jumlah Saudara : Nama Orang Tua Bapak : Sulaiman Ibu : Soniati Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Buruh Harian Lepas Pendidikan Orang Tua Bapak : SD/Sederajat Ibu : SD/Sederajat Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 Jenis Gizi Buruk : MARASMUS Penyakit Penyerta : Demam, Batuk, Pilek Latitude : 00.01064° Longitude : 109.34690°</p>	
4	<p>Nama Balita : Rafli Almair L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 15 Mei 2015 Umur : 1 Tahun Alamat : Jl. Khatulistiwa, Dharma Putra 2 Rt1/Rw26 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hilir Jumlah Saudara : 1 Nama Orang Tua Bapak : Rio Renaldi Ibu : Rahmah Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Ibu Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SD/Sederajat Ibu : SD/Sederajat Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000 Jenis Gizi Buruk : Marasmus Penyakit Penyerta : Demam, Diare Latitude : 00.00937° Longitude : 109.33910°</p>	

5	<p>Nama Balita : Putri Sakinah Rahayu L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 18 Oktober 2012 Umur : 3 Tahun Alamat : Jl. Khatulistiwa, Komp Tai Chu Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hilir Jumlah Saudara : 1 Nama Orang Tua Bapak : Muhari Ibu : Mariani Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Ibu Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMP/Sederajat Ibu : SMP/Sederajat Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 Jenis Gizi Buruk : Marasmus Penyakit Penyerta : Demam, Batuk, Pilek Latitude : 00.00480° Longitude : 109.32834°</p>	
6	<p>Nama Balita : M. Salam L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 09 Maret 2015 Umur : 1 Tahun Alamat : Jl. Parwasal, Depan Gg. Makam Muslim Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah Jumlah Saudara : 4 Nama Orang Tua Bapak : Tarimun Ibu : Rokaiyah Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Ibu Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SD/Sederajat Ibu : Tidak Tamat SD Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 Jenis Gizi Buruk : Marasmus Penyakit Penyerta : Latitude : 00.00642° Longitude : 109.34641°</p>	

7	<p>Nama Balita : M. Raffa L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 14 Oktober 2014 Umur : 2 Tahun Alamat : Jl. Tritura, Gg. Ashari Rt3/Rw5 Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Tanjung Hilir Jumlah Saudara : 3 Nama Orang Tua Bapak : Hamdani Ibu : Fatmawati Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Ibu Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMP Ibu : SD Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 Jenis Gizi Buruk : Marasmus Penyakit Penyerta : Demam, Batuk, Pilek, Diare Latitude : 00.02351° Longitude : 109.35566°</p>	
8	<p>Nama Balita : Ramadhan Habiburahim L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 04 Juli 2014 Umur : 3 Tahun Alamat : Jl. Kom Yos Sudarso, Gg. Kplp Kecamatan : Pontianak Barat Kelurahan : Sungai Beliang Jumlah Saudara : 2 Nama Orang Tua Bapak : Hendri Yanto Ibu : Santi Pekerjaan Orang Tua Bapak : Nelayan Ibu : Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMA Ibu : SMA Penghasilan Orang Tua : Rp 1.600.000 Jenis Gizi Buruk : Marasmus Penyakit Penyerta : ISPA Latitude : 00.20124° Longitude : 111.44153°</p>	

9	<p>Nama Balita : Nikita Surya Sari L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 23 September 2012 Umur : 4 Tahun Alamat : Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Kayu Manis Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hulu Jumlah Saudara : 1 Nama Orang Tua Bapak : Mansyur Ibu : Wenty Juwita Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Ibu : Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMA Ibu : SMA Penghasilan Orang Tua : Rp 1.500.000 Jenis Gizi Buruk : Marasmus Penyakit Penyerta : Demam Latitude : 00.00179° Longitude : 109.18410°</p>	
10	<p>Nama Balita : M.Arifin L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 25 Maret 2013 Umur : 3 Tahun Alamat : Jl. Tebu Gg. Dwi Ratna No 36 Kecamatan : Pontianak Barat Kelurahan : Sungai Jawi Dalam Jumlah Saudara : 2 Nama Orang Tua Bapak : Kasiman Ibu : Arbania Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SD/Sederajat Ibu : SD/Sederajat Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.300.000 Jenis Gizi Buruk : Marasmus Penyakit Penyerta : - Latitude : 00.00571° Longitude : 109.18232°</p>	

11	<p>Nama Balita : Arua L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 13 September 2015 Umur : 1 Tahun Alamat : Jl. H.Rais.Arahman Gg. Sekawan Kecamatan : Pontianak Barat Kelurahan : Sungai Jawi Dalam Jumlah Saudara : 2 Nama Orang Tua Bapak : Hendra Ibu : Muchlis Suryawati Pekerjaan Orang Tua Bapak : Karyawan Swasta Ibu : Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMA Ibu : SMA Penghasilan Orang Tua : Rp 3.000.000 Jenis Gizi Buruk : Marasmus Penyakit Penyerta : - Latitude : 00.0109.0° Longitude : 109.19101°</p>	
12	<p>Nama Balita : Adam Putra Utama L/P : Laki-Laki Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 05-12-2014 Umur : 1 Th 4 Bulan Alamat : Jl. Tajungharapan Gg.M. Taufik Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Banjar Serasan Jumlah Saudara : 1 Nama Orang Tua Bapak : Riki Ibu : Agustina Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Ibu : Ibu rumah tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMA Ibu : SMP Penghasilan Orang Tua : 1,5 Juta Jenis Gizi Buruk : Gizi Kurang Penyakit Penyerta : Tipes Latitude : 0.03004° Longitude : 109.21541°</p>	

13	<p>Nama Balita : M. Farid L/P : Laki-Laki Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 04-01-2015 Umur : 1 Th 3 Bulan Alamat : Jl. Tanjungharapangg. Rawasari II Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Banjar Serasan Jumlah Saudara : 1 Nama Orang Tua Bapak : M. Taufik Ibu : Dina Pekerjaan Orang Tua Bapak : Swasta Ibu : Ibu rumah tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMA Ibu : SMA Penghasilan Orang Tua : 1 – 1,5 Juta Jenis Gizi Buruk : Gizi Kurang Penyakit Penyerta : Diare Latitude : 0.02189° Longitude : 109.21226°</p>	
14	<p>Nama Balita : Alif Pratama L/P : Laki-Laki Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 24-11-2011 Umur : 4 Th 5 Bulan Alamat : Jl. Tanjungpulau Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Dalambugis Jumlah Saudara : 2 Nama Orang Tua Bapak : Hendri Ibu : Agustini Pekerjaan Orang Tua Bapak : Pedagang Ibu : Iburumahtangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SD Ibu : SMA Penghasilan Orang Tua : 1,3 Juta Jenis Gizi Buruk : Gizi Kurang Penyakit Penyerta : Batuk, TBC Latitude : 0.00487° Longitude : 109.20410°</p>	

15	<p>Nama Balita : Aliando L/P : Laki-Laki Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 7-05-2015 Umur : 1 Th Alamat : Jl. Tanjungpulau Rt.05/Rw.12 Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Dalambugis Jumlah Saudara : 1 Nama Orang Tua Bapak : Arisman Ibu : Wardaniarti Pekerjaan Orang Tua Bapak : Swasta Ibu : Ibu rumah tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMA Ibu : SMA Penghasilan Orang Tua : 1 – 2 Juta Jenis Gizi Buruk : Gizi Kurang Penyakit Penyerta : Batuk, Demam, Diare Latitude : 0.0203004° Longitude : 109.21591°</p>	
16	<p>Nama Balita : Ihye Saifiullah L/P : Laki-Laki Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 11-19-2011 Umur : 4 Th 6 Bulan Alamat : Jl. Selat Madura Gg. Karomah Rt 04/Rw 07 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah Jumlah Saudara : 2 Nama Orang Tua Bapak : Miswi Ibu : Fatimah Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Ibu : Ibu rumah tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMP Ibu : SD Penghasilan Orang Tua : 1,2 Juta Jenis Gizi Buruk : Gizi Buruk Penyakit Penyerta : Batuk, Diare Latitude : 0.00812° Longitude : 109.20584°</p>	

17	<p>Nama Balita : Ridho Abdul Hafid L/P : Laki-Laki Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 6-10-2015 Umur : 6 Bulan Alamat : Gg. Semut Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Tanjung Hulu Jumlah Saudara : 5 Nama Orang Tua Bapak : Suroto Ibu : Seri Indrayani Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Ibu : Ibu rumah tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SD Ibu : SD Penghasilan Orang Tua : 1,2 Juta Jenis Gizi Buruk : Gizi Kurang Penyakit Penyerta : Batuk, Pneumia / Anemia Latitude : 0.01170° Longitude : 109.21487°</p>	
18	<p>Nama Balita : Zulkarnain L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 09 Juli 2007 Umur : 9 Tahun Alamat : Jl. Masjid Dalam Rt01/Rw07 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah Jumlah Saudara : Nama Orang Tua Bapak : (Alm) Abdullah Ibu : Suryati Pekerjaan Orang Tua Bapak : - Ibu : Ibu Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : - Ibu : SD Penghasilan Orang Tua Jenis Gizi Buruk : Marasmus Penyakit Penyerta : Demam Latitude : 00.005452° Longitude : 109.31516°</p>	

19	Nama Balita	: Dzakir Khafadi	
	L/P	: L	
	Tempat, tanggal Lahir	: Pontianak, 09 Januari 2015	
	Umur	: 1 Tahun	
	Alamat	: Jl. Khatulistiwa, Gg. Satu Dalam	
	Kecamatan	: Pontianak Utara	
	Kelurahan	: Siantan Hilir	
	Jumlah Saudara	:	
	Nama Orang Tua	:	
	Bapak	: Rizki Aminullah	
	Ibu	: Nurazizah	
	Pekerjaan Orang Tua	:	
	Bapak	: Honorer	
	Ibu	: Ibu Rumah Tangga	
	Pendidikan Orang Tua	:	
	Bapak	: S1	
	Ibu	: SMA	
	Penghasilan Orang Tua	: Rp. 1.000.000 – Rp. 2.000.000	
	Jenis Gizi Buruk	: Marasmus	
	Penyakit Penyerta	: Gejala Saluran Pencernaan dan Kencing	
Latitude	: 00.0666°		
Longitude	: 109.31545°		

Dari data survey di atas, jika kita jabarkan dalam bentuk tabel distribusi frekuensi berdasarkan tingkat pendidikan, jenis pekerjaan dan penghasilan, maka akan didapat masalah pokok penyebab dari gizi buruk Kota Pontianak. Tabel distribusi frekuensi dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 4.7. Distribusi Frekuensi Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
Rendah (SD Sederajat)	7	38,89
Menengah (SMP-SMA)	10	55,56
Tinggi (D3/Sarjana)	1	5,56

Tabel 4.8. Distribusi Frekuensi Jenis Pekerjaan

Pekerjaan	Jumlah	%
Buruh Harian Lepas	11	57,89
Swasta	5	26,32
Wira Usaha	1	5,26
Rumah Tangga	1	5,26
Honorer (Tidak Tetap)	1	5,26

Tabel 4.9. Distribusi Frekuensi Penghasilan

Penghasilan	Jumlah	%
500.000 - 1.000.000	6	33,33
1.000.000 - 2.000.000	11	61,11
> 2.000.000	1	5,56

Ketiga tabel distribusi frekuensi di atas, menunjukkan bahwa faktor penghasilan sangat berpengaruh terhadap terjadinya kasus gizi buruk. Dimana penghasilan dibawah 2.000.000 sebanyak kurang lebih 94,44%. Hal ini disebabkan oleh faktor pekerjaan dimana dari 18 kasus gizi buruk di Kota Pontianak periode Januari-April sebanyak 57,89% orang tuanya bekerja sebagai buruh harian lepas. Dapat disimpulkan bahwa penyebab utama terjadinya gizi buruk di Kota Pontianak disebabkan oleh faktor ekonomi.

5.1 PENANGGULANGAN KEAKSARAAN

Pola atau hal-hal tersebut memang harus dapat diatasi oleh Pemerintah, agar buta aksara dapat diselesaikan dengan berbagai cara, diantaranya dengan:

- a. Mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah
Pemerintah harus berupaya untuk menekan anak usia sekolah yang tidak sekolah dan putus sekolah yang diakibatkan oleh masalah kemiskinan, maupun yang diakibatkan oleh jauh dari layanan pendidikan.
- b. Membuat cara-cara baru dalam proses pembelajaran
Membuat cara-cara yang baru yang asyik agar peserta didik tidak bosan untuk belajar dan menjaga kemampuan beraksara bagi peserta didik.
- c. Adanya niat baik dan sungguh-sungguh dari pemerintah
Pemerintah harus mempunyai niat yang baik, sungguh-sungguh dan serius untuk memberantas buta aksara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
- d. Perlunya keterlibatan berbagai pihak dalam upaya percepatan pemberantasan buta aksara
Pemberantasan buta aksara bukan saja tugas pemerintah semata tapi itu tugas kita semua selaku generasi penerus bangsa. Jadi semua pihak harus berpartisipasi untuk memberantas buta aksara, contohnya ibu-ibu PKK harus ikut serta, organisasi masyarakat (Ormas), mahasiswa yang sedang Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan anggota TNI yang mempunyai program TNI Manunggal Aksara.

Salah satu desain proses pembelajaran keaksaraan berbasis tutorial terpadu dalam rangka pemberantasan buta aksara di Kota Pontianak lebih cocok dibanding model lainnya karena model pelaksanaan program ini adalah tutorial terpadu yaitu merupakan pelaksanaan pembelajaran berdasarkan keterpaduan antara pendidikan keaksaraan fungsional dan pendidikan keluarga, artinya pada saat warga belajar mengikuti pembelajaran dilapangan bersama tutor mempelajari suatu materi maka ketika warga belajar pulang kerumah masing-masing ini merupakan tanggung jawab keluarga

untuk melakukan pendampingan belajar dengan mengembangkan dan menguatkan materi yang telah diberikan. Dalam kegiatan pendampingan belajar dikeluarga bisa dilakukan oleh semua anggota keluarga (suami, istri, anak, cucu, menantu, sepupu) dengan catatan mempunyai kemampuan dan kesediaan untuk mendampingi. Secara teknis metode yang digunakan dalam pembelajaran adalah ceramah, diskusi, praktek, tanya jawab, latihan dan brainstorming.

Filosofi keaksaraan fungsional sebagaimana dikemukakan oleh Beynham (1995:1) yang menyatakan bahwa pada dasarnya keaksaraan termasuk ideologi. Dengan berupa ideologi tentu saja keaksaraan tidak bersifat netral, semuanya tergantung pada keputusan sebagai sesuatu yang tidak netral, maka program pendidikan keaksaraan harus memper-timbangkan faktor-faktor lain yang mempengaruhi keaksaraan tersebut.

UNESCO mendefinisikan kemampuan keaksaraan atau melek aksara sebagai kemampuan seseorang untuk membaca dan menulis kalimat sederhana yang diperlukan dalam kehidupan sehari-hari, dan seseorang dikatakan mempunyai kemampuan keaksaraan fungsional jika seseorang tersebut dapat terlibat dalam aktivitas dimana kemampuan keaksaraan merupakan prasyarat sebagai effective function kelompok dan sebagai dasar bagi dirinya untuk meningkatkan kemampuan membaca, menulis dan berhitungnya sendiri.

Pada pelaksanaannya keaksaraan fungsional merupakan penyempurnaan pendekatan bagi program pemberantasan buta aksara yang menitikberatkan pada proses dari, oleh dan untuk warga belajar dengan strategi pembelajarannya melalui diskusi, membaca, menulis, berhitung dan aksi. Keaksaraan fungsional juga merupakan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati, mendengar dan berbicara yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari dan lingkungan sekitar warga belajar. Oleh karena itu, keaksaraan fungsional bertujuan untuk mengembangkan kemampuan dan keterampilan membaca, menulis dan berhitung dengan harapan warga belajar dapat menggunakannya atau berfungsi untuk pemecahan masalah dalam kehidupannya sehari-hari dan kahidupan masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keaksaraan fungsional berpusat pada bagaimana cara masyarakat menggunakan keterampilan keaksarannya dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat tidak hanya membaca informasi tetapi menerapkannya dan mengambil keuntungan untuk meningkatkan kualitas kahidupan, secara material maupun secara fisik.

Bahan-bahan ajar yang didapatkan dari lingkungan secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dapat dipelajari serta dianalisa, selanjutnya menulis rencana dan proposal untuk memperbaiki situasi setempat.

Tujuan kelompok belajar keaksaraan fungsional adalah membantu warga belajar mencari dan menggunakan bahan “calistung” (Baca, Tulis, dan Hitung) sendiri. Karena itu, tutor tidak hanya membantu warga belajar membaca buku, tetapi tutor juga membantu mereka pergi ke TBM (Taman Bacaan Masyarakat).

Strategi Pendidikan dan Pengembangan Program Keaksaraan Fungsional :

1. Pendekatan

Keaksaraan Fungsional merupakan suatu pendekatan atau cara untuk mengembangkan kemampuan warga belajar dalam menguasai dan menggunakan keterampilan menulis, membaca, berhitung, berfikir, mengamati dan berdiskusi yang berorientasi pada kehidupan sehari-hari berdasarkan konteks lokal.

Dalam kaitannya dengan konteks lokal tersebut, bahan-bahan materi ajar yang digunakan didapatkan dari lingkungan mereka sendiri, baik diperoleh secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dapat dipelajari serta dianalisa, selanjutnya menulis rencana dan proposal untuk memperbaiki situasi sesuai dengan kebutuhan warga belajar setempat.

Dalam penyelenggaraan program pembelajaran keaksaraan fungsional ini dapat dilakukan dalam bentuk kelompok belajar. Tujuan kelompok belajar keaksaraan fungsional (Kejar KF) adalah membantu warga belajar mencari dan menggunakan bahan “calistung” (Baca, Tulis, dan Hitung) sendiri. Karena itu, tutor tidak hanya membantu warga belajar membaca buku, tetapi tutor juga membantu mereka pergi ke TBM (Taman Bacaan Masyarakat).

Tutor tidak hanya membantu warga belajar membaca informasi tentang bagaimana memperoleh dana, tutor juga membantu mereka pergi ke koperasi atau bank untuk mencari informasi dan formulir atau membantu warga belajar membuka rekening. Tutor juga meminta nara sumber dari instansi lain untuk membantu warga belajar.

Selain kelompok belajar, warga belajar dapat dibelajarkan dengan membentuk kelompok Usaha Bersama (UB). Pembentukan kelompok ini merupakan suatu kesepakatan antara Tutor, Pengelola PKBM dan Warga Belajar dalam menciptakan suatu usaha dari keterampilan yang telah dipelajari selama Kegiatan Belajar Mengajar (KBM), dikelola bersama-sama untuk membantu dalam meningkatkan kesejahteraan taraf hidup semua pihak yang terlibat di dalam UB tersebut. Jadi, dengan cara-cara seperti inilah ada kebermaknaan dan kebermanfaatan pendidikan Keaksaraan Fungsional (KF) bagi warga belajar KF yang berkembang pada masyarakat yang notabene hidup dalam garis ekonomi rendah (miskin). Keaksaraan pada masyarakat miskin adalah :

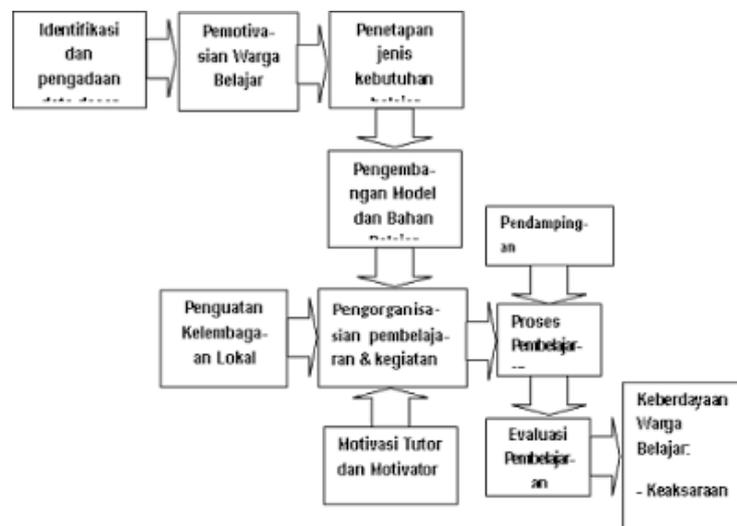
- Ketidapkahaman mereka tentang pentingnya pendidikan untuk meningkatkan taraf hidupnya

- Penyelenggaraan program keaksaraan tidak luput mengalami kesulitan untuk menarik perhatian dan melibatkan mereka, terutama orang dewasa dalam proses pembelajaran

Salah satu pendekatan yang dapat digunakan dalam mengembangkan model program pembelajaran keaksaraan fungsional adalah Action Reserch dan prinsip-prinsip pembelajaran partisipatif. Dalam konteks pendidikan sepanjang hayat (*life long education*), tanggung jawab program keaksaraan fungsional tidak terhenti setelah program dinyatakan berakhir, namun harus sampai pada dampak pembelajaran bagi kehidupan mereka secara terus menerus sepanjang hidupnya.

2. Alur Kegiatan Penyelenggaraan Program Keaksaraan Fungsional

Penyelenggaraan program aksi diarahkan untuk memungkinkan warga masyarakat dapat terlibat sejak awal baik pada sisi proses kegiatan maupun dalam pengambilan keputusan yang diperlukan pada setiap tahapan. Hal ini dilakukan sebagai prosedur kerja bagi penyelenggara dalam pengelolaan program juga sebagai medium pembelajaran bagi masyarakat dalam pengembangan kapasitas.



Gambar 5.1 Bagan Model Penyelenggaraan Program

Keterangan:

1. Berdasarkan gambaran di atas, langkah pertama yang dilakukan Tim Pengembang adalah melakukan identifikasi untuk memperoleh gambaran komprehensif terhadap calon kelompok sasaran;
2. Melakukan motivasi kepada kelompok sasaran mengenai perlunya meningkatkan kecakapan keaksaraan sebagai pintu masuk bagi upaya pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat. Pada saat ini perlu dilakukan pula koordinasi dan penggerakan tokoh-tokoh masyarakat lokal dan pemerintah Kabupaten/Kota untuk berperanserta dalam kegiatan ini;

3. Tim Pengembang bersama-sama dengan calon tutor dan warga belajar untuk menetapkan jenis kegiatan dan tema-tema belajar yang akan dibelajarkan;
4. Tim Pengembang mengembangkan draft model keaksaraan yang terintegrasi dengan *vocational skill (life skills)*
5. Melakukan penguatan kelembagaan lokal, baik pengurus Rukun Warga, Rukun Tetangga, Lembaga Keagamaan, Organisasi Kepemu- daan dan tokoh-tokoh masyarakat.
6. Melakukan pengorganisasian pembelajaran dan pelaksanaan kegiatan yang menghasilkan rencana kegiatan pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat.
7. Tim pengembang melakukan orientasi tenaga lapangan dan fasilitator/tutor. Materi orientasi yang disampaikan berkenaan dengan konsep dan implementasi keaksaraan, metodologi pembelajaran, pengembangan media belajar bersumber sumber daya lokal, evaluasi pembelajaran dan kiat-kiat melakukan motivasi warga belajar;
8. Proses pembelajaran dan pemberdayaan warga belajar dengan melibatkan berbagai sumber belajar. Tim pengembang dari BPKB- bersama-sama dengan Tutor, Pamong Belajar dari Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) dan/atau TLD melakukan pendampingan, pemantauan dan evaluasi (formatif dan diagnostik) agar proses pembelajaran berlangsung secara efektif, serta mengatasi berbagai hambatan yang terjadi.
9. Melakukan evaluasi program atau evaluasi sumatif, yaitu evaluasi untuk mengetahui sejauhmana ketercapaian program keaksaraan yang dilakukan. Aspek yang dievaluasi antara lain berkenaan dengan kemampuan kecakapan keaksaraan, kecakapan vocational, kecakapan sosial-ekonomi, kecakapan diri dan kepercayaan diri.
10. Hasil evaluasi inilah yang dapat memberikan gambaran mengenai tingkat keberdayaan warga belajar, baik kecakapan keaksaraan, kecakapan vocational, kecakapan sosial-ekonomi, kecakapan diri dan kepercayaan diri.

Salah satu hal yang penting diperhatikan dalam perencanaan program keaksaraan adalah konteks sosial lokal. Jalal et.al. (2005:192-194) menekankan pada pentingnya memperhatikan konteks sosial lokal dan dalam perancangan program diperlukan desain lokal, yang selanjutnya dalam rancangan tersebut unsur utamanya terdiri atas (a) kelompok sasaran, (b) tujuan, (c) kegiatan belajar, (d) waktu dan tempat pembelajaran dan (e) hal lain yang terkait yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masing-masing kelompok belajar. Konteks sosial lokal yang perlu diperhatikan adalah bahasa yang dipergunakan dalam komunikasi sosial calon warga belajar. Salah satu bentuk penterjemahan konteks sosial lokal dalam wujud bahasa adalah bahasa ibu (*mother tongue*). Bahasa ibu

dipergunakan untuk mengekspresikan dan menerima informasi dalam kegiatan komunikasi sosial.

Selain itu, salah satu usaha untuk penanggulangan dan pemberantasan keaksaraan di masyarakat, konsultan menawarkan suatu program PRO PKMKP (**PRO**gram **PE**latihan **KE**terampilan **M**asyarakat **KE**terbatasan **P**endidikan) dengan memanfaatkan sumber daya alam Kota Pontianak seperti hasil lidah buaya, umbi-umbian, buah-buahan (nanas dan pepaya), dan pemanfaatan limbah kayu serta limbah kain yang masih bisa digunakan dan dibuat menjadi bahan yang memiliki nilai ekonomi sehingga mampu meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Pontianak. Hal ini pernah dilakukan di Kabupaten Tegal yang merupakan pusat konveksi. Ditegal sendiri program ini dikenal dengan PRO HAPSARI (**PRO**duksi **H**uruf **A**ngka dari **PE**rca menuju **uSA**ha **M**andi**RI**) dengan memanfaatkan perca kaos dan training. Pro Hapsari merupakan produk kreatif yang dipergunakan sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan huruf abjad, huruf hijaiyyah, dan angka di lembaga PAUD dan pendidikan keaksaraan fungsional tingkat dasar. Melalui Pro Hapsari warga belajar setiap hari bersentuhan langsung dengan pola-pola huruf dan angka.

Pro PKMKP merupakan produk kreatif yang digunakan sebagai media pembelajaran untuk mengenalkan huruf/aksara latin dan angka kepada masyarakat Kota Pontianak yang masih bermasalah dengan buta aksara dan memiliki keterbatasan pendidikan sehingga masyarakat tersebut tidak terberdayakan tenaganya dan sulit untuk bersaing dalam dunia kerja yang berdampak kepada kemiskinan. Melalui Pro PKMKP warga belajar akan mendapatkan pembelajaran mengenai aksara dengan cara membaca, menulis dan berhitung dan didukung dengan adanya pelatihan keterampilan sehingga program ini lebih menarik untuk diikuti oleh warga belajar, karena warga akan dibekali keterampilan yang bisa terus dikembangkan oleh kelompok belajar tersebut.

Kota Pontianak yang terkenal dengan hasil lidah buaya yang melimpah telah menemukan inovasi untuk mengolah panganan-panganan yang berbahan dasar lidah buaya seperti, air minum kemasan, dodol lidah buaya, keripik lidah buaya, dan permen yang semuanya berasal dari bahan dasar lidah buaya. Namun masih banyak sumber daya alam yang lain yang belum optimal pemanfaatannya seperti buah pisang, umbi-umbian (ubi kayu, ubi jalar, keladi), buah-buahan seperti nanas dan pepaya yang juga banyak tersebar di Kota Pontianak namun belum mampu diolah menjadi olahan yang memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi. Pro PKMKP hadir untuk memberikan pelatihan kepada kelompok belajar masyarakat yang khususnya memiliki keterbatasan pendidikan sehingga menjadi masyarakat yang berdaya dengan cara memberikan pelatihan keterampilan untuk mengolah pisang, umbi-umbian, pepaya menjadi keripik-keripik kering, kemudian pemanfaatan nanas menjadi selai yang semuanya dikemas kedalam kemasan yang menarik dan lebih tahan lama, sehingga hasil tersebut menjadi komoditi yang bisa dijual sebagai hasil atau makanan khas dari Kota Pontianak.

Penggunaan limbah-limbah kayu bisa didapat dari banyak mebel yang tersebar di Kota Pontianak, kemudian limbah kayu tersebut bisa dimanfaatkan menjadi berbagai macam kerajinan tangan seperti ukiran tameng khas suku Dayak Kalimantan Barat baik dalam ukuran besar maupun ukuran kecil (gantungan kunci), membuat miniatur keraton Kadriyah Pontianak, miniatur rumah Radakng, dan lain sebagainya selain Tugu Khatulistiwa yang sudah banyak dijumpai sebagai cinderamata atau oleh-oleh khas Kota Pontianak. Kain bekas juga bisa digunakan sebagai bahan dasar untuk membuat keset kaki, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Inovasi-inovasi dan daya kreativitas seperti itulah yang ingin dikembangkan dalam program PKMKP sebagai wujud program pemberdayaan masyarakat. Untuk menjalankan program tersebut, tentunya ada beberapa strategi yang harus dilakukan, diantaranya adalah sebagai berikut :

1) Sintak

Langkah-langkah pembuatan Pro PKMKP sebagai produk masyarakat berdaya yaitu :



Gambar 5.2 Pro PKMKP sebagai Produk Masyarakat Berdaya

2) Sistem sosial

Kelompok usaha kreatif yang telah dijalankan warga belajar mampu memberikan dampak positif baik pada kehidupan individu maupun lingkungan. Warga belajar yang hidup di lingkungan pertanian mempunyai visi yang sama untuk memanfaatkan hasil alam dan hasil pertanian, sehingga usaha kreatif ini mampu berkembang untuk memenuhi kebutuhan lebih baik.

3) Peran dan Tugas Tutor

Tutor sangat berperan dalam peningkatan kualitas dan pemasaran "Pro PKMKP". Tutor mendampingi warga belajar dalam pelatihan keterampilan. Tutor juga harus mampu melihat pangsa pasar sehingga hasil produksi yang dibuat dalam kelompok belajar dapat didistribusikan dan mampu bersaing sehingga memiliki nilai ekonomi. Selain menjadi tenaga pengajar, tutor

bertanggung jawab menjadi distributor sehingga hasil produksi tersebut dapat dijadikan lahan pemenuhan kebutuhan ekonomi masyarakat setempat.

4) **Sistem pendukung**

Kota Pontianak merupakan sentra pertanian lidah buaya, pisang, umbi-umbian, nanas dan pepaya yang cukup besar, sehingga bahan baku untuk mendukung Pro PKMKP tersedia cukup melimpah. Semangat warga belajar untuk merubah kehidupan sangat tinggi, baik semangat untuk bebas dari buta aksara maupun semangat dalam meningkatkan taraf hidup.

5) **Dampak instruksional dan pengiring**

Dampak instruksional usaha mandiri yang kreatif pada pendidikan keaksaraan usaha mandiri yaitu warga belajar mampu meningkatkan penghasilannya, warga belajar mampu memanfaatkan pengetahuan calistung untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi, warga belajar mampu berpikir maju dalam menghadapi persaingan usaha. Dampak pengiring dari usaha kreatif ini adalah kerjasama yang baik dalam kelompok usaha, tingkat kreatifitas meningkat, terjalinnya kemitraan usaha.

5.2. **PENANGGULANGAN PUTUS SEKOLAH**

Dalam mengatasi terjadinya anak putus sekolah harus adanya berbagai usaha pencegahannya sejak dini, baik yang dilakukan oleh orang tua, sekolah (pemerintah) maupun oleh masyarakat. Sehingga anak putus sekolah dapat dibatasi sekecil mungkin. Seperti yang telah dipaparkan pada bab 4, bahwa penyebab anak putus sekolah di Kota Pontianak, adalah dari segi faktor psikologis yang berkaitan dengan minat, tingkat motivasi dan kesadaran, lingkungan sekolah, faktor sosial serta faktor ekonomi. Jika kita melihat dari segi faktor psikologis tentunya ini banyak berpengaruh terhadap perilaku keluarga anak itu sendiri. Anak – anak tidak hanya harus mendapatkan pendidikan yang bersifat formal saja, akan tetapi informal juga harus diperhatikan. Tanpa kita sadari, anak lebih banyak menghabiskan waktunya di luar sekolah. Ada beberapa cara untuk menanggulangi putus sekolah dari segi psikologis, diantaranya :

1. Membangkitkan kesadaran orang tua akan pentingnya pendidikan anak
2. Memberikan dorongan dan bantuan kepada anak dalam belajar
3. Mengadakan pengawasan terhadap anak di rumah serta memberikan motivasi kepada anak sehingga anak rajin dalam belajar dan tidak membuat si anak bosan dalam mengerjakan pekerjaan rumah yang diberikan di sekolah.
4. Tidak membiarkan anak bekerja mencari uang dalam masa belajar.
5. Tidak memanjakan anak dengan memberikan uang jajan yang terlalu banyak.

Jika kita kaitkan dengan peranan pemerintah untuk menangani putus sekolah, ada beberapa cara yang dapat dilakukan salah satunya adalah dengan memusatkan perhatian kepada pendidikan luar sekolah dan bidang garapan pendidikan luar sekolah. Abad terkhir ini, kemajuan bidang pendidikan mencapai puncaknya dengan timbulnya konsepsi pendidikan baru yang berbeda dengan konsep pendidikan yang sudah ada dan telah lama berlangsung. Dalam konsepsi tersebut diketengahkan tentang pendidikan luar sekolah yang merupakan sistem baru dalam dunia pendidikan. Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal dan informal. Pendidikan formal kebalikan dari pendidikan nonformal yaitu pendidikan yang dilaksanakan terstruktur dan berjenjang. Pendidikan informal adalah pendidikan yang diperoleh seseorang dari pengalaman sehari-hari dengan sadar atau tidak sadar, sejak seseorang lahir sampai mati, didalam keluarga, dalam pekerjaan atau pengalaman sehari – hari.

"Menurut Hamojoyo dalam Mustofa Kamil, Pendidikan nonformal adalah usaha yang terorganisir secara sistematis dan kontinyu di luar sistem persekolahan melalui hubungan sosial untuk membimbing individu, kelompok, dan masyarakat agar memiliki sikap dan cita-cita sosial (yang efektif) guna meningkatkan taraf hidup di bidang materiil, sosial, dan mental dalam rangka usaha mewujudkan kesejahteraan sosial".

Pendidikan luar sekolah dilakukan guna memenuhi kebutuhan masyarakat (diluar sistem pendidikan formal). *Output* yang dihasilkan dari proses pendidikan luar sekolah dapat diaplikasikan. Diaplikasikan untuk menunjang proses kehidupan sosial di masyarakat. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Satuan pendidikan nonformal terdiri atas lembaga kursus, lembaga pelatihan kelompok belajar, pusat kegiatan belajar masyarakat, dan majelis taklim serta satuan pendidikan yang sejenis. Kursus dan pelatihan diselenggarakan bekal ketrampilan dan kecakapan hidup, dan untuk mengembangkan diri. Pembangunan pendidikan, membangun sumber daya manusia dari yang belum terdidik menjadi berpendidikan, yang sudah berpendidikan ditingkatkan kualitas pendidikannya, atau dari yang mempunyai pendidikan umum diarahkan pada pendidikan keahlian atau ketrampilan tertentu untuk mendorong terciptanya kemandirian dalam berusaha. Pada kenyataan yang ada di lapangan, lembaga pendidikan nonformal muncul dan berkembang oleh unsur kebutuhan akan pentingnya

pendidikan dan pengetahuan yang kian pesat dan kompleks. Pendidikan nonformal muncul oleh karena pada jalur pendidikan formal beberapa komponen atau jenis program yang dibutuhkan di lapangan masih belum terpenuhi sehingga sebagai unsur komplementer, pendidikan nonformal mutlak diperlukan.

“Program Pendidikan Nonformal (PNF) diarahkan untuk memberikan pelayanan pendidikan (dalam rangka pemeratan dan percepatan wajib belajar pendidikan dasar) kepada masyarakat yang belum sekolah, putus sekolah dan buta aksara, agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, ketrampilan dan sikap kepribadian mandiri”.

Program Pendidikan Nonformal (PNF) diarahkan untuk memberikan pelayanan pendidikan (dalam rangka pemeratan dan percepatan wajib belajar pendidikan dasar) kepada masyarakat yang belum sekolah, putus sekolah, dan buta aksara, agar memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi diri dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap kepribadian mandiri. Sebagian dari program pendidikan luar sekolah dapat digunakan sebagai alternatif solusi untuk mengurangi angka anak putus sekolah.

Untuk menangani masalah putus sekolah, pemerintah dapat melakukan beberapa cara, diantaranya :

1. Memfasilitasi anak putus sekolah dengan Mendirikan sekolah alam

Bermain adalah hal yang paling disukai oleh anak dan menjadi fitrahnya. Beragam permainan menjadi pesona dan daya tarik anak, baik itu permainan yang dilakukan di dalam ruangan maupun diluar ruangan. Namun, pernahkah terbesit dalam benak dan pikiran selaku orangtua untuk mengajak putra-putri bermain sambil belajar Seperti bermain outbound, bercocok tanam, beternak, belajar mencuci baju, bermain sepakbola, menggambar bahkan berwiraswasta. Ada sekelompok anak yang sedang asyik bermain sepakbola, belajar mencuci baju, outbound. Walaupun tampak kotor, anak-anak terlihat senang. Mereka bukan hanya bermain saja, melainkan juga sedang bersekolah, sekolah alam tepatnya. Cara belajarnya pun berbeda dengan sekolah umum lainnya sesuai dengan namanya, anak-anak coba didekatkan dengan alam. Suasana dan sarana sekolah alam memang dirancang untuk menempa kecerdasan natural anak. Namun bukan mustahil sekolah biasa menjadikan anak didik juga mencintai lingkungan.

Sekolah alam adalah salah satu bentuk pendidikan alternatif yang menggunakan alam sebagai media utama sebagai pembelajaran siswa didiknya . Tidak seperti sekolah biasa yang lebih banyak menggunakan metode belajar mengajar di dalam kelas, para siswa belajar lebih banyak di alam terbuka. Di sekolah alam metode belajar mengajar lebih banyak menggunakan aktif atau

action learning. anak belajar melalui pengalaman, anak mengalami, dan melakukan langsung . Dengan mengalami langsung anak atau siswa diharapkan belajar dengan lebih bersemangat, tidak bosan, dan lebih aktif. Penggunaan alam sebagai media belajar diharapkan agar kelak anak atau siswa jadi lebih tahu dengan lingkungannya dan tahu aplikasi dari pengetahuan yang dipelajari. Tidak hanya sebatas teori saja.

“Sistem pendidikan sekolah alam berbeda dari sekolah formal umumnya. Kurikulum yang diterapkan di sekolah alam disusun oleh staff pengajar agar sesuai dengan kemampuan siswanya. Sistem pendidikan di sekolah alam memadukan teori dan penerapan atau praktek. Dengan demikian pemahaman siswa terhadap materi pembelajaran bersifat integratif, komprehensif dan aplikatif. Sekaligus juga lebih 'membumi'”.

Kemampuan dasar yang ingin dibangun adalah kemampuan anak untuk membangun jiwa keingintahuan, kemampuan melakukan observasi dan membuat hipotesis, serta kemampuan menerapkan metode berpikir ilmiah. Sehingga pengetahuan yang didapat bukan sekedar hafalan, tetapi hasil pengalaman dan penemuan mereka sendiri. Di sini anak juga diarahkan untuk memahami potensi dasar dirinya. Dalam hal ini alam sebagai ruang belajar yang mampu memotivasi anak untuk terus berinteraksi dengan ilmu yang mereka pelajari, karena selain mereka belajar dari buku yang disediakan mereka juga akan langsung belajar dari alam disekitarnya serta belajar di alam terbuka, secara naluriah akan menimbulkan suasana *fun*, tanpa tekanan dan jauh dari kebosanan. Dengan demikian akan tumbuh kesadaran pada anak bahwa *learning is fun* dan belajar identik dengan kegembiraan.

Kegiatan sekolah alam ini dapat diaplikasikan didaerah dekat perkotaan yang nota bene juga terdapat anak putus sekolah. Dengan terapan belajar yang menyesuaikan kebutuhan dan kapasitas anak diharapkan mampu mengurangi anak putus sekolah di daerah perkotaan.

2. Mendirikan pusat kegiatan belajar mengajar atau PKBM

Keterlibatan masyarakat sebagai bagian dari sebuah sistem pada proses pendidikan yang berperan juga sebagai penyelenggara pendidikan di masyarakat sendiripun saat ini masih kecil (walaupun tidak seluruh wilayah di Indonesia rendah) dan belum merata dalam hal keterlibatan secara langsung menangani secara serius permasalahan tingginya angka putus sekolah dan meningkatkan pola pikir dan paradigma masyarakat untuk menyadarkan dan memahami bersama betapa pentingnya pendidikan sebagai bekal masa depan bangsa bagi generasi penerus bangsa Indonesia. Adapun keterlibatan secara langsung unsur masyarakat dalam menyelenggarakan proses pendidikan yang berbasis masyarakat dapat dilakukan dengan mendirikan dan

menyelenggarakan satuan pendidikan nonformal yang dikelola dan dikembangkan sendiri oleh masyarakat dan bekerjasama dengan pemerintah melalui satuan kerja pendidikan nonformal dan informal.

Implementasi pendidikan nonformal di Indonesia sangat beragam. Mulai dari usia tingkat prasekolah, pada umur produktif masa sekolah, sampai pada konsep pendidikan sepanjang hayat *lifelong education*. Pendidikan merupakan kunci penting titik tolak dan tolak ukur peradaban suatu negara. Oleh karenanya, langsung maupun tidak langsung, pendidikan bukan satu hal yang harus dinomorduakan, akan tetapi faktor penting yang tidak dapat dianggap remeh sebagaimana perhatian pemerintah Indonesia terhadap pertumbuhan dan perkembangan pendidikan dewasa ini. Keberadaan pendidikan nonformal memiliki peran penting dalam menumbuhkan dan mengembangkan pengetahuan dan pendidikan di Indonesia, khususnya pada hal yang bersifat praktis dan mudah untuk diaplikasikan.

Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keberadaan Pendidikan Nonformal di Indonesia. Perkembangan dan pertumbuhan PKBM di lapisan masyarakat dewasa ini telah mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari maraknya ijin yang diajukan kepada Dinas Pendidikan melalui Bagian Pelaksana Pendidikan Luar Sekolah untuk mendirikan dan mengembangkan satuan pendidikan nonformal sejenis PKBM dengan karakteristik yang berbeda-beda pada tiap PKBM yang akan didirikan tersebut. Namun, kesamaan yang pada umumnya muncul adalah kekhawatiran pada pendiri dan penyelenggara PKBM terhadap tingginya angka putus sekolah yang salah satu imbas dari pelaksanaan Ujian Nasional. Hal lain yang menjadi pemicu berdiri dan berkembangnya PKBM yaitu rendahnya minat masyarakat awam untuk melanjutkan pendidikan formal ke jenjang yang lebih tinggi, sehingga dengan keberadaan PKBM dapat menjembatani masyarakat awam yang hendak melanjutkan pendidikan (kesetaraan) ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Program yang ada dalam Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) yaitu: Kegiatan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini), Kelompok Belajar Paket A setara SD, Kelompok Belajar Paket B setara SMP, dan Kelompok Belajar Paket C setara SMA, Kegiatan kursus.

“Rifyanto Bakrie memaparkan tujuan dibentuknya PKBM. Adapun hal-hal yang termasuk tujuan dibentuknya suatu PKBM, antara lain; memperluas kesempatan warga masyarakat, khususnya yang tidak mampu untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan dan sikap mental yang diperlukan untuk mengembangkan diri dan bekerja mencari nafkah”.

Tujuan pendirian PKBM pada dasarnya mengakomodir kekurangan fasilitas belajar yang ada di masyarakat khususnya bagi anak putus sekolah wajib belajar 9 tahun.

5.3 PENANGGULANGAN GIZI BURUK

Kemitraan yang luas antara pemerintah Indonesia, UNICEF, dan Uni Eropa dalam mengatasi masalah gizi di kalangan anak-anak bangsa menunjukkan tanda-tanda kemajuan yang penting. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sambutannya pada seminar dan pameran pangan nasional Jakarta Food Security Summit: Feed Indonesia Feed The World 2012 yang digelar di Jakarta Convention Center, mengatakan pemerintah terus bekerja untuk mengatasi kekurangan gizi dan kesulitan untuk mendapatkan pangan dengan program-program pro rakyat. Program-program pro rakyat yang dimaksud seperti program beras miskin (raskin) dengan harga murah, menggratiskan pelayanan kesehatan dan pemberian bea siswa untuk siswa miskin.

“Kita tahu bahwa perbaikan gizi dapat menjadi kenyataan jika semua orang-orang di dalam masyarakat menyadari bagaimana berperilaku gizi yang baik dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Inilah hal utama yang paling penting, namun seringkali diabaikan, oleh keluarga-keluarga yang paling rentan terkena masalah gizi buruk”, perwakilan UNICEF untuk Indonesia, Angela Kearney, menyebutkan. “Menangani masalah terhambatnya pertumbuhan tinggi badan, pada khususnya, memiliki konsekuensi penting bagi prospek ekonomi dan pembangunan jangka panjang di Indonesia, karena dengan penanganan yang baik, anak-anak akan menunjukkan perilaku yang lebih baik di sekolah, tumbuh lebih sehat, dan dengan demikian, dapat berperan sebagai orang yang lebih berguna di dalam lingkungan masyarakat mereka ketika mereka dewasa nantinya.

Dr. Minarto, Direktur Gizi untuk Kementerian Kesehatan Indonesia, juga menggarisbawahi pentingnya pergeseran kebijakan yang coba diusung oleh kemitraan ini. “Indonesia adalah pemain terkemuka dalam mengakselerasi perbaikan gizi (SUN) global, dan melalui kolaborasi ini kita telah mendirikan jaringan kunci di antara departemen-departemen pemerintah, badan-badan PBB, lembaga bantuan internasional, organisasi-organisasi non-pemerintah, dan juga sektor swasta, yang akan membantu lebih baik lagi dalam mengawasi penargetan sumber-sumber daya, tanggapan program yang lebih baik, dan yang terpenting, reformasi kebijakan untuk meningkatkan gizi bagi anak-anak kita,” kata Dr. Minarto.

Penanggulangan masalah gizi perlu dilakukan secara terpadu antar departemen dan kelompok profesi, melalui upaya-upaya peningkatan pengadaan pangan, penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan, peningkatan status sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta peningkatan teknologi hasil pertanian dan teknologi pangan. Upaya ini dilakukan untuk memperoleh perbaikan pola konsumsi pangan masyarakat yang beranekaragaman dan seimbang dalam mutu gizi.

Upaya-upaya penanggulangan masalah gizi yang harus dilakukan secara terpadu oleh masyarakat dan pihak pemerintah setempat antara lain :

1. Upaya pemenuhan dan persediaan pangan nasional terutama peningkatan produksi beraneka ragam pangan.
2. Peningkatan usaha perbaikan gizi keluarga (UPGK) yang diarahkan pada pemberdayaan keluarga untuk meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga.
3. Peningkatan upaya pelayanan-pelayanan gizi terpadu dan system rujukan dimulai dari tingkat pos pelayanan terpadu (posyandu), hingga puskesmas dan rumah sakit.
4. Peningkatan upaya keamanan pangan dan gizi melalui system kewaspadaan pangan dan gizi masyarakat (SKPG).
5. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang pangan dan gizi masyarakat.
6. Peningkatan teknologi pangan untuk mengembangkan berbagai produk pangan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat luas.
7. Peningkatan kesling.
8. Upaya penelitian dan pengembangan pangan dan gizi.

Jika kita lihat dari upaya pemerintah dalam mengatasi masalah Gizi dapat di kelompokkan menjadi 2, yaitu :

1. Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif, meliputi :
 - Penemuan aktif dan rujukan kasus gizi buruk.
 - Perawatan balita gizi buruk.
 - Pendampingan balita gizi buruk pasca perawatan
2. Upaya kesehatan Promotif dan Preventif, meliputi :
 - Pendidikan (penyuluhan) gizi melalui promosi kadarzi
 - Revitalisasi posyandu.
 - Pemberian suplementasi gizi.
 - Pemberian MP – ASI bagi balita gakin

5.3.1 Kebijakan dan Strategi Menangani Masalah Gizi

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah yang berkaitan dengan gizi buruk maka tidak lepas dari kebijakan dan strategi dari pihak terkait terutama pemerintah sebagai pemegang wewenang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1. Kebijakan

- a. mengingat besarnya dan sebaran gizi buruk yang ada di semua wilayah Indonesia dan dampaknya terhadap kualitas sumber daya manusia, pencegahan dan penganggulangan gizi buruk merupakan program nasional sehingga perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi dilaksanakan secara berkesinambungan antara pusat daerah.
- b. Penanggulangan masalah gizi buruk dilaksanakan pendekatan komperatif dengan mengutamakan upaya pencegahan dan upaya peningkatan yang di dukung upaya pengobatan dan upaya pemulihan.
- c. Penanggulan masalah gizi buruk dilaksanakan oleh semua kabupaten atau kota secara terus menerus dengan koordinasi lintas instansi / sektor atau dinas organisasi masyarakat.
- d. Penangulangan masalah gizi buruk diselenggarakan secara demokratis transparan melalui kemitraan di tingkat kabupaten atau kota antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
- e. Penanggulangan masalah gizi buruk dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan meningkatkan akses untuk memperoleh informasi dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat yang telah berdaya diharapkan berperan sebagai pelaku / pelaksanaan, melakukan advokasi, dan melakukan pemantauan untuk peningkatan pelayanan publik.

2. Strategi

- a. Pencegahan dan penanggulangan gizi buruk dilaksanakan di seluruh kabupaten / kota di Indonesia sesuai dengan kewenangan wajib dan standar pelayanan minimal (SPM) dengan memperhatikan besaran dan luasnya masalah.
- b. Mengembalikan fungsi posyandu dan meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dan keluarga dalam memantau tumbuh kembang balita, mengenali dan menanggulangi secara dini balita yang mengalami gangguan pertumbuhan melalui revitalitas posyandu.
- c. Meningkatkan kemampuan petugas dalam manajemen dan melakukan tata laksana gizi buruk untuk mendukung fungsi melakukan tata laksana gizi burk untuk mendukung fungsi posyandu yang di kelola oleh masyarakat melalui revitalisasi Puskesmas.
- d. Menanggulangi secara langsung masalah gizi yang terjadi pada kelompok rawan melalui pemberian intervensi gizi (suplementasi), seperti kapsul Vitamin A, MP ASI, dan makanan tambahan.
- e. Mewujudkan keluarga sadar gizi melalui promosi gizi, advokasi dan sosialisasi tentang makanan sehat dan bergizi seimbang serta pola hidup bersih dan sehat.

- f. Mengalang kerjasama lintas sektor dan kemiraan dengan swasta atau dunia usaha dan masyarakat untuk mobilisasi sumber daya dalam rangka meningkatkan daya beli keluarga untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi seimbang.
- g. Mengaktifkan kembali Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) melalui revitalisasi SKPG dan Sistem Kewaspadaan Dini Gizi Buruk, yang dievaluasi dengan kajian data SKDN < yaitu semua balita mendapat kartu menuju sehat ditimbang setiap bulan, dan berat badan naik dan penyakit dan data pendukung lainnya.

Sementara itu, strategi yang direkomendasikan adalah :

1. Menyatukan tujuan, kebijakan, dan strategi berkaitan dengan gizi dalam pengembangan kebijakan dan program pembangunan nasional
2. Meningkatkan ketahanan pangan tingkat rumah tangga
3. Melindungi konsumen melalui peningkatan kualitas dan keamanan pangan
4. Mencegah dan meningkatkan tata laksana penyakit infeksi
5. Mempromosikan ASI dan makanan pendamping ASI
6. Meningkatkan pola asuh untuk kelompok rawan
7. Mencegah masalah kurang zat gizi mikro
8. Mempromosikan gizi seimbang dan hidup sehat
9. Memantau, menilai, dan menganalisis situasi gizi secara terus-menerus.

Beberapa hal yang perlu mendapat perhatian instansi dalam penyusunan rencana strategi adalah sebagai berikut:

1. Masalah gizi adalah masalah kesehatan masyarakat yang penanganannya tidak dapat dilakukan dengan pendekatan dan pelayanan kesehatan saja.
2. Masalah gizi merupakan sindroma kemiskinan yang erat kaitannya dengan masalah ketahanan pangan tingkat rumah tangga. Oleh karena itu, peningkatan status gizi masyarakat memerlukan kebijakan yang menjangkau juga cukup, baik jumlah maupun mutunya.
3. Masalah gizi dapat disebabkan oleh kesadaran gizi masyarakat belum memadai. Jika hal ini disertai dengan keadaan hygiene perorangan maupun sanitasi lingkungan yang kurang mendukung, akan menyebabkan timbulnya berbagai penyakit infeksi yang akhirnya akan menurunkan keadaan kesehatan dan gizi.
4. Meskipun masalah gizi merupakan sindroma kemiskinan, tetapi dalam kasus-kasus tertentu pemecahan kemungkinan tanpa harus menunggu sampai dicapai tingkat pertumbuhan ekonomi

memadai, misalnya penanggulangan masalah kurang Vitamin A, penanganan anemia dan lain-lain.

5. Dengan demikian Direktorat Gizi Masyarakat menyusun rencana program yang berlandaskan kebijaksanaan dan perencanaan holistik atau menyeluruh dengan memperhatikan the Strength, the weakness, the Theat (analisa SWOT).

5.3.2 Program Pemerintah

Program gizi dilaksanakan saat ini di Jabar dalam Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Gizi Buruk tahun 2005-2009 sebagai berikut.

1. Revitalisasi posyandu

Pokok kegiatan revintalisasi posyandu meliputi :

1. Pelatihan atau orientasi petugas puskesmas, petugas sektor dan kader yang berasal dari masyarakat
2. Pelatihan ulang petugas dan kader
3. Pembinaan dan pendamping kader
4. Penyediaan sarana terutama decin, KMS atau buku KIA, panduan posyandu, media KIA, sarana pencatatan
5. Penyediaan biaya oprasional
6. penyedian modal usaha kader melalui Usaha Kecil Menengah (UKM) dan mendorong partisipasi swata.

2. Revitalisasi Puskesmas

Pokok kegiatan revintalisasi puskesmas meliputi :

1. pekatihan manajemen program gizi di puskesmas bagi pimpinan dan petugas puskesmas dan jaringan.
2. Penyediaan biaya operational puskesmas untuk pembinaan posyandu, pelacakan kasus kerja sama lintas sektor tingkat kecamatan, dll.
3. Pemenuhan saran atau pometri KIE bagi puskesmas dan jaringan.
4. Pelatihan tatalaksana gizi buruk bagi petugas rumah sakit, puskesmas dan perawat.

Program-program yang mendukung aksi pangan dan gizi disusun dengan mengacu pada progm pembangunan nasinal (Propenas 2010-2015) bidang pertanian, kesehatan dan industri. Program-program dalam aksi pangan dan gizi ini dirancang sedemikian rupa sehingga merupakan

ramuan yang sinergis antara ketiga bidang tersebut di atas, dengan tetap memberikan ruang gerak yang luas dalam implementasinya.

5.3.3 Intervensi Gizi dan Kesehatan

Intervensi gizi dan kesehatan bertujuan memberikan pelayanan langsung kepada balita. Ada dua bentuk pelayanan langsung kepada balita. Ada dua bentuk pelayanan gizi dan kesehatan yaitu pelayanan perorangan dalam merangka menyembuhkan dan memulihkan anak dari kondisi gizi buruk dan pelayanan masyarakat, yaitu dalam rangka mencegah timbulnya gizi buruk di masyarakat. Pokok kegiatan intervensi gizi dan kesehatan adalah sebagai berikut :

1. Perawatan atau pengobatan gratis dirumah sakit dan puskesmas balita gizi buruk dari keluarga miskin.
2. Pemberian makanan tambahan (PMT) berupa MP ASI bagi anak 6-23 bulan dan PMT pemulihan pada 24-59 bulan kepada balita gizi kurang dari keluarga miskin
3. Pemberian suplementasi gizi (kapsul Vitamin A, tablet atau sirup Fe).

5.3.4 Promosi Keluarga Sadar Gizi

Promosi keluarga sadar gizi bertujuan dipraktikkannya normal keluarga sadar gizi bagi seluruh keluarga di indonesia untuk mencegah terjadinya promosi keluarga sadar gizi dilakukan dengan memperhatikan aspek-aspek sosial budaya (lokal spesifik). Pokok kegiatan promosi keluarga sadar gizi meliputi :

1. Menyusun strategi promosi keluarga sadar gizi
2. Mengembangkan, menyediakan, dan menyebar luaskan materi promosi pada masyarakat, organisasi kemasyarakatan institusi, pendidikan, tempat kerja, dan tempat-tempat umum.
3. Melakukan kampanye secara tehnik menggunakan media efektif terpilih.
4. Menyelenggarakan diskusi kelompok terarah melalui dasa wisma dengan dukungan petugas.

5.4 PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH KOTA PONTIANAK BERDASARKAN RPJMD TAHUN 2015 - 2019

Dalam mewujudkan capaian keberhasilan pembangunan, Pemerintah Kota Pontianak menetapkan rangkaian program sesuai dengan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang dilaksanakan oleh SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Pontianak. Penetapan program pembangunan dan penanganan urusan pembangunan yang disesuaikan dengan misi pembangunan daerah adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Religius, Cerdas, Sehat, Berbudaya dan Harmonis.
2. Menerapkan prinsip-prinsip Good Governance dalam Penyelenggaraan Pemerintahan dan Implementasi Zona Integritas melalui Penetapan Wilayah Bebas Korupsi di Sektor Pelayanan Publik.
3. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Dasar Perkotaan untuk Mendukung Pertumbuhan dan Perkembangan Kota dan Wilayah.
4. Mewujudkan Tata Ruang Kota Berwawasan Lingkungan yang Nyaman Aman dan Layak Huni.
5. Menciptakan Iklim Usaha yang Kondusif Guna Memacu Pertumbuhan Ekonomi Kota yang Berdaya Saing

Program - program prioritas sebagaimana diuraikan di atas merupakan program-program yang terkait langsung dengan upaya mencapai visi dan misi pembangunan lima tahun periode 2015 - 2019 berdasarkan urusan serta Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang melaksanakannya. Disamping itu, pada masing-masing SKPD terdapat pula beberapa program yang perencanaannya dibuat berdasarkan kebutuhan nyata SKPD yang bertujuan untuk mendukung pelayanan internal organisasi, administrasi umum dan/atau pelayanan aparatur. Program-program rutin/wajib yang juga didasarkan atas kebutuhan riil masing-masing SKPD adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
- b. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan Perlengkapan Kantor
- c. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
- d. Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur
- e. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
 - Penyusunan Rencana Kerja (Renstra, Renja, RKA, DPA, DPPA, RKT)
 - Penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LPPD, LAKIP, SAKIP, SPIP, PKK)
- f. Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Pelaporan Keuangan
 - Penyusunan Laporan Keuangan
- g. Program Peningkatan Pelayanan Prima
 - Penyusunan Laporan IKM
- h. Program Pengembangan Data/Informasi
 - Penyusunan Data dan Profil SKPD
- i. Program Pengembangan Sistem Informasi
 - Pembuatan Sistem Informasi
 - Pengelolaan Website

5.5 PENANGANAN TERPADU KEAKSARAAN, PUTUS SEKOLAH DAN GIZI BURUK

Keaksaraan, Putus Sekolah dan Gizi Buruk merupakan masalah yang tidak pernah hilang dalam kehidupan masyarakat. Dijaman eraglobalisasi seperti ini, ketiga masalah tersebut adalah momok bagi pemerintah daerah. Jika kita lihat secara garis besar, memang ketiga masalah itu tidak ada hubungannya, akan tetapi jika kita telaah lebih mendalam maka kita akan menemukan keterkaitan akan masalah Keaksaraan, Putus Sekolah dan Gizi Buruk. Banyak hal yang bisa dilakukan untuk menangani ketiga masalah tersebut secara terpadu. Dikarenakan secara garis besar, penyebab utama dari ketiga masalah tersebut adalah sosial, budaya dan ekonomi.

Sebelum kita membahas masalah penangan terpadu Keaksaraan, Putus Sekolah dan Gizi Buruk lebih lanjut, tentunya akan lebih baik jika kita membahas keterkaitan ketiga hal tersebut. Keterkaitan ketiga hal tersebut adalah merupakan masalah yang ada dalam masyarakat. Masyarakat adalah sekelompok individu yang menempati wilayah tertentu. Jika kita berbicara tentang wilayah, tentunya tidak terlepas dari lingkungan yang pada akhirnya akan berpengaruh pada pola hidup orang yang tinggal di wilayah tersebut. Seperti yang telah di paparkan di paragraph sebelumnya, masalah ini muncul karena faktor ekonomi, sosial dan budaya yang ada di suatu wilayah yang menjadi object timbulnya ketiga masalah tersebut. Jika kita gambarkan dalam bentuk diagram venn berdasarkan paparan mengenai faktor penyebab terjadinya buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk pada bab 4, keterkaitan ketiga masalah tersebut adalah dari faktor ekonomi. Hal ini dapat dilihat pada gambar berikut :



Gambar 5.3 Diagram Venn Keterkaitan Faktor Penyebab Masalah Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk

Keterkaitan akan faktor penyebab terjadinya masalah tersebut akan berpengaruh terhadap kebijakan – kebijakan yang akan diambil oleh pemerintah dalam upaya mencegah dan memberantas masalah buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk. Melihat dari paparan sebelumnya, memang masing–masing masalah tersebut memiliki cara yang berbeda – beda dalam menanganinya. Akan tetapi hal tersebut tentunya akan menimbulkan suatu ketidak efektifan mengingat masalah buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk pada dasarnya adalah suatu hal yang berkaitan. Untuk itu kami dari pihak konsultan menyarankan adanya penanganan lintas sektor masalah buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk dengan cara membentuk suatu tim yang terdiri dari beberapa SKPD terkait. Adapun upaya yang dapat diambil dalam penanganan terpadu buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk antara lain :

1. Program Keaksaraan Fungsional yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk menekan tingginya angka buta aksara didukung dengan program pemberdayaan masyarakat dari Dinas Sosial yang berupa pemberian keterampilan atau kerajinan tangan, sehingga warga belajar buta aksara tidak hanya mendapatkan pembelajaran membaca, menulis dan berhitung saja, melainkan juga mendapatkan pembelajaran keterampilan yang bisa mereka kembangkan sehingga warga belajar dapat memanfaatkan keterampilan yang mereka dapat sehingga mereka menjadi warga yang berdaya dan mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
2. Dinas Kesehatan yang didukung oleh Puskesmas, Posyandu, dan sebagainya yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pontianak, mendata dan menangani secara cepat kasus-kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Pontianak, yang mana data masalah gizi buruk yang tersebar tersebut bisa diakses oleh Bappeda, sehingga Bappeda bisa merencanakan kebijakan pembangunan kesehatan dalam membantu menangani dan menekan angka kasus-kasus gizi buruk yang ada di Kota Pontianak.
3. Studi pemetaan dan penanganan terpadu buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk yang diadakan Bappeda bisa membantu melihat titik-titik lokasi kantong terjadinya buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk Kota Pontianak. Hasil pemetaan tersebut bisa digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk mengetahui lokasi kantong buta aksara, sehingga Dinas Pendidikan lebih gamblang melihat dan merencanakan di lokasi mana saja yang perlu diadakannya kegiatan pemberantasan buta aksara. Sedangkan untuk Dinas Kesehatan begitu pula, yang mana daerah-daerah rawan gizi buruk bisa dilihat dan diketahui dengan cepat.
4. Empat kartu kesejahteraan masyarakat program pemerintah yang meliputi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu HP (*sim card*) sebagai uang elektronik untuk mengakses simpanan keluarga sejahtera. Program tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana pemberantasan buta aksara, yaitu dengan memberikan

persyaratan bahwa masyarakat yang bisa memiliki kartu-kartu tersebut harus memiliki keterangan bebas buta aksara dari RT atau Kelurahan setempat. Apabila di suatu daerah masih ada warga yang buta aksara, dan apabila warga ingin bisa menikmati fasilitas program pemerintah tersebut, warga itu harus mengikuti terlebih dahulu program keaksaraan fungsional yang diadakan oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan sebagai syarat untuk bisa mendapatkan kartu-kartu kesejahteraan masyarakat tersebut. Sehingga dengan demikian angka buta aksara bisa ditekan serendah-rendahnya.

5. Mensosialisasikan kepada masyarakat, forum peduli pendidikan, lembaga sosial, organisasi masyarakat, perangkat kelurahan, serta *stakeholder* terkait untuk berpartisipasi aktif dalam mengawasi dan menginformasikan kepada dinas terkait mengenai masalah buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk sehingga dinas terkait dapat melakukan pendataan dan mengambil arah kebijakan untuk menangani permasalahan tersebut secara cepat dan tepat.

Dari kelima point tersebut diatas, jika memungkinkan dapat menjadi usulan sebagai pelengkap di dalam RPJMD Kota Pontianak tahun 2015 – 2019, sebagaimana tertuang dalam tabel uraian strategi dan arah kebijakan pembangunan tahun 2015 – 2019 misi pertama yaitu “Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis”. Uraian dari RPJMD yang berkaitan dengan misi pembangunan daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.1 Strategi Dan Arah Kebijakan Pembangunan Tahun 2015 – 2019

MISI 1 :

Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang religius, cerdas, sehat, berbudaya dan harmonis

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1 Meningkatkan keharmonisan dan kualitas kehidupan beragama	Meningkatkan pemahaman dan pelayanan keagamaan dan keharmonisan kehidupan bermasyarakat	Meningkatkan pelayanan kesejahteraan masyarakat dan kehidupan beragama serta keharmonisan masyarakat	Memfasilitasi, melakukan pembinaan, mejalin kerjasama dan koordinasi dengan stakeholder/ pelaku kehidupan beragama dan masyarakat luas
2 Meningkatkan pengembangan potensi seni budaya	Meningkatnya apresiasi terhadap seni budaya	Menjalin kerjasama dan partisipasi masyarakat dalam seni budaya	Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM seni dan ekonomi kreatif, sistem informasi dan kesadaran masyarakat akan pentingnya HAKI

			Mengembangkan event dan promosi kebudayaan dan sarana prasarana kesenian untuk mendorong seni budaya dan ekonomi kreatif
		Melestarikan, megebangkan dan aktualisasi nilai dan tradisi dalam rangka memperkaya dan memperkokoh khasanah budaya daerah	Memperkuat dan memperluas jejaring dan kerjasama dengan pelaku budaya dalam mengelola dan melestarikan karya aset budaya secara berkelanjutan
		Mempertahankan dan mengembangkan nilai- nilai khasanah seni budaya Kota Pontianak	Meningkatkan pemeliharaan dan pelestarian tempat, benda dan bangunan cagar budaya
3	Meningkatkan keberdayaan masyarakat	Meningkatnya perlindungan dan pemberdayaan perempuan dan anak dalam pembangunan	Meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak
		Meningkatnya pembinaan keluarga berencana dan sejahtera	Mewujudkan norma keluarga kecil bahagia sejahtera
			Meningkatkan perlindungan perempuan dan peningkatan kesetaraan gender
			Menjadikan kota Pontianak Layak Anak
4	Meningkatkan pelayanan dan pengembangan potensi kepemudaan dan olahraga	Meningkatnya pengembangan prestasi kepemudaan	Meningkatkan pemberdayaan potensi kepemudaan
		Meningkatnya kualitas dan kuantitas prestasi olahraga	Meningkatkan penyelenggaraan olahraga pendidikan, rekreasi dan prestasi
			Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana olahraga
			Peningkatan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam pembangunan daerah
			Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga
			Peningkatan penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana dan prasarana olahraga

5 Meningkatkan pemerataan pendidikan yang berkualitas.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Meningkatkan pemerataan mutu pendidikan pada jenjang SD/MI, SLTP/MTS, dan SMA/SMK/MA	Peningkatan akreditasi sekolah dan Penerapan sistem manajemen mutu (Quality Management System)
			Pelaksanaan Pemetaan Sekolah
		Mengurangi angka anak-anak keluarga miskin yang putus sekolah SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA	Meningkatkan motivasi dalam pembelajaran bagi siswa di sekolah
			Penyelenggaraan penyeteraan bagi masyarakat pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA dan Pemberian bantuan Operasional bagi sekolah pada jenjang SD/MI, SLTP/MTs dan SMA/SMK/MA
			Penataan penempatan guru dan peningkatan manajemen pendidikan
	Meningkatnya pemerataan kualitas tenaga pendidik	Meningkat mutu tenaga pendidik	Melaksanakan kegiatan penyeteraan pendidikan
	Meningkatnya kualitas dan cakupan pendidikan informal, PAUDNI serta pendidikan berkebutuhan khusus	Meningkatkan mutu pendidikan PAUDNI	Optimalisasi kegiatan peningkatan mutu pendidikan PAUDNI
	Peningkatan akses pendidikan bagi masyarakat yang berkebutuhan khusus	Pembangunan sarana dan prasarana pendidikan untuk masyarakat yang berkebutuhan khusus	
Meningkatnya wawasan masyarakat melalui penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta budaya minat baca	Meningkatkan pelayanan dan pengelolaan perpustakaan,	Membangun sistem perpustakaan yang efektif dan efisien	
		Pengembangan sarana dan prasarana perpustakaan	
		Pemasyarakatan iptek melalui media belajar sambil bermain	

		Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah	Meningkatnya keselamatan dan kelestarian dokumen/ arsip daerah	Menyelenggarakan pelestarian, pemeliharaan, perawatan dan pengamanan arsip		
6	Meningkatkan derajat kesehatan masyarakat	Meningkatnya kualitas kesehatan perorangan	Meningkatkan kepuasan pelanggan rumah sakit	Pelayanan rumah sakit yang berfokus kepada kepuasan pelanggan		
			Meningkatkan kesadaran hidup bersih dan sehat	kampanye hidup bersih dan sehat bagi masyarakat		
			Meningkatkan efisiensi/ mutu layanan rumah sakit	Peningkatan Pelayanan rumah sakit bermutu sesuai dengan standar		
			Pemenuhan standar pelayanan rumah sakit	Peningkatan mutu dan manajemen rumah sakit		
			Meningkatkan sarana dan prasarana rumah sakit	Mengadakan sarana dan prasarana memenuhi standar yang ditentukan		
			Meningkatkan kualitas Sumber daya manusia kesehatan	Peningkatan kualitas sumber daya manusia kesehatan terutama dokter spesialis dan paramedis		
		Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Meningkatkan kesehatan dan keselamatan ibu hamil dan bayi	Peningkatan pelayanan ibu hamil, melahirkan dan bayi		
			Meningkatkan kesehatan balita dan anak	Peningkatan pelayanan kesehatan anak balita		
			Peningkatan gizi masyarakat	Penanganan dan pencegahan gizi buruk		
			Penanganan dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular	Penurunan angka kesakitan penyakit menular dan tidak menular		
		7	Meningkatkan Kesehatan Lingkungan	Peningkatan pola hidup bersih dan sehat	Meningkatkan sanitasi dan perilaku hidup bersih dan sehat	Pengembangan lingkungan yang sehat dan perilaku sehat

8	Meningkatkan Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Meningkatnya Peran Serta dan Kemandirian Masyarakat dalam layanan kesehatan	Memperluas pembinaan, kerjasama dan koordinasi dalam rangka pemberdayaan masyarakat	Memperluas cakupan promosi, penyampaian informasi kepada kelompok-kelompok masyarakat
9	Meningkatkan Pelayanan Kesehatan yang Berkualitas, Merata dan Terjangkau	Meningkatnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau	Peningkatan kualitas layanan kesehatan	Pemenuhan standar pelayanan kesehatan
			Meningkatnya kesadaran kesehatan masyarakat	Mendorong peran serta masyarakat dalam peningkatan derajat kesehatan masyarakat
10	Memastikan terlaksananya Jaminan Kesehatan Semesta (Universal Coverage)	Meningkatnya Kepesertaan Jaminan Kesehatan	Penyediaan jaminan kesehatan masyarakat	Perluasan cakupan jaminan pemeliharaan kesehatan
11	Menurunkan permasalahan sosial masyarakat	Menurunnya Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya	Meningkatkan upaya pemberdayaan PMKS dan masyarakat dalam kepedulian sosial	Perluasan dan peningkatan akses penyelenggaraan kesejahteraan sosial bagi PMKS
				Meningkatkan tanggungjawab dan kepedulian masyarakat dalam menyelenggarakan kesejahteraan sosial
			Meningkatkan ketepatan sasaran penerima beras miskin	Meningkatkan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana Peningkatan kualitas administrasi dan ketepatan penerima program raskin
Usulan Pelengkap Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Kota Pontianak 2015 – 2019				
12.	Meningkatkan angka melek aksara Kota Pontianak	Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan	Meningkatkan program belajar pemberdayaan masyarakat berupa program Keaksaraan Fungsional di setiap PKBM yang tersebar di Kota Pontianak	Memfasilitasi, melakukan pembinaan, menjalin kerjasama dan koordinasi serta pengawasan oleh stakeholder/ pelaku Pendidikan untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan Kota Pontianak

		Untuk mendapatkan bantuan kesejahteraan masyarakat, masyarakat itu sendiri harus memiliki surat keterangan bebas buta aksara dari RT atau Kelurahan setempat	Kerjasama lintas sektor antar stakeholder terkait mengenai bantuan kesejahteraan untuk masyarakat
13. Mengurangi angka putus sekolah di Kota Pontianak	Meningkatkan pengawasan terhadap anak-anak usia sekolah	Meningkatkan kontrol pendidikan dengan menyisir tempat-tempat yang rawan dikunjungi anak-anak usia sekolah pada jam-jam masuk sekolah	Mengerahkan aparat pemerintah seperti Sat POL PP untuk mengontrol dan merazia tempat-tempat yang rawan dikunjungi anak-anak usia sekolah pada jam-jam sekolah
	Meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya orang tua akan pentingnya pendidikan anak	Meningkatkan peran serta orang tua dan masyarakat akan kepedulian terhadap anak-anak usia sekolah	Mensosialisasikan pentingnya pendidikan anak dari dinas terkait, peningkatan mutu pembelajaran sehingga membuat anak merasa tidak bosan dengan pelajaran yang terkesan itu-itu saja
14. Meningkatkan sumber daya manusia Kota Pontianak	Meningkatnya keterampilan dan perekonomian masyarakat	Membuat suatu program pelatihan keterampilan dan pembelajaran masyarakat seperti Pro PKMKP sebagai program unggulan upaya pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah	Mensosialisasikan program yang telah direncanakan kepada stakeholder terkait seperti PKK, PKBM dan perangkat kelurahan
			Pembinaan program dengan memfasilitasi tenaga pengajar, penyediaan alat-alat produksi dan bahan baku keterampilan
			Mengevaluasi dan meningkatkan keterampilan masyarakat sesuai dengan permintaan pasar

		Meningkatkan promosi produk hasil keterampilan masyarakat	Kerjasama dan koordinasi dengan para pelaku pasar untuk mendistribusikan hasil produksi ke pasar lokal maupun nasional
	Meningkatkan pelayanan terpadu pendidikan dan kesehatan masyarakat	Meningkatkan peran serta (partisipasi) masyarakat dalam menangani dan melaporkan masalah buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk di suatu daerah	Menghimbau, mensosialisasikan kepada masyarakat, forum pendidikan, lembaga sosial, organisasi masyarakat, perangkat kelurahan, serta <i>stakeholder</i> terkait akan pentingnya pendidikan dan kesehatan Mewadahi masyarakat dan <i>stakeholder</i> terkait dalam upaya pelaporan dengan memanfaatkan teknologi informasi yang telah berkembang saat ini

Upaya – upaya tersebut tentunya harus di dukung dengan kebijakan – kebijakan yang tepat agar tepat sasaran. Pertanyaannya adalah bagaimana agar kebijakan tersebut bisa tepat sasaran?. Untuk menjawab hal tersebut adalah dengan memanfaatkan teknologi yang ada sekarang ini. Dunia teknologi akhir – akhir ini berkembang dengan pesat. Buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk adalah masalah kehidupan sosial masyarakat yang berhubungan dengan wilayah / daerah. Tentunya akan lebih mudah jika ketiga masalah tersebut kita petakan secara *overlay* sehingga tergambar kondisi eksisting kantong buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk yang ada di Kota Pontianak.

5.5.1 Pendekatan Dengan Pemetaan

Pemetaan merupakan bentuk visualisasi dari permukaan bumi yang diskalakan. Kemajuan teknologi di bidang pemetaan membuat hampir semua sector kehidupan dapat dipetakan. Pemetaan sekarang ini dianggap sebagai solusi dalam memecahkan suatu masalah yang dulunya dianggap sulit. Dengan pemetaan kebijakan akan keputusan dapat lebih tepat sasaran. Hal ini dikarekan pemetaan menggambarkan masalah – masalah yang ada secara visualisasi dengan mempertimbangkan kondisi eksisting dimana asal masalah tersebut berada. Pemetaan merupakan solusi yang kompleks dalam memecahkan masalah buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk melihat pemetaan mengkombinasikan antara data *spatial* (keruangan) dan data tabular (data keaksaraan, putus sekolah dan gizi buruk).

Kombinasi kedua jenis data tersebutlah yang membuat pemetaan kami anggap menjadi solusi

yang tepat dalam menangani masalah buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk. Dengan konsep *overlay layer* kita akan melihat ketiga masalah tersebut berada di wilayah mana. Dengan *Overlay layer* kita akan mengetahui kondisi eksisting ketiga masalah tersebut. Dengan *overlay layer* akan memudahkan mengambil kebijakan yang tepat sesuai dengan karakteristik dimana asal ketiga masalah tersebut muncul.

Overlay layer adalah konsep pemetaan dengan menumpuk beberapa parameter keruangan menjadi sebuah peta. Jika dulu buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk hanya hanya di data tanpa mengetahui dimana dan bagaimana kondisi eksisting masalah tersebut dengan pemetaan hal itu tidak akan terjadi lagi. Disini pemetaan buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk akan dilengkapi dengan data tabular *by name*, *by addres* dan *by koordinat*. Untuk mencapai tujuan maksimal, tentunya kita terlebih dahulu harus menyamakan persepsi dan pemodelan data untuk masing – masing ketiga masalah buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk. Hal ini bertujuan agar kedepannya tidak adalagi terjadi *missing data* dalam proses pendataan buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk. Adapun rumusan pemodelan data yang kami buat untuk buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk adalah sebagai berikut :

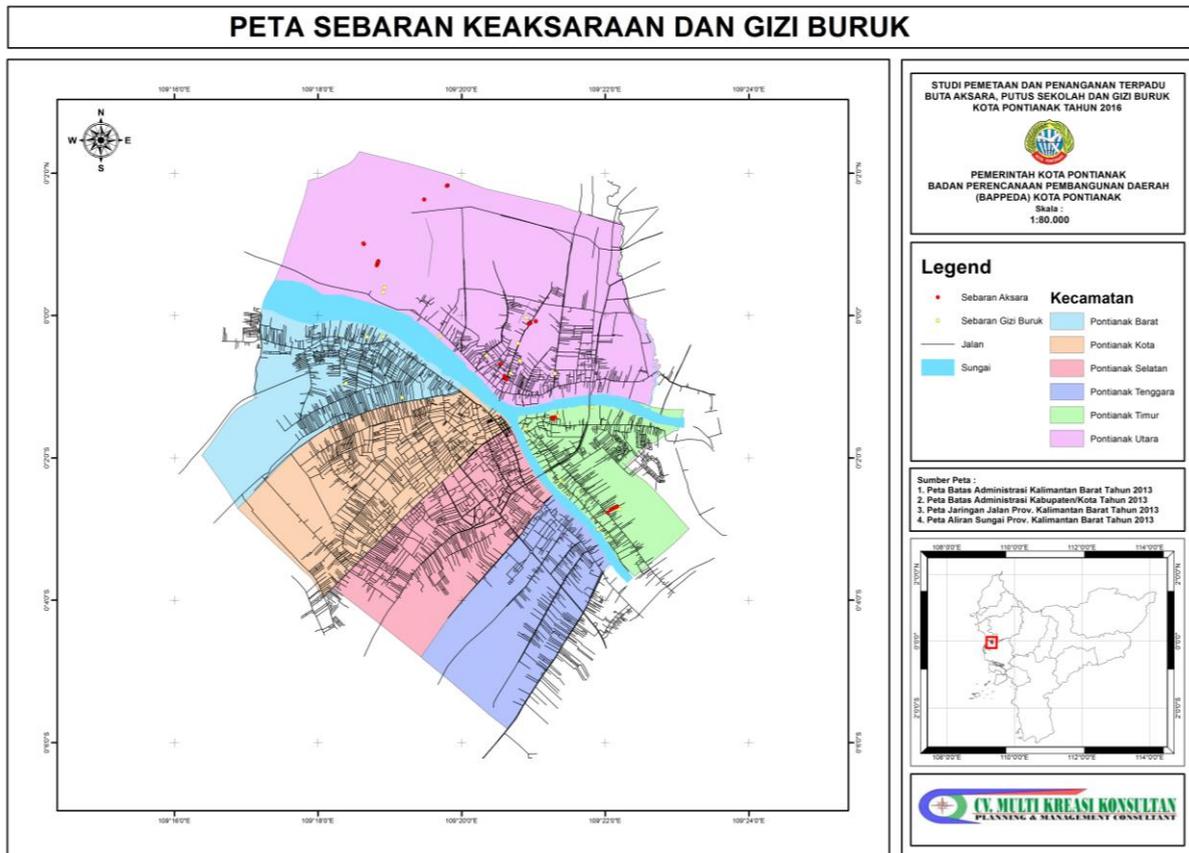
1. Buta Aksara Putus Sekolah

Nama Kolom	Keterangan
Id	: Nomor urut registrasi pendataan
Nama	: Nama masyarakat yang buta aksara / putus sekolah
L/P	: Jenis kelamin
Tempat Lahir	: Tempat lahir masyarakat yang buta aksara / putus sekolah
Tanggal Lahir	: Tanggal lahir masyarakat yang buta aksara / putus sekolah
Bulan Lahir	: Bulan lahir masyarakat yang buta aksara / putus sekolah
Tahun Lahir	: Tahun lahir masyarakat yang buta aksara / putus sekolah
Usia	: Usia masyarakat yang buta aksara sewaktu di data / putus sekolah
Pendidikan Terakhir	: Pendidikan terakhir masyarakat buta aksara / putus sekolah
Kecamatan	: Kecamatan asal masyarakat yang buta aksara / putus sekolah
Kelurahan	: Kelurahan asal masyarakat yang buta aksara / putus sekolah
No KK	: No Kartu Keluarga masyarakat yang buta aksara / putus sekolah
NIK	: No Induk Kependudukan yang terdapat pada KTP
Tahun Data	: Tahun pendataan dilakukan
Foto	: Foto masyarakat yang buta aksara / putus sekolah
Latitude	: Koordinat
Longitude	: Koordinat
Jenis	: Keaksaraan atau putus sekolah
Keterangan	: Progres pencapaian / history yang telah dilakukan

2. Gizi Buruk

Nama Kolom	Keterangan
Id	: Nomor urut registrasi pendataan
Nama	: Nama balita gizi buruk
L/P	: Jenis Kelamin
Umur	: Usia Balita balita gizi buruk sewaktu di lakukan pendataan
Tgl.Lahir	: Tanggal lahir balita gizi buruk
Jlh.Saudara	: Jumlah saudara balita gizi buruk
Nama Orang Tua	: Nama orang tua balita gizi buruk bapak dan ibu
Pekerjaan Orang Tua	: Pekerjaan orang tua balita baik maupun ibu
Pendidikan Orang Tua	: Pendidikan terakhir orang tua balita gizi buruk bapak dan ibu
Penghasilan Orang Tua	: Penghasilan rata-rata perbulan orang tua balita gizi buruk
Tanggal Kasus Di Temukan	: Tanggal kasus balita balita gizi buruk di temukan
Penyakit Penyerta	: Penyakit penyerta balita gizi buruk sewaktu ditemukan kasus gizi buruk
Berat Badan (Kg)	: Berat badan balita gizi buruk sewaktu ditemukannya masalah gizi buruk
Tinggi Badan (Cm)	: Tinggi badan balita gizi buruk sewaktu ditemukannya masalah gizi buruk
Bulan	: Bulan ditemukannya kasus gizi buruk
Tahun	: Tahun ditemukannya balita gizi buruk
Bulan Tuntas	: Kasus gizi buruk pada balita yang bersangkutan dinyatakan tuntas / sembuh
History	: Keterangan tahapan – tahapan penanganan dan progress perkembangan balita gizi buruk
Keterangan	: Tuntas / meninggal dunia / pindah, dll
Foto Balita Gizi Buruk	: Foto balita gizi buruk
Latitude	: Koordinat
Longitude	: Koordinat

Dari dua pemodelan data tersebut, kami mencoba untuk menerapkannya didalam suatu pemetaan terpadu guna mendapatkan solusi penanganannya dengan teknik *overlay layer*.



Gambar 5.4 Konsep Pemetaan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah Dan Gizi Buruk Kota Pontianak

Melihat gambar diatas, tentunya hal pertama yang dapat kita simpulkan adalah lokasi kantong buta aksara dan gizi buruk di Kota Pontianak yang tersebar di Kecamatan Pontianak Timur, Utara dan Barat. Berdasarkan data sekunder dari PKBM yang ada di Kota Pontianak kami melakukan servey pencacahan untuk mengecek secara langsung masyarakat buta aksara. Pecacahan yang kami lakukan untuk masing – masing PKBM bervariasi jumlahnya tergantung kondisi real di lapangan. Data keaksaraan yang kami gunakan adalah tahun terakhir di ajukannya untuk program keaksaraan fungsional. Kemudian dari data sekunder tersebut, didapatlah data primer yang menunjukkan lokasi eksisting dimana kantong keaksaraan di Kota Pontianak berada.

Menurut PKBM yang kami datangi, kantong keaksaraan di Kota Pontianak terdapat di Pontianak Utara dan Timur dan yang paling banyak dijumpai adalah di Pontianak Utara. Detail data buta aksara di Pontianak Utara dan Timur dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.2 Data Buta Aksara Kecamatan Pontianak Utara dan Timur

	NAMA RESPONDEN	ALAMAT RESPONDEN	NO. KK	NO. KTP	KELURAHAN	KECAMATAN	PKBM	LONGITUDE	LATITUDE
1	SUMIATI	JL. PANCA BHAKTI, RT03/RW13	6171 041812080010	6171 046002750012	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	KHATULISTIWA	0,01249	109,3139
2	SUMINA	JL. PANCA BHAKTI, Gg. HIDAYAH 4 RT03/RW13	6171 040409120006	6171 045408940006	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	KHATULISTIWA	0,01246	109,3139
3	SUMIATI	JL. PANCA BHAKTI, Gg. HIDAYAH 3 RT03/RW13	6171 041011080006	6171 045406870008	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	KHATULISTIWA	0,01215	109,3138
4	ROPIATUN	JL. PANCA BHAKTI, Gg. HIDAYAH 4 RT03/RW13	6171 041403110002	6171 044204870016	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	KHATULISTIWA	0,01195	109,3137
5	JUMIATI	JL. PANCA BHAKTI, RT03/RW13	6171 042105080045	6171 045008790022	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	KHATULISTIWA	0,01177	109,3137
6	SAMSI AH	JL. PANCA BHAKTI, RT03/RW13	6171 041706080033	6171 044605780020	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	KHATULISTIWA	0,01241	109,3139
7	HAMAEDAH	JL. PANCA BHAKTI, Gg. HIDAYAH RT02/RW13	6171 041207080010	6171 046207710004	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	KHATULISTIWA	0,01276	109,3140
8	ARDIAN	JL. PANCA BHAKTI, Gg. HIDAYAH 3 RT03/RW13	6171 040509070010	6171 044102660002	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	KHATULISTIWA	0,01253	109,3139
9	JUANA	JL. PANCA BHAKTI, RT03/RW13	6171 041306080029	6171 044503670011	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	KHATULISTIWA	0,01249	109,3139
10	SAMONA	JL. PANCA BHAKTI, RT03/RW13	6171 041106080019	6171 044211820012	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	KHATULISTIWA	0,01254	109,3139
11	SAPARIYAH	JL. PANCA BHAKTI, RT04/RW13	6171 041910110002	6171 047112610027	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	KHATULISTIWA	0,01679	109,3107
12	MAY	JL. PANCA BHAKTI, RT04/RW13	6171 041712120002	6171 047112650115	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	KHATULISTIWA	0,01693	109,3106
13	MAT ALI	JL. PARWASAL DALAM, Gg. ANANDA No. 49, RT03/RW24	6171 043010070010	6171 040608700011	SIANTAN TENGAH	PONTIANAK UTARA	PANGERAN PERBU	-0,00132	109,3505
14	BAHRIYAH	JL. PARWASAL DALAM, Gg. ANANDA No. 49, RT03/RW24	6171 043010070010	6171 044706750011	SIANTAN TENGAH	PONTIANAK UTARA	PANGERAN PERBU	-0,0013	109,3505
15	SUBAIRI	JL. PARWASAL, Gg. HOLLYWOOD, No. 70, RT03/RW24	6171 040803100002	6171 040506790025	SIANTAN TENGAH	PONTIANAK UTARA	PANGERAN PERBU	-0,00173	109,3492
16	EDI GUNAWAN	JL. PARWASAL, Gg. HOLLYWOOD, No. 71, RT03/RW24	6171 042806080036	6171 041010790024	SIANTAN TENGAH	PONTIANAK UTARA	PANGERAN PERBU	-0,00181	109,3491
17	JUDA	JL. PARWASAL DALAM, RT03/RW24	6171 042212080017	6171 044607730001	SIANTAN TENGAH	PONTIANAK UTARA	PANGERAN PERBU	-0,0019	109,3489
18	TIJAH	JL. PARWASAL, Gg. HOLLYWOOD, No. 73A, RT03/RW24	6171 041911090011	6171 044806930028	SIANTAN TENGAH	PONTIANAK UTARA	PANGERAN PERBU	-0,00186	109,3490
19	SUMINTEN	JL. PARWASAL DALAM, Gg. HOLLYWOOD No. 75 RT03/RW24	6171 041212070059	6171 046905720503	SIANTAN TENGAH	PONTIANAK UTARA	PANGERAN PERBU	-0,00189	109,3490
20	PANI	JL Dharma Putra Gg Dharma Putra 3	6171 040709090000	6171 044801480002	SIANTAN HILIR	PONTIANAK UTARA	AL FIKRI	-0,014083333	109,34325
21	HAMZAH	JL Dharma Putra Gg Dharma Putra 3	6171 041112080055	6171 040307440003	SIANTAN HILIR	PONTIANAK UTARA	AL FIKRI	-0,014666667	109,3435
22	SAHARA	JL Dharma Putra Gg Dharma Putra 3	6171 041112080055	6171 046007460001	SIANTAN HILIR	PONTIANAK UTARA	AL FIKRI	-0,014666667	109,3435
23	HALIYAH	JL Dharma Putra Gg Dharma Putra 4	6171 040602080014	6171 045704700006	SIANTAN HILIR	PONTIANAK UTARA	AL FIKRI	-0,011305556	109,342417
24	HALIMA	JL Dharma Putra Gg Dharma Putra 3	6171 042507130012	6171 045502670012	SIANTAN HILIR	PONTIANAK UTARA	AL FIKRI	-0,014944444	109,343806
25	JUMALIA	JL KEBANGKITAN NASIONAL	6171 041601120013	6171 044707630002	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	MIFTAHUS SOLIHIN	0,027222222	109,324667

26	JUMADI	JL KEBANGKITAN NASIONAL	6171 041601120013	6171 041205590001	BATU LAYANG	PONTIANAK UTARA	MIFTAHUS SOLIHIN	0,027222222	109,324667
27	PUNANTI	JL KEBANGKITAN NASIONAL	6171 040605100011	6171 044709550000	SIANTAN HILIR	PONTIANAK UTARA	MIFTAHUS SOLIHIN	0,030472222	109,330083
28	RADIYEH	JL KEBANGKITAN NASIONAL	6171 042303090028	6171 044406790000	SIANTAN HILIR	PONTIANAK UTARA	MIFTAHUS SOLIHIN	0,030388889	109,329917
29	SITI	JL KEBANGKITAN NASIONAL	6112 012704110020	6112 014203850021	SIANTAN HILIR	PONTIANAK UTARA	MIFTAHUS SOLIHIN	0,030388889	109,329917
30	HAYATI	JL SAMI SUMPING	6171 020912080008	6171 024306660015	SAIGON	PONTIANAK TIMUR	PATTIMURA	-0,053	109,36975
31	SENI	JL SAMI SUMPING	6171 020305070049	6171 025806820001	SAIGON	PONTIANAK TIMUR	PATTIMURA	-0,030388889	109,369917
32	YULIA	JL SAMI SUMPING	6171 022304070014	6171 026008720004	SAIGON	PONTIANAK TIMUR	PATTIMURA	-0,053861111	109,367944
33	MISTIYE	JL SAMI SUMPING	6171 0203060006	6171 024205780001	SAIGON	PONTIANAK TIMUR	PATTIMURA	-0,053	109,36975
34	WARDAH	JL SAMI SUMPING	6171 021401072534	6171 024603650001	SAIGON	PONTIANAK TIMUR	PATTIMURA	-0,053	109,36975
35	SUPA'I	JL TANJUNG RAYA GG CENDANA	6171 021304070036	6171 025503480002	SAIGON	PONTIANAK TIMUR	PATTIMURA	-0,053861111	109,369111
36	SANTI	JL TANJUNG RAYA GG CENDANA	6171 022711070023	6171 024506850005	SAIGON	PONTIANAK TIMUR	PATTIMURA	-0,053861111	109,369111
37	PARIDA	JL TRITURA GG KARYA SEPAKAT RT004/RW005	6171 021102080013	6171 024604550002	TJ.HILIR	PONTIANAK TIMUR	RADEN SITI KARTINI	-0,02405	109,3543
38	MARSUDEH	JL TRITURA GG KARYA SEPAKAT RT004/RW005	6171 020504100002	6171 025606560004	TJ.HILIR	PONTIANAK TIMUR	RADEN SITI KARTINI	-0,02393	109,3543
39	LEHA	JL TRITURA GG KARYA SEPAKAT RT004/RW005	6171 021206070016	6171 024304480003	TJ.HILIR	PONTIANAK TIMUR	RADEN SITI KARTINI	-0,02389	109,3543
40	JULAIHA	JL TRITURA GG KARYA SEPAKAT RT002/RW002	6171 022107080010	6171 024212670008	TJ.HILIR	PONTIANAK TIMUR	RADEN SITI KARTINI	-0,0242	109,3546
41	MINAH	JL TRITURA GG KARYA SEPAKAT RT002/RW002	6171 021401080009	6171 025503480004	TJ.HILIR	PONTIANAK TIMUR	RADEN SITI KARTINI	-0,02378	109,3550

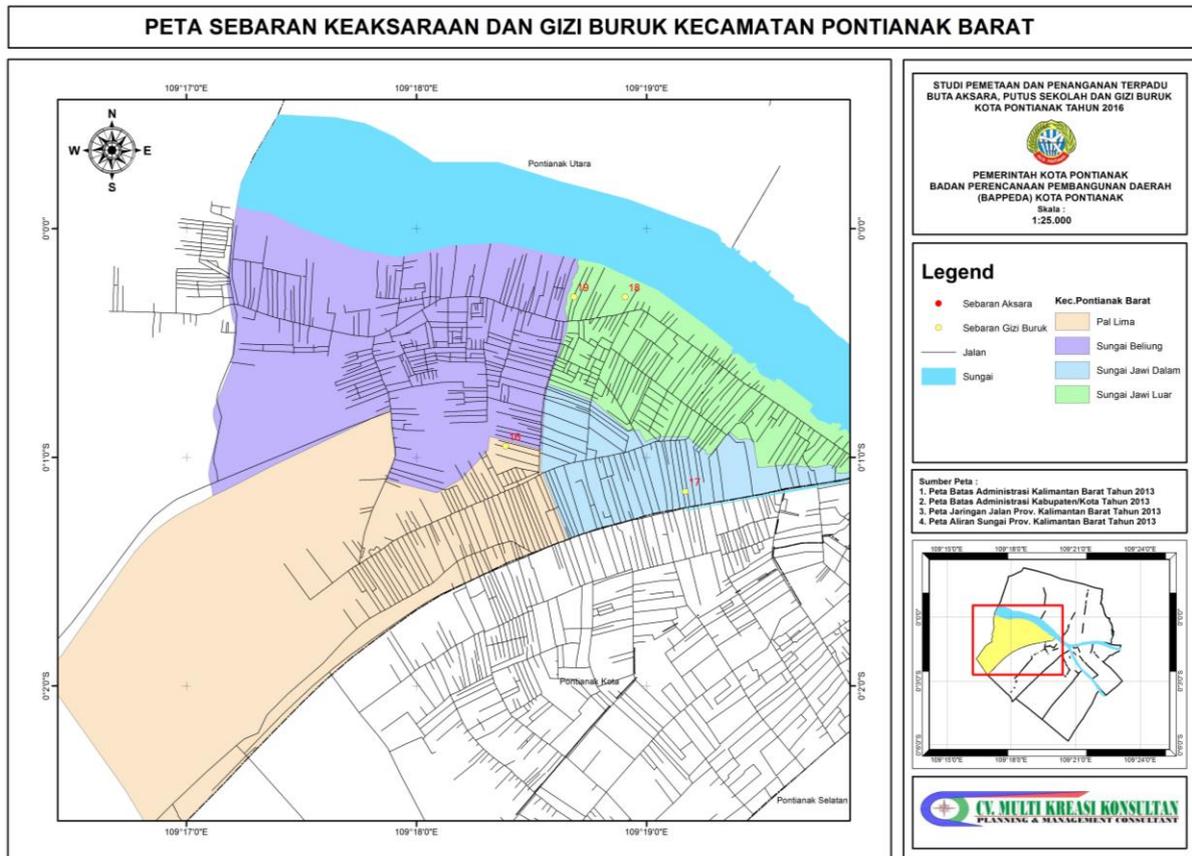
Sedangkan untuk data balita gizi buruk, kami dari pihak konsultan mengambil data sekunder dari Dinas Kesehatan Kota Pontianak. Kemudian dari data tersebut kami melakukan survey kelapangan untuk mendapatkan data primer. Survey tersebut dilakukan untuk melakukan studi lebih mendalam akan penyebab terjadinya kasus gizi buruk. Adapun data yang kami jadikan dasar survey adalah data tahun 2016 bulan Januari – April. Detail data kasus gizi buruk berdasarkan survey lapangan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 5.3 Data Gizi Buruk Tahun 2016 Januari - April

NO	NAMA ANAK	NAMA ORANG TUA	ALAMAT	KECAMATAN	KELURAHAN	LAT	LONG
1	M. ABIZAR	MISNAWAR/MARIATI	JL. PARIT PANGERAN RT4/RW10	PONTIANAK UTARA	SIANTAN HULU	109,355	-0,01353
2	SITI NURLAILA	SULAIMAN/SONIATI	JL. SELAT MADURA RT2/RW9	PONTIANAK UTARA	SIANTAN TENGAH	109,3469	-0,01064
3	RAFLI ALMAIR	RIO RENALDI/RAHMAH	JL. KHATULISTIWA, DHARMA PUTRA 2	PONTIANAK UTARA	SIANTAN HILIR	109,3391	-0,00937
4	M. FARID ALFARISI	MUHADI/SUBEIDEH	JL. PARWASAL, Gg. MELATI I	PONTIANAK UTARA	SIANTAN TENGAH	109,3483	-0,00048
5	PUTRI SAKINAH	MUHARI/MARIANI	JL. KHATULISTIWA, KOMP TAI CHU	PONTIANAK UTARA	SIANTAN HILIR	109,3283	-0,0048
6	M. SALAM	TARIMUN/ROKAIYAH	JL. PARWASAL, DEPAN Gg. MAKAM MUSLIM	PONTIANAK UTARA	SIANTAN TENGAH	109,3464	-0,00642
7	DZAKIR KHAFADI	RIZKI AMINULLAH/NURAZIZAH	JL. KHATULISTIWA, Gg. SATU DALAM	PONTIANAK UTARA	SIANTAN HILIR	109,3155	0,00666
8	IHYE SYAIFULLAH	MISWI/FATIMAH	JL. SELAT MADURA, Gg. KAROMAH	PONTIANAK UTARA	SIANTAN TENGAH	109,3447	0,01353
9	ZULKARNAIN	(ALM) ABDULLAH/SURYATI	JL. MASJID DALAM RT01/RW07	PONTIANAK UTARA	SIANTAN TENGAH	109,3152	0,005452
10	M. RAFFA	HAMDANI/FATMAWATI	JL. TRITURA, Gg. ASHARI RT3/RW5	PONTIANAK TIMUR	TANJUNG HILIR	109,3557	-0,02351
11	ALIANDO	ARISMAN/WAIDANIARTI	JL. TANJUNG PULAU RT 05/RW12	PONTIANAK TIMUR	DALAM BUGIS	109,37	-0,0453
12	ALIF PRATAMA	HENDRI/AGUSTINI	JL. TANJUNG PULAU	PONTIANAK TIMUR	DALAM BUGIS	109,3447	0,01353
13	RIDHO ABDUL HAFID	SUROTO/SRI INDRAYANI	Gg. SEMUT	PONTIANAK TIMUR	TANJUNG HULU	109,3635	-0,02139
14	M. FARID	M.TAUFIK/DINA	JL. TANJUNG HARAPAN, Gg. PAWASARI 2	PONTIANAK TIMUR	SAIGON	109,3563	-0,03858
15	ADAM PUTRA UTAMA	RIKI/AGUSTINA	JL. TANJUNG HARAPAN, Gg. M. TAUFIK	PONTIANAK TIMUR	SAIGON	109,365	-0,05011
16	M.ARIFIN	KASIMAN/ARBANIA	JL. TEBU GG. DWI RATNA NO 36	PONTIANAK BARAT	SUI JAWI DALAM	109,3064	-0,01586
17	ARUA	HENDRA/MUHLIS SURYAWATI	JL. H.RAIS.ARAHMAN GG. SEKAWAN	PONTIANAK BARAT	SUI JAWI DALAM	109,3195	-0,01917
18	RAMADHAN HABIBURAHIM	HENDRI YANTO/SANTI	JL. KOM YOS SUDARSO GG. KPLP NO 4	PONTIANAK BARAT	SUI BELIUNG	109,3151	-0,00498
19	NIKITA SURYA SARI	MANSYUR/WENTY	JL. KOM YOS SUDARSO GG. KAYU MANIS	PONTIANAK BARAT	SUI BELIUNG	109,3114	-0,00497

Dari data kasus gizi buruk diatas, masalah gizi buruk tersebar di tiga kecamatan, yaitu Kecamatan Pontianak Utara, Timur dan Barat. Jika kita melihat dari kondisi eksisting sebaran tersebut, ketiga wilayah itu berada di pinggiran Kota Pontianak. Tentunya dalam hal ini pemerintah harus lebih jeli memperhatikan daerah pinggiran kota.

Jika kita lihat lebih detail, berdasarkan batas administrasi kelurahan per-kecamatan, keaksaraan dan gizi buruk dapat dipetakan dengan pemodelan sebagai berikut.

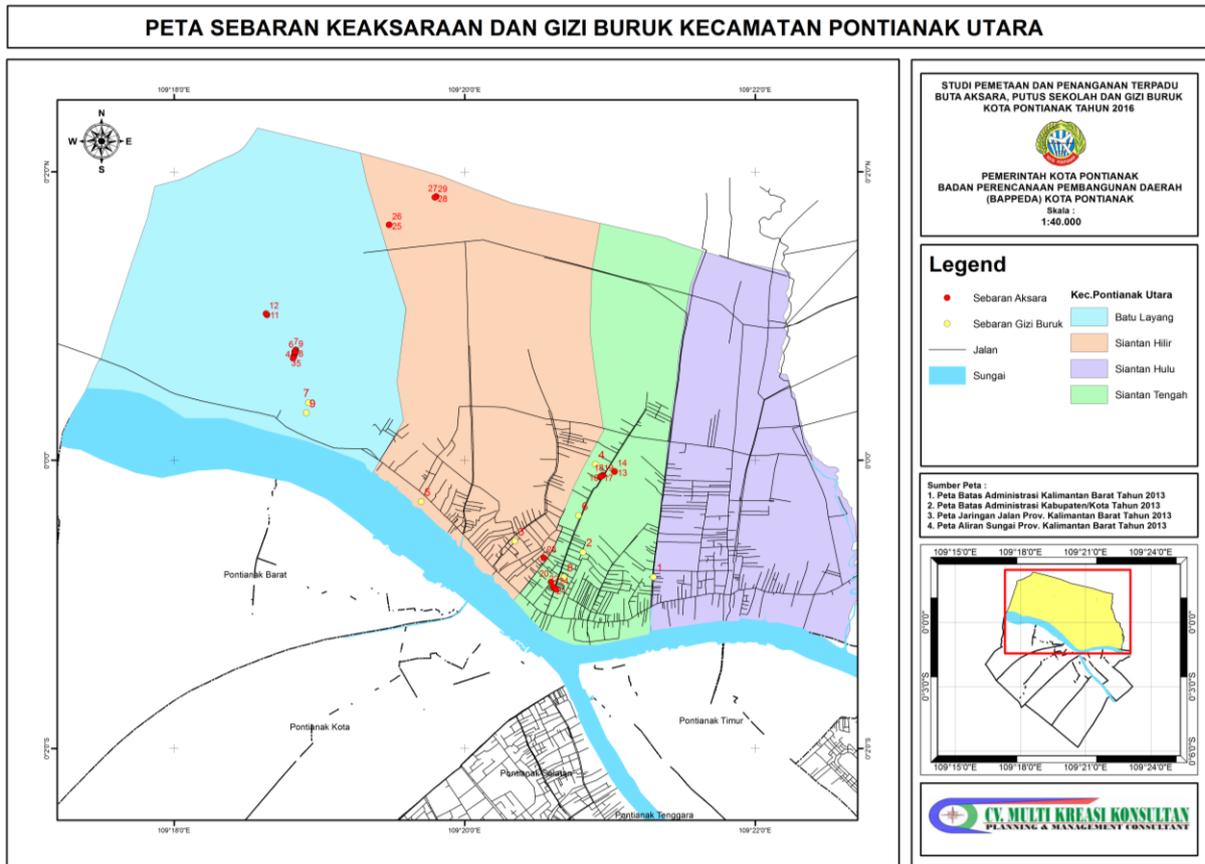


Gambar 5.5 Peta Sebaran Keaksaraan dan Gizi Buruk Kecamatan Pontianak Barat

Dari hasil survey keaksaraan dan gizi buruk yang kami lakukan, Pontianak Barat adalah salah satu kecamatan yang tidak memiliki buta aksara. Akan tetapi terdapat empat kasus gizi buruk yang tersebar di tiga kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak Barat. Pontianak Barat terdapat empat kelurahan, yaitu Kelurahan Pal Lima, Sungai Beliang, Sungai Jawi Dalam dan Sungai Jawi Luar. Peta batas administrasi Kecamatan Pontianak Barat dan sebaran kasus gizi buruknya dapat dilihat pada gambar 5.5 diatas.

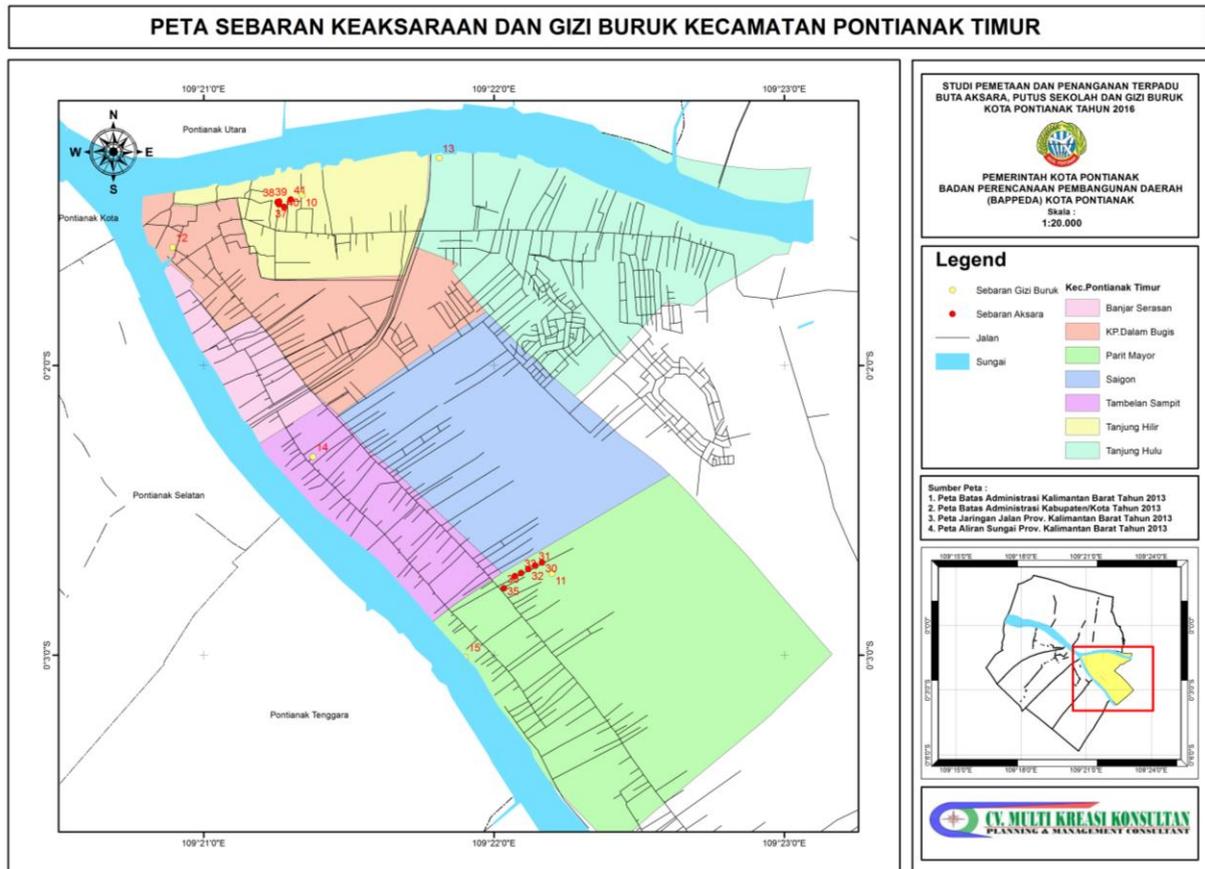
Pontianak Utara terdiri dari empat kelurahan, yaitu Batu Layang, Sintan Hilir, Sintan Hulu dan Sintan Tengah. Kecamatan Pontianak Utara merupakan kawasan agribisnis yang ada di Kota Pontianak. Tentunya hal ini harus didukung dengan sumberdaya manusia yang memadai. Keaksaraan

di Kecamatan Pontianak Utara dapat dikatakan lumayan banyak. Dari hasil pencacahan, kami mendapatkan kurang lebih 29 orang buta aksara yang terpusat di Kelurahan Batu Layang dan Siantan Tengah. Sedangkan untuk kasus gizi buruknya tersebar di semua kelurahan yang ada di Kecamatan Pontianak utara kecuali Siantan Hulu.



Gambar 5.6 Peta Sebaran Keaksaraan dan Gizi Buruk Kecamatan Pontianak Utara

Sedangkan Pontianak Timur, buta aksara tersebar di Kelurahan Parit Mayor, Tanjung Hilir dan Tanjung Hulu. Dari hasil pencacahan yang kami dapatkan, buta aksara di Kecamatan Pontianak Timur berjumlah 12 orang. Untuk kasus gizi buruk periode Januari – April 2016 berjumlah 6 kasus. Penyebaran gizi buruk di Kecamatan Pontianak Timur dapat dikatakan merata di semua kelurahan. Kecamatan Pontianak Timur adalah kecamatan yang paling kecil batas admistrasinya dengan jumlah penduduk terpadat dan jumlah kelurahan terbanyak. Pontianak Timur diapit oleh 2 sungai, yaitu sungai Kapuas dan sungai Landak. Peta Batas administrasi Kecamatan Pontianak Timur dan sebaran keaksaraan dan gizi buruk di Pontianak Timur dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 5.6 Peta Sebaran Keaksaraan dan Gizi Buruk Kecamatan Pontianak Timur

5.5.2 Pendekatan Dengan Sistem Informasi

Sistem informasi adalah suatu sinergi antara data, mesin pengolah data (yang biasanya meliputi computer, program aplikasi dan jaringan) dan manusia untuk menghasilkan informasi. Jadi sistem informasi bukan hanya aplikasi perangkat lunak. Sistem informasi ada pada hampir setiap perusahaan atau instansi untuk mendukung kegiatan sehari-hari. Biasanya porsi pengerjaan pengembangan system informasi diserahkan kepada orang-orang yang bekerja dibidang Teknologi Informasi. System informasi terdiri dari system informasi *offline* dan *online*. Sistem informasi yang bersifat *offline* adalah system informasi yang hanya bisa diakses oleh beberapa perangkat computer saja yang telah di tentukan dalam 1 topologi jaringan. Sedangkan system informasi yang bersifat *online* adalah system informasi yang dapat diakses oleh lain di manapun dan kapanpun tanpa terbatas ruang dan waktu.

Melihat perkembangan dari teknologi informasi sekarang ini yang semakin pesat, tidak menutup kemungkinan jika masalah – masalah yang berkaitan dengan masyarakat dapat kita pantau dan selesaikan dengan membangun suatu system informasi baik bersifat *offline* maupun *online*. Dengan memanfaatkan system informasi user akan lebih mudah dalam memanajemen data dan

mendapatkan informasi yang akurat mengenai masalah tersebut sehingga mempermudah dalam pengambilan kebijakan. Dengan menggabungkan pemetaan dan sistem informasi tentunya akan menjadikan suatu sistem pemantauan yang sangat kompleks. Gabungan dari sistem informasi dan pemetaan belakangan ini lebih dikenal dengan nama Sistem Informasi Geografis (SIG). Beberapa contoh penelitian yang berkaitan dengan Sistem Informasi Geografis adalah sebagai berikut :

1. Sistem Informasi Geografis Untuk Mendukung Upaya Pencegahan Demam Berdarah dengan Pendekatan *Medical Geography* (Azimi Indra, 2010)

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Azimi tahun 2010, mahasiswa Universitas Tanjung Pura dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Geografis Untuk Mendukung Upaya Pencegahan Demam Berdarah dengan Pendekatan *Medical Geography* (Studi Kasus : Kota Pontianak)”. Dari penelitian diperoleh bahwa sistem dapat menangani proses input data dan proses pencarian data serta melakukan fungsi-fungsi spasial dengan baik. Input data oleh pengguna selalu divalidasi dan ada umpan balik kepada pengguna ketika terjadi kesalahan. Selain itu, sistem juga mampu menangani data history kasus demam berdarah serta menampilkannya dalam bentuk peta.

Pemetaan demam berdarah dengan Sistem Informasi Geografis dapat menunjukkan penyebaran kasus demam berdarah yang digambarkan dalam bentuk peta sehingga pengguna mengetahui secara lebih jelas daerah-daerah mana yang paling sering terjadi kasus demam berdarah. Sistem juga dapat membantu pengguna untuk menemukan pola penyebaran kasus demam berdarah (jika ada). Dengan demikian, sistem dapat membantu menganalisis pengaruh tindakan pencegahan (terutama fogging) terhadap jumlah kasus demam berdarah yang terjadi serta merencanakan tindakan fogging yang akan dilakukan. Sehingga sistem ini dapat menjadi solusi alternatif bagi Pemerintah Kota Pontianak dan pihak-pihak terkait untuk mendukung upaya pencegahan demam berdarah.

2. Sistem Informasi Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Berbasis Sistem Informasi Geografis (Utami Sri, 2007)

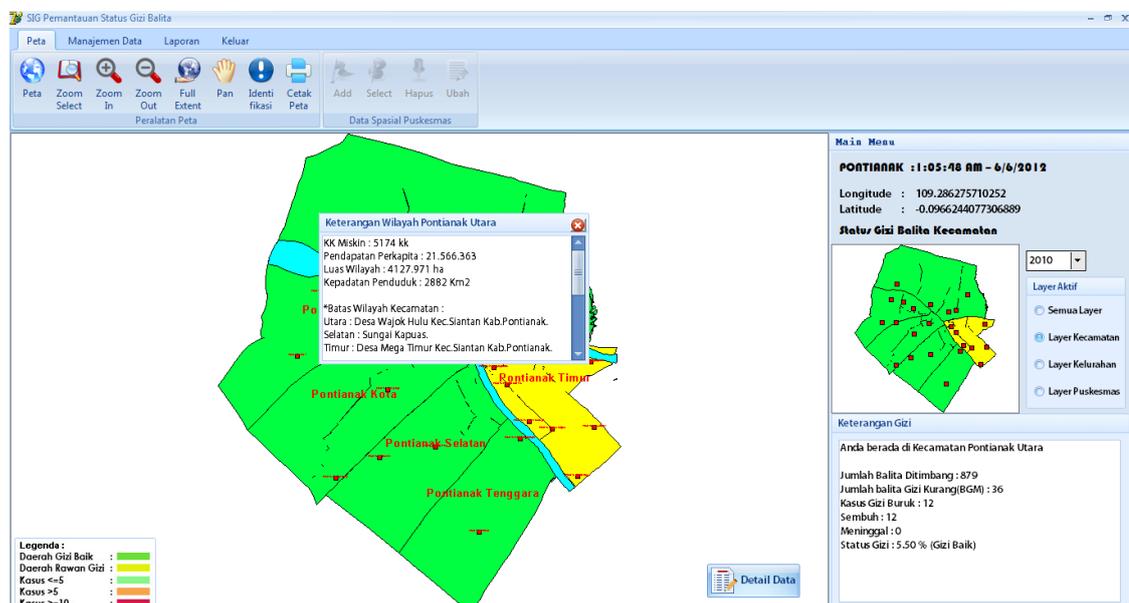
Penelitian yang dilakukan oleh Sri Utami tahun 2007, mahasiswa Universitas Diponegoro dengan judul “Pengembangan Sistem Informasi Pekan Imunisasi Nasional (PIN) Berbasis Sistem Informasi Geografis (SIG) Guna Mendukung Evaluasi Program PIN di Kota Semarang”. Dari penelitian diperoleh bahwa perangkat

lunak SIG dipakai sebagai program bantu untuk merencanakan penentuan jumlah sasaran, jumlah sasaran target dan jumlah vaksin yang diperlukan dalam pelaksanaan program imunisasi. Sehingga dengan adanya Sistem Informasi ini, pelaksanaan Pekan Imunisasi Nasional lebih efektif dilakukan dan tepat sasaran.

Sistem ini juga mempermudah dalam memanajemen data. Hal ini dikarenakan sistem ini mengubah cara perhitungan data yang sebelumnya dikerjakan secara manual menjadi terkomputerisasi. Selain itu data yang belum tersimpan dalam basis data menyebabkan kesulitan dalam pembaruan data (peremajaan, penghapusan, dan penyisipan data) pengaksesan data, kemungkinan penggunaan data secara bersamaan untuk kegiatan lain dan kemungkinan integrasi data. Dengan adanya sistem ini maka hal-hal yang menjadi kendala dalam proses manajemen data Pekan Imunisasi Nasional dapat diselesaikan.

3. Sistem Informasi Geografis Pemantauan Status Gizi Balita Kota Pontianak (Santri Samanhudi, 2012)

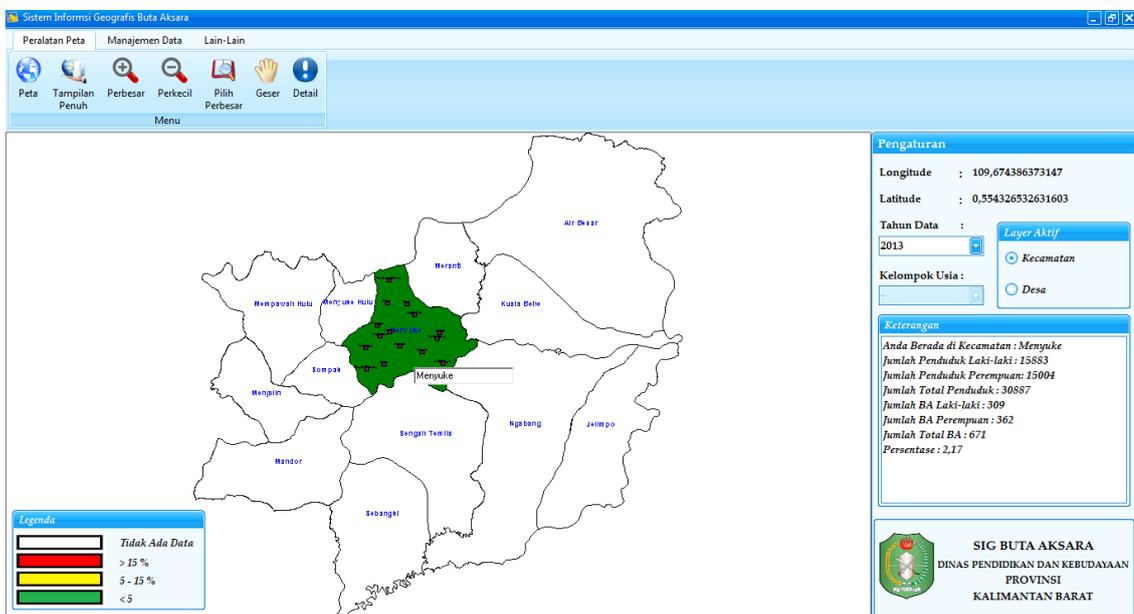
Penelitian yang dilakukan oleh Santri Samanhudi tahun 2012, mahasiswa Universitas Tanjung Pura dengan judul “Sistem Informasi Geografis Pemantauan Status Gizi Balita Kota Pontianak”. Dari penelitian diperoleh bahwa sistem dapat menangani proses input data dan proses pencarian data serta melakukan fungsi-fungsi spasial dengan baik. Sistem juga mampu menangani data history kasus gizi buruk dan data SKDN serta menampilkannya dalam bentuk peta. Tampilan aplikasi dapat dilihat pada gambar dibawah ini.



Dengan adanya system ini akan mempermudah pengguna dalam menentukan status gizi balita di suatu wilayah kecamatan yang ada di Kota Pontianak. Selain itu system ini mempermudah dalam pelaporan dan manajemen data. Sebelumnya data – data SKDN dan balita gizi buruk di buat dalam format *excel*, dengan adanya system ini data – data tersebut lebih terstruktur dan terorganisir.

4. Sistem Informasi Geografis Pemantauan Buta Aksara di Kalimantan Barat Kabupaten Landak (Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura, 2014)

Melalui Lembaga Penelitian Untan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melakukan sebuah penelitian mengenai “Study Pemetaan Masyarakat Buta Aksasara di Kabupaten Landak (2014)”. Sistem ini menangani data base *by name by adres* masyarakat buta aksara yang ada di Kabupaten Landak yang kemudian di tampilkan dalam bentuk pemetaan yang terstruktur.



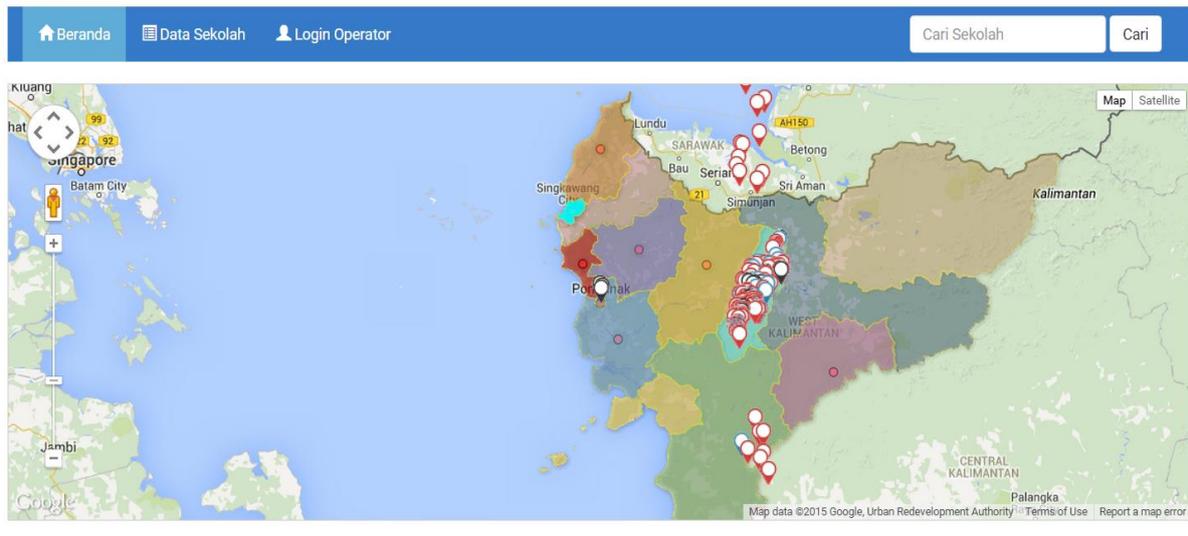
5. Sistem Informasi Geografis Sebaran Sekolah Di Kalimantan Barat Berbasis Web GIS (Lembaga Penelitian Universitas Tanjungpura, 2015)

Melalui Lembaga Penelitian Untan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat melakukan sebuah penelitian mengenai “Study Pemetaan Sebaran Sekolah di Kalimantan Barat (2015)”. Aplikasi ini berbasis Web GIS dimana semua orang dapat melihat lokasi sekolah, alamat sekolah, kondisi sekolah dan kondisi eksisting sekolah secara realtime. Aplikasi ini dapat diakses pada link di bawah ini :

www.dikbud.kalbarprov.go.id/sistem-informasi-geografis-sekolah-provinsi-kalimantan-barat



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SISTEM INFORMASI GEOGRAFIS PERSEBARAN SEKOLAH



Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan Barat © 2015

Dari beberapa penelitian tersebut, tentunya kita dapat menyimpulkan bahwa Sistem Informasi Geografis dapat kita terapkan juga dalam pemantauan keaksaraan dan gizi buruk yang ada di Kota Pontianak sehingga kebijakan yang diambil lebih tepat sasaran. Menuju program *smart city* Kota Pontianak tentunya hal ini sangat berkaitan. Dengan adanya Sistem Informasi Geografis pemantauan keaksaraan dan gizi buruk, akan lebih mempermudah akses data antar stake holder terkait sehingga pengambilan kebijakan yang berkenaan dengan penanggulangan maupun pemberantasan masalah keaksaraan dan gizi buruk di Kota Pontianak akan lebih tepat sasaran.

6.1 KESIMPULAN

Dari hasil penelitian sebagaimana dikemukakan pada uraian terdahulu, dapat disimpulkan:

1. Pendidikan masyarakat merupakan suatu proses dimana upaya pendidikan yang diprakarsai pemerintah diwujudkan secara terpadu dengan upaya penduduk setempat untuk meningkatkan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang lebih bermanfaat dan memberdayakan masyarakat.
2. Keberhasilan program pemberantasan buta aksara di daerah merupakan salah satu bentuk nyata penguatan pengembangan sumber daya manusia guna mendukung pembangunan. Kegiatan tersebut dapat dilaksanakan bahkan terselesaikan secara tuntas di setiap daerah di Indonesia, dengan waktu yang relatif cepat jika didukung oleh berbagai unsur dan komponen secara sinergis. Komponen utama tentu adalah dukungan kebijakan dan komitmen pemerintah, khususnya pemerintah daerah dan didukung penuh oleh peran serta masyarakat secara aktif dan melalui berbagai bentuk kegiatan inovatif. Peranserta tersebut diwujudkan dalam berbagai bentuk tindakan nyata, misalnya memberikan motivasi atau kesadaran pentingnya melek aksara, membantu sarana/fasilitas pembelajaran, dan dalam bentuk menyelenggarakan program keaksaraan itu sendiri. Hanya dengan kepedulian inilah program pembebasan kantong-kantong kemiskinan di setiap daerah di Indonesia akan dapat terselesaikan sehingga Indonesia menjadi cerdas, bermartabat dan berbudaya dimata dunia.
3. Buta aksara adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Pemerintah mempunyai program-program untuk memberantas buta aksara ini misalnya dengan adanya kejar paket A, B, dan C, juga banyak didirikannya taman bacaan-taman bacaan. Namun dalam kenyataan di lapangan banyak terdapat hambatan-hambatan yang menghadang untuk memberantas buta aksara misalnya layanan pendidikan yang kurang menunjang atau yang masih jauh dari perumahan penduduk padahal pemerintah sudah menganggarkan begitu besarnya entah dihilang dimana, juga tenaga pengajar yang kurang, dan hambatan yang

paling besar berasal dari peserta didik sendiri yang agak malas untuk kembali belajar dan putus ditengah jalan.

4. Buta aksara bukan sekedar permasalahan yang sempit, yaitu ketidakmampuan individu atau warga masyarakat membaca atau menulis huruf dan kata, tetapi secara luas terkait dengan ketidakmampuan untuk memahami, menganalisis dan memecahkan permasalahan kehidupannya.
5. Tingkat keaksaraan suatu Negara/Provinsi maupun Kabupaten Kota merupakan salah satu indikator dalam penentuan indeks pengembangan sumber daya manusia (Human Development Index). Oleh sebab itu memberikan perhatian yang besar bagi upaya-upaya pemberantasan buta aksara merupakan kebijakan yang tepat dan perlu mendapat dukungan sepenuhnya dari semua unsur dan komponen masyarakat agar tumbuh rasa tanggung jawab bersama guna mewujudkan misi yang mulia ini.
6. Adanya data buta aksara yang akurat dan terkini adalah hal yang penting dalam pelaksanaan program pemberantasan buta aksara. Metodologi dalam mendapatkan data sangat penting. Metodologi yang digunakan harus berbasis survei, bukan berbasis sampling dimana nama-nama dan profil data untuk buta aksara harus dicatat. Selain itu, pemutakhiran data-data ini dilakukan setiap tahun.
7. Persoalan atau alasan yang dihadapi oleh masyarakat penyandang buta aksara untuk tidak mengikuti program buta aksara adalah:
 - a. Umur: Mereka menyatakan umur saya sudah terlalu tua untuk belajar.
 - b. Kepentingan: Mereka menyatakan kepentingan membaca dan menulis juga tidak dipakai dalam kehidupan sehari-hari, mereka lebih senang berhitung dan berkomunikasi dengan masyarakat setempat yang mereka tempati.
 - c. Apatis: Melalui program pemberantasan aksara mereka ketahui akan tetapi mereka menganggap bahwa setelah mereka tau pasti akan hilang lagi pengetahuan tersebut selama 3 sampai 4 bulan berikutnya. Sehingga mereka merasa apatis (kurang menyadari) terhadap program buta aksara.
 - d. Sibuk dengan pekerjaan: Mereka tidak punya waktu lagi untuk mengikuti program pemberantasan buta aksara dikarenakan terlalu sibuk dengan pekerjaan bercocok tanam atau pekerjaan sambilan mereka (mencari upahan) untuk orang lain.
 - e. Fatalisme atau pasrah pada nasib
8. Sekolah merupakan sarana utama dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat akan pendidikan. Untuk itu sekolah harus terletak pada posisi yang strategis dan tersebar merata diseluruh daerah. Perkembangan wilayah permukiman dan jumlah penduduk yang terus meningkat

menimbulkan beberapa masalah diantaranya daya tampung sekolah tidak memadai, jalur akses menuju sekolah kurang, fasilitas pendukung yang tidak lengkap dan lain sebagainya. Sehingga kondisi seperti ini bisa mengganggu stabilitas pelayanan pendidikan itu sendiri. Untuk itu sarana dan prasarana pendidikan juga harus dikembangkan guna memenuhi kebutuhan pendidikan masyarakat.

9. Faktor-faktor yang membuat seseorang menjadi buta aksara, diantaranya:
 - a. Kemiskinan; Kemiskinan adalah faktor utama yang membuat seseorang menjadi buta aksara. Karena untuk makan sehari-hari juga masih sulit apalagi untuk mengenyam bangku sekolah, meskipun sekarang sudah yang namanya Bantuan Operasional Sekolah (BOS) tapi dana tersebut banyak di korupsi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - b. Orang tua yang buta aksara memiliki kecenderungan tidak menyekolahkan anaknya; Orang tua enggan menyekolahkan anaknya karena orang tua nya sendiri tidak bisa calistung.
 - c. Jauh dengan layanan pendidikan; Layanan pendidikan yang jauh juga menjadi factor seseorang menjadi buta aksara, contohnya saja di daerah pedalaman atau daerah terpencil sangat jauh ke sekolah dasar sekalipun, apalagi ke sekolah lanjutan. Mereka yang di daerah terpencil harus berangkat pagi-pagi sekali atau jam lima pagi karena jarak rumahnya dengan sekolah sangat jauh.
 - d. Orang tua menganggap bahwa sekolah itu tidak penting; Orang tua menganggap bahwa sekolah adalah perbuatan yang sia-sia, tidak penting dan lebih baik menyuruh anak mereka untuk membantu berladang, berternak, berjualan, menggembala hewan, atau bahkan mereka menyuruh anak mereka untuk mengemis atau ngamen di jalan.
10. Banyak sekali kendala yang dihadapi pemerintah untuk memberantas buta aksara mulai dari peserta didik sampai kepada anggaran biaya untuk kegiatan tersebut. Kendala tersebut dapat diperinci sebagai berikut:
 - a. Keterbatasan kemampuan peserta didik berbahasa Indonesia sehingga proses pembelajaran terhambat. Peserta didik biasanya tidak bisa menggunakan bahasa Indonesia sehingga terjadi kendala yang dihadapi oleh pengajar yang mengajar karena tidak nyambungny bahasa yang dipergunakan, pengajar menggunakan bahasa Indonesia sedangkan peserta didik berbahasa daerah.
 - b. Peserta didik kurang aktif dan masih malu-malu untuk mengikuti pembelajaran. Peserta didik yang kurang aktif dalam pembelajaran mungkin karena peserta didik bosan dan malas dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) dan malu untuk mengikutinya. Sehingga banyak sehingga yang sudah mengikuti kegiatan tersebut yang tidak melanjutkan lagi.

- c. Masih adanya anak usia sekolah yang tidak bersekolah. Masih banyak ditemui anak usia sekolah yang seharusnya sekolah tapi mereka malah berada di tempat-tempat yang tidak layak, contohnya mereka mengamen dan mengemis di perempatan di kota-kota besar, ada juga yang memulung sampah baik di tempat pembuangan sampah atau di jalan-jalan, kalau di pedesaan banyak yang menggembalakan hewan ternaknya.
 - d. Banyak yang putus sekolah setiap tahunnya. Banyak anak usia sekolah yang sudah bersekolah setengah jalan tapi tidak dilanjutkan atau putus sekolah. Hal ini disebabkan oleh faktor kemiskinan. Meskipun sudah ada Bantuan Operasional Sekolah tapi sebagian dari mereka tidak menikmati dana tersebut karena diselewengkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.
 - e. Pengajar yang kurang Professional; Pengajar harus seprofesional mungkin, pengajar harus mempunyai cara-cara dalam proses pembelajaran dan pengajar harus di beri pelatihan lagi oleh dinas pendidikan.
 - f. Program pemberdayaan bukan sebagai program berkelanjutan tapi hanya program sesaat; Program memberantas buta aksara yang seharusnya menjadi program berkelanjutan malah menjadi program yang sesaat. Hal ini bisa terjadi karena pengajar dan peserta didik bosan dan bisa juga anggaran atau gaji untuk para pengajar tidak lagi turun.
 - g. Kemampuan pemerintah (dalam penyediaan dana) yang terbatas; Pemerintah harus menyediakan anggaran pendidikan minimal 20% di APBDnya, namun anggaran tersebut sering diselewengkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.
11. Buta aksara dapat diselesaikan dengan berbagai cara, diantaranya dengan:
- a. Mengurangi jumlah anak yang tidak bersekolah; Pemerintah harus berupaya untuk menekan anak usia sekolah yang tidak sekolah dan putus sekolah yang diakibatkan oleh masalah kemiskinan, maupun yang diakibatkan oleh jauh dari layanan pendidikan.
 - b. Membuat cara-cara baru dalam proses pembelajaran; Membuat cara-cara yang baru yang asyik agar peserta didik tidak bosan untuk belajar dan menjaga kemampuan beraksara bagi peserta didik.
 - c. Adanya niat baik dan sungguh-sungguh dari pemerintah; Pemerintah harus mempunyai niat yang baik, sungguh-sungguh dan serius untuk memberantas buta aksara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia.
 - d. Perlunya keterlibatan berbagai pihak dalam upaya percepatan pemberantasan buta aksara; Pemberantasan buta aksara bukan saja tugas pemerintah semata tapi itu tugas

kita semua selaku generasi penerus bangsa. Jadi semua pihak harus berpartisipasi untuk memberantas buta aksara, contohnya ibu-ibu PKK harus ikut serta, organisasi masyarakat (Ormas), mahasiswa yang sedang Kuliah Kerja Nyata (KKN), dan anggota TNI yang mempunyai program TNI Manunggal Aksara.

12. Pemberian perhatian yang lebih besar bagi masyarakat yang terlibat secara langsung di dalam program pemberantasan buta aksara adalah suatu keniscayaan. Selama ini harus diakui bahwa pemberian perhatian (terutama insentif) bagi para tutor dan penyelenggara program pemberantasan buta aksara masih sangat memprihatinkan.
13. Pembangunan SIG (Sistem Informasi Geografis) merupakan salah satu solusi untuk mengatasi permasalahan ini. Dengan adanya SIG ini, selain membantu tersedianya sarana informasi bagi masyarakat, SIG juga berguna sebagai media analisa perencanaan dalam proses pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, karena SIG mempunyai kemampuan analisis keruangan, maupun analisis waktu sehingga teknologi ini sering dipakai dalam proses perencanaan. Teknologi ini dirancang untuk membantu mengumpulkan data, menyimpan data serta menganalisa data, menyimpan data serta menganalisis obyek beserta data geografis yang bersifat penting dan kritis untuk dianalisis.
14. Sistem Informasi Geografis dapat digunakan untuk mendapatkan informasi mengenai data buta aksara secara akurat, dan tepat, hasil pencarian selain berbentuk teks, juga dihasilkan dalam bentuk visual (peta lokasi). Data dalam bentuk visual ini menunjukkan pada peta dimana posisi atau letak sebaran buta aksara berada dan juga dilengkapi dengan informasi-informasi pendukung lainnya.
15. Aplikasi SIG sebaran data buta aksara merupakan sistem berbasis komputer yang bersifat user friendly sehingga pemakai dapat dengan mudah menjalankan atau pun mengaksesnya.
16. Data dari aplikasi SIG sebaran data buta aksara itu data spasial maupun tabular harus benar-benar merepresentasikan keadaan yang sesungguhnya (georeference spasialnya).
17. Dengan adanya aplikasi SIG sebaran data buta aksara dapat dijadikan sumber informasi yang aktual sehingga Pejabat pembuat keputusan (Dinas Pendidikan dan Kebudayaan) untuk dapat menghasilkan suatu strategi spasial pendidikan dengan konsep SDSS (*Spatial Decision Support System*) untuk penentuan kebijaksanaannya.
18. Salah satu jenis pendidikan yang menggunakan pendekatan pendidikan berbasis masyarakat adalah pendidikan non formal melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) atau *Community Learning Centre*. PKBM merupakan tempat berbagai kegiatan pembelajaran yang dibutuhkan oleh masyarakat sesuai dengan minat dan kebutuhannya dengan pendidikan berbasis masyarakat. PKBM merupakan sebuah lembaga pendidikan bentukan masyarakat,

yang dikelola dan dikembangkan oleh masyarakat itu sendiri dengan tujuan untuk memberikan pelayanan pendidikan di masyarakat. PKBM sebagai sumber informasi berisi berbagai jenis program pembelajaran yang berguna terutama dalam peningkatan kemampuan dalam bidang keterampilan fungsional yang berorientasi pada pemberdayaan potensi masyarakat.

19. Agar pengembangan kelembagaan PKBM tidak salah arah dalam pengentasan pemberantasan buta aksara, beberapa hal berikut perlu diperhatikan secara seksama :

- Harus dapat memberikan jaminan keberlangsungan dan perkembangan PKBM sebagai suatu gerakan masyarakat di tingkat akar rumput yang berkembang secara luas di tengah-tengah masyarakat
- Menghindari terperosok ke arah penciptaan birokrasi baru yang menghambat kreativitas dan inovasi masyarakat dalam membangun dan mengembangkan dirinya melalui PKBM
- Memberikan adanya kepastian dan perlindungan hukum bagi seluruh kegiatan PKBM
- Membangkitkan dan mendorong partisipasi yang luas dan berbobot anggota masyarakat dalam PKBM
- Meningkatkan kemungkinan untuk kemitraan yang luas dan fleksibel dengan berbagai pihak baik pemerintah dengan berbagai sektor dan instansinya, maupun dengan berbagai lembaga non pemerintah baik lokal, nasional dan internasional, dengan dunia usaha, dengan lembaga-lembaga pendidikan, sosial, budaya maupun keagamaan
- Mencerminkan dan mewujudkan implementasi konsep PKBM yang utuh dan menyeluruh
- Membangkitkan inspirasi dan stimulasi bagi seluruh pemangku kepentingan PKBM untuk mengembangkan PKBM ke arah yang lebih baik dikemudian hari, yaitu PKBM yang lebih partisipatif, lebih bermanfaat bagi masyarakat sekitar, lebih bermutu serta PKBM yang mandiri dan berkelanjutan.

20. Buta aksara berdampak terhadap pembangunan bangsa, yakni: 1) rendahnya produktivitas masyarakat, 2) rendahnya kesadaran untuk menyekolahkan anak/ keluarganya, 3) rendahnya kemampuan mengakses informasi, 4) sulit menerima inovasi (pembaharuan), serta 5) rendahnya indeks pembangunan manusia.

21. Status gizi wilayah dibagi menjadi 2 macam, yaitu wilayah bebas rawan gizi (gizi baik) dan wilayah rawan gizi. Wilayah bebas rawan gizi adalah wilayah dengan prevalensi balita gizi kurang dan gizi buruk <15%, sedangkan wilayah rawan gizi adalah wilayah yang prevalensi balita kurang dan gizi buruk $\geq 15\%$.

22. Di Kota Pontianak rata-rata anak-anak yang menderita gizi buruk dikarenakan faktor kemiskinan/ekonomi keluarga, dan seluruh penderitanya tergolong kedalam Marasmus, yaitu keadaan gizi buruk yang ditandai dengan ciri-ciri seorang anak tampak sangat kurus, wajah seperti orang tua, gampang nangis/cengeng ataupun rewel, kulit terlihat keriput dan kering, perut akan terlihat cekung dan tulang iga akan gambang, rentan terserang penyakit infeksi dan diare kronis maupun konstipasi.
23. Dari data primer yang didapat di lapangan, hampir keseluruhan kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Pontianak dikarenakan anak tersebut tidak mendapatkan ASI secara eksklusif. Anak-anak yang terkena gizi buruk sudah diberi makanan pendamping kisaran usia antara 1 – 6 bulan pertama.
24. Tidak hanya karena faktor ekonomi keluarga kasus gizi buruk terjadi di Kota Pontianak, melainkan beberapa kasusnya dikarenakan oleh kurangnya pendidikan orang tua sehingga kurang sadar akan pentingnya asupan gizi untuk anak, dan ada pula orang tua yang malu untuk membawa anaknya berobat ke Posyandu atau Puskesmas terdekat karena gizi buruk yang diderita anaknya merupakan suatu aib bagi keluarga. Kemudian ada pula kasusnya dikarenakan oleh faktor penyakit bawaan lainnya, yang membuat anak tersebut menderita gizi buruk.
25. Fakta yang terjadi di lapangan di Kota Pontianak ada 3 (tiga) Kecamatan yang memiliki angka/kasus gizi buruk dari total 6 Kecamatan di Kota Pontianak. 3 (tiga) Kecamatan tersebut antara lain; Kecamatan Pontianak Utara dengan 10 kasus, Kecamatan Pontianak Timur dengan 6 kasus dan Kecamatan Pontianak Barat dengan 3 kasus. Jadi keseluruhan kasus gizi buruk yang disurvei di Kota Pontianak berjumlah total 19 kasus.
26. Penanggulangan gizi buruk di Kota Pontianak perlu dilakukan secara terpadu antar departemen dan kelompok profesi melalui upaya-upaya peningkatan pengadaan pangan, penganekaragaman produksi dan konsumsi pangan, peningkatan status sosial ekonomi, pendidikan dan kesehatan masyarakat, serta peningkatan teknologi hasil pertanian dan teknologi pangan.
27. Upaya pemerintah dalam mengatasi gizi buruk dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu; (1) Upaya Kesehatan Kuratif dan Rehabilitatif yang meliputi penemuan aktif dan rujukan kasus gizi buruk, perawatan balita gizi buruk, pendampingan balita gizi buruk pasca perawatan; dan (2) Upaya Kesehatan Promotif dan Preventif yang meliputi pendidikan (penyuluhan) gizi, revitalisasi Posyandu, pemberian suplementasi gizi dan pemberian MP ASI bagi balita gakin.
28. Masalah buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk erat kaitannya dengan masalah kemiskinan yang terjadi di Kota Pontianak. Kemiskinan dapat menyebabkan angka gizi buruk bertambah

dikarenakan orang tua dari anak yang menderita gizi buruk tidak/kurang dapat memenuhi kebutuhan gizi anaknya. Kemiskinan pula dapat menyebabkan angka buta aksara dan putus sekolah meningkat, karena anak tidak dapat bersekolah atau terpaksa putus sekolah untuk membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga.

6.2 REKOMENDASI

Dari hasil aplikasi SIG sebaran data buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk diharapkan memberikan dampak positif bagi perkembangan dunia pendidikan dan kesehatan. Disamping itu juga, dapat membantu bagi para pembuat kebijakan untuk membuat keputusan yang tepat dalam segala hal yang berkaitan dengan pendidikan dan kesehatan. Namun, sistem ini akan mencapai hasil yang diinginkan bila dalam proses pelaksanaan, pengoperasian, up dating, dan perawatan dilakukan dengan baik dan benar.

Berdasarkan hasil dan kesimpulan penelitian sebagaimana dikemukakan di atas, maka direkomendasikan agar:

1. Pemerintah baik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi maupun Kabupaten/Kota perlu memberikan bantuan kepada PKBM dalam hal sarana dan prasarana perkantoran untuk lebih menggiatkan program buta aksara.
2. Data spasial dalam hal ini peta dasar dari SIG, hendaknya mempunyai *georeference* yang jelas sehingga bila ditambahkan data spasial dari daerah yang baru tidak perlu dilakukan proses dari awal. Pengambilan data posisi dengan GPS (*handheld* ataupun *geodetic*) juga diperlukan *setting georeference* yang sama dengan peta dasar SIG.
3. Untuk data atribut, hendaknya dilakukan up dating sesuai dengan kondisi yang terbaru baik itu data tabular maupun data grafik/foto sehingga benar-benar merupakan representasi dari kondisi masyarakat buta aksara yang terkini.
4. SIG sebagai sistem berbasis komputer tentunya membutuhkan spesifikasi tertentu sehingga meningkatkan kerja dari aplikasi SIG tersebut.
5. Perlu penempatan khusus untuk aplikasi SIG ini sehingga orang (user) bisa mengakses lebih mudah yang kedepannya bisa dilakukan SIG berbasis intra ataupun internet (dalam bentuk WEB).
6. Perawatan aplikasi ini sendiri juga membutuhkan personil yang benar-benar mengetahui SIG sehingga bila terjadi error bisa segera teratasi.
7. Untuk pemerintah Kota Pontianak agar dapat menerapkan aplikasi Sistem Informasi Geografis Sebaran data buta aksara dan gizi buruk ini sebagai alat bantu untuk proses pemantauan dan

perencanaan pembangunan pendidikan dan kesehatan, guna meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan di Kota Pontianak.

8. Perlu terus ditingkatkan kerjasama dan sinergisitas antar instansi pemerintah, unsur-unsur masyarakat dalam rangka memelihara keberlanjutan upaya-upaya pemberantasan buta aksara dan membina agar warga masyarakat yang telah melek aksara tidak kembali menjadi buta aksara.
9. Keberlanjutan dari kegiatan ini perlu dilakukan pemantauan dan penilaian melalui; (1) pelaksanaan koordinasi antar instansi, lembaga-lembaga terkait di kabupaten, kecamatan dan bahkan sampai pada tingkat kelurahan dan desa, (2) melakukan pendataan atau pemutakhiran data guna lebih terarah guna mengetahui perkembangan-perkembangan terakhir berkenaan dengan pemberantasan buta aksara, dan (3) mendayagunakan forum pendidikan nonformal guna mengambil peran di dalam kegiatan pendataan, pemantauan dan penilaian sesuai dengan panduan yang disediakan.
10. Program Keaksaraan Fungsional yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan untuk menekan tingginya angka buta aksara didukung dengan program pemberdayaan masyarakat dari Dinas Sosial yang berupa pemberian keterampilan atau kerajinan tangan, sehingga warga belajar buta aksara tidak hanya mendapatkan pembelajaran membaca, menulis dan berhitung saja, melainkan juga mendapatkan pembelajaran keterampilan yang bisa mereka kembangkan sehingga warga belajar dapat memanfaatkan keterampilan yang mereka dapat sehingga mereka menjadi warga yang berdaya dan mampu memenuhi kebutuhan mereka sendiri.
11. Studi pemetaan dan penanganan terpadu buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk yang diadakan Bappeda bisa membantu melihat titik-titik lokasi kantong terjadinya buta aksara, putus sekolah dan gizi buruk Kota Pontianak. Hasil pemetaan tersebut bisa digunakan oleh Dinas Pendidikan untuk mengetahui lokasi kantong buta aksara, sehingga Dinas Pendidikan lebih gamblang melihat dan merencanakan di lokasi mana saja yang perlu diadakannya kegiatan pemberantasan buta aksara. Sedangkan untuk Dinas Kesehatan begitu pula, yang mana daerah-daerah rawan gizi buruk bisa dilihat dan diketahui dengan cepat.
12. Empat kartu kesejahteraan masyarakat program pemerintah yang meliputi Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu HP (*sim card*) sebagai uang elektronik untuk mengakses simpanan keluarga sejahtera. Program tersebut juga bisa dimanfaatkan sebagai sarana pemberantasan buta aksara, yaitu dengan memberikan persyaratan bahwa masyarakat yang bisa memiliki kartu-kartu tersebut harus memiliki keterangan bebas buta aksara dari RT atau Kelurahan setempat. Apabila di suatu daerah masih ada warga yang buta aksara, dan apabila warga ingin bisa menikmati fasilitas program

pemerintah tersebut, warga itu harus mengikuti terlebih dahulu program keaksaraan fungsional yang diadakan oleh pemerintah khususnya Dinas Pendidikan sebagai syarat untuk bisa mendapatkan kartu-kartu kesejahteraan masyarakat tersebut. Sehingga dengan demikian angka buta aksara bisa ditekan serendah-rendahnya.

13. Pro PKMKP yang dicanangkan dapat menjadi produk unggul pemberdayaan masyarakat, demi menciptakan masyarakat yang berdaya dengan mampu memproduksi barang-barang konsumsi yang berupa makanan dan kerajinan tangan yang memiliki nilai ekonomis sebagai makanan ringan atau kerajinan tangan khas Kota Pontianak.
14. Hasil karya dari Pro PKMKP harus tetap diawasi dan mampu didistribusikan oleh tutor (tenaga pengajar) keterampilan, sehingga warga belajar tidak hanya sekedar mampu memproduksi, tetapi memiliki pangsa pasar yang mampu menjual dan bersaing dengan produk pasar lainnya.
15. Berbagai macam hasil produksi dari Pro PKMKP bisa menjadi sarana hubungan kerjasama dengan Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Pontianak, sebagai komoditi yang memiliki nilai jual dan nilai budaya ciri khas Kota Pontianak.
16. Penanggulangan masalah gizi buruk dilakukan dengan pendekatan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan meningkatkan akses untuk memperoleh informasi dan kesempatan untuk mengemukakan pendapat, serta keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan. Masyarakat yang telah berdaya diharapkan berperan sebagai pelaku / pelaksanaan, melakukan advokasi, dan melakukan pemantauan untuk peningkatan pelayanan publik.
17. Penanggulangan masalah gizi buruk diselenggarakan secara demokratis transparan melalui kemitraan di tingkat kabupaten atau kota antara pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.
18. Mengembalikan fungsi posyandu dan meningkatkan kembali partisipasi masyarakat dan keluarga dalam memantau tumbuh kembang balita, mengenali dan menanggulangi secara dini balita yang mengalami gangguan pertumbuhan melalui revitalitas posyandu.
19. Meningkatkan kemampuan petugas dalam manajemen dan melakukan tata laksana gizi buruk untuk mendukung fungsi melakukan tata laksana gizi burk untuk mendukung fungsi posyandu yang di kelola oleh masyarakat melalui revitalisasi Puskesmas.
20. Mewujudkan keluarga sadar gizi melalui promosi gizi, advokasi dan sosialisasi tentang makanan sehat dan bergizi seimbang serta pola hidup bersih dan sehat.
21. Mengalng kerjasama lintas sektor dan kemiraan dengan swasta ataun dunia usaha dan masyarakat untuk mobilisasi sumber daya dalam angka meningkatkan daya beli keluarga untuk menyediakan makanan sehat dan bergizi seimbang.

22. Mengaktifkan kembali Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi (SKPG) melalui revit alisasi SKPG dan Sistem Kewaspadaan Dini Gizi Buruk, yang dievaluasi dengan kajian data SKDN < yaitu semua balita mendapat kartu menuju sehat ditimbang setiap bulan, dan berat badan naik dan penyakit dan dat pendukung lainnya.
23. Dinas Kesehatan yang didukung oleh Puskesmas, Posyandu, dan sebagainya yang tersebar di seluruh kecamatan di Kota Pontianak, mendata dan menangani secara cepat kasus-kasus gizi buruk yang terjadi di Kota Pontianak, yang mana data masalah gizi buruk yang tersebar tersebut bisa diakses oleh Bappeda, sehingga Bappeda bisa merencanakan kebijakan pembangunan kesehatan dalam membantu menangani dan menekan angka kasus-kasus gizi buruk yang ada di Kota Pontianak.
24. Kasus gizi buruk yang ditangani oleh Puskesmas, posyandu dan unit pelayanan kesehatan lainnya bisa didukung oleh PKK yang ada di setiap Kelurahan untuk mengawasi warga-warga yang rentan terkena gizi buruk. PKK bisa berperan aktif dalam mensosialisasikan kepada warga masyarakat akan pentingnya pemenuhan gizi terhadap anak dan bahkan turut serta dalam mencatat dan mendata setiap warga yang kekurangan gizi atau bahkan gizi buruk. Data yang dikumpulkan oleh kelompok PKK di Kelurahan setempat bisa digunakan oleh pihak Puskesmas di Kecamatan untuk menangani lebih lanjut kasus-kasus gizi buruk yang terjadi di suatu daerah, sehingga Puskesmas lebih terbantuan dalam pendataan dan lebih mudah menangani langsung ke lokasi untuk masalah kasus gizi buruk di daerah tersebut.

LAMPIRAN HASIL SURVEY BUTA AKSARA

Data Buta Aksara Hasil Survey Kegiatan Study Pemetaan dan Penanganan Terpadu Buta Aksara, Putus Sekolah dan Gizi Buruk Kota Pontianak tersebar di dua kecamatan, yaitu kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Timur (Berdasarkan Pendataan Melalui PKBM). Keaksaraan di Kecamatan Pontianak Utara dapat dikatakan lumayan banyak. Dari hasil pencacahan, kami mendapatkan kurang lebih 29 orang buta aksara yang terpusat di Kelurahan Batu Layang dan Siantan Tengah. Sedangkan Pontianak Timur, buta aksara tersebar di Kelurahan Parit Mayor, Tanjung Hilir dan Tanjung Hulu. Dari hasil pencacahan yang kami dapatkan, buta aksara di Kecamatan Pontianak Timur berjumlah 12 orang.

No	Detail Data	Foto
1	Nama Responden : Pani L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 01 April 1948 Umur : 68 Tahun Alamat : JL Dharma Putra Gg Dharma Putra 3 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hilir RT/RW : No KK : 6171 040709090000 No KTP : 6171 044801480002 PKBM : AL FIKRI Latitude : 00.00507° Longitude : 109.20357°	
2	Nama Responden : Hamzah L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Segedong, 03 Juli 1944 Umur : 56 Tahun Alamat : JL Dharma Putra Gg Dharma Putra 3 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hilir RT/RW : 004/026 No KK : 6171 041112080055 No KTP : 6171 046007460001 PKBM : AI FIKRI Latitude : 00.00528° Longitude : 109.20366°	

3	Nama Responden : Sahara L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Segedong, 20 April 1946 Umur : 54 Tahun Alamat : Jl Dharma Putra Gg Dharma Putra 3 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hilir RT/RW : 004/026 No KK : 6171 041112080055 No KTP : 6171 046007460001 PKBM : Al Fikri Latitude : 00.00528° Longitude : 109.20366°	
4	Nama Responden : Halima L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 15 Februari 1967 Umur : 49 Tahun Alamat : Jl Dharma Putra Gg Dharma Putra 3 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantanhilir RT/RW : 004/026 No KK : 6171 042507130012 No KTP : 6171 045502670012 PKBM : Aal Fikri Latitude : 00.00538° Longitude : 109.20377°	
5	Nama Responden : Haliyah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 17 April 1970 Umur : 46 Tahun Alamat : Jl Dharma Putra Gg Dharma Putra 4 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hilir RT/RW : 004/026 No KK : 6171 040602080014 No KTP : 6171 045704700006 PKBM : Al Fikri Latitude : 00.00407° Longitude : 109.20327°	

6	Nama Responden : Jumalia L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 07 Juli 1963 Umur : 53 Tahun Alamat : Jlkebangkitannasional Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batulayang RT/RW : 05/005 No KK : 6171 041601120013 No KTP : 6171 044707630002 PKBM : Miftahussolihin Latitude : 00.01380° Longitude : 109.19288°	
7	Nama Responden : Jumadi L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 12 Mei 1959 Umur : 57 Tahun Alamat : Jl Kebangkitan Nasional Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batulayang RT/RW : 05/005 No KK : 6171 041601120013 No KTP : 6171 041205590001 PKBM : Miftahussolihin Latitude : 00.01380° Longitude : 109.19288°	
8	Nama Responden : Punanti L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 07 Juli 1955 Umur : 60 Tahun Alamat : Jl Kebangkitan Nasional Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantanhilir RT/RW : 002/09 No KK : 6171 040605100011 No KTP : 6171 044709550000 PKBM : Miftahussolihin Latitude : 00.01497° Longitude : 109.19483°	

9	<p>Nama Responden : Radiyeh L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 04 Juni 1979 Umur : 37 Tahun Alamat : Jl Kebangkitan Nasional Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantanhilir RT/RW : 02/009 No KK : 6171 042303090028 No KTP : 6171 044406790000 PKBM : Miftahussolihin Latitude : 00.01494° Longitude : 109.19477°</p>	
10	<p>Nama Responden : Siti L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Kuburaya, 20 Maret 1983 Umur : 33 Tahun Alamat : Jl Kebangkitan Nasional Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantanhilir RT/RW : 002/09 No KK : 6112 012704110020 No KTP : 6112 014203850021 PKBM : Miftahussolihin Latitude : 00.01494° Longitude : 109.19477°</p>	
11	<p>Nama Responden : Hayati L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 03 Mei 1966 Umur : 50 Tahun Alamat : Jl Sami Sumping Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 002/021 No KK : 6171 020912080008 No KTP : 6171 024306660015 PKBM : Pattimura Latitude : 00.02708° Longitude : 109.22111°</p>	

12	Nama Responden : Seni L/P : P Tempat, tanggal Lahir : TI Pakedai, 18 Juni 1982 Umur : 34 Tahun Alamat : Jl Sami Sumping Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 002/021 No KK : 6171 020305070049 No KTP : 6171 025806820001 PKBM : Pattimura Latitude : 00.01494° Longitude : 109.19477°	
13	Nama Responden : Yulia L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 06 Juni 1972 Umur : 44 Tahun Alamat : Jl Sami Sumping Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 021/02 No KK : 6171 022304070014 No KTP : 6171 026008720004 PKBM : Pattimura Latitude : 00.02739° Longitude : 109.22046°	
14	Nama Responden : Mistiye L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 02 Mei 1978 Umur : 38 Tahun Alamat : Jl Sami Sumping Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 021/02 No KK : 6171 0203060006 No KTP : 6171 024205780001 PKBM : Pattimura Latitude : 00.02708° Longitude : 109.22111°	

15	<p>Nama Responden : Wardah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 06 Maret 1965 Umur : 51 Tahun Alamat : Jl Sami Sumping Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 021/02 No KK : 6171 021401072534 No KTP : 6171 024603650001 PKBM : Pattimura Latitude : 00.02708° Longitude : 109.22111°</p>	
16	<p>Nama Responden : Supa'l L/P : P Tempat, tanggal Lahir : pontianak, 15 maret 1948 Umur : 68 Tahun Alamat : Jl Tanjung Raya Gg Cendana Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 004/006 No KK : 6171 021304070036 No KTP : 6171 025503480002 PKBM : Pattimura Latitude : 00.02739° Longitude : 109.22088°</p>	
17	<p>Nama Responden : Santi L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Sambas, 05 Mei 1983 Umur : 33 Tahun Alamat : Jl Tanjung Raya Gg Cendana Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Saigon RT/RW : 002/006 No KK : 6171 022711070023 No KTP : 6171 024506850005 PKBM : Pattimura Latitude : 00.02739° Longitude : 109.22088°</p>	

18	Nama Responden : Parida L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 06 April 1955 Umur : 61 Tahun Alamat : Jl. Tritura, Gg. Karya Sepakat Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Tj. Hilir RT/RW : 004/005 No KK : 6171 021102080013 No KTP : 6171 024604550002 PKBM : Raden Sitti Kartini Latitude : 00.02405° Longitude : 109.35432°	
19	Nama Responden : Marsudeh L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 16 Juni 1958 Umur : 58 Tahun Alamat : Jl Tritura Gg Karya Sepakat Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Tj. Hilir RT/RW : 004/005 No KK : 6171 020504100002 No KTP : 6171 025606560004 PKBM : Raden Sitti Kartini Latitude : 00.02393° Longitude : 109.35425°	
20	Nama Responden : Leha L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 03 April 1948 Umur : 68 Tahun Alamat : Jl. Tritura, Gg. Karya Sepakat Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Tj. Hilir RT/RW : 004/005 No KK : 6171 021206070016 No KTP : 6171 024304480003 PKBM : Raden Sitti Kartini Latitude : 00.02389° Longitude : 109.35434°	

21	Nama Responden : Julaiha L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 02 Desember 1967 Umur : 49 Tahun Alamat : Jl. Tritura, Gg. Karya Sepakat Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Tj. Hilir RT/RW : 002/002 No KK : 6171 022107080010 No KTP : 6171 024212670008 PKBM : Raden Sitti Kartini Latitude : 00.02420° Longitude : 109.35462°	
22	Nama Responden : Minah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 15 Maret 1948 Umur : 68 Tahun Alamat : Jl. Tritura, Gg. Karya Sepakat Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Tj. Hilir RT/RW : 002/002 No KK : 6171 021401080009 No KTP : 6171 025503480004 PKBM : Raden Sitti Kartini Latitude : 00.00680° Longitude : 109.36155°	
23	Nama Responden : Sapariyah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Punggur, 31 Desember 1961 Umur : 55 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 004/013 No KK : 6171 041910110002 No KTP : 6171 047112610027 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01679° Longitude : 109.31066°	

24	Nama Responden : May L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 31 Desember 1965 Umur : 51 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 004/013 No KK : 6171 041712120002 No KTP : 6171 047112650115 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01693° Longitude : 109.31055°	
25	Nama Responden : Samona L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Karti, 02 November 1982 Umur : 34 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 041106080019 No KTP : 6171 044211820012 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01254° Longitude : 109.31385°	
26	Nama Responden : Juana L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Karti, 05 Maret 1967 Umur : 49 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 041306080029 No KTP : 6171 044503670011 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01249° Longitude : 109.31391°	

27	Nama Responden : Ardian L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Karti, 01 Februari 1966 Umur : 50 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 040509070010 No KTP : 6171 044102660002 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01253° Longitude : 109.31391°	
28	Nama Responden : Hamaedah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 22 Juli 1971 Umur : 45 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 002/013 No KK : 6171 041207080010 No KTP : 6171 046207710004 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01276° Longitude : 109.31399°	
29	Nama Responden : Samsiah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 06 Mei 1978 Umur : 38 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 041706080033 No KTP : 6171 044605780020 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01241° Longitude : 109.31386°	

30	<p>Nama Responden : Ropiatun L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 02 April 1987 Umur : 29 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 041403110002 No KTP : 6171 044204870016 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01195° Longitude : 109.31372°</p>	
31	<p>Nama Responden : Jumiaty L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 10 Agustus 1979 Umur : 36 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 042105080045 No KTP : 6171 045008790022 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01177° Longitude : 109.31365°</p>	
32	<p>Nama Responden : Sumina L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Sambas, 14 Agustus 1994 Umur : 22 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 040409120006 No KTP : 6171 045408940006 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01246° Longitude : 109.31390°</p>	

33	<p>Nama Responden : Sumiati L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Sambas, 14 Juni 1987 Umur : 29 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti, Gg. Hidayah 3 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 041011080006 No KTP : 6171 045406870008 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01215° Longitude : 109.31379°</p>	
34	<p>Nama Responden : Sumiati L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Karti, 20 Februari 1975 Umur : 41 Tahun Alamat : Jl. Panca Bhakti Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Batu Layang RT/RW : 003/013 No KK : 6171 041812080010 No KTP : 6171 046002750012 PKBM : Khatulistiwa Latitude : 00.01249° Longitude : 109.31390°</p>	
35	<p>Nama Responden : Suminten L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 29 Mei 1972 Umur : 44 Tahun Alamat : Jl. Parwasal Dalam, Gg. Hollywood No. 75 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah RT/RW : 003/024 No KK : 6171 041212070059 No KTP : 6171 046905720503 PKBM : Pangeran Perbu Latitude : 00.00189° Longitude : 109.34897°</p>	

36	<p>Nama Responden : Juda L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pemangkat, 06 Juli 1973 Umur : 43 Tahun Alamat : Jl. Parwasal Dalam, Rt03/Rw24 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah RT/RW : 003/024 No KK : 6171 042212080017 No KTP : 6171 044607730001 PKBM : Pangeran Perbu Latitude : 00.00190° Longitude : 109.34893°</p>	
37	<p>Nama Responden : Edi Gunawan L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 10 Oktober 1979 Umur : 37 Tahun Alamat : Jl. Parwasal, Gg. Hollywood, No. 71, Rt03/Rw24 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah RT/RW : 003/024 No KK : 6171 042806080036 No KTP : 6171 041010790024 PKBM : Pangeran Perbu Latitude : 00.00181° Longitude : 109.34912°</p>	
38	<p>Nama Responden : Subairi L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 05 Juni 1979 Umur : 37 Tahun Alamat : Jl. Parwasal, Gg. Hollywood, No. 70, Rt03/Rw24 Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Siantan Tengah RT/RW : 003/024 No KK : 6171 040803100002 No KTP : 6171 040506790025 PKBM : Pangeran Perbu Latitude : 00.00173° Longitude : 109.34921°</p>	

39	<p>Nama Responden : Tijah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Sambas, 08 Juni 1983 Umur : 33 Tahun Alamat : Jl. Parwasal, Gg. Hollywood, No. 73a Pontianak Utara Kecamatan : Siantan Tengah Kelurahan : 003/024 RT/RW : 6171 041911090011 No KK : 6171 044806930028 No KTP : Pangeran Perbu PKBM : 00.00186° Latitude : 109.34897° Longitude :</p>	
40	<p>Nama Responden : Mat Ali L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Seruat Iii, 06 Agustus 1970 Umur : 46 Tahun Alamat : Jl. Parwasal Dalam, Gg. Ananda No. 49 Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Siantan Tengah RT/RW : 003/024 No KK : 6171 043010070010 No KTP : 6171 040608700011 PKBM : Pangeran Perbu Latitude : 00.00132° Longitude : 109.35054°</p>	
41	<p>Nama Responden : Bahriyah L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Seruat Iii, 07 Juni 1975 Umur : 41 Tahun Alamat : Jl. Parwasal Dalam, Gg. Ananda No. 49 Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Siantan Tengah RT/RW : 003/024 No KK : 6171 043010070010 No KTP : 6171 044706750011 PKBM : Pangeran Perbu Latitude : 00.00130° Longitude : 109.35052°</p>	

LAMPIRAN HASIL SURVEY GIZI BURUK

Data hasil survey gizi buruk Kota Pontianak.

No	Detail Data	Foto
1	<p>Nama Balita : M. Farid Alfarisi (Herul) L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 02 Januari 2015 Umur : 1 Tahun Alamat : Jl. Parwasal Dalam, Gg. Melati 1 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah Jumlah Saudara : Nama Orang Tua : Bapak : Muhadi Ibu : Subeideh Pekerjaan Orang Tua : Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Ibu Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua : Bapak : SD/ Sederajat Ibu : SdDSederajat Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 JenisGizi Buruk : Marasmus Latitude : 00.00048° Longitude : 109.34834°</p>	
2	<p>Nama Balita : M. Abizar L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 24 Mei 2014 Umur : 2 Tahun Alamat : Jl. Parit Pangeran Rt4/Rw10 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hulu Jumlah Saudara : Nama Orang Tua : Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Ibu Rumah Tangga Pekerjaan Orang Tua : Bapak : Misnawar Ibu : Mariati Pendidikan Orang Tua : Bapak : SD/Sederajat Ibu : SD/Sederajat Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.000.000 JenisGizi Buruk : Marasmus Latitude : 00.01353° Longitude : 109.35498°</p>	

3	<p>Nama Balita : Siti Nurlaila L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 02 Februari 2014 Umur : 2 Tahun Alamat : Jl. Selat Madura Rt2/Rw9 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah Jumlah Saudara : Nama Orang Tua Bapak : Sulaiman Ibu : Soniati Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Buruh Harian Lepas Pendidikan Orang Tua Bapak : SD/Sederajat Ibu : SD/Sederajat Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.000.000 – Rp. 1.500.000 JenisGizi Buruk : MARASMUS Latitude : 00.01064° Longitude : 109.34690°</p>	
4	<p>Nama Balita : Rafli Almair L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 15 Mei 2015 Umur : 1 Tahun Alamat : Jl. Khatulistiwa, Dharma Putra 2 Rt1/Rw26 Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hilir Jumlah Saudara : Nama Orang Tua Bapak : Rio Renaldi Ibu : Rahmah Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Ibu Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SD/Sederajat Ibu : SD/Sederajat Penghasilan Orang Tua : JenisGizi Buruk : Marasmus Latitude : 00.00937° Longitude : 109.33910°</p>	

5	<p>NamaBalita : Putri Sakinah Rahayu L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 18 Oktober 2012 Umur : 3 Tahun Alamat : Jl. Khatulistiwa, Komp Tai Chu Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hilir Jumlah Saudara : 1 Nama Orang Tua Bapak : Muhari Ibu : Mariani Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Ibu Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMP/Sederajat Ibu : SMP/Sederajat Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 JenisGizi Buruk : Marasmus Latitude : 00.00480° Longitude : 109.32834°</p>	
6	<p>NamaBalita : M. Salam L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 09 Maret 2015 Umur : 1 Tahun Alamat : Jl. Parwasal, Depan Gg. Makam Muslim Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah Jumlah Saudara : 4 Nama Orang Tua Bapak : Tarimun Ibu : Rokaiyah Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Ibu Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SD/Sederajat Ibu : Tidak Tamat SD Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 JenisGizi Buruk : Marasmus Latitude : 00.00642° Longitude : 109.34641°</p>	

7	<p>NamaBalita : M. Raffa L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 14 Oktober 2014 Umur : 2 Tahun Alamat : Jl. Tritura, Gg. Ashari Rt3/Rw5 Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Tanjung Hilir Jumlah Saudara : 3 Nama Orang Tua Bapak : Hamdani Ibu : Fatmawati Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Ibu Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : Ibu : Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.000.000 - Rp. 1.500.000 JenisGizi Buruk : Latitude : 00.02351° Longitude : 109.35566°</p>	
8	<p>NamaBalita : Ramadhan Habiburrahim L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 04 Juli 2014 Umur : 3 Tahun Alamat : Jl. Kom Yos Sudarso, Gg. Kplp Kecamatan : Pontianak Barat Kelurahan : Sungai Beliang JumlahSaudara : 2 Nama Orang Tua Bapak : Hendri Yanto Ibu : Santi Pekerjaan Orang Tua Bapak : Nelayan Ibu : Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMA Ibu : SMA Penghasilan Orang Tua : Rp 1.600.000 JenisGiziBuruk : Marasmus Latitude : 00.20124° Longitude : 111.44153°</p>	

9	<p>NamaBalita : Nikita Surya Sari L/P : P Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 23 September 2012 Umur : 4 Tahun Alamat : Jl. Kom Yos Sudarso Gg. Kayu : Manis Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Hulu JumlahSaudara : 1 Nama Orang Tua : Bapak : Mansyur Ibu : Wenty Juwita Pekerjaan Orang Tua : Bapak : Buruh Ibu : Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua : Bapak : SMA Ibu : SMA Penghasilan Orang Tua : Rp 1.500.000 JenisGiziBuruk : Marasmus Latitude : 00.00179° Longitude : 109.18410°</p>	
10	<p>NamaBalita : M.Arifin L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 25 Maret 2013 Umur : 3 Tahun Alamat : Jl. Tebu Gg. Dwi Ratna No 36 Kecamatan : Pontianak Barat Kelurahan : Sungai Jawi Dalam JumlahSaudara : 2 Nama Orang Tua : Bapak : Kasiman Ibu : Arbania Pekerjaan Orang Tua : Bapak : Buruh Harian Lepas Ibu : Rumah Tangga Pendidikan Orang Tua : Bapak : SD/Sederajat Ibu : SD/Sederajat Penghasilan Orang Tua : Rp. 1.300.000 JenisGiziBuruk : Marasmus Latitude : 00.00571° Longitude : 109.18232°</p>	

11	<p>NamaBalita : Arua L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 13 September 2015 1 Tahun Umur : Alamat : Jl. H.Rais.Arahman Gg. Sekawan Pontianak Barat Kecamatan : Sungai Jawi Dalam Kelurahan : 2 JumlahSaudara : Nama Orang Tua : Hendra Bapak : Muchlis Suryawati Ibu : Pekerjaan Orang Tua : Karyawan Swasta Bapak : Rumah Tangga Ibu : Pendidikan Orang Tua : SMA Bapak : SMA Ibu : Rp 3.000.000 Penghasilan Orang Tua : Marasmus JenisGiziBuruk : 00.0109.0° Latitude : 109.19101° Longitude :</p>	
12	<p>NamaBalita : Adam Putra Utama L/P : Laki-Laki Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 05-12-2014 Umur : 1 Th 4 Bulan Alamat : Jl. Tajungharapan Gg.M. Taufik Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Banjarserasan JumlahSaudara : 1 Nama Orang Tua : Bapak : Riki Ibu : Agustina Pekerjaan Orang Tua : Bapak : Buruh Ibu : Ibu rumah tangga Pendidikan Orang Tua : Bapak : SMA Ibu : SMP Penghasilan Orang Tua : 1,5 Juta JenisGiziBuruk : Gizi Kurang Latitude : 0.03004° Longitude : 109.21541°</p>	

13	<p>NamaBalita : M. Farid L/P : Laki-Laki Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 04-01-2015 Umur : 1 Th 3 Bulan Alamat : Jl. Tanjungharapangg. Rawasari li Kecamatan : Pontinaktimur Kelurahan : Banjar Serasan JumlahSaudara : 1 Nama Orang Tua Bapak : M. Taufik Ibu : Dina Pekerjaan Orang Tua Bapak : Swasta Ibu : Ibu rumah tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMA Ibu : SMA Penghasilan Orang Tua : 1 – 1,5 Juta JenisGiziBuruk : Gizi Kurang Latitude : 0.02189° Longitude : 109.21226°</p>	
14	<p>NamaBalita : Alif Pratama L/P : Laki-Laki Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 24-11-2011 Umur : 4 Th 5 Bulan Alamat : Jl. Tanjungpulau Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Dalambugis JumlahSaudara : 2 Nama Orang Tua Bapak : Hendri Ibu : Agustini Pekerjaan Orang Tua Bapak : Pedagang Ibu : Iburumahtangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SD Ibu : SMA Penghasilan Orang Tua : 1,3 Juta JenisGiziBuruk : Gizi Kurang Latitude : 0.00487° Longitude : 109.20410°</p>	

15	<p>NamaBalita : Aliando L/P : Laki-Laki Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 7-05-2015 Umur : 1 Th Alamat : Jl. Tanjungpulau Rt.05/Rw.12</p> <p>Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Dalambugis JumlahSaudara : 1 Nama Orang Tua Bapak : Arisman Ibu : Wardaniarti Pekerjaan Orang Tua Bapak : Swasta Ibu : Ibu rumah tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMA Ibu : SMA Penghasilan Orang Tua : 1 – 2 Juta JenisGiziBuruk : Gizi Kurang Latitude : 0.0203004° Longitude : 109.21591°</p>	
16	<p>NamaBalita : Ihye Saifiullah L/P : Laki-Laki Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 11-19-2011 Umur : 4 Th 6 Bulan Alamat : Jl. Selat Madura Gg. Karomah Rt 04/Rw 07</p> <p>Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah JumlahSaudara : 2 Nama Orang Tua Bapak : Miswi Ibu : Fatimah Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Ibu : Ibu rumah tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SMP Ibu : SD Penghasilan Orang Tua : 1,2 Juta JenisGiziBuruk : Gizi Buruk Latitude : 0.00812° Longitude : 109.20584°</p>	

17	<p>NamaBalita : Ridho Abdul Hafid L/P : Laki-Laki Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 6-10-2015 Umur : 6 Bulan Alamat : Gg. Semut</p> <p>Kecamatan : Pontianak Timur Kelurahan : Tanjung Hulu JumlahSaudara : 5 Nama Orang Tua Bapak : Suroto Ibu : Seri Indrayani Pekerjaan Orang Tua Bapak : Buruh Ibu : Ibu rumah tangga Pendidikan Orang Tua Bapak : SD Ibu : SD Penghasilan Orang Tua : 1,2 Juta JenisGiziBuruk : Gizi Kurang Latitude : 0.01170° Longitude : 109.21487°</p>	
18	<p>NamaBalita : Zulkarnain L/P : L Tempat, tanggal Lahir : Pontianak, 09 Juli 2007 Umur : 9 Tahun Alamat : Jl. Masjid Dalam Rt01/Rw07</p> <p>Kecamatan : Pontianak Utara Kelurahan : Siantan Tengah JumlahSaudara : Nama Orang Tua Bapak : (Alm) Abdullah Ibu : Suryati Pekerjaan Orang Tua Bapak : Ibu : Pendidikan Orang Tua Bapak : Ibu : Penghasilan Orang Tua : JenisGiziBuruk : Marasmus Latitude : 00.005452° Longitude : 109.31516°</p>	

19	NamaBalita	:	Dzakir Khafadi	
	L/P	:	L	
	Tempat, tanggal Lahir	:	Pontianak, 09 Januari 2015	
	Umur	:	1 Tahun	
	Alamat	:	Jl. Khatulistiwa, Gg. Satu Dalam Pontianak Utara	
	Kecamatan	:	Siantan Hilir	
	Kelurahan	:		
	JumlahSaudara	:		
	Nama Orang Tua	:	Rizki Aminullah	
	Bapak	:	Nurazizah	
	Ibu	:		
	Pekerjaan Orang Tua	:		
	Bapak	:		
	Ibu	:		
	Pendidikan Orang Tua	:		
	Bapak	:		
	Ibu	:		
	Penghasilan Orang Tua	:		
	Jenis Gizi Buruk	:	00.0666°	
	Latitude	:	109.31545°	
	Longitude	:		